



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

(AUDITED)

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun. Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun anggaran 2019, yang senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019, disusun dengan kelengkapan sebuah laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2018, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 dan 2018, Neraca per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dan 2018, Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 dan 2018, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019 dan 2018, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 dan 2018, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang seluruhnya dilengkapi dengan 52 lampiran.

Dengan demikian, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 ini, dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan semua pihak, untuk dapat mengetahui secara utuh pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor sepanjang Tahun Anggaran 2019.

Bogor, Juni 2020

WALI KOTA

BIMA ARYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bogor, Juni 2020

WALI KOTA

BIMA ARYA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan (konsolidasian) keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Kota Bogor. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Daerah Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Disamping ketentuan tersebut, Laporan Keuangan ini juga disusun dan disajikan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/Informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, dan data informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

LP SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka Panjang.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) serta penerimaan dan pengeluaran kas non rekening umum kas daerah selama Tahun Anggaran 2019.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Lain-lain dan Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Ikhtisar Laporan Keuangan.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bagian I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018.....	1
Bagian II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018.....	3
Bagian III Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.....	4
Bagian IV Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018.....	6
Bagian V Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018.....	8
Bagian VI Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018.....	11
Bagian VII Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
Lampiran	



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)
1	PENDAPATAN					
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	104,45	912.197.971.288,85
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	644.546.554.586,00	689.543.006.040,00	106,98	592.978.746.862,00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	96,10	48.418.070.315,00
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	100,56	26.772.427.406,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	100,08	244.028.726.705,85
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.577.997.671.710,00	1.455.644.350.874,00	92,25	1.303.332.063.609,00
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.066.762.734.201,00
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	73.713.874.000,00	53.495.246.384,00	72,57	70.988.926.350,00
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	856.297.349.000,00	838.948.449.000,00	97,97	791.929.143.000,00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	204.362.379.000,00	189.891.532.535,00	92,92	179.875.196.265,00
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1 . 2 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2	0,00	0,00		0,00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1 . 2 . 3 . 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2	0,00	0,00		0,00
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan		124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	113.173.397.771,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	87.142.218.371,00
1 . 3 . 2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.2	0,00	0,00		0,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	0,00	0,00		26.031.179.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.639.970.560.688,00	2.559.857.207.793,86	96,97	2.328.703.432.668,85
2	BELANJA					
2 . 1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	90,59	1.945.851.266.176,04
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.303.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	90,67	1.108.690.038.689,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	5.1.2.1	789.887.964.541,00	711.101.422.815,19	90,03	672.795.038.324,21
2 . 1 . 3	Belanja Bunga	5.1.2.1	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	93,97	6.598.058.977,83
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.1.2.1	85.099.234.000,00	79.149.334.000,00	93,01	118.993.313.285,00
2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	92,75	38.774.816.900,00
2 . 2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.593,00
2 . 2 . 1	Belanja Tanah	5.1.2.2	23.520.000.000,00	18.044.020.000,00	76,72	9.314.649.200,00

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00
2 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2	162.100.280.110,00	144.703.165.317,00	89,27	66.483.846.768,00
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.109.630.240,00	1.910.823.018,00	90,58	1.774.343.705,00
2 . 2 . 6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2	716.921.000,00	655.385.000,00	91,42	0,00
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
	JUMLAH BELANJA		2.871.218.762.599,52	2.526.504.949.919,19	87,99	2.402.870.069.719,04
2 . 4	TRANSFER					
2 . 4 . 1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	0,00	0,00		3.716.867.124,00
2 . 4 . 1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00		3.716.867.124,00
2 . 5	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	0,00
2 . 5 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4	4.042.013.000,00	1.023.845.129,00	25,33	0,00
2 . 5 . 2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.4	1.115.203.192,00	972.007.890,00	87,16	0,00
	JUMLAH TRANSFER		5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	3.716.867.124,00
	BELANJA DAN TRANSFER		2.876.375.978.791,52	2.528.500.802.938,19	87,91	2.406.586.936.843,04
	SURPLUS / (DEFISIT)		(236.405.418.103,52)	31.356.404.855,67	(13,26)	(77.883.504.174,19)
3	PEMBIAYAAN					
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	153,32	388.671.502.466,71
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.5.1	256.564.582.703,52	256.564.582.703,52	100,00	330.288.545.977,71
3 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.1	0,00	139.752.780.949,00	-	55.640.573.400,00
3 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	99,78	2.742.383.089,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	25.656.196.860,00	155.495.608.833,00	606,07	54.223.415.589,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2	20.159.164.600,00	16.000.000.000,00	79,37	8.700.000.000,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.2	5.497.032.260,00	139.495.608.833,00	2.537,65	0,00
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.2	0,00	0,00	-	45.523.415.589,00
	PEMBIAYAAN NETTO		236.405.418.103,52	246.306.520.997,52	104,19	334.448.086.877,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	277.662.925.853,19	0,00	256.564.582.703,52



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	REF	2019 AUDITED	2018 AUDITED
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	256.564.582.703,52	330.288.545.977,71
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(256.564.582.703,52)	(330.288.545.977,71)
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	277.662.925.853,19	256.564.582.703,52
Sub Total		277.662.925.853,19	256.564.582.703,52
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain	5.2.4	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		277.662.925.853,19	256.564.582.703,52



PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2019 AUDITED	2018 AUDITED
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.3.1	256.115.222.198,00	241.211.999.533,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.3	153.905.685,00	549.961.149,00
Kas di BLUD	5.3.4	8.107.669.667,19	1.854.238.461,52
Kas di Bendahara FKTP	5.3.5	9.337.552.993,00	12.656.415.139,00
Kas Lainnya	5.3.6	0,00	173.631.664,00
Kas di Bendahara BOS Pusat	5.3.7	4.229.656.416,00	417.961.220,00
Piutang Pendapatan	5.3.8	454.435.483.328,82	290.103.493.941,00
Piutang Lainnya	5.3.9	150.777.331.093,38	192.470.717.640,38
Penyisihan Piutang	5.3.10	(197.644.133.020,74)	(168.778.975.776,21)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.11	844.904.499,12	540.978.634,03
Persediaan	5.3.12	32.596.243.908,48	26.708.887.744,69
JUMLAH ASET LANCAR		718.953.836.768,24	597.909.309.350,41
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Dana Bergulir	5.3.13	63.742.100,00	63.742.100,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		63.742.100,00	63.742.100,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.14	523.642.733.332,61	504.092.523.552,36
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		523.642.733.332,61	504.092.523.552,36
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		523.706.475.432,61	504.156.265.652,36
ASET TETAP	5.3.15		
Tanah	5.3.16	4.767.414.421.962,63	4.749.339.012.961,63
Peralatan dan Mesin	5.3.17	743.613.685.335,72	627.792.307.268,29
Gedung dan Bangunan	5.3.18	1.206.807.131.742,41	1.064.887.956.865,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.19	2.124.872.812.527,01	1.904.629.267.613,01
Aset Tetap Lainnya	5.3.20	9.905.925.846,82	9.114.028.408,32
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.21	57.861.964.006,16	58.417.911.301,16
Akumulasi Penyusutan	5.3.22	(1.817.462.723.225,42)	(1.608.771.628.636,89)
JUMLAH ASET TETAP		7.093.013.218.195,33	6.805.408.855.781,46

URAIAN	REF	2019 AUDITED	2018 AUDITED
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.23		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.23	3.266.687.864,00	3.350.792.857,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.23	52.526.184.310,00	52.526.184.310,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.23	13.345.818.781,80	12.720.633.781,80
Aset Lain-lain	5.3.23	175.679.958.444,04	168.763.333.169,03
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.23	(12.013.269.674,60)	(10.831.140.342,40)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.23	(117.612.965.360,87)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		115.192.414.364,37	226.529.803.775,42
JUMLAH ASET		8.450.865.944.760,55	8.134.004.234.559,65
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.24		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.24	268.757.122,00	118.059.579,00
Utang Bunga	5.3.24	155.902.381,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.24	5.484.766.176,84	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.24	1.705.986.062,69	1.657.035.105,14
Utang Beban	5.3.24	8.176.671.331,00	7.843.210.475,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.24	32.113.634.366,00	23.424.617.826,69
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		47.905.717.439,53	33.042.922.985,83
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.25		
Utang Dalam Negeri	5.3.25	71.301.960.298,90	82.271.492.651,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		71.301.960.298,90	82.271.492.651,00
JUMLAH KEWAJIBAN		119.207.677.738,43	115.314.415.636,83
EKUITAS	5.3.26		
Ekuitas	5.3.26	8.331.658.267.022,12	8.018.689.818.922,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.450.865.944.760,55	8.134.004.234.559,65



**PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL**

SUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	REFF	SALDO 2019 AUDITED	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.727.229.093.257,38	2.436.413.072.665,23	290.816.020.592,15	11,94
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	1.103.749.943.939,38	978.398.728.172,62	125.351.215.766,76	12,81
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1	737.331.826.392,00	621.558.560.112,00	115.773.266.280,00	18,63
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1	53.875.569.216,84	47.342.141.425,47	6.533.427.791,37	13,80
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1	31.792.054.691,25	26.664.685.899,42	5.127.368.791,83	19,23
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1	280.750.493.639,29	282.833.340.735,73	(2.082.847.096,44)	(0,74)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	1.518.694.889.156,00	1.344.449.259.953,00	174.245.629.203,00	12,96
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2	1.169.426.692.106,00	1.066.762.734.201,00	102.663.957.905,00	9,62
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2	73.935.800.682,00	70.988.926.350,00	2.946.874.332,00	4,15
8.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2	49.082.597.889,00	23.969.468.586,00	25.113.129.303,00	-
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2	856.516.761.000,00	791.929.143.000,00	64.587.618.000,00	8,16
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2	189.891.532.535,00	179.875.196.265,00	10.016.336.270,00	5,57
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2	41.073.011.000,00	0,00	41.073.011.000,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2	252.258.206.150,00	251.655.346.352,00	602.859.798,00	0,24
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2	252.258.206.150,00	251.655.346.352,00	602.859.798,00	0,24
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2	55.936.979.900,00	26.031.179.400,00	29.905.800.500,00	114,88
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	5.4.1.2	55.936.979.900,00	26.031.179.400,00	29.905.800.500,00	114,88
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	104.784.260.162,00	113.565.084.539,61	(8.780.824.377,61)	(7,73)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	104.784.260.162,00	113.565.084.539,61	(8.780.824.377,61)	(7,73)
8.3.2	Dana Darurat - LO	5.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	5.4.2	2.337.325.981.869,93	2.295.506.995.908,63	41.818.985.961,30	1,82
9.1.1	Beban Pegawai - LO	5.4.2.1	1.181.752.537.782,00	1.108.594.976.025,00	73.157.561.757,00	6,60
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	729.719.621.848,63	674.212.023.607,04	55.507.598.241,59	8,23
9.1.3	Beban Bunga	5.4.2.3	8.123.548.025,63	6.598.058.977,83	1.525.489.047,80	23,12
9.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	5.4.2.4	79.149.334.000,00	176.349.861.743,00	(97.200.527.743,00)	(55,12)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	46.743.921.755,00	42.615.654.251,00	4.128.267.504,00	9,69
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.6	254.507.759.244,57	259.196.841.952,85	(4.689.082.708,28)	(1,81)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.7	28.865.157.244,54	18.136.105.750,31	10.729.051.494,23	59,16
9.1.9	Beban Lain-lain	5.4.2.8	6.468.248.950,55	6.086.606.477,60	381.642.472,95	6,27
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.9	1.023.845.129,00	2.717.245.904,00	(1.693.400.775,00)	(62,32)

NO URUT	URAIAN	REF	SALDO 2019 AUDITED	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.11	972.007.890,00	999.621.220,00	(27.613.330,00)	(2,76)
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		389.903.111.387,45	140.906.076.756,60	248.997.034.630,85	176,71
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		389.903.111.387,45	140.906.076.756,60	248.997.034.630,85	176,71
9.4	POS LUAR BIASA	5.4.3	9.455.600,00	1.557.079.950,00	(1.547.624.350,00)	(99,39)
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	5.4.3.1	9.455.600,00	1.557.079.950,00	(1.547.624.350,00)	(99,39)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(9.455.600,00)	(1.557.079.950,00)	1.547.624.350,00	(99,39)
	SURPLUS/DEFISIT-LO		389.893.655.787,45	139.348.996.806,60	250.544.658.980,85	179,80



PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2019 (Audited)	2018 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	689.543.006.040,00	592.978.746.862,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	51.362.153.192,00	48.418.070.315,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	28.241.844.911,00	26.772.427.406,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	246.694.455.891,86	243.946.836.375,85
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	53.495.246.384,00	70.988.926.350,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	24.159.177.895,00	23.969.468.586,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	838.948.449.000,00	791.929.143.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	189.891.532.535,00	179.875.196.265,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	41.073.011.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	252.139.954.160,00	236.569.329.408,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	88.328.640.000,00	87.142.218.371,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	55.936.979.900,00	26.031.179.400,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.559.814.450.908,86	2.328.621.542.338,85
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.181.889.361.829,00	1.108.690.038.689,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	711.101.422.815,19	672.795.038.324,21
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	6.578.046.142,00	6.598.058.977,83
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	79.149.334.000,00	118.993.313.285,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	46.743.921.755,00	38.774.816.900,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	1.995.853.019,00	3.716.867.124,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	9.455.600,00	1.557.079.950,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.5.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.027.467.395.160,19	1.951.125.213.250,04
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		532.347.055.748,67	377.496.329.088,81

Uraian	Ref	2019 (Audited)	2018 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	42.756.885,00	81.890.330,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap	5.5.6.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		42.756.885,00	81.890.330,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Belanja Tanah	5.5.6.2	18.044.020.000,00	9.314.649.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	99.754.707.372,00	101.665.269.154,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	144.703.165.317,00	66.483.846.768,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	235.965.307.071,00	276.223.614.766,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	1.910.823.018,00	1.774.343.705,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.6.2	655.385.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.6.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		501.033.407.778,00	455.461.723.593,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(500.990.650.893,00)	(455.379.833.263,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	145.237.547.127,00	58.382.956.489,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		145.237.547.127,00	58.382.956.489,00
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	16.000.000.000,00	8.700.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.178,00	2.742.383.089,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	134.010.842.655,00	42.781.032.500,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00

Uraian	Ref	2019 (Audited)	2018 (Audited)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	155.495.608.833,00	54.223.415.589,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(10.258.061.706,00)	4.159.540.900,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	152.311.626.278,34	149.411.694.907,46
Koreksi Silpa	5.5.8.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		152.311.626.278,34	149.411.694.907,46
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	152.160.928.735,34	149.457.688.127,46
Koreksi Silpa	5.5.8.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		152.160.928.735,34	149.457.688.127,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		150.697.543,00	(45.993.220,00)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		21.249.040.692,67	(73.769.956.494,19)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		256.660.403.509,52	330.452.598.776,71
Saldo Akhir Kas di BUD		277.909.444.202,19	256.682.642.282,52
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		256.115.222.198,00	241.211.999.533,00
Saldo Kas Di BLUD		8.107.669.667,19	1.854.238.461,52
Saldo Kas di FKTP (Puskesmas)		9.337.552.993,00	12.655.487.018,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		4.195.093.659,00	410.956.121,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		153.905.685,00	549.961.149,00



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019 AUDITED	2018 AUDITED
EKUITAS AWAL	8.018.689.818.922,82	7.890.419.513.340,87
SURPLUS/DEFISIT-LO	389.893.655.787,45	139.348.996.806,60
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(76.925.207.688,15)	(11.078.691.224,65)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Lancar	-	-
Mutasi Saldo Awal - Investasi Jangka Panjang	-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap	-	-
Mutasi Saldo Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Mutasi Saldo Awal - Dana Cadangan	-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya	-	(17.690.000.000,00)
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek	-	289.583.717,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	1,00	31.342.847.740,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(5.677.129.797,55)	(11.950.059.661,49)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(406.561.683,00)	91.578.443.339,94
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	72.439.250,00	(105.020.327.764,11)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	(270.066.342,00)	(5.342.076.872,28)
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	4.989.735.435,56	16.102.092.594,19
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43.956.012.161,71	4.247.515.740,57
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(117.612.965.360,87)	1.626.437.002,54
Koreksi ekuitas lainnya	(1.976.671.353,00)	(16.263.147.061,00)
EKUITAS AKHIR	8.331.658.267.022,12	8.018.689.818.922,82



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bogor; dan
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



-
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

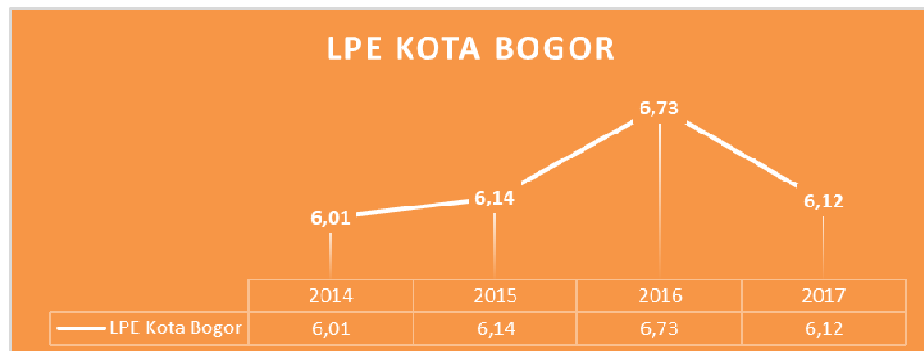
2.1. Ekonomi Makro

Berikut ini adalah perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bogor sebagai berikut:

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Grafik 2.1

Pertumbuhan LPE Kota Bogor Tahun 2014-2017



Grafik diatas menunjukkan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor periode tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 LPE Kota Bogor 6,01%, terus meningkat di tahun 2015 dan 2016 menjadi 6,14% dan 6,73%, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 6,12%.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010)
Menurut Pengeluaran Laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume dan kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

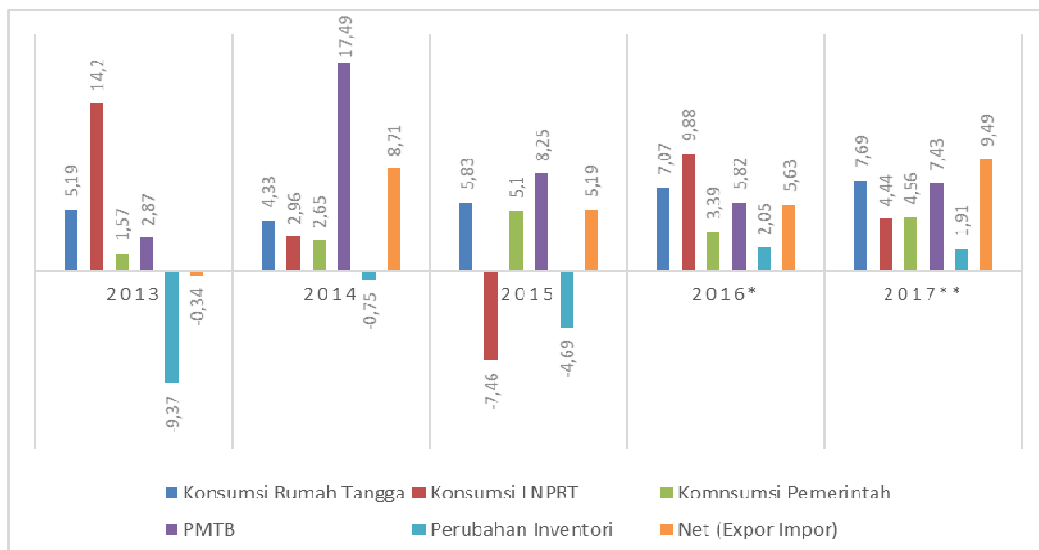
Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2013-2017

	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,19	4,33	5,83	7,07	7,69
2	Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	14,2	2,96	-7,46	9,88	4,44
3	Konsumsi Pemerintah	1,57	2,65	5,1	3,39	4,56
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,87	17,49	8,25	5,82	7,43
5	Perubahan Inventori	-9,37	-0,75	-4,69	2,05	1,91
6	Net (Expor Impor)	-0,34	8,71	5,19	5,63	9,49
	Total PDRB	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2013-2017



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 komponen PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi

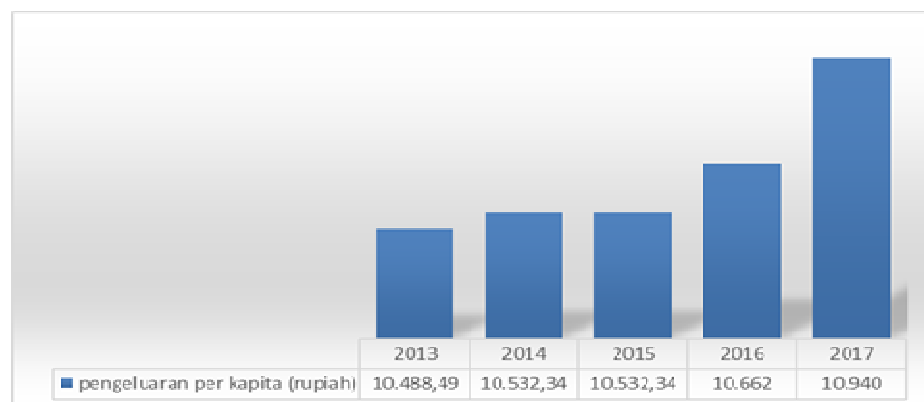
adalah berasal dari komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), yaitu sebesar 14,2 persen, komponen dengan pertumbuhan terendah adalah komponen Perubahan Inventori, yaitu sebesar (-9,37) persen.

Pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan yang berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yaitu sebesar tumbuhan 14, 62 point, dari 2,87 persen pada tahun 2013 menjadi 17,49 persen pada tahun 2014. Pada tahun ini juga komponen Perubahan Inventori dan komponen Net (Export Impor). Tahun 2015 terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan komponen-komponen PDRB ADHK Menurut Pengeluaran.

Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan serta Pengadaan Listrik dan Gas juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

Grafik 2.3
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita
di Kota Bogor Tahun 2015-2017

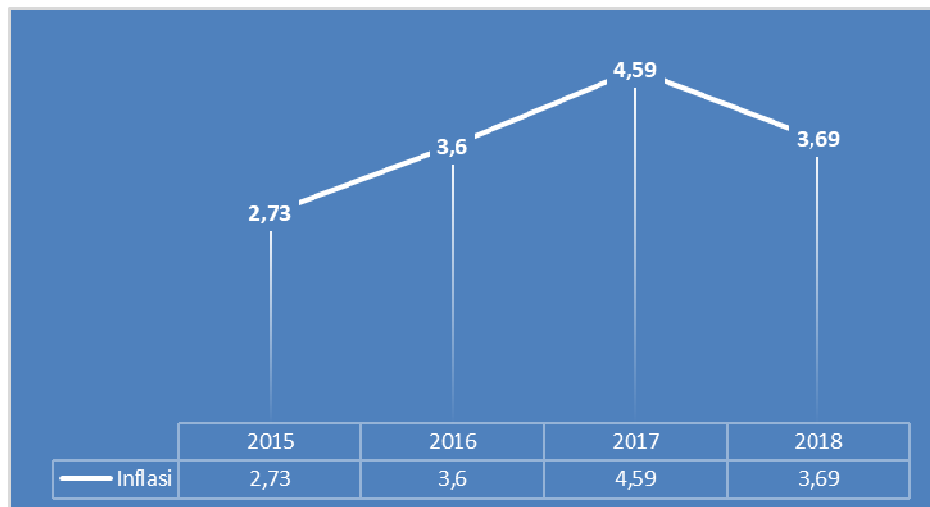


Pengeluaran per kapita Kota Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Tahun 2013 pengeluaran per kapita Kota Bogor sebesar Rp 10.488,49,-. Tahun 2014 meningkat menjadi Rp10.532,34. Hingga Tahun 2017 pengeluaran per kapita Kota Bogor menjadi Rp10.940,-.

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Grafik 2.4

Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2015-2018



Selama periode 2015-2018, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Bogor pada posisi 2,75 %, mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 3,6% dan 4,59. Dan mengalami penurunan sampai 0.9% pada tahun 2018 yaitu 3,69%.

2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio)

Tabel 2.2

Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017

	Gini Rasio						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bogor	0.39	0.45	0.45	0.36	0.47	0.43	0.431

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebesar 0,431 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.



2.1.6 Penurunan Angka Kemiskinan

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2018, Persentase kemiskinan di Kota Bogor cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bogor dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin 90.200 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 950.334 jiwa. Kemudian menurun menjadi 88.900 pada tahun 2011 dari jumlah penduduk sebanyak 987.315 jiwa, hingga pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 76.530 dari jumlah penduduk 1.081.009 jiwa.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kota Bogor sebanyak 811.118 orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 448.386 jiwa. Jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan sebanyak 47.438 jiwa, tingkat pengangguran di Kota Bogor adalah 9,57 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61,13 persen.

Permasalahan yang dihadapi Kota Bogor terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
3. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal

2.2. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2019-2024

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama 5 tahun (Tahun 2019-2024). Berikut ini adalah Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini :

Tabel 2.3
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024

INDIKATOR MAKO PEMBANGUN AN DAERAH	Satuan	Kondi si Awal (2018)	TARGET TAHUN 2019-2024						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)	Indeks	75.66	76.12	76.67	77.22	77.78	78.33	78.89
2	Jumlah Penduduk	Dalam Ribus Jiwa	1.096	1.112	1.131	1.148	1.166	1.183	1.200
3	Laju Pertumbu han Penduduk (LPP) (%)	%	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46	1.44	1.44
4	Angka Kemiskina n (%)	%	5.93	5.85	5.8	5.78	5.53	5.28	5
5	Tingkat Pengangu ran Terbuka (TPT) (%)	%	9.28*	8.9	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6
6	Laju Pertumbu han Ekonomi (LPE) (%)	%	6.14*	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0.41	0.41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36

INDIKATOR MAKO PEMBANGUN AN DAERAH	Satuan	Kondi si Awal (2018)	TARGET TAHUN 2019-2024						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Tingkat Inflasi (%)	%	3.69	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019

2.3. KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA APBD merupakan landasan dalam penyusunan APBD. Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Mengacu pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2019, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 dari masing-masing kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah;
- c. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
- d. Penyesuaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2019-2024 pada Bulan April 2019;
- e. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat dan Propinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
- f. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam perkembangan dan/ atau perubahan keadaan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya penyesuaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019. Rancangan KUPA Tahun Anggaran 2019 dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 162 menyatakan bahwa Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yaitu :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah

2.3.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada perkembangannya mengalami perubahan, yang meliputi :

a. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp2.350.478.728.324,00 menjadi Rp2.619.039.389.088,00 atau meningkat sebesar Rp 268.560.660.764,00 atau 11,43%. Peningkatan target Pendapatan pada APBD Perubahan diasumsikan diakibatkan oleh adanya peningkatan target pendapatan pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

b. Asumsi Belanja Daerah

Perubahan asumsi Belanja Daerah yang semula ditargetkan Rp2.607.679.400.305,00 meningkat menjadi Rp2.855.444.807.191,52 atau ditargetkan meningkat sebesar Rp247.765.406.886,52 atau 9,50%. Asumsi perubahan Belanja Daerah diakibatkan adanya

perubahan pada komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

c. Asumsi Pembiayaan Daerah

Perubahan asumsi pada komponen Penerimaan Pembiayaan daerah semula ditargetkan Rp 268.697.704.241,00 menurun 2,47% atau menurun sebesar Rp6.636.089.277,48, sehingga komponen Penerimaan Pembiayaan daerah ditargetkan menjadi Rp262.061.614.963,52. Sedangkan perubahan asumsi pada komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah, semula ditargetkan sebesar Rp11.497.032.260,00 meningkat sebesar Rp14.159.164.600,00 atau 123,15%, sehingga komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditargetkan menjadi Rp25.656.196.860,00.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Kota Bogor harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang di butuhkan, volume program dan kegiatan yang telah di anggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. sedangkan apabila menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kota Bogor melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Tahun 2019 diarahkan sebagai berikut :

a. Pendapatan yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perubahan Kebijakan PAD Kota Bogor pada Tahun 2019 adalah peningkatan target komponen-komponen PAD seperti Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Reteribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari yang telah ditargetkan pada APBD Murni Tahun 2019. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik atas kinerja perusahaan tahun 2018.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan

Perubahan kebijakan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan sebagai berikut :



- 1) Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Alokasi DBHCHT tersebut bersifat earmarked, dimana penggunaannya sudah diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UU Nomor 39 tahun 2007 ayat (1) yaitu untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selanjutnya kelima kegiatan tersebut dirinci lebih detil menjadi 21 (dua puluh satu) sub jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam PMK 84/PMK.07/2008 jo. PMK Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan DBHCHT. Pengaturan penggunaan DBHCHT tersebut pada dasarnya merupakan bentuk sharing kewajiban Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah penerima DBHCHT guna mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan pengenaan cukai hasil tembakau yaitu dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta mitigasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan produk tembakau disamping juga dalam rangka optimalisasi penerimaan negara CHT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 39 tahun 2007.
- 2) Penyesuaian Tambahan Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. DAU tambahan ini melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- 3) Penyesuaian Pendapatan Dana Alokasi Khusus, yaitu DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Non Fisik, DAK Penugasan, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



4) Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Perubahan Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Penyesuaian Pendapatan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yaitu Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

1) Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung meliputi :

a) Belanja Pegawai, sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan serta pengalokasian tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemutakhiran data.
2. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi

b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Penyesuaian belanja hibah Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
2. Penambahan anggaran belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat di daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kota Bogor.



3. Penambahan anggaran belanja bantuan sosial untuk beasiswa siswa miskin dan bansos tidak terencana.

c) Belanja Tidak Terduga

Pengurangan belanja tidak terduga dipakai untuk penanggulangan bencana dan keperluan mendesak, dilakukan dengan menggeser anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

2) Belanja Langsung

Kebijakan Perubahan Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2019 yaitu :

a) Penyesuaian alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah dengan fokus pada pencapaian tujuan/ sasaran daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Bogor.

b) Penyesuaian alokasi anggaran untuk program/ kegiatan/ pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019.

c) Disebabkan karena pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan, pergeseran maupun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

d) Penyesuaian alokasi anggaran untuk program/ kegiatan/ pekerjaan yang mempunyai sisa hasil penghematan belanja.

e) Menampung Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan yang bersifat earmark, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan yang dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :

1. Program dan Kegiatan pada Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan,
2. Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
3. Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.



4. Program dan Kegiatan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan untuk kegiatan penanggulangan bencana dan belanja keadaan mendesak yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
 5. Program dan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah yang melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- f) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan :
1. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 2. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran kembali Sisa lebih Penggunaan Anggaran DBHCHT sampai dengan tahun 2018 sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-202/PK/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Nilai Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau s.d. TA 2018 dan Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Sisa DBH CHT s.d. TA 2018.
- h) Mendukung persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020.
- i) Percepatan pemenuhan janji politis Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2019-2024.
- j) Percepatan persiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024, khususnya untuk penataan Kawasan Suryakencana dan Naturalisasi Ciliwung Cisadane.
- k) Penambahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan/atau antar jenis belanja untuk beberapa kegiatan yang sudah terakomodir dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dikarenakan perubahan perencanaan dalam pelaksanaannya.

2.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2019 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018. Kebijakan



perubahan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 adalah penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Pakuan dimana tujuan penyertaan modal tersebut untuk memperkuat cakupan layanan air perpipaan kepada masyarakat dan PT Bank BJB untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Bogor pada PT Bank BJB.

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD serta Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2019. Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 yang telah sepakati selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2019, Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp2.559.857.207.793,86 atau mencapai 96,97 % dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp2.639.970.560.688,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan transfer mencapai Rp2.528.500.802.938,19 atau hanya 87,91% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp2.876.375.978.791,52 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat surplus sebesar Rp31.356.404.855,67.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp246.306.520.997,52 dari yang dianggarkan sebesar Rp236.405.418.103,52. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp277.662.925.853,19.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas



desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil merupakan pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp2.876.375.978.791,52 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp972.607.288.978,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.162.190.020.000,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp41.073.011.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi sebesar Rp250.615.369.110,00, Bantuan Keuangan sebesar Rp124.119.271.600,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp89.365.600.000,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp236.405.418.103,52 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2019

Uraian		Anggaran	Realisasi	Selisih		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1		PENDAPATAN	2.639.970.560.688,00	2.559.857.207.793,86	-80.113.352.894,14	-3,03
	1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	43.276.927.941,86	4,45
	1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.577.997.671.710,00	1.455.644.350.874,00	-122.353.320.836,00	-7,75
	1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	-1.036.960.000,00	-1,16
2		BELANJA DAN TRANSFER	2.876.375.978.791,52	2.528.500.802.938,19	-347.875.175.853,33	-12,09
	2 . 1	BELANJA OPERASI	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	-210.437.740.992,33	-9,41
	2 . 2	BELANJA MODAL	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	-129.316.587.801,00	-20,52
	2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.968.939.487,00	9.455.600,00	-4.959.483.887,00	-99,81
	2 . 4	TRANSFER	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	-3.161.363.173,00	-61,30
		SURPLUS / (DEFISIT)	-236.405.418.103,52	31.356.404.855,67	267.761.822.959,19	-113,26
3	3 . 1	PENERIMAAN DAERAH	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	139.740.514.867,00	53,32
	3 . 2	PENGELUARAN DAERAH	25.656.196.860,00	155.495.608.833,00	129.839.411.973,00	506,07
		PEMBIAYAAN NETTO	236.405.418.103,52	246.306.520.997,52	9.901.102.894,00	4,19

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2019 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selisih (Lebih) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target Tahun 2019 adalah sebesar Rp43.276.927.941,86 atau 4,45 %. Selisih (kurang) realisasi Dana Perimbangan dari target Tahun 2019 adalah sebesar Rp122.353.320.836,00 atau 7,75%. Selisih (kurang) realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.036.960.000,00 atau 1,16%.

Sama dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2019 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Realisasi belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.528.500.802.938,19 atau 87,91% dari target belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp2.876.375.978.791,52.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp262.061.614.963,52 dapat direalisasikan sebesar Rp401.802.129.830,52 atau



153,32%. Realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp155.495.608.833,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp139.495.608.833,00.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2019, yaitu :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
3. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;
4. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4. Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah **Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah** atau **SIMRAL - Kota Bogor** yang dikembangkan oleh BPPT Tangerang Selatan.

4.2. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

- a. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;

- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam

bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

- a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;

- 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
 - d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan

penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- a) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

8. Konsistensi

a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik

dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

9. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

11. Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian

integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.

- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

- a. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :
 - 1) Transaksi dan *saldo resiprokal* antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
 - 2) Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
 - 3) Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional dan beban transfer;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;

- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

- b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.4. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu :

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak pastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan LRA

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP dan interpretasinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD/BLUD
- b. dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.
- c. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.
- d. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah baik berupa Kas dan atau Non Kas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- c. Pada saat pendapatan disahkan oleh BUD dalam SP2B

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis kas akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam pengungkapan pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu

4.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum

daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

4.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja dibayar dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah daerah telah melakukan pembayaran lebih dulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah daerah.

Belanja dibayar dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Belanja Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau smesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (*cut off*).

Belanja Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

4.11. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri,

persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:

- a. persediaan bahan pakai habis;
- b. persediaan bahan/material;
- c. persediaan barang lainnya.

4.12 KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

1. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan, adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa Manfaat, adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai Wajar, adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;

Nilai Buku, adalah diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan;

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi buku perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Selain itu, termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), adalah merupakan aset tetap yang masih dalam proses konstruksi pembangunan/pengerjaan dan ;belum siap digunakan pada tanggal pelaporan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- g. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah:

- a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap pakai;
- b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- c. pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan;
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut digunakan dan dikuasai pihak lain;
- c. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK;
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - 2) dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - 3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - 4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Aset tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah daerah atas perolehan suatu aset tetap di mas mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana. Kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat :

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Misalnya, utang belanja yang timbul akibat pemakaian listrik dan air.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misalnya, hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Contohnya, ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DAN SiLPA/SiKPA/SAL

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam akuntansi berbasis Akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan SAL disajikan pada LPSAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan

tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain :

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (non-recurring);
- b. Selisih kurs terealisasi atas Kas Di Bendahara Umum Daerah;
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

4.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYESUAIAN, KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian

Kebijakan akuntansi penyesuaian merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun neraca baik untuk smesteran maupun untuk tahun anggaran berkenaan. Misalnya, penyesuaian atas nilai persediaan yang menggunakan metode periodik, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap tahun berkenaan, reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, dan lain-lain.

Penyesuaian-penyesuaian ini diperlukan dengan tujuan agar neraca dapat menggambarkan posisi keuangan yang sesungguhnya sehingga tidak salah ditafsirkan oleh pembaca laporan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena :

- 1) keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
- 2) kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi,
- 3) kesalahan perhitungan matematis,
- 4) kesalahan interpretasi fakta,
- 5) kecurangan, atau
- 6) kelalaian, dan lain-lain.

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

PSAP 10-Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada

awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrua penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrua, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrua (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrua penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrua. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrua utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;

ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.19 PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Desember 2018
3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Oktober 2019
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
 2. Belanja
 3. Transfer
 4. Surplus atau defisit
 5. Penerimaan pembiayaan
 6. Pengeluaran pembiayaan
 7. Pembiayaan neto; dan
 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
- (Rincian Laporan Realisasi Anggaran tersaji pada Lampiran 52)*

Per 31 Desember 2019
(Rp)Per 31 Desember 2018
(Rp)**5.1.1. PENDAPATAN****2.559.857.207.793,86****2.328.703.432.668,85**

Realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp2.559.857.207.793,86 atau 96,97% dari target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp2.639.970.560.688,00. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.559.857.207.793,86 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**1.015.884.216.919,86****912.197.971.288,85**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp1.015.884.216.919,86 atau mencapai 104,45% dari target pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp972.607.288.978,00. Pendapatan sebesar Rp1.015.884.216.919,86 tersebut terdiri dari :

▪ Pendapatan Pajak Daerah**689.543.006.040,00****592.978.746.862,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 689.543.006.040,00 atau 106,98% dari target sebesar Rp 644.546.554.586,00. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp689.543.006.040,00 terdiri dari :

- Pajak Hotel 95.247.182.735,00
- Pajak Restoran 153.467.175.721,00
- Pajak Hiburan 33.017.933.672,00
- Pajak Reklame 11.708.055.331,00
- Pajak Penerangan Jalan 53.438.870.690,00
- Pajak Parkir 15.424.581.199,00

Per 31 Desember 2019
(Rp)Per 31 Desember 2018
(Rp)

• Pajak Air Bawah Tanah	4.665.857.092,00
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	144.563.137.359,00
• Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	178.010.212.241,00
Jumlah	689.543.006.040,00

▪ **Pendapatan Retribusi Daerah** **51.362.153.192,00** **48.418.070.315,00**

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp51.362.153.192,00 atau 96,10% dari target sebesar Rp53.446.789.400,00.

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp51.362.153.192,00 terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum sebesar Rp24.605.960.222,00 terdiri dari:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 9.129.454.647,00
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 10.314.145.250,00
 - Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman 570.265.625,00
 - Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2.716.141.000,00
 - Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 478.347.600,00
 - Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus 21.717.800,00
 - Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 22.521.200,00
 - Retribusi PKB - Mobil Barang/ B ban - Pick Up 753.811.800,00
 - Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 332.964.400,00
 - Retribusi PKB - Mobil 23.908.800,00



Barang/ Beban - Truck		
-	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	91.794.500,00
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	150.887.600,00
	Jumlah	24.605.960.222,00
•Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.547.456.350,00 terdiri dari :		
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.458.829.990,00
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	131.000.000,00
-	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	14.255.000,00
-	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	732.533.000,00
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.281.000,00
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	47.489.500,00
-	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	517.868.640,00
-	Retribusi Pelayana Tempat Olahraga	1.282.452.500,00
-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	30.696.720,00
-	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	182.050.000,00
	Jumlah	8.547.456.350,00
• Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp18.208.736.620,00 terdiri dari :		



-	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17.517.398.120,00
-	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	318.137.500,00
-	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	373.201.000,00

Jumlah 18.208.736.620,00

▪ **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **28.241.844.911,00** **26.772.427.406,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28.241.844.911,00 atau 100,56% dari target sebesar Rp28.083.707.761,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28.241.844.911,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUKD, yang terdiri dari:

-	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan	19.684.735.000,00
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten	4.178.360.124,00
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.220.612.637,00
-	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Pasar Pakuan Jaya	158.137.150,00

Jumlah 28.241.844.911,00



▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.737.212.776,86	244.028.726.705,85
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp246.737.212.776,86 atau 100,08% dari target sebesar Rp246.530.237.231,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp246.737.212.776,86 terdiri dari:		
• Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	42.756.885,00	
• Penerimaan Jasa Giro	12.530.596.605,00	
• Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	49.303.200,00	
• Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	115.748.512,00	
• Pendapatan Denda Pajak	6.254.155.598,00	
• Pendapatan Denda Retribusi	39.273.363,00	
• Pendapatan Dari Pengembalian	3.450.887.877,00	
• Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	499.973.400,00	
• Pendapatan BLUD	171.573.201.544,86	
• Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	7.000.000,00	
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN	44.165.589.650,00	
• Kontribusi Kebun Raya Bogor	1.134.955.000,00	
• Penerimaan Bunga atas Penerusan Pinjaman	6.578.046.142,00	
• Sewa Rusunawa	295.725.000,00	
Jumlah	246.737.212.776,86	



	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.455.644.350.874,00	1.303.332.063.609,00
Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp1.455.644.350.874,00 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp1.577.997.671.710,00 yang terdiri dari:		
▪ Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.106.494.405.814,00	1.066.762.734.201,00
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Transfer untuk Pemerintah Kota Bogor adalah sebesar Rp1.162.190.020.000,00. Dengan realisasi Rp1.106.494.405.814,00 atau 95,21% dari target tahun 2019 yang terdiri dari:		
• Dana Bagi Hasil Pajak	53.495.246.384,00	70.988.926.350,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.495.246.384,00 atau 72,57% dari target sebesar Rp73.713.874.000,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari :		
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.658.009.934,00	
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.577.131.514,00	
- Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	43.260.104.936,00	
Jumlah	53.495.246.384,00	



• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.159.177.895,00	23.969.468.586,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp24.159.177.895,00 atau 86,85% dari target sebesar Rp27.816.418.000,00.		
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh dari:		
– Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	38.200.200,00	
– Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	590.155.800,00	
– Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	10.913.811.410,00	
– Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	12.309.504.498,00	
– Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LRA	307.505.987,00	
Jumlah	<u>24.159.177.895,00</u>	
• Dana Alokasi Umum	838.948.449.000,00	791.929.143.000,00
Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp838.948.449.000,00 mencapai 97,97% dari target sebesar Rp856.297.349.000,00		
• Dana Alokasi Khusus	189.891.532.535,00	179.875.196.265,00
Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp189.891.532.535,00 atau 92,92% dari target sebesar Rp204.362.379.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
– DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp21.297.141.095,00		

Per 31 Desember 2019
(Rp)Per 31 Desember 2018
(Rp)

terdiri dari:		
DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	5.283.426.700,00	
DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Kesehatan Rujukan	12.607.233.170,00	
DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	3.406.481.225,00	
	Jumlah	<u>21.297.141.095,00</u>
- DAK Non Fisik sebesar Rp158.233.216.811,00 terdiri dari:		
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.187.400.000,00	
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	14.400.557.716,00	
DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	469.538.600,00	
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	124.293.718.425,00	
DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.458.402.070,00	
DAK Nonfisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	10.423.600.000,00	
	Jumlah	<u>158.233.216.811,00</u>
- DAK Penugasan sebesar Rp10.361.174.629,00 terdiri dari:		
DAK Penugasan - Bidang Kesehatan dan KB	6.065.751.720,00	
DAK Penugasan - Bidang Air Minum	1.164.852.909,00	
DAK Penugasan - Bidang Sanitasi	1.717.500.000,00	
DAK Penugasan - Bidang Pasar	1.413.070.000,00	
	Jumlah	<u>10.361.174.629,00</u>



▪ Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	41.073.011.000,00	0,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan dana penyesuaian sebesar Rp41.073.011.000,00 atau sebesar 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.073.011.000,00.		
▪ Transfer Pemerintah Provinsi	252.139.954.160,00	236.569.329.408,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp252.139.954.160,00 atau sebesar 100,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.615.369.110,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp252.139.954.160,00 terdiri dari:		
• Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	91.942.876.980,00	
• Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	64.890.127.350,00	
• Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.945.198.130,00	
• Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	199.011.200,00	
• Bagi Hasil Pajak Rokok	41.162.740.500,00	
Jumlah	252.139.954.160,00	
▪ Bantuan Keuangan	55.936.979.900,00	0,00
Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 55.936.979.900,00 atau sebesar 45,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp 124.119.271.600,00		



5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 129.401.651.000,00 113.173.397.771,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2019 adalah sebesar Rp129.401.651.000,00 atau mencapai 99,21% dari target sebesar Rp130.438.611.000,00

Realisasi sebesar tersebut terdiri dari:

• **Pendapatan Hibah dari Pemerintah. 88.328.640.000,00 87.142.218.371,00**

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp88.328.640.000,00 atau 98,84% dari target Rp89.365.600.000,00 berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS APBN.

• **Pendapatan Lainnya 0,00 26.031.179.400,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya pada tahun 2019 sebesar 0,00 dan di tahun 2018 sebesar Rp26.031.179.400,00 dikarenakan pada tahun ini bantuan keuangan dikelompokkan ke dalam pendapatan transfer.

5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER 2.528.500.802.938,19 2.406.586.936.843,04

Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp2.528.500.802.938,19 atau 87,91% dari Anggaran Belanja tahun 2019 sebesar Rp2.876.375.978.791,52. Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Belanja



sebesar Rp2.526.504.949.919,19 atau 87,99% dari target sebesar Rp2.871.218.762.599,52 dan Realisasi Transfer sebesar Rp1.995.853.019,00 atau 38,70% dari anggaran sebesar Rp5.157.216.192,00. Penghematan realisasi belanja dan transfer tahun 2019 terdapat pada semua pos belanja. Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi **2.025.462.086.541,19** **1.945.851.266.176,04**

Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.025.462.086.541,19 atau 90,59% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.235.899.827.533,52. Realisasi sebesar Rp2.025.462.086.541,19 terdiri dari:

▪ **Belanja Pegawai** **1.181.889.361.829,00** **1.108.690.038.689,00**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.181.889.361.829,00,00 atau 90,67% dari anggaran sebesar Rp 1.303.512.672.792,52. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.181.889.361.829,00,00 termasuk Belanja pegawai Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- BTL - Belanja Gaji dan Tunjangan 480.807.837.587,00
- BTL - Belanja Tambahan Penghasilan PNS 430.063.148.526,00
- BTL - Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 9.934.860.000,00
- BTL - Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.425.320.280,00

Per 31 Desember 2019
(Rp)Per 31 Desember 2018
(Rp)

• BL - Honorarium PNS	11.859.459.500,00
• BL - Honorarium Non PNS	121.851.695.045,00
• BL - Uang Lembur	2.350.190.000,00
• BL - Honorarium Pegawai BOS	36.273.535.838,00
• BL Honorarium Pegawai BLUD	63.323.315.053,00

Jumlah 1.181.889.361.829,00

▪ **Belanja Barang 711.101.422.815,19 672.795.038.324,21**

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp711.101.422.815,199 atau 90,03% dari anggaran sebesar Rp789.887.964.541,00. Belanja Barang sebesar Rp711.101.422.815,199 terdiri dari:

• Belanja Bahan Pakai Habis	54.014.522.236,00
• Belanja Bahan/Materi l	28.652.169.395,00
• Belanja Jasa Kantor	142.075.683.327,00
• Belanja Premi Asuransi	47.939.753.631,00
• Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.477.425.210,00
• Belanja Cetakan Penggandaan	16.060.426.015,00
• Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gdg/Parkir	1.912.647.612,00
• Belanja Sewa Sarana Mobilitas	451.432.000,00
• Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.716.688.007,00
• Belanja Makanan dan Minuman	27.472.472.168,00
• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.657.095.515,00
• Bela ja Pakaian Kerja	3.175.946.095,00
• Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.152.019.800,00
• Belanja Perjalanan Dinas	98.925.696.726,00
• Belanja Pemeliharaan	45.151.691.038,00
• Belanja Jasa Konsultasi	18.5 7.863.294,00
• Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	2.622.584.740,00
• Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	69.000.000,00
• Belanja kursus, pelatihan,	9.355.501.800,00



<p>sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja arang dan Jasa Dana BOS 69.368.288.719,00 • Belanja Barang dan Jasa BLUD 104.996.686.337,19 • Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 842.198.250,00 • Belanja Pemberian Hadiah/ Uan Pembinaan 4.493.630.900,00 <p style="text-align: right;">Jumlah 711.101.422.815,19</p>		
<p>▪ Bunga</p> <p>Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp6.578.046.142,00 atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 adalah Belanja Bunga atas Dana Pinjaman dari International Bank For reconstruction and Development (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor).</p>	<p>6.578.046.142,00</p>	<p>6.598.058.977,83</p>
<p>▪ Hibah</p> <p>Realisasi Hibah sebesar Rp79.149.334.000,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp85.099.234.000,00. Belanja Hibah sebesar Rp79.149.334.000,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Hibah Barang ke Pemerintah Pusat sebesar Rp14.834.084.000,00 - Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp32.264.300.000,00 - Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota sebesar Rp5.635.000.000,00 - Belanja Hibah Satuan - - 	<p>79.149.334.000,00</p>	<p>118.993.313.285,00</p>



Pendidikan Menengah sebesar Rp9.875.550.000,00		
- Belanja Hibah Bidang BOP PAUD sebesar Rp7.738.800.000,00		
- Belanja Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp8.801.600.000,00		
▪ Bantuan Sosial	46.743.921.755,00	38.774.816.900,00
Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp46.743.921.755,00 atau 92,75% dari anggaran sebesar Rp50.399.956.200,00 terdiri dari:		
- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp33.453.880.005,00		
- Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp10.489.000.000,00		
- Bantuan Tidak Terencana (BTT) sebesar Rp2.801.041.750,00		
5.1.2.2 Belanja Modal	501.033.407.778,00	455.461.723.593,00
Realisasi Belanja Modal tahun 2019 adalah sebesar Rp501.033.407.778,00 atau 79,48% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp630.349.995.579,00. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp501.033.407.778,00 terdiri dari:		
• Belanja Tanah	18.044.020.000,00	9.314.649.200,00
Realisasi Belanja Tanah tahun 2019 adalah sebesar Rp18.044.020.000,00 atau 76,72% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp23.520.000.000,00.		
• Belanja Peralatan dan Mesin	99.754.707.372,00	101.665.269.154,00
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2019 adalah sebesar Rp99.754.707.372,00 atau 85,16% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp117.133.344.792,00. Belanja		



Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.754.707.372,00 termasuk didalamnya Belanja Peralatan Mesin BOS sebesar Rp15.672.816.701,00 dan Belanja Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp2.887.183.461,00.		
• Belanja Bangunan dan Gedung	144.703.165.317,00	66.483.846.768,00
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2019 adalah sebesar Rp144.703.165.317,00 atau 89,27% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp162.100.280.110,00		
• Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.965.307.071,00	276.223.614.766,00
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 adalah sebesar Rp235.965.307.071,00 atau 72,66% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp324.769.819.437,00		
• Belanja Aset Tetap Lainnya	1.910.823.018,00	1.774.343.705,00
Realisasi Belanja Aset tetap Lainnya tahun 2019 adalah sebesar Rp1.910.823.018,00 atau 90,58% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.109.630.240,00.		
• Belanja Aset Lainnya	655.385.000,00	0,00
Realisasi Belanja Aset lainnya tahun 2019 adalah sebesar Rp.655385.000,00 atau 91,42% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 716.921.000,00		
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	9.455.600,00	1.557.079.950,00
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2019 adalah sebesar Rp9.455.600,00 atau 0,19% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp4.968.939.487,00 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran		



BPHTB atas nama Andhika Pramudita
sesuai Keputusan Walikota Bogor
nomor 900.45

5.1.3 TRANSFER / BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA	0,00	3.716.867.124,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada tahunj 2019 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00		
5.1.4 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.995.853.019,00	0,00
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.995.853.019,00 atau 38,70% dari anggaran sebesar Rp5.157.216.192,00 . Realisasi Transfer tersebut terdiri dari :		
1. Transfer bantuan keuangan ke Kabupaten sebesar Rp1.023.845.129,00 atau 25,33% dari anggaran Rp4.042.013.000,00		
2. Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp972.007.890,00 atau 87,16% dari anggaran Rp1.115.203.192,00		
SURPLUS / (DEFISIT)	31.356.404.855,67	(77.883.504.174,19)
5.1.5 PEMBIAYAAN	246.306.520.997,52	334.448.086.877,71
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan neto tahun 2019 adalah sebesar Rp246.306.520.997,52 atau 104,19% dari anggaran		



Rp236.405.418.103,52 dengan rincian
sebagai berikut:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan 401.802.129.830,52 388.671.502.466,71

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp401.802.129.830,52 atau 153,32% dari anggaran sebesar Rp262.061.614.963,52.

Jumlah tersebut bersumber dari:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp256.564.582.703,52 atau 100% dari anggaran Rp256.564.582.703,52
2. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD - BLUD) sebesar Rp139.752.780.949,00. (*Rincian tersebut terdapat pada lampiran 48*)
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.484.766.178,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp5.497.032.260,00 yang merupakan pengembalian dari PDAM atas Pinjaman Nomor SLA- 1226/DSMI/2009

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan 155.495.608.833,00 54.223.415.589,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp155.495.608.833,00 atau 606,07% dari anggaran Rp25.656.196.860,00

Jumlah tersebut terdiri dari:

- Penyertaan Modal sebesar 16.000.000.000,00
Rp16.000.000.000,00 atau 79,37%



dari anggaran sebesar
Rp20.159.164.600,00 . Realisasi
tersebut terdiri dari penyertaan
modal PDAM Kota Bogor sebesar
Rp10.000.000.000.000,00 dan
penyertaan modal pada PD Pasar
Pakuan sebesar
Rp6.000.000.000.000,00

- Pembayaran Pokok Pinjaman 139.495.608.833,00
Dalam Negeri sebesar
Rp139.495.608.833,00 atau
2.537,65% dari anggaran
5.497.032.260,00 . Realisasi
tersebut terdiri dari:
 1. Penerusan Pinjaman PDAM
Nomor SLA-226/DSMI/2009
sebesar 5.484.766.178,00
 2. Pembayaran Pokok Utang BLUD
sebesar 134.010.842.655,00
(Rincian terdapat pada lampiran
49)

Jumlah 155.495.608.833,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

277.662.925.853,19

256.564.582.703,52



5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari :

5.2.1 Saldo anggaran lebih

Saldo anggaran lebih awal tahun 2018 sebesar Rp330.288.545.977,71 dan tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun 2018 sebesar Rp330.288.545.977,71 dan tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) tahun 2018 sebesar Rp256.564.582.703,52 dan tahun 2019 sebesar Rp277.662.925.853,19.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun anggaran 2018 terdapat koreksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2018 sebesar Rp256.564.582.703,52 dan tahun 2019 sebesar Rp277.662.925.853,19.



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

5.3.1. Kas di Kas Daerah Rp 256.115.222.198,00 Rp 241.211.999.533,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp256.115.222.198,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp241.211.999.533,00. Mutasi Kas di Kas Daerah selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2018	Rp	241.211.999.533,00
- Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019	Rp	2.412.104.380.752,00
- Pengeluaran Kas Tahun Anggaran 2019	Rp	2.397.201.158.087,00
- Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2019	Rp	256.115.222.198,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp256.115.222.198,00 adalah Kas di Kas Daerah pembentuk SILPA yang disimpan di Bank BJB Cabang Bogor dengan nomor rekening sebagai berikut :

No	Nama / Kode Rekening	Jumlah
1	0130270203013 (Rutin)	Rp 256.115.222.198,00
	Jumlah di BKU	Rp 256.115.222.198,00

(Rincian Kas di Kas Daerah/BUD disajikan pada Lampiran 1)

5.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2018

adalah sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	0,00
- Penerimaan Kas tahun 2019	Rp	28.122.783.170,00
- Pengeluaran Kas tahun 2019	Rp	28.122.783.170,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	0,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada Lampiran 2)

5.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 153.905.685,00 Rp 549.961.149,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp153.905.685,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp549.961.149,00; Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	549.961.149,00
- Penambahan dari Pencairan SP2D tahun 2019	Rp	1.423.867.794.089,34
- Pengurangan dari Realisasi SPJ dan Pengembalian tahun 2019	Rp	1.424.263.849.553,34
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	153.905.685,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp153.905.685,00 adalah saldo yang berada pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp	56.846.325,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	97.058.549,00
- Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	811,00
Jumlah	Rp	153.905.685,00

(Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 3)



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.3.4.	Kas di BLUD	Rp	8.107.669.667,19	Rp	1.854.238.461,52
---------------	--------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.107.669.667,19 dan tahun 2018 sebesar Rp1.854.238.461,52 dengan mutasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	1.854.238.461,52
- Penerimaan pada tahun 2019	Rp	316.732.170.963,86
- Pengeluaran pada tahun 2019	Rp	310.478.739.758,19
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	8.107.669.667,19

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp8.107.669.667,19 adalah kas pembentuk SILPA Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp7.844.133.870,19 dan Rp263.535.797,00 adalah utang PFK yang akan disetor pada tahun 2020.

(Rincian Kas di BLUD disajikan pada Lampiran 4.a dan Lampiran 4.b)

5.3.5.	Kas di FKTP (Puskesmas)	Rp	9.337.552.993,00	Rp	12.656.415.139,00
---------------	--------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------

Saldo kas di FKTP (Puskesmas) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.337.552.993,00 dan Rp12.656.415.139,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	12.656.415.139,00
- Penerimaan pada tahun 2019	Rp	44.170.810.975,00
- Pengeluaran pada tahun 2019	Rp	47.489.673.121,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	9.337.552.993,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp9.337.552.993,000 didalamnya termasuk utang PFK sebesar Rp5.221.325,00.

(Rincian Kas di FKTP (Puskesmas) disajikan pada Lampiran 5)

5.3.6.	Kas Lainnya	Rp	0,00	Rp	173.631.664,00
---------------	--------------------	-----------	-------------	-----------	-----------------------

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp173.631.664,00. Mutasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	173.631.664,00
- Penerimaan pada tahun 2019	Rp	0,00
- Pengeluaran pada tahun 2019	Rp	173.631.664,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

(Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 6)

5.3.7. Kas di Bendahara BOS Pusat Rp 4.229.656.416,00 Rp 417.961.220,00

Saldo Dana Bos Pusat per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.229.656.416,00 dan Rp417.961.220,00 dengan mutasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	417.961.220,00
- Penerimaan pada tahun 2019	Rp	88.366.826.562,00
- Pengeluaran pada tahun 2019	Rp	84.555.131.366,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	4.229.656.416,00

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp4.229.656.416,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro sebesar Rp34.562.757,00

(Rincian Kas Dana Bos Pusat disajikan pada Lampiran 7)

5.3.8. Piutang Pendapatan Rp 454.435.483.328,82 Rp 290.103.493.941,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp454.435.483.328,82 dan Rp290.103.493.941,00. Piutang pendapatan sebesar Rp454.435.483.328,82 terdiri dari :

5.3.8.1 Piutang Pajak Daerah Rp 322.300.079.314,00 Rp 276.293.378.922,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 Rp322.300.079.314,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp276.293.378.922,00 adalah pajak daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai berikut :



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	276.293.378.922,00
- Penambahan pada tahun 2019:		
• Koreksi saldo awal	Rp	79.856.269,00
• Ketetapan tahun 2019	Rp	559.316.726.060,00
- Pengurangan pada tahun 2019:		
• Koreksi saldo awal		1.861.976.229,00
• penerimaan pembayaran		511.527.905.708,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	322.300.079.314,00

Jumlah sebesar Rp322.300.079.314,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel	Rp	561.862.014,00
- Pajak Restoran	Rp	1.268.761.813,00
- Pajak Hiburan	Rp	31.701.555,00
- Pajak Parkir	Rp	154.030.600,00
- Pajak Reklame	Rp	1.285.057.929,00
- Pajak Air Tanah	Rp	142.410.060,00
- PBB P2	Rp	318.856.255.343,00
Jumlah Piutang Pajak	Rp	322.300.079.314,00

Pada Tahun 2019 terdapat koreksi saldo awal piutang pajak yaitu dengan adanya pembatalan, koreksi, Klarifikasi Bukti Bayar, Pemindah bukuan yang terdiri dari :

- Pajak Hotel	Rp	(25.660.000,00)
- Pajak Restaurant	Rp	(401.232.210,00)
- Pajak Reklame	Rp	79.856.269,00
- Pajak parkir	Rp	(3.222.701,00)
- Pajak Hiburan	Rp	(16.443.960,00)



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- PBB P2	Rp	(1.415.417.358,00)
Jumlah	Rp	(1.782.119.960,00)

(Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 8)

5.3.8.2 Piutang Retribusi Daerah Rp 4.794.490.823,00 Rp 2.564.935.426,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.794.490.823,00 dan tahun 2018 sebesar Rp2.564.935.426,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	2.564.935.426,00
- Penambahan pada tahun 2019	Rp	20.588.579.164,00
- Pengurangan pada tahun 2019	Rp	18.359.023.767,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	4.794.490.823,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.794.490.823,00 adalah terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp	29.875.000,00
- Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp	3.915.083.506,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	738.372.317,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Dinas Kesehatan	Rp	111.160.000,00
JUMLAH	Rp	4.794.490.823,00

*(Piutang Retribusi Tersaji
pada lampiran 9, 10,11
dan 12)*

5.3.8.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 70.613.507.316,82 Rp 0,00

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 Rp70.613.507.316,82 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 adalah lain-lain pendapatan daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	0,00
- Penambahan pada tahun 2019	Rp	70.650.684.502,50
- Pengurangan pada tahun 2019	Rp	37.177.185,68
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	70.613.507.316,82

Saldo Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp70.613.507.316,82 adalah terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Piutang hasil pemanfaatan kekayaan daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp	92.575.000,00
- Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah	Rp	69.409.161.007,82
- Piutang denda retribusi pada Dinas Penanaman	Rp	1.025.258.846,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Modal Pelayan Terpadu

Satu Pintu

- Piutang Hasil Rp 86.512.463,00

Pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PPKD atas kontribusi BGS PT Propindo dari tahun 2010 s.d 2018

JUMLAH Rp 70.613.507.316,82

5.3.8.4 Piutang Transfer Rp 45.363.974.292,00 Rp 0,00

Pemerintah Pusat - Dana**Perimbangan**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.363.974.292,00 adalah Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 sesuai PMK 20/PMK.07/2020 sebesar Rp22.092.634.200,00 dan Penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sesuai PMK 36/PMK.07/2020 sebesar Rp23.271.340.092,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	0,00
- Penambahan pada tahun 2019	Rp	45.363.974.292,00
- Pengurangan pada tahun 2019	Rp	0,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	45.363.974.292,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan per 31 Desember 2019 sebesar



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Rp45.363.974.292,00 terdiri dari :

- Piutang Bagi Hasil Pajak	Rp	20.440.554.298
- Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	Rp	24.923.419.994
JUMLAH	Rp	45.363.974.292,00

(Rincian terdapat pada lampiran 17)

5.3.8.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 11.363.431.583,00 Rp 11.245.179.593,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 Rp11.245.179.593,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.363.431.583,00 adalah pajak daerah yang belum diterima pembayarannya sesuai Kepgub Jawa Barat Nomor 973/Kep.205-Bapenda/2020, dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	11.245.179.593,00
- Penambahan pada tahun 2019	Rp	11.363.431.583,00
- Pengurangan pada tahun 2019	Rp	11.245.179.593,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	11.363.431.583,00

(Rincian terdapat pada lampiran 18)

5.3.9. Piutang Lainnya Rp 150.777.331.093,38 Rp 192.470.717.640,38

Piutang lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 150.777.331.093,38 dan pada tahun 2018 sebesar Rp192.470.717.640,38, Dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	192.470.717.640,38
- Penambahan pada tahun 2019	Rp	132.854.615.662,00
- Pengurangan pada tahun 2019	Rp	174.548.002.209,00
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	150.777.331.093,38



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Saldo per 31 Desember 2019 sebesar 150.777.331.093,38 terdiri dari :

- Pemutusan Kontrak Rp 63.100.000,00
Konsultan PT. Indocitra
Intiperkasa pada Dinas
Perhubungan (*lihat lampiran 19*)
- Piutang BLUD (*lihat lampiran 20*) Rp 63.756.576.937,00
- Piutang PDAM Terkait Setoran Laba (*lihat lampiran 21*) Rp 88,40
- Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-R I (*lihat lampiran 21*) Rp 10.140.927.594,98
Piutang hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp10.140.927.594,98 piutang yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004).
- Penggunaan langsung Rp 30.000.000,00
Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar (*lihat lampiran 21*)
- Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank) (*lihat lampiran 21*) Rp 76.786.726.473,00

Jumlah	Rp 150.777.331.093,38
---------------	------------------------------

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

(NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00

5.3.10. Penyisihan Piutang Rp (197.644.133.020,74) Rp (168.778.975.776,21)

Penyisihan piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(197.644.133.020,74) dan Rp(168.778.975.776,21) Jumlah Penyisihan piutang sebesar Rp(197.644.133.020,74) terdiri dari penyisihan:

- Piutang Pajak	Rp	(167.622.577.087,59)
- Piutang Retribusi	Rp	(2.583.396.182,00)
- Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp	(24.777.770.359,90)
- Piutang lainnya	Rp	(2.660.389.391,25)
Jumlah		<u>(197.644.133.020,74)</u>

(Rincian Penyisihan Piutang disajikan pada Lampiran 22)

5.3.11. Beban Dibayar Dimuka Rp 844.904.499,12 Rp 540.978.634,03

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp844.904.499,12 dan Rp540.978.634,03



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Jumlah Beban Dibayar dimuka sebesar Rp844.904.499,12 adalah Beban pada Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Beban dibayar dimuka pada RSUD-BLUD	Rp	5.023.057,53
- Beban dibayar dimuka pada Disperumkim	Rp	164.942.465,75
- Beban dibayar dimuka pada Sekretariat DPRD	Rp	146.547.259,25
- Beban dibayar dimuka pada BPKAD	Rp	528.391.716,59
Jumlah	Rp	844.904.499,12

(Rincian Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Lampiran 23)

5.3.12. Persediaan Rp 32.596.243.908,48 Rp 26.708.887.744,69

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp32.596.243.908,48 dan Rp26.708.887.744,69. Jumlah persediaan sebesar Rp32.596.243.908,48 terdiri dari :

- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.873.444.715,98
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	5.105.506.820,00
- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	1.125.778.157,00
- Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	311.796.613,00
- Persediaan Barang Cetakan	Rp	4.890.294.223,00
- Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp	831.420.344,00
- Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga- BLUD	Rp	364.228.455,50



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Persediaan Bahan baku bangunan	Rp	288.077.400,00
- Persediaan Bahan/bibit tanaman	Rp	12.128.500,00
- Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	15.941.294.018,00
- Persediaan Bahan kimia	Rp	112.717.000,00
- Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	113.059.762,00
- Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	Rp	870.000,00
- Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga (berupa pembangunan gedung Kejaksaan Negeri) yang belum di serah terimakan oleh Pemda.	Rp	1.625.627.900,00
Jumlah	Rp	32.596.243.908,48

(Rincian Persediaan disajikan pada Lampiran 24)

5.3.13. Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir Rp 63.742.100,00 Rp 63.742.100,00

Saldo Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00 berbentuk dana bergulir. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp63.742.100,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2000	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2001	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2002	Rp	550.000.000,00
- Tahun 2003	Rp	600.000.000,00
Jumlah	Rp	1.750.000.000,00
- Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	Rp	1.686.257.900,00
- Saldo sampai akhir tahun 2019 sebesar	Rp	63.742.100,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Walikota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

BPR Bank Pasar berfungsi sebagai lembaga penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan. Dari jumlah Rp1.750.000.000,00 digunakan untuk acara seremonial pencairan Garda Emas oleh Pemda sebesar Rp15.000.000,00 dan yang disalurkan ke masyarakat, berjumlah Rp1.735.000.000,00.

Berdasarkan data Rekapitulasi Tingkat Pengembalian Dana Bergulir Garda Emas dan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Prosus Taskin Garda Emas bulan Desember 2007 (dari PINBUK), sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah dana yang telah disalurkan, termasuk eks proyek/prosus taskin pada dinas (penyaluran oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial/BPMPS dan Dinas Perindagkop), serta dana yang digulirkan kembali dari pengembalian masyarakat, jumlah dana bergulir telah berkembang menjadi sebesar Rp6.115.584.678,00. Sejak tahun 2008 tidak ada lagi perguliran dana dari pengembalian dana bergulir.



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Saldo dana bergulir yang ada di masyarakat per 31 Desember 2009 terdiri dari 2 kategori, yaitu dana bergulir dengan kondisi macet sebesar Rp2.247.224.411,00 dan dana bergulir dengan kondisi masih dapat tertagih sebesar Rp63.742.100,00.

Terhadap dana bergulir dengan kondisi macet, sebagian debitor sedang diupayakan dilakukan proses penagihan atau penghapusannya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

(Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir disajikan pada Lampiran 25)

5.3.14. Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp 523.642.733.332,61	Rp 504.092.523.552,36
--	------------------------------	------------------------------

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau Cost Method dan Metode Ekuitas atau Equity Method.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp523.642.733.332,61 dengan rincian sebagai berikut:

- Modal yang telah disetor Rp 11.684.452.323,00 pada Bank BJB
- Modal yang telah disetor Rp 301.614.529.217,49 pada PDAM Kota Bogor
- Modal yang telah disetor Rp 63.273.818.526,85 pada BPR Bank Kota Bogor



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	Rp	5.611.872.158,71
- Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	Rp	141.458.061.106,56
Jumlah	Rp	523.642.733.332,61

(Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 26)

Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp11.684.452.323,00 merupakan setoran modal tunai sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian :

- Saldo Awal Penyertaan Modal Per 31 Desember 2018	Rp	11.684.452.323,00
- Modal disetor tahun 2019	Rp	0,00
Jumlah		11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah Go Public.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor sampai dengan 31



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Desember 2019 sebesar Rp 304.180.322.966,39 yang terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per Rp	288.343.093.386,49
31 Desember 2018	
- Penyertaan Modal 2019 Rp	10.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih 2019) Rp	22.956.170.831,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda Rp	(19.684.735.000,00)
Jumlah	Rp 301.614.529.217,49

Laporan Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 31 Desember 2019 disajikan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor ditetapkan menjadi Rp30.000.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2019 sebesar Rp 63.273.818.526,85 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per Rp	57.093.433.177,85
31 Desember 2018	
- Penyertaan Modal 2019 Rp	6.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas (50% x Laba Bersih 2019) Rp	4.400.997.986,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda Rp	4.220.612.637,00
Jumlah	Rp 63.273.818.526,85

Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2019



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

disajikan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Saldo Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.611.872.158,71 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019	Rp	5.531.182.412,21
- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih 2019)	Rp	80.689.746,50
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.611.872.158,71

Nilai penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.611.872.158,71 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum di Audit oleh Auditor Independen.

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, bangunan, serta peralatan & mesin	Rp	233.279.924.240,00
Jumlah	Rp	238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Perlatan 7 mesin	Rp	100.361.083.000,00

Sisa penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40.000.000.000,00 akan dianggarkan dan dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyertaan Modal berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin telah diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar Pakuan Jaya tetapi secara formal belum disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset.

Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 141.458.061.106,56 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2018	Rp	141.440.362.252,81
- Penyertaan Modal 2019	Rp	0,00
- Pengurang Ekuitas (55% x Rugi Bersih 2019)	Rp	175.836.003,75
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	158.137.150,00
Jumlah	Rp	141.458.061.106,56

Nilai penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2019 sebesar Rp141.458.061.106,56 tersebut



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh Auditor Independen.

(Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 26)

5.3.15. Aset Tetap Rp 7.093.013.218.195,33 Rp 6.805.408.855.781,46

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah 8.910.475.941.420,75 dan Rp8.414.180.484.418,36. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 (sebelum Penyusutan) Rp 8.414.180.484.418,36

Penambahan Rp 579.786.518.528,66

Penambahan sebesar Rp579.786.518.528,66 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Rp 501.033.407.778,00
- Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap Rp 109.161.780,63
- Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2019 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan Rp 276.112.484,00
- Dropping antar SKPD (BM) Rp 1.517.365.508,68
- Hibah Rp 4.791.920.643,01
- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 48.966.324.338,96
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 14.038.651.826,00
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi) Rp 352.963.220,38
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi) Rp 8.700.610.949,00

(Rincian penambahan aset tetap tersaji dalam lampiran 28 dan 29)



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Pengurangan	Rp	83.491.061.526,25
Pengurangan sebesar Rp83.491.061.526,25 terdiri dari :		
- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	1.517.365.508,68
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	48.966.324.338,96
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	1.675.008.997,42
- Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	625.185.000,00
- Belanja Modal tidak menjadi asset	Rp	6.892.784.948,68
- Kewajiban kepada pihak ketiga th 2019 yg asetnya telah diakui di tahun 2019	Rp	76.796.164,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	Rp	15.075.000,00
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	14.038.651.826,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	7.966.424.970,53
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	1.717.444.771,99
<i>(Rincian pengurangan aset tetap tersaji dalam lampiran 30 dan 31)</i>		
Saldo per 31 Desember 2019 (sebelum Penyusutan)	Rp	8.910.475.941.420,76
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.817.462.723.225,42)
Saldo per 31 Desember 2019 (Nilai Buku)	Rp	7.093.013.218.195,33



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

(Daftar rincian aset tetap disajikan dalam lampiran 27)

Aset Tetap tersebut terdiri dari:

5.3.16. Tanah Rp 4.767.414.421.962,63 Rp 4.749.339.012.961,63

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp4.767.414.421.962,63 dan Rp4.749.339.012.961,63. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 4.749.339.012.961,63

Penambahan Rp 18.160.329.001,00

Penambahan sebesar Rp18.160.329.001,00 terdiri

dari :

- Belanja Modal Tahun Rp 18.044.020.000,00
Anggaran 2019

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 116.309.000,00

- Koreksi belum tercatat Rp 1,00
(inventarisasi)

Pengurangan Rp 84.920.000,00

Pengurangan sebesar Rp. 84.920.000,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 84.920.000,00

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 4.767.414.421.962,63

5.3.17. Peralatan Mesin Rp 743.613.685.335,72 Rp 627.792.307.268,29

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp743.613.685.335,72 dan Rp627.792.307.268,29. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 627.792.307.268,29

Penambahan Rp 132.718.508.257,96



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Penambahan	sebesar	
Rp132.718.508.257,96	terdiri	
dari :		
- Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	99.754.707.372,00
- Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	Rp	109.161.780,63
- Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2019 yang asetnya Telah diakui	Rp	226.848.484,00
- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	1.184.605.667,00
- Hibah	Rp	972.528.000,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	18.504.426.908,95
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	3.087.085.900,00
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	178.533.197,38
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	8.700.610.948,00
Pengurangan	Rp	16.897.130.190,53
Pengurangan	sebesar	
Rp16.897.130.190,53	terdiri	
dari :		
- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	1.184.605.667,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	1.428.457.194,00
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi asset Ekstrakomtabel	Rp	1.623.924.770,92
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	5.970.984.859,68
- Kewajiban kepada pihak	Rp	76.796.164,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

ketiga th 2019 yg asetnya
telah diakui di tahun 2019

- Reklasifikasi ke Aset Rp	15.075.000,00
Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	
- Reklasifikasi antar KIB Rp	47.930.300,00
(Inventarisasi)	
- Reklasifikasi ke aset lainnya Rp	4.831.911.462,93
(Inventarisasi)	
- Penghapusan BMD dan Rp	1.717.444.771,99
Double Catat	

Saldo per 31 Desember 2019 743.613.685.335,72

5.3.18. Gedung Bangunan Rp 1.206.807.131.742,41 Rp 1.064.887.956.865,95

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp1.206.807.131.742,40 dan Rp1.064.887.956.865,95. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 1.064.887.956.865,95

Penambahan Rp 169.637.479.070,00

Penambahan sebesar
Rp169.637.479.070,00 terdiri
dari :

- Belanja Modal Tahun Rp	144.703.165.317,00
Anggaran 2019	
- Dropping antar SKPD (BM) Rp	329.802.081,00
- Hibah Rp	1.857.665.184,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp	17.953.856.489,00
- Reklasifikasi antar KIB Rp	4.618.559.976,00
(Inventarisasi)	
- Reklasifikasi dari aset lain- Rp	174.430.023,00
lain (inventarisasi)	



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Pengurangan Rp 27.718.304.193,54

Pengurangan sebesar
Rp27.718.304.193,54 terdiri
dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 21.057.180.868,95
- Belanja Modal tidak menjadi aset Rp 808.329.989,00
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 2.742.597.878,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi) Rp 3.110.195.457,59

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 1.206.807.131.742,41

5.3.19. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.124.872.812.527,01 Rp 1.904.629.267.613,01

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp2.124.872.812.527,01 dan Rp1.904.629.267.613,01. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 1.904.629.267.613,01

Penambahan Rp 246.238.466.290,01

Penambahan sebesar
Rp246.238.466.290,01 terdiri
dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Rp 235.965.307.071,00
- Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2019 yang asetnya Telah diakui Rp 49.264.000,00
- Hibah Rp 1.916.127.459,01
- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 2.022.692.110,00
- Reklasifikasi antar KIB Rp 6.285.075.650,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

(Inventarisasi)

Pengurangan Rp 25.994.921.376,01

Pengurangan sebesar
Rp25.994.921.376,01 terdiri
dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 25.952.738.876,01
- Belanja Modal tidak menjadi aset Rp 38.412.500,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya Rp 3.770.000,00

(Inventarisasi)

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 2.124.872.812.527,01

5.3.20. Aset Tetap lainnya Rp 9.905.925.846,82 Rp 9.114.028.408,32

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp9.905.925.846,82 dan Rp9.114.028.408,32. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 9.114.028.408,32

Penambahan Rp 2.684.047.578,68

Penambahan sebesar
Rp2.684.047.578,68 terdiri
dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Rp 2.566.208.018,00
- Dropping antar SKPD (BM) Rp 2.957.760,68
- Hibah Rp 45.600.000,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 21.351.500,00
- Reklasifikasi antar KIB Rp 47.930.300,00

(Inventarisasi)

Pengurangan Rp 1.892.150.140,18

Pengurangan sebesar
Rp1.892.150.140,18 terdiri dari



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

:

- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	332.759.841,68
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	443.027.400,00
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	51.084.226,50
- Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	625.185.000,00
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	75.057.600,00
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	344.488.022,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	20.548.050,00
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	9.905.925.846,82

5.3.21. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 57.861.964.006,16 Rp 58.417.911.301,16

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp 57.861.964.006,16 dan Rp58.417.911.301,16. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	58.417.911.301,16
Penambahan	Rp	10.347.688.331,01
Penambahan sebesar Rp10.437.688.331,01 terdiri dari :		
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	10.347.688.331,01
Pengurangan	Rp	10.903.635.626,00
Pengurangan sebesar Rp. 10.903.635.626,00 terdiri dari :		
- Reklasifikasi antar KIB	Rp	10.903.635.626,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

(Inventarisasi)

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 57.861.964.006,16

*Rincian Kontruksi dalam
Pengerjaan disajikan dalam
lampiran 32)*

5.3.22. Akumulasi Penyusutan Rp 1.817.462.723.225,42 Rp 1.608.771.628.636,89

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp(1.817.462.723.225,42) dan Rp(1.608.771.628.636,89). Mutasi Akumulasi Penyusutan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 1.608.771.628.636,89

Penambahan Rp 219.053.398.636,11

Penambahan sebesar Rp219.053.398.636,11 terdiri dari :

- Beban Penyusutan aset tetap Rp 253.277.223.410,75 tahun Anggaran Tahun 2019
- Koreksi Saldo Awal hasil Rp (34.223.824.774,64) inventarisasi berupa 1) Konversi Kode Barang lama ke Kode Barang baru sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016, 2) Koreksi Masa Manfaat yang melebihi masa manfaat awal, 3) koreksi belum tercatat dan 4) reklasifikasi dari aset lain lain ke aset tetap

Pengurangan Rp 10.362.304.047,58

Pengurangan Akumulasi penyusutan sebesar Rp(10.362.304.047,58) berasal dari Koreksi Saldo Awal



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

hasil inventarisasi berupa Reklasifikasi ke Aset Ekstra Komptabel, Reklasifikasi ke aset lainnya, Koreksi Nilai Perolehan, dan Penghapusan BMD karena penjualan lelang, aset tetap yang mengalami pencatatan ganda.

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 1.817.462.723.225,42

5.3.23. Aset Lainnya Rp 115.192.414.364,37 Rp 226.529.803.775,42

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 berjumlah Rp115.192.414.364,37 dan Rp226.529.803.775,42. Jumlah tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen yang telah sebelumnya yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp115.192.414.364,37 terdiri dari :

1. Tagihan Jangka Panjang

- Tagihan Penjualan Rp 876.360.088,00
Angsuran tanah (*lihat lampiran 33*)
- Tuntutan Ganti Kerugian Rp 2.390.327.776,00
Daerah (*lihat lampiran 34 dan 35*)

Jumlah Rp 3.266.687.864,00

2. Kemitraan dengan Pihak Rp 52.526.184.310,00
ketiga (*lihat lampiran 36*)

3. Aset Tak berwujud (*lihat lampiran 37*) Rp 13.345.818.781,80

Akumulasi amortisasi aset Rp (12.013.269.674,60)
tidak berwujud

4. Aset lain-lain. Nilai aset lain- Rp 175.679.958.444,04
lain terdiri atas aset rusak berat dan aset yang masih dalam proses penelusuran



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

(Aset Lainnya - Aset Lain-lain) (lihat lampiran 38 dan 39)

Akumulasi penyusutan Aset lainnya	Rp	(117.612.965.360,87)
Jumlah Aset Lainnya	Rp	115.192.414.364,37

5.3.24. Kewajiban Jangka Pendek Rp 47.905.717.439,53 Rp 33.042.922.985,83

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 Rp47.905.717.439,53 dan tahun 2018 sebesar Rp33.042.922.985,83 dengan Mutasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018,
yang terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	118.059.579,00
- Pendapatan diterima dimuka	Rp	1.657.035.105,14
- Utang Beban Pegawai	Rp	1.999.475.013,00
- Utang Beban Barang Jasa	Rp	5.843.735.462,00
- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	Rp	23.424.617.826,69

- Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018	Rp	33.042.922.985,83
- Penambahan tahun 2019	Rp	1.013.863.288.886,87
- Pengurangan tahun 2019	Rp	999.000.494.433,17
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	47.905.717.439,53

Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.905.717.439,53 terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (lihat lampiran 40)	Rp	268.757.122,00
--	----	----------------



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Utang Bunga (<i>lihat lampiran 41</i>)	Rp	155.902.381,00		
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	5.484.766.176,84		
- Pendapatan diterima dimuka (<i>lihat lampiran 42, 43 dan 44</i>)	Rp	1.705.986.062,69		
- Utang Beban Pegawai(<i>lihat lampiran 45</i>)	Rp	1.732.517.166,00		
- Utang Beban Barang Jasa(<i>lihat lampiran 45</i>)	Rp	6.444.154.165,00		
- Utang Jangka Pendek Lainnya (<i>lihat lampiran 46</i>)	Rp	31.833.732.382,00		
- Utang Pengadaan Aset Tetap (<i>lihat lampiran 47</i>)	Rp	279.901.984,00		
	Rp	47.905.717.439,53		
5.3.25. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	71.301.960.298,90	Rp	82.271.492.651,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.301.960.298,90 dan pada tahun 2018 sebesar Rp82.271.492.651,00 dengan mutasi tahun 2019 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	82.271.492.651,00
- Penambahan tahun 2019	Rp	2,74
- Pengurangan tahun 2019	Rp	10.969.532.354,84
- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	71.301.960.298,90

Kewajiban jangka panjang tersebut adalah Utang kepada Pemerintah Pusat berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusa n Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor : SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan.

Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

5.3.26. Ekuitas Rp 8.331.658.267.022,12 Rp 8.018.689.818.922,82

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.331.658.267.022,12 dan pada tahun 2018 sebesar Rp8.018.689.818.922,82 dengan perincian dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1. PENDAPATAN - LO **Rp 2.727.229.093.257,38** **Rp 2.436.413.072.665,23**

Saldo Pendapatan - LO tahun 2019 sebesar
Rp2.727.229.093.257,38 terdiri dari:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO **Rp 1.103.749.943.939,38** **Rp 978.398.728.172,62**

Saldo pendapatan asli daerah - LO
sebesar Rp1.103.749.943.939,38
terdiri dari:

● **Pendapatan Pajak Daerah-LO** **Rp 737.331.826.392,00** **Rp 621.558.560.112,00**

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO
sebesar Rp737.331.826.392,00

terdiri dari :

- Hotel - LO	Rp	93.660.497.712,00
- Losmen - LO	Rp	992.954.279,00
- Wisma Pariwisata - LO	Rp	1.064.782.239,00
- Restoran - LO	Rp	99.182.699.306,00
- Rumah Makan - LO	Rp	41.820.611.562,00
- Kafetaria - LO	Rp	11.903.693.993,00
- Jasa Boga/ Katering - LO	Rp	701.448.157,00
- Tontonan Film/Bioskop - LO	Rp	12.210.944.715,00
- Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana - LO	Rp	6.034.000,00
- Pameran - LO	Rp	1.000.000,00
- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	Rp	3.821.021.317,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

	Per	Per
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)

- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	Rp	238.710.082,00
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	Rp	14.111.410.468,00
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	Rp	2.631.342.340,00
- Pertandingan Olahraga - LO	Rp	1.600.000,00
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	Rp	9.768.587.551,00
- Pajak Reklame Kain - LO	Rp	1.112.946.093,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO		4.862.500,00
- Pajak Reklame Berjalan - LO	Rp	467.018.775,00
- Pajak Reklame Udara - LO	Rp	26.125.000,00
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	Rp	53.438.870.690,00
- Pajak Parkir - LO	Rp	15.400.849.046,00
- Pajak Air Tanah - LO	Rp	4.200.530.906,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	Rp	192.553.073.420,00
- BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	Rp	178.010.212.241,00

Jumlah	Rp	737.331.826.392,00
---------------	-----------	---------------------------

● **Pendapatan Retribusi Daerah - LO** Rp **53.875.569.216,84** Rp **47.342.141.425,47**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp53.875.569.216,84 terdiri dari:

- Pelayanan kesehatan di	Rp	9.240.614.647,00
--------------------------	----	------------------



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Puskesmas - LO		
- Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	Rp	10.314.145.250,00
Sementara - LO		
- Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	Rp	570.265.625,00
- Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Rp	2.716.141.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	Rp	478.347.600,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	Rp	21.717.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	Rp	22.521.200,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	Rp	753.811.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	Rp	332.964.400,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	Rp	23.908.800,00
- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	Rp	91.794.500,00
- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Rp	182.050.000,00
- Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga - LO	Rp	30.696.720,00
- Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	Rp	150.887.600,00
- Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	Rp	6.289.035.067,00



	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

- Kendaraan Bermotor - LO	Rp	131.000.000,00
- Tempat Kegiatan Usaha - LO	Rp	14.255.000,00
- Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	Rp	732.533.000,00
- Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	Rp	150.281.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	Rp	47.489.500,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	Rp	517.868.640,00
- Pelayanan Tempat Olahraga - LO	Rp	1.282.452.500,00
- Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	Rp	19.052.487.244,00
- Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	Rp	318.137.500,00
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	Rp	410.162.823,84
Jumlah	Rp	53.875.569.216,84

● **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO sebesar Rp31.792.054.691,25 adalah :

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	Rp	31.792.054.691,25
--	----	-------------------



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Bagian Laba Bank BJB	Rp	4.178.360.124,00		
Bagian Laba PDAM Tirta Pakuan	Rp	22.956.170.831,00		
Bagian Laba BPR Bank Kota	Rp	4.400.997.986,00		
Bagian Laba PD Pasar Pakuan	Rp	175.836.003,75		
Bagian Laba PD Jasa Transportasi	Rp	80.689.746,50		
Jumlah	Rp	31.792.054.691,25		
• Lain-lain PAD Yang Sah-LO	Rp	280.750.493.639,29	Rp	282.833.340.735,73
Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp280.750.493.639,29 terdiri dari:				
- Hasil Penjualan Tanah - LO	Rp	7.961.600,00		
- Jasa Giro Kas Daerah - LO	Rp	12.092.879.929,00		
- Jasa Giro Kas Bendahara - LO	Rp	462.019.569,00		
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	Rp	2.718.909,00		
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	Rp	112.765.603,00		
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	Rp	264.000,00		
- Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	Rp	240.144.733,00		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	187.798.416,32		



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Restoran - LO	
- Pendapatan Denda Pajak Rp	31.526.079,00
Hiburan - LO	
- Pendapatan Denda Pajak Rp	474.089.377,50
Reklame - LO	
- Pendapatan Denda Pajak Rp	75.364.444,00
Parkir - LO	
- Pendapatan Denda Pajak Air Rp	46.163.794,00
Tanah - LO	
- Pendapatan Denda Pajak Rp	22.479.703.577,00
Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan-LO	
- Pendapatan Denda Bea Rp	48.540.864,00
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
- Pendapatan Denda Retribusi Rp	652.758,00
Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
- Pendapatan Denda Retribusi Rp	110.176.998,00
Izin Mendirikan Bangunan - LO	
- Pendapatan Denda Atas Rp	7.000.000,00
Pelanggaran Perda - LO	
- Pendapatan Dari Rp	3.450.887.877,00
Pengembalian Lainnya - LO	
- Hasil dari Pemanfaatan - Rp	361.725.000,00
Kekayaan Daerah Sewa - LO	
- Hasil dari Pemanfaatan Rp	586.485.863,00
Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	
- Pendapatan Jasa Layanan Rp	185.565.647.289,61
Umum BLUD - LO	
- Pendapatan Lain-lain BLUD - Rp	2.526.385.074,86



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

LO

- Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	1.135.956.092,00
Lainnya - LO		
- Pendapatan Dana Kapitasi	Rp	44.165.589.650,00
JKN - LO		
- Penerusan Pinjaman kepada	Rp	6.578.046.142,00
PDAM Tirta Pakuan - LO		
Jumlah	Rp	280.750.493.639,29

5.4.1.2. Pendapatan Transfer Rp 1.518.694.889.156,00 Rp 1.344.449.259.953,00

Pendapatan Transfer - Dana
Perimbangan - LO sebesar
Rp1.518.694.889.156,00 terdiri :

**• Pendapatan Transfer Rp 1.169.426.692.106,00 Rp 1.066.762.734.201,00
Pemerintah Pusat - LO**

Pendapatan Transfer-
Pemerintah Pusat - LO sebesar
Rp1.169.426.692.106,00

terdiri dari:

**- Bagi Hasil Pajak- LO sebesar
Rp73.935.800.682,00**

dengan rincian :

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Rp 5.658.009.934,00
Bangunan Sektor
Pertambangan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Rp 1.091.207.802,00
Bangunan Sektor Perkebunan -
LO

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 Rp 43.260.104.936,00
dan Pasal 29 WP Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal
21 - LO



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	Rp	4.712.209.492,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	Rp	19.214.268.518,00
Jumlah	Rp	73.935.800.682,00
- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LO sebesar Rp49.082.597.889,00 dengan rincian :		
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	Rp	50.933.774,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO		9.223.446,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	Rp	764.460.992,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	Rp	13.618.334.718,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO		340.322.620,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	Rp	33.792.348.697,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LO	Rp	506.973.642,00
Jumlah	Rp	49.082.597.889,00
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp856.516.761.000,00 dengan rincian :		
Dana Alokasi Umum (Rutin)	Rp	813.779.065.000,00
DAU Tambahan	Rp	25.169.384.000,00
DAU Tambahan terkait PBI	Rp	17.568.312.000,00
Jumlah	Rp	856.516.761.000,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Dana Alokasi Khusus (DAK)			
sebesar			
Rp189.891.532.535,00			
dengan rincian :			
DAK Bidang Infrastrukt	Air	Rp	1.164.852.909,00
Minum - LO			
DAK Bidang Infrastrukt		Rp	1.717.500.000,00
Sanitasi- LO			
DAK Bidang Keluarga		Rp	6.065.751.720,00
Berencana - LO			
DAK Bidang Kesehatan - LO		Rp	21.297.141.095,00
DAK Bidang Perdagangan -			1.413.070.000,00
LO			
DAK Non Fisik-LO		Rp	158.233.216.811,00
Jumlah		Rp	189.891.532.535,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO sebesar Rp41.073.011.000,00			
- Dana Insentif daerah - LO		Rp	41.073.011.000,00
Jumlah		Rp	41.073.011.000,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp252.258.206.150,00 terdiri dari :			



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	252.258.206.150,00		
- LO				
Jumlah	Rp	252.258.206.150,00		
• Bantuan Keuangan - LO	Rp	55.936.979.900,00	Rp	26.031.179.400,00
Bantuan Keuangan - LO sebesar Rp55.936.979.900,00 terdiri dari:				
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	55.936.979.900,00		
- LO				
Jumlah	Rp	55.936.979.900,00		
5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	Rp	104.784.260.162,00	Rp	113.565.084.539,61
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp104.784.260.162,00. Saldo lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO terdiri dari:				
• Pendapatan Hibah - LO				
Pendapatan hibah -LO sebesar Rp104.784.260.162,00,00 terdiri dari:				
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	Rp	16.235.620.162,00		
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	Rp	220.000.000,00		
- Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	Rp	88.328.640.000,00		
Jumlah	Rp	104.784.260.162,00		

(dapat dilihat pada lampiran 50)



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.4.2. BEBAN **Rp 2.337.325.981.869,93 Rp 2.295.506.995.908,63**

Beban LO tahun 2019 sebesar Rp2.337.325.981.869,93. Saldo Beban LO terdiri dari:

5.4.2.1. Beban Pegawai-LO **Rp 1.181.752.537.782,00 Rp 1.108.594.976.025,00**

Beban pegawai-LO sebesar Rp1.181.752.537.782,00 terdiri dari:

- Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		357.505.742.394,00
- Beban Tunjangan Keluarga - LO	Rp	33.233.608.896,00
- Beban Tunjangan Jabatan - LO	Rp	8.405.465.388,00
- Beban Tunjangan Fungsional - LO	Rp	21.897.052.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	Rp	6.199.634.680,00
- Beban Tunjangan Beras - LO	Rp	17.737.838.450,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	Rp	1.270.736.541,00
- Beban Pembulatan Gaji - LO	Rp	5.188.875,00
- Beban iuran Jaminan Kesehatan - LO	Rp	10.035.878.330,00
- Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	Rp	26.933.025,00
- Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	Rp	26.933.025,00
- Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	Rp	7.201.425,00
- Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	Rp	14.265.825,00
- Beban Tunjangan Perumahan - LO	Rp	10.410.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

LO	
- Beban Gaji Pokok/Uang Representasi DPRD - LO	Rp 1.026.795.000,00
- Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	Rp 133.177.800,00
- Beban Tunjangan Jabatan DPRD-LO	Rp 1.488.852.750,00
- Beban Tunjangan Beras DPRD - LO	Rp 142.594.980,00
- Beban Tunjangan PPH/Khusus DPRD - LO	Rp 247.819,00
- Beban iuran Jaminan Kesehatan DPRD - LO	Rp 68.287.941,00
- Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LO	Rp 2.120.076,00
- Beban iuran Jaminan Kematian DPRD - LO	Rp 6.360.228,00
- Beban Uang Paket DPRD - LO	Rp 88.336.500,00
- Beban Tunjangan Komisi DPRD - LO	Rp 52.343.550,00
- Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO	Rp 6.132.000.000,00
- Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD - LO	Rp 406.665.000,00
- Beban Tunjangan Reses	Rp 1.381.800.000,00
- Beban Pembulatan Gaji Walikota/Wakil walikota	Rp 480,00
- Beban iuran Jaminan Kematian - LO	Rp 2.199.728.849,00
- Beban iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp 733.243.888,00
- Beban Gaji Pokok Walikota dan wakil walikota - LO	Rp 54.600.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Tunjangan Keluarga Walikota/ Wakil Walikota	Rp 7.644.000,00
- Tunjangan jabatan Walikota / Wakil walikota	Rp 98.280.000,00
- Tunjangan beras Walikota / Wakil walikota	Rp 6.952.320,00
- Tunjangan PPH Walikota / Wakil walikota	Rp 827.552,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	Rp 301.431.506.586,00
- Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	Rp 128.459.066.940,00
- Beban Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	Rp 172.575.000,00
- Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	Rp 360.360.000,00
- Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	Rp 1.416.000.000,00
- Beban Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp 8.158.500.000,00
- Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	Rp 25.425.320.280,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 10.674.444.500,00
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - LO	Rp 1.225.415.000,00
- Beban Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa - LO	Rp 25.600.000,00
- Beban Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap - LO	Rp 92.450.591.441,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	Rp 29.212.203.604,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Honorarium Moderator / Rp	155.900.000,00
MC / Pembaca Doa - LO	
- Honor Pejabat Negara Rp	33.000.000,00
- Beban Uang Lembur PNS - LO Rp	1.284.532.000,00
- Beban Uang Lembur Non PNS - Rp	1.065.658.000,00
LO	
- Beban Honorarium Pengelola Rp	36.273.535.838,00
Dana BOS - LO	
- Beban Pegawai BLUD - LO Rp	63.120.491.006,00
Jumlah	Rp 1.181.752.537.782,00

5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa-LO Rp 729.719.621.848,63 Rp 674.212.023.607,04

Beban Barang dan Jasa-LO sebesar Rp729.719.621.848,63

terdiri dari:

Beban Persediaan Rp 176.283.167.046,07

Beban Persediaan sebesar Rp189.899.587.282,94 terdiri dari:

- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Rp	17.897.698.191,69
- Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp	12.125.904.007,00
- Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp	13.098.000,00
- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp	3.856.218.925,75
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp	10.036.085.304,00
- Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp	56.582.500,00
- Beban Persediaan Pengisian Isi Rp	55.345.980,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Tabung Gas		
- Beban Persediaan Kit Pelatihan	Rp	101.440.000,00
- Beban Persediaan Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	Rp	5.600.697.998,00
- Beban Persediaan Bahan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	Rp	2.796.084.752,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Pertanian/ Perkebunan/ Kehutanan	Rp	760.942.396,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Peternakan/Perikanan	Rp	99.254.800,00
- Beban Persediaan Plakat/Vandel /Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	Rp	2.658.341.251,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Rp	4.701.430.775,46
- Beban Dokumentasi	Rp	288.683.374,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja /Perlengkapan SAR	Rp	397.894.600,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Tukang	Rp	1.083.097.698,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Rp	1.532.584.102,00
- Beban Kompensasi Penghapusan Becak	Rp	182.000.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Ibadah	Rp	9.450.000,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Olah Raga	Rp	940.347.592,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai	Rp	12.342.602.439,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Habis Sekolah		
- Beban Persediaan Habis Pakai	Rp	369.418.002,00
- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	Rp	15.829.450.585,00
- Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	Rp	1.529.254.100,00
- Beban Persediaan Bibit Ternak	Rp	14.500.000,00
- Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	Rp	48.100.697.677,00
- Beban Persediaan Bahan Kimia	Rp	4.706.035.432,00
- Beban Persediaan Makanan Pokok	Rp	4.553.953.669,17
- Beban Bahan Percontohan/Praktek	Rp	562.812.600,00
- Beban Pakan Ternak/Hewan	Rp	112.980.000,00
- Beban Bahan Pupuk	Rp	124.802.000,00
- Beban Bahan Pengemasan/Packing Barang	Rp	35.090.000,00
- Beban Bahan Plat Uji/Registrasi	Rp	243.852.400,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	Rp	104.207.636,00
- Beban Cetak	Rp	15.462.332.859,00
- Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp	361.821.240,00
- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp	174.267.500,00
- Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp	351.476.400,00
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	210.045.000,00
- Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp	349.209.375,00
- Beban Pakaian Dinas Resmi (PSR)	Rp	210.276.000,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Pakaian kerja lapangan	Rp	2.947.366.095,00
- Beban Pakaian Kerja Staf	Rp	244.557.150,00
- Beban Pakaian Adat Daerah	Rp	110.365.000,00
- Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp	98.805.000,00
- Beban Pakaian Olahraga	Rp	400.388.800,00
- Beban Pakaian Event	Rp	542.461.000,00
- Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	Rp	996.956.840,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat berupa :		
Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Pabaton Kec. Bogor Tengah	Rp	98.100.000,00
Paket Hibah Sarana dan Prasarana Pos Ronda (Kec. Bogor Tengah)	Rp	123.200.000,00
Kelengkapan dan Instalasi Multimedia Kepada Pengadilan Negeri Kota Bogor	Rp	720.656.840,00
Pemberian Kecamatan bagi siswa Sekolah Dasar dan menengah oleh Dinas Kesehatan		55.000.000,00
- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga (Bantuan Sosial)	Rp	842.198.250,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga (Bantuan Sosial) berupa :		



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Bantuan Perlengkapan Sekolah dan perlengkapan Rumah Tangga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	60.103.250,00
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa oleh Dinas Pendidikan	Rp	37.500.000,00
Bantuan Modal Usaha bagi WRSE oleh Dinas Sosial		34.595.000,00
Hibah Septik tank Individu oleh Dinas PUPR		710.000.000,00
- Beban Barang Dana BOS Daerah	Rp	9.571.040.843,00
- Beban Barang dan Jasa Dana BLUD	Rp	3.203.181.143,87
Beban Jasa	Rp	357.172.129.500,90
Beban Jasa sebesar Rp357.172.129.500,90 terdiri dari:		
- Beban Jasa telepon	Rp	1.032.151.926,00
- Beban Jasa air	Rp	4.213.619.236,00
- Beban Jasa listrik	Rp	44.455.840.612,00
- Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	Rp	5.000.000,00
- Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp	1.844.803.850,00
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet	Rp	4.442.778.201,00
- Beban Jasa Paket/Pengiriman	Rp	58.457.000,00
- Beban Jasa Sertifikasi	Rp	1.402.722.842,00
- Beban Jasa Transaksi Keuangan	Rp	32.600.000,00
- Beban Jasa Penerangan/Iklan/ Reklame/Fotografi/Film	Rp	5.509.127.500,00
- Beban Jasa Kesehatan/	Rp	94.306.248.739,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Kedokteran		
- Beban Jasa Kebersihan	Rp	3.682.022.315,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara/ Event Organize	Rp	3.055.940.758,00
- Beban Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	Rp	102.287.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Pengajar -PNS	Rp	2.707.452.440,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/ Pengajar-Non PNS	Rp	20.165.494.328,00
- Beban Jasa Keamanan	Rp	3.726.241.500,00
- Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan		144.880.494,00
- Beban jasa administrasi perkantoran	Rp	13.156.171.952,00
- Beban Jasa Pengurusan Jenazah	Rp	32.800.000,00
- Beban Iuran Keanggotaan Pemerintah	Rp	191.205.725,00
- Beban Jasa Teknologi Informasi (IT)	Rp	2.553.885.125,00
- Beban Jasa Bantuan Hukum	Rp	246.085.000,00
- Beban Jasa Angkut		196.310.000,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	Rp	63.876.947.593,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Rp	963.284.145,90
- Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	Rp	419.259.525,00
- Beban Penggandaan	Rp	12.458.094.194,00
- Beban Penjilidan	Rp	462.974.133,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	Rp	1.673.197.612,00
- Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	Rp	234.250.000,00
- Beban Sewa Tempat Parkir/ Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	Rp	12.110.000,00
- Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp	689.673.346,00
- Beban Sewa Meja Kursi	Rp	468.777.500,00
- Beban Sewa Komputer dan Printer	Rp	145.581.000,00
- Beban Sewa Proyektor	Rp	7.200.000,00
- Beban Sewa Generator	Rp	322.538.400,00
- Beban Sewa Tenda/Stand/Panggung	Rp	2.267.114.375,00
- Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Rp	95.000.000,00
- Beban Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	Rp	1.042.917.600,00
- Beban Sewa Alat Penerangan	Rp	17.000.000,00
- Beban Sewa Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner	Rp	144.431.132,00
- Beban Sewa Alat Komunikasi	Rp	96.195.000,00
- Beban Sewa Alat Peraga/Praktek/Pelatihan	Rp	12.500.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dekorasi Interior/Eksterior	Rp	190.968.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan	Rp	3.200.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	Rp	2.113.860.437,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Harian Pegawai

- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	10.702.646.605,00
- Beban Makanan dan Minuman Tamu	Rp	4.420.403.722,00
- Beban makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	Rp	12.183.630.091,00
- Beban Makanan dan Minuman Pasien/Atlit/Panti	Rp	16.200.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Piket/Jaga	Rp	1.043.016.600,00
- Beban Makanan dan Minuman Lembur	Rp	29.164.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Penelitian	Rp	7.309.926.750,00
- Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	Rp	3.222.427.500,00
- Beban Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan	Rp	328.429.919,00
- Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Seni dan Budaya	Rp	363.171.500,00
- Beban Jasa konsultansi Penilaian/Appraisal	Rp	15.500.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Perancangan/Design	Rp	5.990.742.533,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp	1.300.811.425,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	Rp	10.000.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	Rp	38.000.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	Rp	21.000.000,00
- Beban Kursus-kursus Singkat/	Rp	8.742.520.720,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Pelatihan		
- Beban Sosialisasi	Rp	232.047.700,00
- Beban Bimbingan Teknis	Rp	1.727.659.000,00
- Beban Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	Rp	4.493.630.900,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp	100.314.121.209,00
Beban perjalanan dinas sebesar Rp100.314121.209,00 terdiri dari:		
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	20.077.485.714,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	61.779.345.213,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp	18.457.290.282,00
Beban Pemeliharaan	Rp	82.333.783.855,79
Beban Pemeliharaan sebesar Rp 82.333.783.855,79 terdiri dari:		
- Beban Jasa Service	Rp	3.376.479.244,00
- Beban Penggantian Suku Cadang	Rp	9.765.756.362,00
- Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Rp	13.284.154.621,00
- Beban Jasa KIR	Rp	240.000,00
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	270.572.600,00
- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp	502.229.763,00
- Beban Perlengkapan Kendaraan Operasional	Rp	30.490.000,00
- Beban Pemeliharaan Tanah	Rp	1.678.969.490,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	8.937.935.827,79



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	25.179.431.743,00		
- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	9.493.509.251,00		
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.660.811.300,00		
- Beban Pemeliharaan Bukan Gedung dan Bangunan	Rp	6.678.326.854,00		
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel	Rp	1.446.402.500,00		
- Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp	24.775.300,00		
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	Rp	3.699.000,00		
5.4.2.3. Beban Bunga - LO	Rp	8.123.548.025,63	Rp	6.598.058.977,83
Beban Bunga - LO sebesar Rp8.123.548.025,63 terdiri dari:				
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Rp	6.578.046.142,00		
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Rp	1.545.501.883,63		
Jumlah	Rp	8.123.548.025,63		
5.4.2.4. Beban Hibah - LO	Rp	79.149.334.000,00	Rp	176.349.861.743,00
Beban Hibah - LO sebesar Rp79.149.334.000,00 terdiri dari:				
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp	14.834.084.000,00		
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp	32.264.300.000,00		
- Beban Hibah Dana BOS ke	Rp	5.635.000.000,00		



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota			
- Beban Hibah Satuan Pendidikan Menengah	Rp	9.875.550.000,00	
- Beban Hibah Bidang BOP PAUD	Rp	7.738.800.000,00	
- Beban Hibah BOP Penyelenggara-an Pendidikan kesetaraan	Rp	8.801.600.000,00	
Jumlah	Rp	79.149.334.000,00	
5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial-LO	Rp	46.743.921.755,00	Rp 42.615.654.251,00
Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp46.743.921.755,00 adalah:			
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sebesar Rp46.743.921.755,00 terdiri dari :			
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rp	33.453.880.005,00	
- Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Rp	10.489.000.000,00	
- Bantuan Tidak Terencana (BTT)	Rp	2.801.041.750,00	
Jumlah	Rp	46.743.921.755,00	
5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	254.507.759.244,57	Rp 259.196.841.952,85
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp254.507.759.244,57terdiri dari:			
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	Rp	5.427.272.152,45	
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	Rp	126.354.360,12	



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	Rp	794.198.297,13
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	15.876.850.724,85
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp	899.990.350,00
- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp	74.548.059,93
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	Rp	209.499.153,27
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp	492.112.946,06
- Beban Penyusutan Alat Ukur	Rp	1.377.667.947,03
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan	Rp	595.604.550,31
- Beban Penyusutan Alat Kantor	Rp	8.609.436.784,63
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	Rp	15.046.164.668,75
- Beban Penyusutan Komputer	Rp	18.510.602.164,27
- Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	2.216.901.766,08
- Beban Penyusutan Alat Studio	Rp	1.015.116.191,65
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi	Rp	1.249.473.182,65
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	Rp	280.079.576,19
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran	Rp	14.767.502.641,90
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan	Rp	62.983.041,14
- Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	Rp	4.861.058.761,12



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp	1.421.254.166,42
- Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp	238.544.005,35
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Rp	33.639.109,54
- Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Rp	333.202.867,56
- Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp	18.284.640,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	479.200.281,43
- Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp	13.858.073,67
- Beban Penyusutan Senjata Api	Rp	4.572.730,01
- Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	Rp	37.577.575,50
- Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp	1.907.396.308,56
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	22.176.054.684,48
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	1.022.597.481,47
- Beban Penyusutan Bangunan Menara	Rp	2.560.155,97
- Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	Rp	74.904.964,73
- Beban Penyusutan Bangunan Candi		320.635,36
- Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	243.843.956,85



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

- Beban Penyusutan Jalan	Rp	73.727.208.631,72
- Beban Penyusutan Jembatan	Rp	978.155.543,37
- Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	Rp	560.126.557,44
- Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	Rp	55.455.031,94
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	Rp	596.683.293,44
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	52.154.461.219,49
- Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	556.137.982,51
- Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	Rp	1.528.675.087,77
- Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	Rp	511.840.416,11
- Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp	4.433.174,63
- Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	Rp	1.331.759.965,22
- Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	Rp	155.188.102,37
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	Rp	232.131.328,90
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	Rp	7.452.846,25
- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	Rp	16.072.977,25
- Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	Rp	362.488.317,84
- Beban Penyusutan Jaringan	Rp	41.406.348,66



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Listrik			
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon	Rp	4.724.131,00	
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp	1.182.129.332,20	
Jumlah	Rp	254.507.759.244,57	
5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang	Rp	28.865.157.244,54	Rp 18.136.105.750,31
Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp28.865.157.244,54 terdiri dari:			
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp	18.398.677.525,59	
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	214.947.062,41	
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	9.857.495.809,30	
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	394.036.847,24	
Jumlah	Rp	28.865.157.244,54	
5.4.2.8. Beban lain-lain	Rp	6.468.248.950,55	Rp 6.086.606.477,60
Beban Lain-lain pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.468.248.950,55.			
- Beban lain-lain ini berasal dari Aset Tetap yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi atau yang tidak diakui sebagai aset.			



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.4.2.9 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	Rp 1.023.845.129,00	Rp 2.717.245.904,00
--	----------------------------	----------------------------

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.023.845.129,00 merupakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cijujung, Pemerintah Desa Galuga dan Pemerintah Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sesuai Keputusan Walikota Bogor Nomor: 658.1.45-348 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Penetapan Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampai Galuga pada Tahun Keempat (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).

- Pemerintah Desa Cijujung Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	307.153.539,00
- Pemerintah Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	563.114.821,00
- Pemerintah Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	153.576.769,00
Jumlah	Rp	1.023.845.129,00



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

5.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	972.007.890,00	Rp	999.621.220,00
Beban Transfer pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp972.007.890,00 terdiri dari :				
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik sebagai berikut :				
- DPC PKB	Rp	48.529.544,00		
- DPC PPP	Rp	90.517.200		
- DPC Gerindra	Rp	129.007.022,00		
- DPC Hanura	Rp	65.274.919,00		
- DPC Demokrat	Rp	107.152.342,00		
- DPD PKS	Rp	129.111.710,00		
- DPC PDI Perjuangan	Rp	210.906.887,00		
- DPC Partai Bulan Bintang	Rp	39.792.679,00		
- DPC Partai Golkar	Rp	151.715.587,00		
Jumlah	Rp	972.007.890,00		
5.4.3. POS LUAR BIASA	Rp	9.455.600,00	Rp	1.557.079.950,00
5.4.3.1. Pos Luar Biasa LO tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp9.455.600,00 dan Rp1.557.079.950,00. Saldo Pos Luar Biasa LO terdiri dari:				
●Beban tak terduga terdiri dari :				
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB atas nama Andhika Pramudita sesuai	Rp	9.455.600,00		



Per	Per
31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)

Keputusan Walikota Bogor
Nomor 900.45- 289 Tahun 2019
tanggal 19 September 2019.

Jumlah	Rp	<u>9.455.600,00</u>		
Surplus / Defisit - LO	Rp	389.893.655.787,45	Rp	139.348.996.806,60



5.5. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2. Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3. Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.

3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4. Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp277.909.444.202,19 dan Rp256.682.642.282,52. Setelah terdapat koreksi saldo awal, maka saldo awal kas sebesar Rp256.660.403.509,52. Koreksi saldo awal terjadi karena kesalahan penyajian saldo akhir di BUD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.238.773,00 yang disebabkan karena penambahan atas selisih jasa giro tahun 2016 yang belum dicatat senilai Rp928.121, pengurangan atas koreksi kas karena ada penyetoran jasa giro 2018 senilai Rp20.548.894 dan pengurangan atas koreksi saldo awal kas FKTP atas jasa giro PKM Mulyaharja yang belum tercatat di thn 2018, dan telah disetorkan pada tahun 2019 senilai Rp2.618.000. Kas per 31 Desember 2019 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp256.115.222.198,00; Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2019 sebesar Rp153.905.685,00; Kas di FKTP (Puskesmas) sebesar Rp9.337.552.993,00 termasuk didalamnya utang PFK sebesar



Rp5.221.325,00; Kas di Bendahara BOS Rp4.195.093.659,00 tidak termasuk didalamnya jasa giro sebesar Rp34.562.757,00; dan Kas di BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sebesar Rp8.107.669.667,19 termasuk didalamnya utang PFK tahun 2018 sebesar Rp263.535.797,00. Posisi Kas di BUD mengalami kenaikan sebesar Rp21.249.040.692,67 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari:

1.	Aktivitas Operasi	Rp.	2.559.814.450.908,86
2.	Aktivitas Investasi	Rp.	42.756.885,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	145.237.547.127,00
4.	Aktivitas Transitoris	Rp.	152.311.626.278,34
	Jumlah	Rp.	2.857.406.381.199,20

Arus Kas Keluar dari:

1.	Aktivitas Operasi	Rp.	2.027.467.395.160,19
2.	Aktivitas Investasi	Rp.	501.033.407.778,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	155.495.608.833,00
4.	Aktivitas Transitoris	Rp.	152.160.928.735,34
	Jumlah	Rp.	2.836.157.340.506,53

Sehingga Kenaikan Kas adalah:

1.	Arus Kas Masuk	Rp.	2.857.406.381.199,20
2.	Arus Kas Keluar	Rp.	2.836.157.340.506,53
	Jumlah	Rp.	21.249.040.692,67

5.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp**532.340.486.887,67** yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut :

Arus Masuk Kas	Rp.	2.559.814.450.908,86
Arus Keluar kas	Rp.	2.027.467.395.160,19
Kenaikan Arus Kas Bersih	Rp.	532.347.055.748,67

**5.5.5.1 Arus Masuk Kas**

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp2.559.814.450.908,86** terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah	Rp	689.543.006.040,00
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	51.362.153.192,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	28.241.844.911,00
Lain-lain PAD yang Sah	Rp	246.694.455.891,86
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	53.495.246.384,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	24.159.177.895,00
Dana Alokasi Umum	Rp	838.948.449.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp	189.891.532.535,00
Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Dana Penyesuaian	Rp	41.073.011.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	252.139.954.160,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Pendapatan Hibah	Rp	88.328.640.000,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp	0,00
Penerimaan Lainnya	Rp	55.936.979.900,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.559.814.450.908,86

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp689.543.006.040,00** terdiri dari :

- Pajak Hotel Bintang Empat	Rp	39.225.061.307,00
- Pajak Hotel Bintang Tiga	Rp	40.193.666.879,00
- Pajak Hotel Bintang Dua	Rp	7.831.426.323,00
- Pajak Hotel Bintang Satu	Rp	2.764.506.510,00



- Pajak Hotel Melati Tiga	Rp	302.255.641,00
- Pajak Hotel Melati Dua	Rp	1.823.678.750,00
- Pajak Hotel Melati Satu	Rp	1.048.850.807,00
- Pajak Losmen/penginapan/Kost	Rp	992.954.279,00
- Pajak Wisma Pariwisata	Rp	1.064.782.239,00
- Pajak Restoran	Rp	99.041.422.009,00
- Pajak Rumah Makan	Rp	41.820.611.562,00
- Pajak Kafetaria	Rp	11.903.693.993,00
- Pajak Katering	Rp	701.448.157,00
- Pajak Tontonan Film/Bioskop	Rp	12.206.815.465,00
- Pajak Kesenian/Musik/Tari/Busana	Rp	6.034.000,00
- Pajak Pameran	Rp	1.000.000,00
- Pajak Diskotik	Rp	0,00
- Pajak Karaoke	Rp	3.821.021.317,00
- Pajak Permainan Bilyar	Rp	227.657.690,00
- Pajak Permainan Bowling	Rp	11.052.392,00
- Pajak Permainan Ketangkasan	Rp	14.111.410.468,00
- Pajak Panti Pijat / Refleksi	Rp	302.601.380,00
- Pajak Mandi Uap/Spa	Rp	312.259.651,00
- Pajak Pusat Kebugaran	Rp	2.016.481.309,00
- Pajak Pertandingan Olahraga	Rp	1.600.000,00
- Pajak Reklame Papan/Bilboard/ Videotron/Megatron	Rp	10.083.995.108,00
- Pajak Reklame Kain	Rp	1.088.853.973,00
- Pajak Reklame Melekat//Stiker	Rp	4.862.500,00
- Pajak Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan)	Rp	490.468.750,00
- Pajak Reklame Udara	Rp	39.875.000,00
- Pajak Penerangan Jalan	Rp	53.438.870.690,00
- Pajak Parkir	Rp	15.424.581.199,00
- Pajak Air Tanah	Rp	4.665.857.092,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	178.010.212.241,00



- PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp	144.563.137.359,00
Jumlah	Rp	689.543.006.040,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp51.362.153.192,00** terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	9.129.454.647,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp	10.314.145.250,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat	Rp	570.265.625,00
- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp	2.716.141.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Rp	478.347.600,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	Rp	21.717.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	Rp	22.521.200,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick up	Rp	753.811.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Rp	332.964.400,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Rp	23.908.800,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	91.794.500,00
- Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang	Rp	150.887.600,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewa Tanah	Rp	5.458.829.990,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	Rp	131.000.000,00
- Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha	Rp	14.255.000,00
- Retribusi Terminal- Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal	Rp	732.533.000,00



- Retribusi Tempat Khusus parkir	Rp	150.281.000,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Rp	182.050.000,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sebelum di Potong	Rp	47.489.500,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sesudah di Potong	Rp	517.868.640,00
- Retribusi PelayananTempat Olahraga	Rp	1.282.452.500,00
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	Rp	30.696.720,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	17.517.398.120,00
- Retribusi Izin Trayek	Rp	318.137.500,00
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Rp	373.201.000,00
Jumlah	Rp.	51.362.153.192,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **Rp28.241.844.911,00** terdiri dari:

- Bagian Laba PDAM Kota Bogor	Rp	19.684.735.000,00
- Bagian Laba Perumda Bank Kota Bogor	Rp	4.220.612.637,00
- Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	Rp	4.178.360.124,00
- Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	Rp	158.137.150,00
Jumlah	Rp	28.241.844.911,00

Arus masuk kas dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp246.694.455.891,86** terdiri dari:

- Jasa Giro Daerah	Rp	12.092.879.929,00
- Jasa Giro Pemegang Kas	Rp	437.716.676,00
- Kerugian Barang	Rp	49.303.200,00
- Bidang Pendidikan	Rp	2.718.909,00



- Bidang Perhubungan	Rp	264.000,00
- Bidang Pekerjaan Umum	Rp	112.765.603,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	221.012.084,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	270.871.354,00
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	30.875.228,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	385.889.496,00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	78.288.131,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	Rp	46.979.637,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	5.171.698.804,00
- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp	48.540.864,00
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	39.273.363,00
- Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	Rp	3.450.887.877,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	Rp	499.973.400,00
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	Rp	169.046.816.470,00
- Pendapatan lain-lain BLUD	Rp	2.526.385.074,86
- Kontribusi Kebun Raya Bogor	Rp	1.134.955.000,00
- Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	44.165.589.650,00
- Penerusan Pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan	Rp	6.578.046.142,00
- Sewa Rusunawa	Rp	295.725.000,00
- Pendapatan denda Atas Pelanggaran Perda	Rp	7.000.000,00
Jumlah	Rp	246.694.455.891,86

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar **Rp53.495.246.384,00** terdiri dari:

- Bagi Hasil PBB	Rp	5.658.009.934,00
- Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan PPh 29	Rp	43.260.104.936,00



- Bagi Hasil PPh Perseorangan/PPH 21	Rp	0,00
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	4.577.131.514,00
Jumlah	Rp	53.495.246.384,00

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar **Rp 24.159.177.895,00** merupakan Bagi Hasil dari:

- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Rp	10.913.811.410,00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Rp	307.505.987,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Rp	12.309.504.498,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	Rp	38.200.200,00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Rp	590.155.800,00
Jumlah	Rp	24.159.177.895,00

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp 838.948.449.000,00**

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar **Rp 189.891.532.535,00** terdiri dari dari:

- DAK Reguler Bidang Kesehatan	Rp	21.297.141.095,00
- DAK Non Fisik	Rp	158.233.216.811,00
- DAK Penugasan	Rp	10.361.174.629,00
Jumlah	Rp	189.891.532.535,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar **Rp 252.139.954.160,00** terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	91.942.876.980,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	64.890.127.350,00



- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	53.945.198.130,00
- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Minum	Rp	199.011.200,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	41.162.740.500,00
Jumlah	Rp	252.139.954.160,00

Arus masuk kas dari pendapatan hibah sebesar Rp 88.328.640.000,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya Rp 55.936.979.900,00 antara lain diperoleh dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi adalah sebesar **Rp2.027.467.395.160,19** Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp	1.181.889.361.829,00
Belanja Barang	Rp	711.101.422.815,19
Belanja Bunga	Rp	6.578.046.142,00
Belanja Hibah	Rp	79.149.334.000,00
Bantuan Sosial	Rp	46.743.921.755,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.995.853.019,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	9.455.600,00
Jumlah	Rp	2.027.467.395.160,19

5.5.6. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp **500.990.650.893,00** yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:



Arus Masuk Kas	Rp	42.756.885,00
Arus Keluar Kas	Rp	501.033.407.778,00
Penurunan Arus Kas Bersih	(Rp)	500.990.650.893,00

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp **42.756.885,00** Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Penjualan atas tanah	Rp	42.756.885,00
Jumlah	Rp	42.756.885,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp **501.033.407.778,00** adalah belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2019, yang terdiri dari:

Belanja Tanah	Rp	18.044.020.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	99.754.707.372,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	144.703.165.317,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	235.965.307.071,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	1.910.823.018,00
Belanja Aset Lainnya	Rp	655.385.000,00
Jumlah	Rp	501.033.407.778,00

5.5.7. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp **10.258.061.706,00** merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp	145.237.547.127,00
Arus Kas Keluar	Rp	155.495.608.833,00
Penurunan Kas	(Rp)	10.258.061.706,00



5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar **Rp145.237.547.127,00** merupakan pinjaman daerah pada rumah Sakit Umum Daerah (RSUD-BLUD) sebesar Rp139.752.780.949,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 sebesar Rp5.484.766.178,00.

Pinjaman Dalam Negri - Lainnya	Rp	145.237.547.127,00
Jumlah	Rp	<u>145.237.547.127,00</u>

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar **Rp155.495.608.833,00** terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor dan Bank Kota Bogor	Rp	16.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	Rp	5.484.766.178,00
- Pembayaran Pokok Utang kepada lembaga keuangan Bank	Rp	134.010.842.655,00
Jumlah	Rp	<u>155.495.608.833,00</u>

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar **Rp150.697.543,00**.

Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp	152.311.626.278,34
Arus Kas Keluar	Rp	152.160.928.735,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	<u>150.697.543,00</u>

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar **Rp152.311.626.278,34** dengan rincian sebagai berikut:



Utang Taspen	Rp	22.134.939,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	297.707.990,00
Utang PPh Pusat	Rp	58.353.421.258,47
Utang PPN Pusat	Rp	57.755.649.730,87
Utang Taperum	Rp	632.203.000,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	Rp	34.110.679.765,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp	1.139.829.595,00
Jumlah	Rp	152.311.626.278,34

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar **Rp152.160.928.735,34** dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	Rp	22.134.939,00
- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	298.528.630,00
- Utang PPh Pusat	Rp	58.370.277.194,47
- Utang PPN Pusat	Rp	57.751.074.230,87
- Utang Taperum	Rp	632.203.000,00
- Utang Iuran Wajib Pegawai	Rp	34.017.086.387,00
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp	1.069.624.354,00
Jumlah	Rp	152.160.928.735,34

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan Surplus (Defisit) dari operasional tahun berjalan serta Dampak Akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bogor pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Bogor. Pada Tahun 2019 terdapat saldo awal Ekuitas sebesar Rp8.018.689.818.922,82 merupakan saldo akhir Ekuitas 2018.

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.331.658.267.022,12 mengalami peningkatan sebesar Rp312.968.448.099,30 dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.018.689.818.922,82

5.6.2 Surplus/defisit - LO

Surplus/defisit - LO Tahun 2019 Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 389.893.655.787,45 merupakan selisih antar Pendapatan-LO sebesar Rp2.727.229.093.257,38 dengan Beban-LO sebesar Rp 2.337.325.981.869,93 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp9.455.600,00

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp76.925.207.688,15 merupakan Perubahan yang disebabkan oleh koreksi ekuitas yang terdiri atas:

- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	Rp	1,00
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	Rp	(5.677.129.797,55)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap	Rp	(406.561.683,00)

(Gedung dan Bangunan)

- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	Rp	72.439.250,00
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	Rp	(270.066.342,00)
- Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	Rp	4.989.735.435,56
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	43.956.012.161,71
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(117.612.965.360,87)
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp	(1.976.671.353,00)
Jumlah	Rp	(76.925.207.688,15)

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan kodefikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor sehingga dilakukan inventarisasi ulang dengan Sensus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. *(Lihat lampiran 51)*

5.6.4 Ekuitas

Ekuitas Akhir pada tahun 2019 sebesar Rp8.331.658.267.022,12. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Bogor Selatan (30,81 km²)
2. Kecamatan Bogor Timur (10,15 km²)
3. Kecamatan Bogor Utara (17,72 km²)
4. Kecamatan Bogor Tengah (8,13 km²)
5. Kecamatan Bogor Barat (32.85 km²)
6. Kecamatan Tanah Sereal (18,84 km²).

Secara administrative Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.



dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.
3. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan



perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

6.3 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 adalah sejumlah 6.987 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.406 Pria dan 3.581 Perempuan, sedangkan berdasarkan golongan ruang untuk golongan IV sejumlah 1.991 Orang, Golongan III sejumlah 3.354 Orang, Golongan II Sejumlah 1.453 Orang dan Golongan I Sejumlah 189 Orang, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	36	24	60
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	17	4	21
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	70	21	91
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	38	14	52
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	24	28	52
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	16	21	37
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	36	22	58
8	Dinas Kesehatan Kota Bogor	113	586	699
9	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	17	10	27
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	32	18	50
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor	24	12	36
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	319	24	343
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	14	26	40



NO	UNIT KERJA	Laki-Laki	Perempuan	Total
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	104	22	126
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor	16	21	37
16	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	33	18	51
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	36	14	50
18	Dinas Pendidikan Kota Bogor	995	2216	3211
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	7	19	26
20	Dinas Perhubungan Kota Bogor	245	12	257
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	34	23	57
22	Dinas Pertanian Kota Bogor	42	35	77
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	106	18	124
24	Dinas Sosial Kota Bogor	32	14	46
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	26	6	32
26	Inspektorat Kota Bogor	27	25	52
27	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor	12	3	15
28	Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	88	56	144
29	Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	102	46	148
30	Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	72	28	100
31	Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	52	9	61
32	Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	60	29	89
33	Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	80	24	104
34	RSUD Kota Bogor	27	29	56
35	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	291	3	294
36	Sekretariat Daerah Kota Bogor	122	77	199
37	Sekretariat DPRD Kota Bogor	37	23	60
38	Sekretariat KPU Kota Bogor	4	1	5
	Total	3406	3581	6987



BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat Kota Bogor. Selain itu, dapat dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru guna memperbaiki kekurangan pada tahun 2019.

Harapan kedepan Catatan atas Laporan Keuangan ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum benar-benar dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai visi dan misi Kota Bogor.

Bogor, Juni 2020

WALI KOTA

BIMA ARYA

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran No.	Nama Lampiran
1	Kas di kas daerah
2	Kas di Bendahara Penerimaan
3	Kas di Bendahara Pengeluaran
4.a	Kas di Rekening Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor/Badan layanan Umum Daerah
4.b	Kas di Bendahara pada Rumah Sakit Umum Daerah/Badan layanan Umum Daerah
5	Kas di FKTP (Puskesmas)
6	Kas Lainnya
7	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN pada SMP dan SD Kota Bogor
8	Daftar Piutang Pajak Daerah
9	Daftar Piutang Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Daftar Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
13	Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
14	Piutang Denda Pajak Daerah
15	Daftar Piutang Denda Retribusi Daerah
16	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang sah pada PPKD
17	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat
18	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
19	Daftar Piutang Lainnya pada Dinas Perhubungan
20	Daftar Saldo Piutang Perusahaan / Asuransi
21	Daftar Piutang Lainnya pada PPKD
22	Daftar Penyisihan Piutang
22a	Daftar Penyisihan Piutang Pajak
22b	Daftar Penyisihan Piutang Denda Pajak
22c	Daftar Rekap Rekonsiliasi Per Jenis Piutang Pemerintah Daerah
22d	Daftar Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman
22e	Daftar Piutang Lainnya pada PPKD
22 f	Daftar Penyisihan Piutang Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah
23	Daftar Beban Di bayar di Muka
24	Daftar Rekapitulasi Persediaan
25	Daftar Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Garda Emas
26	Daftar Penyertaan Modal
27	Daftar Aset Tetap per SKPD
28	Daftar Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal, Belanja Operasional dan Hibah
29	Daftar Penambahan Aset Tetap dari Hasil Inventarisasi
30	Daftar Pengurangan Aset Tetap dari Belanja Modal, Belanja Operasional dan Hibah
31	Daftar Pengurangan Aset Tetap dari Hasil Inventarisasi
32	Daftar Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
33	Daftar Tagihan Penjualan Angsuran
34	Daftar Nominatif Tuntutan Perbendaharaan
35	Daftar Nominatif Tuntutan Ganti Rugi
36	Daftar Tanah yang dimanfaatkan Pihak Ketiga
37	Daftar Aset Tak Berwujud
38	Daftar Aset Lainnya - Aset Rusak Berat

Lampiran No.	Nama Lampiran
39	Daftar Aset Lainnya - Aset Lain-lain
40	Daftar Utang Perhitungan Pihak Ketiga
41	Daftar Utang Bunga
42	Daftar Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD
43	Daftar Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
44a	Daftar Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD
44b	Daftar Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD
45	Daftar Rincian Utang Beban
46	Daftar Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya
47	Daftar Kewajiban Jangka Pendek - Utang Pengadaan Aset Tetap
48	Daftar Rekap Penerimaan Dana Talangan pada Rumah Sakit Umum Daerah
49	Daftar Rekap Pembayaran Dana Talangan
50	Daftar Rekapitulasi Pendapatan Hibah
51	Daftar Rincian Koreksi Ekuitas
52	Laporan Realisasi Anggaran Per Rekening Obyek

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
16	Dinas Perhubungan	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	-
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-
25	Sekretariat Daerah	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
27	Kecamatan Bogor Utara	-
28	Kecamatan Bogor Selatan	-
29	Kecamatan Bogor Timur	-
30	Kecamatan Bogor Barat	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-
32	Kecamatan Tanah Sareal	-
33	Inspektorat	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-
Jumlah		-

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Unit Kerja	Sisa Uang Persediaan 2019
1	Dinas Pendidikan	56.846.325,00
2	Dinas Kesehatan	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	97.058.549,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
16	Dinas Perhubungan	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	811
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-
25	Sekretariat Daerah	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
27	Kecamatan Bogor Utara	-
28	Kecamatan Bogor Selatan	-
29	Kecamatan Bogor Timur	-
30	Kecamatan Bogor Barat	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-
32	Kecamatan Tanah Sareal	-
33	Inspektorat	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-
Jumlah		153.905.685,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Rekening Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor/ Badan Layanan Umum Darah
per 31 Desember 2019

No	Nama Unit Kerja	Bank BJB (0060187827001) Operasional	Bank Mandiri (133- 00-7080708-6)	BANK BJB-ESCRAW (0352582588)	Bank BNI (0352582588)	TOTAL
1	Saldo Rekening Koran	Rp 7.454.165.648,00	Rp 26.588.144,19	Rp 1.429.093,00	Rp 547.749.674,00	Rp 8.029.932.559,19
2	Cek Yang Masih Beredar (Outstanding Check)	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
3	Bunga Bank Biaya Administrasi Bank					
	Saldo Disesuaikan (Rekonsiliasi)	Rp 7.454.165.648,00	Rp 26.588.144,19	1.429.093,00	Rp 547.749.674,00	Rp 8.029.932.559,19

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Bendahara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor/ Badan Layanan Umum Daerah
per 31 Desember 2019

No	Nama Unit Kerja	Sisa Kas	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor/ Badan Layanan Umum Daerah	Rp	77.737.108,00
Total		Rp	77.737.108,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Bendahara FKTP
Per 31 Desember 2019

Lampiran 5

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL	JASGIR 2018	KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	Utang Pajak				SALDO AKHIR
							PPN	Pph ps 21	Pph ps 22	Pph ps 23	
1	Bogor Selatan	963.227.558	1.514.008	-	2.379.388.800	2.691.259.690					649.842.660
2	Cipaku	626.024.496	950.779	-	2.368.880.600	2.606.586.501					387.367.816
3	Bondongan	1.275.088.932	2.192.211	-	2.167.571.850	2.265.849.424	4.305.500		645.825		1.179.570.472
4	Lawang Gintung	596.722.625	967.495	-	1.416.213.600	1.321.825.289					690.143.441
5	Bogor Timur	662.349.638	1.103.551	-	2.794.352.700	3.132.438.539					323.160.248
6	Pulo Armin	396.911.931	660.021	-	1.643.285.700	1.965.270.805					74.266.805
7	Bogor Tengah	186.051.776	319.872	-	1.196.889.900	1.306.642.059					75.979.745
8	Sempur	170.393.067	280.920	-	1.182.279.600	1.181.632.075					170.759.672
9	Gang Aut	244.699.322	409.277	-	819.140.400	930.535.683					132.894.762
10	Belong	60.309.173	56.941	-	524.873.400	535.682.458					49.443.174
11	Merdeka	379.839.008	600.251	-	1.450.236.000	1.504.010.984					325.463.773
12	Semplak	458.245.776	787.829	-	2.212.628.700	2.433.004.760					237.081.887
13	Pancasan	183.573.961	222.049	-	1.619.773.650	1.803.125.562					-
14	Pasir Mulya	192.957.043	331.744	-	1.928.778.900	1.980.577.188					140.827.011
15	Gang Kelor	866.468.390	1.489.686	-	1.892.365.950	2.118.837.792					638.506.862
16	Sindang Barang	780.481.971	1.319.483	-	2.831.960.700	2.872.610.910					738.512.278
17	Bogor Utara	351.970.973	568.304	-	2.611.373.250	2.752.469.051					210.306.868
18	Tegal Gundil	498.131.606	810.684	-	1.514.752.500	1.754.946.471					257.126.951
19	Warung Jambu	843.209.324	1.449.697	-	2.060.185.650	2.268.811.367					633.133.910
20	Tanah Sareal	216.813.342	372.759	-	1.686.186.300	1.849.395.806					53.231.077
21	Pondok Rumput	217.003.771	373.086	-	696.231.000	786.896.680					125.965.005
22	Kedung Badak	911.368.636	1.559.132	-	1.847.362.500	2.027.548.121					729.623.883
23	Kayu Manis	665.076.811	1.053.544	-	1.964.963.100	2.001.028.343					627.958.024
24	Mekarwangi	436.492.973	750.445	-	1.887.097.800	1.939.449.404					383.390.924
25	Mulyaharja	473.003.036	405.126	2.618.000	1.468.817.100	1.436.071.265	270.000				502.995.745
	JUMLAH	12.656.415.139	20.548.894	2.618.000	44.165.589.650	47.466.506.227	4.575.500	-	645.825	-	9.337.552.993

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas Lainnya
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
16	Dinas Perhubungan	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	-
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	-
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-
25	Sekretariat Daerah	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
27	Kecamatan Bogor Utara	-
28	Kecamatan Bogor Selatan	-
29	Kecamatan Bogor Timur	-
30	Kecamatan Bogor Barat	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-
32	Kecamatan Tanah Sereal	-
33	Inspektorat	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-
Jumlah		-

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN pada SD Kota Bogor
per 31 Desember 2019

No	Nama Sekolah	Jenjang	Kecamatan	Saldo bos Th Lalu	Pen Pendapatan Dapodik 1 s.d 4 th 2019	Pendapatan BOS Kinerja 2019	JUMLAH PENDAPATAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bel M. Peralatan Mesin	Bel Modal Lainnya	Bel Modal gedung Ged	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS	Koreksi Saldo yang Belum Tercatat	Jas TW 1,2,dan 3 Th 2019	Sisa Bunga Bank Kekurangan Setor Th 2018	Disetor ke KASDA
1	SMP NEGERI 1	SMP	Bogor Tengah	3.502.968	831.600.000	597.000.000	1.432.102.968	98.400.000	571.247.674	79.750.000	61.816.000	-	811.213.674	620.889.294		293.051	-	-
2	SMP NEGERI 2	SMP	Bogor Tengah	1.211.737	891.400.000	645.000.000	1.537.611.737	135.600.000	554.092.633	202.875.000	-	-	892.567.633	645.044.104		255.974	-	-
3	SMP NEGERI 3	SMP	Bogor Tengah	2.938.476	889.000.000		891.938.476	133.200.000	651.169.681	88.100.000	-	-	872.469.681	19.468.795		336.141	-	-
4	SMP NEGERI 4	SMP	Bogor Tengah	1.797.922	924.800.000		926.597.922	140.100.000	692.510.137	66.000.000	-	-	898.610.137	27.987.785		309.520	-	-
5	SMP NEGERI 5	SMP	Tanah Sareal	1.002.206	922.600.000		923.602.206	138.840.000	698.090.913	52.300.000	32.705.600	-	921.936.513	1.665.693		276.163	6.000	-
6	SMP NEGERI 6	SMP	Bogor Barat	8.064.628	908.800.000		916.864.628	127.050.000	583.581.480	200.600.000	-	-	911.231.480	5.633.148		268.433	868.711	868.711
7	SMP NEGERI 7	SMP	Bogor Tengah	1.110.665	898.200.000		899.310.665	131.250.000	629.460.883	134.425.000	-	-	895.135.883	4.174.782		295.303	24.964	24.964
8	SMP NEGERI 8	SMP	Tanah Sareal	8.366.355	894.800.000		903.166.355	126.900.000	623.889.054	129.150.000	4.635.000	-	884.574.054	18.592.301		348.627	-	-
9	SMP NEGERI 9	SMP	Bogor Selatan	17.034.348	903.000.000		920.034.348	133.650.000	668.951.810	37.878.000	67.960.000	-	908.439.810	11.594.538		325.340	-	-
10	SMP NEGERI 10	SMP	Bogor Selatan	16.027.608	902.000.000		918.027.608	136.800.000	706.483.316	38.300.000	-	-	881.583.316	36.444.292		305.057	-	-
11	SMP NEGERI 11	SMP	Bogor Tengah	1.186.097	888.400.000	621.000.000	1.510.586.097	134.250.000	621.011.411	84.914.000	49.320.000	-	889.495.411	621.090.686		216.227	-	-
12	SMP NEGERI 12	SMP	Tanah Sareal	4.657.171	896.200.000		900.857.171	134.316.000	406.557.523	233.588.400	119.115.810	-	893.577.733	7.279.438		305.277	20	-
13	SMP NEGERI 13	SMP	Bogor Selatan	58.929	695.800.000		695.858.929	103.800.000	496.024.286	93.934.727	-	-	693.759.013	2.099.916		159.563	-	-
14	SMP NEGERI 14	SMP	Bogor Barat	3.818.374	867.400.000		871.218.374	130.800.000	646.724.466	91.000.000	-	-	868.524.466	2.693.908		533.537	-	-
15	SMP NEGERI 15	SMP	Bogor Utara	1.409.930	908.600.000		910.009.930	142.260.000	664.240.958	72.500.000	-	-	879.000.958	31.008.972		364.954	4	-
16	SMP NEGERI 16	SMP	Tanah Sareal	6.856.501	1.111.800.000		1.118.656.501	168.386.000	835.294.443	114.900.000	-	-	1.118.580.443	76.058		266.640	-	-
17	SMP NEGERI 17	SMP	Bogor Selatan	3.208.359	807.200.000		810.408.359	106.800.000	464.164.831	170.165.000	58.546.000	-	799.675.831	10.732.528		257.380	-	-
18	SMP NEGERI 18	SMP	Bogor Timur	9.081.838	845.600.000		854.681.838	98.550.000	566.544.216	101.450.000	62.650.000	-	829.194.216	25.487.622		302.083	-	-
19	SMP NEGERI 19	SMP	Bogor Utara	1.687.200	885.800.000		887.487.200	130.200.000	646.404.161	58.400.000	48.576.000	-	883.580.161	3.907.039		329.937	-	-
20	SMP NEGERI 20	SMP	Bogor Utara	16.342.556	729.400.000		745.742.556	104.250.000	427.252.006	118.400.000	70.700.000	-	720.602.006	25.140.550		203.585	-	-
21	SDN BALUNGBANG JAYA 1	SD	Bogor Barat	320.000	147.680.000		148.000.000	17.880.000	114.070.600	15.700.000	-	-	147.650.600	349.400		32.206	9.575	9.575
22	SDN BALUNGBANG JAYA 2	SD	Bogor Barat	531.510	133.280.000		133.811.510	21.600.000	81.484.105	29.800.000	-	-	132.884.105	927.405		38.366	2.546	-
23	SDN BALUNGBANG JAYA 3	SD	Bogor Barat	158.459	204.320.000		204.478.459	30.600.000	135.722.501	33.555.000	4.595.000	-	204.472.501	5.958		51.253	-	-
24	SDN BUBULAK 1	SD	Bogor Barat	706.296	348.320.000		349.026.296	47.760.000	272.361.460	28.300.000	-	-	348.421.460	604.836		100.011	-	-
25	SDN BUBULAK 2	SD	Bogor Barat	401.305	156.160.000		156.561.305	20.400.000	111.073.343	23.600.000	-	-	155.073.343	1.487.962		26.685	90	-
26	SDN BUBULAK 3	SD	Bogor Barat	420.531	193.280.000		193.700.531	28.800.000	136.496.445	28.370.000	-	-	193.666.445	34.086		34.086	41.485	-
27	SDN CEMPLANG	SD	Bogor Barat	536.513	194.400.000		194.936.513	28.440.000	141.963.414	19.140.000	3.500.000	-	193.043.414	1.893.099		45.750	-	-
28	SDN CIBALAGUNG 1	SD	Bogor Barat	254.631	126.080.000		126.334.631	20.520.000	83.360.600	14.845.000	-	-	118.725.600	7.609.031		2.252	(35.633)	-
29	SDN CIBALAGUNG 2	SD	Bogor Barat	253.668	132.480.000		132.733.668	19.440.000	88.328.467	14.214.000	-	-	121.982.467	10.751.201		12.667	-	-
30	SDN CIBALAGUNG 3	SD	Bogor Barat	2.282.945	202.720.000		205.002.945	30.000.000	165.093.700	6.600.000	-	-	201.693.700	3.309.245		42.217	27.828	27.828
31	SDN CIBALAGUNG 4	SD	Bogor Barat	2.640.212	156.480.000		159.120.212	24.170.000	102.363.397	21.312.450	-	-	147.845.847	11.274.365		21.798	-	-
32	SDN CIBALAGUNG 5	SD	Bogor Barat	5.235.270	262.720.000		267.955.270	39.600.000	206.297.296	15.500.000	-	-	261.397.296	6.557.974		73.855	-	-
33	SDN CIJAHE CURUG	SD	Bogor Barat	146.964	189.760.000		189.906.964	25.200.000	143.706.964	21.000.000	-	-	189.906.964	-		29.630	-	-
34	SDN CILENDEK I	SD	Bogor Barat	210.694	440.960.000		441.170.694	66.840.000	336.389.144	34.485.000	2.700.000	-	440.414.144	756.550		131.928	-	-
35	SDN CILENDEK 2	SD	Bogor Barat	2.095.937	180.800.000		182.895.937	26.160.000	138.151.880	18.390.000	-	-	182.701.880	194.057		54.238	3.195	-
36	SDN CILENDEK 4	SD	Bogor Barat	25.390	185.600.000		185.625.390	27.120.000	130.992.995	26.400.000	-	-	184.512.995	1.112.395		39.606	-	-
37	SDN CILENDEK TIMUR 1	SD	Bogor Barat	108.527	421.120.000		421.228.527	78.600.000	279.601.000	63.000.000	-	-	421.201.000	27.527		93.802	116.073	-
38	SDN CILENDEK TIMUR 2	SD	Bogor Barat	8.754.277	200.800.000		209.554.277	30.240.000	151.650.856	21.600.000	5.000.000	-	208.490.856	1.063.421		46.041	4.579	-
39	SDN CURUG 1	SD	Bogor Barat	486.222	261.600.000		262.086.222	41.180.000	190.415.868	26.500.000	3.500.000	-	261.595.868	490.354		108.357	-	-
40	SDN CURUG 3	SD	Bogor Barat	3.233.834	269.440.000		272.673.834	42.240.000	209.590.357	15.750.000	-	-	267.580.357	5.093.477		171.541	-	-
41	SDN GUNUNG BATU 1	SD	Bogor Barat	2.971.397	576.160.000		579.131.397	87.600.000	431.220.694	60.200.000	-	-	579.020.694	110.703		227.000	-	-
42	SDN GUNUNG BATU 2	SD	Bogor Barat	1.069.420	643.360.000		644.429.420	106.550.000	528.792.788	9.000.000	-	-	644.342.788	86.632		213.368	-	-
43	SDN LOJI I	SD	Bogor Barat	2.403.916	219.200.000	129.000.000	350.603.916	30.066.600	165.472.972	24.678.000	928.000	-	221.145.572	129.458.344		74.347	171.783	174.457

No	NamaSekolah	Jenjang	Kecamatan	Saldo bos Th Lalu	Pen Pendapatan Dapodik 1 s.d 4 th 2019	Pendapatan BOS Kinerja 2019	JUMLAH PENDAPATAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bel M. Peralatan Mesin	Bel Modal Lainnya	Bel Modal gedung Ged	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS	Koreksi Saldo yang Belum Tercatat	Jas TW 1,2,dan 3 Th 2019	Sisa Bunga Bank Kekurangan Setor Th 2018	Disetor ke KASDA
44	SDN LOJI 2	SD	Bogor Barat	1.014.530	227.520.000		228.534.530	32.450.000	149.393.931	46.690.000	-	-	228.533.931	599		53.659	-	-
45	SDN LOJI 3	SD	Bogor Barat	74.850	119.520.000		119.594.850	16.500.000	79.740.940	23.100.000	-	-	119.340.940	253.910		23.043	-	-
46	SDN MARGAJAYA 1	SD	Bogor Barat	1.769.291	448.000.000		449.769.291	67.200.000	285.105.163	89.400.000	7.800.000	-	449.505.163	264.128		174.514	-	-
47	SDN MARGAJAYA 2	SD	Bogor Barat	403.178	458.560.000		458.963.178	68.400.000	334.939.643	55.500.000	-	-	458.839.643	123.535		190.004	-	-
48	SDN MARGAJAYA 3	SD	Bogor Barat	718.456	302.240.000		302.958.456	46.200.000	249.808.456	6.950.000	-	-	302.958.456	-		67.210	315.526	315.526
49	SDN MARGAJAYA 4	SD	Bogor Barat	633.387	325.920.000		326.553.387	67.200.000	236.801.102	16.300.000	2.650.000	-	322.951.102	3.602.285		84.114	-	-
50	SDN MENTENG	SD	Bogor Barat	833.256	281.440.000		282.273.256	39.600.000	226.735.409	12.100.000	3.800.000	-	282.235.409	37.847		46.902	55.683	-
51	SDN MERDEKA 1	SD	Bogor Barat	319.626	228.800.000		229.119.626	34.560.000	166.294.350	27.300.000	-	-	228.154.350	965.276		35.227	-	-
52	SDN NEGLASARI BOGOR	SD	Bogor Barat	8.487.769	376.320.000		384.807.769	58.000.000	250.490.331	48.000.000	20.000.000	-	376.490.331	8.317.438		97.430	309.496	309.496
53	SDN PABUARAN CILENDEK	SD	Bogor Barat	4.177.653	214.080.000		218.257.653	33.900.000	163.231.900	11.000.000	-	-	208.131.900	10.125.753		70.854	-	-
54	SDN PURBASARI	SD	Bogor Barat	3.775.888	694.400.000		698.175.888	113.610.000	530.596.449	25.000.000	-	-	669.206.449	28.969.439		277.068	-	-
55	SDN SELAKOPI	SD	Bogor Barat	534.496	213.280.000		213.814.496	32.040.000	163.693.000	13.935.500	-	-	209.668.500	4.145.996		28.494	48.875	-
56	SDN SEMERU 1	SD	Bogor Barat	8.551.709	543.520.000		552.071.709	73.500.000	314.057.122	117.810.000	-	-	505.367.122	46.704.587		215.825	-	-
57	SDN SEMERU 5	SD	Bogor Barat	111.936	162.080.000		162.191.936	21.230.000	105.211.398	33.080.000	-	-	159.521.398	2.670.538		61.341	(18.326)	-
58	SDN SEMERU 6	SD	Bogor Barat	364.596	179.680.000		180.044.596	28.050.000	137.696.815	12.000.000	-	-	177.746.815	2.297.781		34.989	47.500	-
59	SDN SEMPLAK 1	SD	Bogor Barat	3.114.495	623.680.000		626.794.495	94.200.000	420.750.637	110.050.000	-	-	625.000.637	1.793.858		289.232	-	-
60	SDN SEMPLAK 2	SD	Bogor Barat	1.367.459	932.000.000	535.000.000	1.468.367.459	139.800.000	778.567.459	15.000.000	-	-	933.367.459	535.000.000		363.754	624.635	-
61	SDN SINDANGBARANG 1	SD	Bogor Barat	35.016	206.400.000		206.435.016	30.000.000	154.435.016	22.000.000	-	-	206.435.016	-		54.185	318.017	318.017
62	SDN SINDANG BARANG 2	SD	Bogor Barat	150.064	361.600.000		361.750.064	54.600.000	285.949.467	21.200.000	-	-	361.749.467	597		87.832	100	-
63	SDN SINDANG BARANG 3	SD	Bogor Barat	410.714	261.120.000		261.530.714	37.800.000	206.728.520	17.000.000	-	-	261.528.520	2.194		75.659	-	-
64	SDN SINDANG BARANG 4	SD	Bogor Barat	25.151	153.920.000		153.945.151	23.160.000	118.680.000	11.800.000	-	-	153.640.000	305.151		35.895	8.709	-
65	SDN SINDANGRASA	SD	Bogor Barat	79.678	207.040.000		207.119.678	30.360.000	155.705.278	21.000.000	-	-	207.065.278	54.400		24.904	(54.400)	-
66	SDN SITUGEDE 1	SD	Bogor Barat	71.369	158.880.000		158.951.369	22.080.000	114.101.245	22.753.808	-	-	158.935.053	16.316		28.670	-	-
67	SDN SITUGEDE 2	SD	Bogor Barat	627.360	245.760.000		246.387.360	37.200.000	185.627.101	23.500.000	-	-	246.327.101	60.259		61.073	14.741	75.814
68	SDN SITUGEDE 3	SD	Bogor Barat	276.219	266.080.000		266.356.219	43.650.000	193.602.500	29.000.000	-	-	266.252.500	103.719		56.927	315.682	372.609
69	SDN SITUGEDE 4	SD	Bogor Barat	2.165.637	383.360.000		385.525.637	54.600.000	296.923.270	26.500.000	7.500.000	-	385.523.270	2.367		119.932	-	119.932
70	SDN SITUGEDE 5	SD	Bogor Barat	-	217.920.000		217.920.000	18.000.000	169.013.746	30.900.000	-	-	217.913.746	6.254		57.221	318.434	-
71	SDN BATUTULIS 1	SD	Bogor Selatan	1.938.479	405.280.000		407.218.479	62.400.000	256.258.883	64.061.020	-	-	382.719.903	24.498.576		163.968	-	-
72	SDN BATUTULIS 2	SD	Bogor Selatan	2.280.331	459.040.000		461.320.331	68.880.000	314.567.291	74.000.000	2.500.000	-	459.947.291	1.373.040		157.029	29	29
73	SDN BATUTULIS 3	SD	Bogor Selatan	256.851	251.520.000		251.776.851	37.560.000	204.744.750	8.000.000	1.369.800	-	251.674.550	102.301		79.046	-	-
74	SDN BATUTULIS 4	SD	Bogor Selatan	90.018	151.200.000		151.290.018	22.200.000	115.951.764	13.000.000	-	-	151.151.764	138.254		42.847	(9.347)	-
75	SDN BOJONG KERTA	SD	Bogor Selatan	642.022	391.360.000		392.002.022	58.800.000	277.690.622	49.680.000	5.600.000	-	391.770.622	231.400		178.050	-	-
76	SDN BONDONGAN	SD	Bogor Selatan	1.280.000	553.920.000		555.200.000	76.770.000	356.829.256	120.795.000	-	-	554.394.256	805.744		105.037	5.514	-
77	SDN CIBEUREUM 1	SD	Bogor Selatan	700.404	535.520.000		536.220.404	81.285.000	356.896.810	97.425.000	-	-	535.606.810	613.594		228.256	468	-
78	SDN CIBEUREUM 2	SD	Bogor Selatan	425.940	382.240.000		382.665.940	57.600.000	217.176.521	107.398.000	-	-	382.174.521	491.419		125.712	9	-
79	SDN CIBEUREUM 4	SD	Bogor Selatan	4.654.444	393.440.000		398.094.444	58.200.000	200.794.300	104.136.100	-	-	363.130.400	34.964.044		206.341	-	-
80	SDN CIKARET 1	SD	Bogor Selatan	189.432	715.360.000		715.549.432	108.840.000	506.249.068	42.945.000	56.065.000	-	714.099.068	1.450.364		215.547	-	-
81	SDN CIKARET 2	SD	Bogor Selatan	2.197.083	389.440.000		391.637.083	43.200.000	255.960.200	79.550.000	10.200.000	-	388.910.200	2.726.883		144.104	720	-
82	SDN CIPAKU 1	SD	Bogor Selatan	354.821	209.760.000		210.114.821	29.100.000	141.224.346	36.495.000	2.700.000	-	209.519.346	595.475		47.576	-	-
83	SDN CIPAKU 2	SD	Bogor Selatan	660.587	158.400.000		159.060.587	24.360.000	94.031.102	40.300.000	-	-	158.691.102	369.485		45.878	(4.077)	-
84	SDN CIPAKU 4	SD	Bogor Selatan	216.089	222.240.000		222.456.089	33.680.000	141.962.264	41.800.000	2.925.000	-	220.367.264	2.088.825		38.629	-	-
85	SDN CIPAKU PERUMDA	SD	Bogor Selatan	4.216.227	455.200.000		459.416.227	69.720.000	320.892.829	25.451.954	9.778.500	-	425.843.283	33.572.944		173.356	-	-
86	SDN CIRANJANG	SD	Bogor Selatan	373.405	101.920.000		102.293.405	18.846.000	65.012.654	5.000.000	-	-	88.858.654	13.434.751		2.197	10.927	-
87	SDN GENTENG	SD	Bogor Selatan	463.271	387.040.000		387.503.271	58.560.000	263.599.037	65.270.000	-	-	387.429.037	74.234		107.438	-	-
88	SDN HARJASARI I	SD	Bogor Selatan	2.095.278	622.720.000		624.815.278	95.400.000	432.993.661	88.579.999	7.522.000	-	624.495.660	319.618		210.200	-	-
89	SDN HARJASARI II	SD	Bogor Selatan	232.417	271.840.000		272.072.417	35.400.000	187.164.380	38.090.000	6.100.000	-	266.754.380	5.318.037		73.435	-	-
90	SDN KERTAMAYA	SD	Bogor Selatan	742.094	472.320.000		473.062.094	70.680.000	285.395.566	85.325.000	30.675.000	-	472.075.566	986.528		121.957	30.290	-
91	SDN LAWANG GINTUNG 1	SD	Bogor Selatan	2.153.783	394.240.000		396.393.783	60.000.000	258.131.129	61.100.000	16.240.000	-	395.471.129	922.654		152.011	-	-
92	SDN LAWANG GINTUNG 2	SD	Bogor Selatan	1.425.210	304.000.000		305.425.210	43.800.000	232.809.210	22.816.000	6.000.000	-	305.425.210	-		116.785	2.000	-
93	SDN LAWANG GINTUNG 4	SD	Bogor Selatan	1.343.928	151.040.000		152.383.928	21.000.000	84.543.928	46.400.000	440.000	-	152.383.928	-		33.517	-	-
94	SDN LAYUNGSARI 1	SD	Bogor Selatan	1.874.043	293.440.000		295.314.043	38.800.000	190.630.769	59.500.000	-	-	288.930.769	6.383.274		124.806	-	-

No	NamaSekolah	Jenjang	Kecamatan	Saldo bos Th Lalu	Pen Pendapatan Dapodik 1 s.d 4 th 2019	Pendapatan BOS Kinerja 2019	JUMLAH PENDAPATAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bel M. Peralatan Mesin	Bel Modal Lainnya	Bel Modal gedung Ged	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS	Koreksi Saldo yang Belum Tercatat	Jas TW 1,2,dan 3 Th 2019	Sisa Bunga Bank Kekurangan Setor Th 2018	Disetor ke KASDA
95	SDN LAYUNGSARI 2	SD	Bogor Selatan	598.702	261.440.000		262.038.702	35.850.000	182.518.210	42.400.000	-	-	260.768.210	1.270.492		64.168	-	-
96	SDN MUARASARI 1	SD	Bogor Selatan	503.168	287.520.000		288.023.168	36.000.000	182.986.015	67.825.000	-	-	286.811.015	1.212.153		109.315	-	-
97	SDN MUARASARI 2	SD	Bogor Selatan	238.439	246.560.000		246.798.439	46.110.000	129.392.814	45.500.000	-	-	221.002.814	25.795.625		41.921	65.507	65.507
98	SDN MUARASARI 3	SD	Bogor Selatan	241.779	322.240.000		322.481.779	65.000.000	157.997.190	71.900.000	3.250.000	-	298.147.190	24.334.589		76.554	-	-
99	SDN MULYAHARJA 1	SD	Bogor Selatan	192.594	231.040.000		231.232.594	33.840.000	181.978.668	13.890.000	600.000	-	230.308.668	923.926		58.702	40.000	-
100	SDN MULYAHARJA 2	SD	Bogor Selatan	93.383	262.080.000		262.173.383	38.760.000	213.857.535	9.500.000	-	-	262.117.535	55.848		74.296	-	-
101	SDN PABUARAN	SD	Bogor Selatan	1.893.668	398.080.000		399.973.668	59.400.000	252.979.152	85.100.000	-	-	397.479.152	2.494.516		121.287	319.368	319.368
102	SDN PAKUAN	SD	Bogor Selatan	908.742	426.720.000		427.628.742	64.800.000	293.835.572	65.340.000	-	-	423.975.572	3.653.170		187.796	-	-
103	SDN PAMOYANAN 1	SD	Bogor Selatan	130.446	295.680.000		295.810.446	42.210.000	223.234.912	21.500.000	-	-	286.944.912	8.865.534		81.613	-	-
104	SDN PAMOYANAN 2	SD	Bogor Selatan	672.079	440.160.000		440.832.079	66.090.000	320.371.936	47.956.400	5.600.000	-	440.018.336	813.743		101.885	-	-
105	SDN PAMOYANAN 3	SD	Bogor Selatan	766.733	389.920.000		390.686.733	58.800.000	249.816.082	78.650.000	3.302.000	-	390.568.082	118.651		135.804	-	-
106	SDN RANCAMAYA 1	SD	Bogor Selatan	299.791	369.760.000		370.059.791	55.200.000	245.204.211	68.349.800	-	-	368.754.011	1.305.780		175.944	-	-
107	SDN RANCAMAYA 2	SD	Bogor Selatan	94.360	367.840.000		367.934.360	42.900.000	244.976.157	75.000.000	-	-	362.876.157	5.058.203		112.096	-	-
108	SDN RANGGA MEKAR	SD	Bogor Selatan	297.626	258.080.000		258.377.626	38.640.000	198.455.812	17.050.000	3.780.000	-	257.925.812	451.814		70.570	9	-
109	SDN BABAKAN	SD	Bogor Tengah	1.928.397	322.408.397		322.408.397	45.720.000	237.969.929	38.690.000	-	-	322.379.929	28.468		98.830	-	-
110	SDN BARANANGSIANG	SD	Bogor Tengah	2.585.324	257.760.000		260.345.324	39.000.000	185.233.290	24.445.000	7.000.000	-	255.678.290	4.667.034		100.402	20.000	-
111	SDN CIMANGGU KECIL	SD	Bogor Tengah	298.984	369.920.000		370.218.984	77.100.000	246.371.462	28.081.000	18.640.000	-	370.192.462	26.522		50.790	-	-
112	SDN DEWI SARTIKA 1	SD	Bogor Tengah	1.133.809	197.760.000		198.893.809	28.350.000	116.687.996	26.870.000	26.432.000	-	198.339.996	553.813		55.915	-	-
113	SDN DEWI SARTIKA 2	SD	Bogor Tengah	1.273.698	175.520.000		176.793.698	24.816.000	116.777.462	11.075.000	17.543.000	-	170.211.462	6.582.236		42.436	-	-
114	SDN DEWI SARTIKA 3	SD	Bogor Tengah	148.177	154.560.000		154.708.177	23.400.000	111.179.071	9.460.000	10.577.500	-	154.616.571	91.606		33.363	-	-
115	SDN EMPANG 1	SD	Bogor Tengah	751.933	516.800.000		517.551.933	80.400.000	396.604.578	40.500.000	-	-	517.504.578	47.355		157.908	94.046	-
116	SDN EMPANG 2	SD	Bogor Tengah	901.421	507.360.000		508.261.421	79.200.000	395.747.273	33.300.000	-	-	508.247.273	14.148		178.081	-	-
117	SDN GANG AUT	SD	Bogor Tengah	269.085	294.400.000		294.669.085	54.600.000	225.937.787	12.000.000	-	-	292.537.787	2.131.298		72.326	-	-
118	SDN GUNUNG GEDE	SD	Bogor Tengah	576.474	425.920.000		426.496.474	62.500.000	340.478.305	22.000.000	1.500.000	-	426.478.305	18.169		110.656	-	-
119	SDN KAMPUNG RAMBUTAN	SD	Bogor Tengah	48.109	165.440.000		165.488.109	24.480.000	118.026.004	22.690.000	-	-	165.196.004	292.105		73.392	20.000	-
120	SDN KEBON KOPI	SD	Bogor Tengah	135.222	202.080.000		202.215.222	30.600.000	147.035.360	23.500.000	216.000	-	201.351.360	863.862		38.725	-	-
121	SDN MALABAR	SD	Bogor Tengah	293.219	274.240.000		274.533.219	40.200.000	202.610.419	31.722.800	-	-	274.533.219	-		50.618	-	-
122	SDN PABRIK ES I	SD	Bogor Tengah	127.590	141.120.000		141.247.590	22.400.000	110.907.590	4.800.000	3.140.000	-	141.247.590	-		37.806	-	-
123	SDN PANARAGAN 1	SD	Bogor Tengah	3.173.118	423.840.000		427.013.118	46.200.000	322.663.118	58.150.000	-	-	427.013.118	-		108.390	-	-
124	SDN PANARAGAN 2	SD	Bogor Tengah	1.020.616	410.400.000		411.420.616	57.300.000	319.420.616	34.700.000	-	-	411.420.616	-		154.980	3.121	-
125	SDN PANARAGAN 3 BOGOR	SD	Bogor Tengah	660.680	287.040.000		287.700.680	43.800.000	209.664.870	27.698.600	4.455.000	-	285.618.470	2.082.210		101.751	-	-
126	SDN PANARAGAN KIDUL BOGOR	SD	Bogor Tengah	122.579	240.480.000		240.602.579	28.250.000	167.151.630	45.190.000	-	-	240.591.630	10.949	769.223	105.031	-	-
127	SDN PAPANDAYAN	SD	Bogor Tengah	1.644.970	774.880.000		776.524.970	97.560.000	629.635.000	47.550.000	-	-	774.745.000	1.779.970		259.716	-	-
128	SDN PENGADILAN 1 BOGOR	SD	Bogor Tengah	1.191.500	243.520.000		244.711.500	38.400.000	169.436.657	12.110.000	24.713.800	-	244.660.457	51.043		24.957	-	-
129	SDN PENGADILAN 2	SD	Bogor Tengah	100.000	328.320.000		328.420.000	51.719.500	251.870.130	23.560.000	-	-	327.149.630	1.270.370		81.947	131.214	-
130	SDN PENGADILAN 3	SD	Bogor Tengah	439.241	184.640.000		185.079.241	30.480.000	125.198.299	29.231.269	-	-	184.909.568	169.673		50.383	-	-
131	SDN PENGADILAN 5	SD	Bogor Tengah	4.359.660	308.000.000		312.359.660	47.400.000	230.791.288	28.822.750	5.184.750	-	312.198.788	160.872		65.900	-	-
132	SDN PERWIRA	SD	Bogor Tengah	228.552	101.280.000		101.508.552	15.000.000	75.463.796	8.800.000	687.000	-	99.950.796	1.557.756		7.510	(27.051)	-
133	SDN POLISI 1	SD	Bogor Tengah	4.975.539	925.120.000		930.095.539	140.184.000	730.225.219	57.400.000	-	-	927.809.219	2.286.320		329.802	-	-
134	SDN POLISI 2	SD	Bogor Tengah	109.062	209.280.000		209.389.062	26.400.000	152.908.325	29.990.000	-	-	209.298.325	90.737		19.422	-	-
135	SDN POLISI 4	SD	Bogor Tengah	322.819	695.040.000		695.362.819	103.800.000	529.900.702	52.750.000	8.500.000	-	694.950.702	412.117		203.517	-	-
136	SDN POLISI 5	SD	Bogor Tengah	84.629	216.320.000		216.404.629	36.000.000	153.414.629	26.990.000	-	-	216.404.629	-		51.107	-	-
137	SDN RODA	SD	Bogor Tengah	247.000	171.360.000		171.607.000	30.600.000	120.212.036	9.450.000	4.400.000	-	164.662.036	6.944.964		12.221	109.211	-
138	SDN SEMPUR KALER	SD	Bogor Tengah	81.497	186.720.000		186.801.497	28.176.000	143.137.014	14.600.000	-	-	185.913.014	888.483		50.473	-	-
139	SDN SEMPUR KIDUL	SD	Bogor Tengah	946.692	152.480.000		153.426.692	23.640.000	114.796.600	9.940.000	5.000.000	-	153.376.600	50.092		22.423	-	-
140	SDN SINDANGSARI (BOTENG)	SD	Bogor Tengah	380.479	200.640.000		201.020.479	30.144.000	142.703.177	28.020.000	-	-	200.867.177	153.302		51.738	-	-
141	SDN TEGALGA 1	SD	Bogor Tengah	595.671	212.320.000		212.915.671	37.650.000	142.303.150	29.352.500	3.540.000	-	212.845.650	70.021		15.375	63.195	-
142	SDN TEGALGA 2	SD	Bogor Tengah	1.632.885	208.640.000		210.272.885	31.733.000	147.384.010	22.500.000	8.600.000	-	210.217.010	55.875		19.390	-	-
143	SDN BABAKAN ASEM	SD	Bogor Timur	144.459	143.360.000		143.504.459	19.800.000	103.883.900	19.548.700	-	-	143.232.600	271.859		36.481	(7.989)	-
144	SDN BANGKA 3	SD	Bogor Timur	360.318	548.480.000		548.840.318	87.500.000	387.054.750	63.940.000	7.500.000	-	545.994.750	2.845.568	1.399.568	277.953	445.866	445.866
145	SDN BANTARKEMANG 1	SD	Bogor Timur	585.040	164.000.000		164.585.040	30.000.000	117.725.780	11.800.000	4.300.000	-	163.825.780	759.260		40.026	-	-

No	NamaSekolah	Jenjang	Kecamatan	Saldo bos Th Lalu	Pen Pendapatan Dapodik 1 s.d 4 th 2019	Pendapatan BOS Kinerja 2019	JUMLAH PENDAPATAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bel M. Peralatan Mesin	Bel Modal Lainnya	Bel Modal gedung Ged	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS	Koreksi Saldo yang Belum Tercatat	Jas TW 1,2,dan 3 Th 2019	Sisa Bunga Bank Kekurangan Setor Th 2018	Disetor ke KASDA
146	SDN BANTARKEMANG 2	SD	Bogor Timur	208.807	178.400.000		178.608.807	25.380.000	132.175.675	9.500.000	11.500.000	-	178.555.675	53.132		54.961	(24.547)	-
147	SDN BANTARKEMANG 3	SD	Bogor Timur	70.160	280.960.000		281.030.160	38.700.000	154.114.650	70.870.000	17.232.500	-	280.917.150	113.010		93.505	-	-
148	SDN BANTARKEMANG 6	SD	Bogor Timur	439.391	418.880.000		419.319.391	49.200.000	288.965.851	54.450.000	18.720.000	-	411.335.851	7.983.540		123.252	-	-
149	SDN CIHEULEUT 1	SD	Bogor Timur	741.450	265.920.000		266.661.450	38.480.000	159.516.030	52.950.000	15.710.000	-	266.656.030	5.420		89.253	-	-
150	SDN CIHEULEUT 2	SD	Bogor Timur	392.799	334.080.000		334.472.799	45.600.000	239.206.526	37.090.000	10.530.000	-	332.426.526	2.046.273		100.232	8.149	-
151	SDN DUTA PAKUAN	SD	Bogor Timur	421.417	265.920.000		266.341.417	35.400.000	158.085.020	52.110.000	20.700.500	-	266.295.520	45.897		87.311	-	-
152	SDN KATULAMPA 1	SD	Bogor Timur	44.530	308.480.000		308.524.530	49.200.000	213.572.870	25.049.566	20.700.500	-	308.522.936	1.594		126.853	-	-
153	SDN KATULAMPA 2	SD	Bogor Timur	367.197	195.200.000		195.567.197	18.060.000	135.408.199	25.680.000	16.365.500	-	195.513.699	53.498		54.818	4.180	-
154	SDN KATULAMPA 3	SD	Bogor Timur	710.893	245.440.000		246.150.893	33.320.000	174.931.039	31.290.000	4.312.000	-	243.853.039	2.297.854		83.271	46	-
155	SDN KATULAMPA 5	SD	Bogor Timur	3.657.687	364.480.000		368.137.687	54.360.000	254.362.226	59.020.000	-	-	367.742.226	395.461		174.027	327.889	327.889
156	SDN OTISTA	SD	Bogor Timur	771.408	315.680.000		316.451.408	48.000.000	246.953.575	18.400.000	-	-	313.353.575	3.097.833		117.045	142.453	-
157	SDN PAJAJARAN	SD	Bogor Timur	1.969.896	324.960.000		326.929.896	47.000.000	220.928.400	38.300.000	20.492.000	-	326.720.400	209.496		120.597	-	-
158	SDN SINDANGRASA	SD	Bogor Timur	840.668	381.440.000		382.280.668	53.520.000	268.055.580	46.770.000	13.900.000	-	382.245.580	35.088		137.342	27.912	-
159	SDN SINDANGSARI 1	SD	Bogor Timur	369.970	246.240.000		246.609.970	36.600.000	176.259.970	33.750.000	-	-	246.609.970	-		78.746	280.054	-
160	SDN SINDANGSARI 2	SD	Bogor Timur	138.054	244.480.000		244.618.054	36.000.000	161.869.980	37.750.000	7.849.800	-	243.469.780	1.148.274		86.181	19.378	-
161	SDN SUKASARI	SD	Bogor Timur	556.349	622.400.000		622.956.349	89.900.000	326.601.043	140.505.000	58.929.200	-	615.935.243	7.021.106		170.313	49.982	-
162	SDN TAJUR 1	SD	Bogor Timur	141.248	434.880.000	221.000.000	656.021.248	66.600.000	279.634.448	88.660.000	-	-	434.894.448	221.126.800		167.488	461.420	-
163	SDN TAJUR 2	SD	Bogor Timur	2.340.482	356.800.000	189.000.000	548.140.482	51.675.000	270.683.806	16.937.500	17.516.750	-	356.813.056	191.327.426		110.424	1.157	1.157
164	SDN TAJUR 3	SD	Bogor Timur	60.074	226.240.000		226.300.074	43.200.000	145.426.900	24.290.000	13.350.000	-	226.266.900	33.174		75.901	-	-
165	SDN BANTARJATI 1	SD	Bogor Utara	537.813	265.440.000		265.977.813	40.200.000	199.578.132	20.697.000	-	-	260.475.132	5.502.681		118.189	-	-
166	SDN BANTARJATI 5	SD	Bogor Utara	53.980	436.640.000		436.693.980	65.150.000	215.455.880	133.780.000	11.405.000	-	425.790.880	10.903.100		203.310	-	-
167	SDN BANTARJATI 6	SD	Bogor Utara	116.978	206.560.000		206.676.978	31.080.000	145.110.000	30.000.000	-	-	206.190.000	486.978		53.254	-	-
168	SDN BANTARJATI 7	SD	Bogor Utara	195.377	139.680.000		139.875.377	21.600.000	102.716.331	6.913.000	7.825.000	-	139.054.331	821.046		27.084	364	-
169	SDN BANTARJATI 8	SD	Bogor Utara	1.918.597	260.000.000	159.000.000	420.918.597	31.440.000	146.662.580	74.857.000	4.343.000	-	257.302.580	163.616.017		98.484	-	-
170	SDN BANTARJATI 9	SD	Bogor Utara	134.020	300.960.000		301.094.020	44.280.000	235.296.180	18.350.000	-	-	297.926.180	3.167.840		95.033	-	-
171	SDN BHAYANGKARI	SD	Bogor Utara	713.192	152.480.000		153.193.192	23.160.000	105.733.635	24.000.000	-	-	152.893.635	299.557		33.835	-	-
172	SDN BOGOR BARU	SD	Bogor Utara	1.282.033	165.600.000		166.882.033	26.520.000	134.303.887	6.020.000	-	-	166.843.887	38.146		55.187	-	-
173	SDN CEGER 1	SD	Bogor Utara	25.000	220.960.000		220.985.000	32.400.000	147.455.777	41.000.000	-	-	220.855.777	129.223		62.437	-	-
174	SDN CEGER 2	SD	Bogor Utara	109.473	129.280.000		129.389.473	19.080.000	89.787.000	20.150.000	-	-	129.017.000	372.473		32.520	(846)	-
175	SDN CIBULUH 1	SD	Bogor Utara	12.299.983	476.480.000		488.779.983	69.600.000	335.046.045	72.390.000	8.103.000	-	485.139.045	3.640.938		229.958	-	-
176	SDN CIBULUH 2	SD	Bogor Utara	349.811	303.040.000		303.389.811	42.300.000	167.164.098	15.700.000	-	-	225.164.098	78.225.713		35.996	-	-
177	SDN CIBULUH 3	SD	Bogor Utara	3.262.206	289.440.000		292.702.206	42.255.000	180.397.946	52.400.000	4.500.000	-	279.552.946	13.149.260		144.818	-	-
178	SDN CIBULUH 4	SD	Bogor Utara	123.774	353.440.000		353.563.774	54.780.000	248.406.449	50.100.000	-	-	353.286.449	277.325		108.694	-	-
179	SDN CIBULUH 5	SD	Bogor Utara	501.355	172.000.000		172.501.355	25.200.000	113.047.200	34.194.000	-	-	172.441.200	60.155		46.714	3.778	-
180	SDN CIBULUH 6	SD	Bogor Utara	1.083.814	301.440.000		302.523.814	46.500.000	213.619.367	33.500.000	-	-	293.619.367	8.904.447		124.134	38.295	38.295
181	SDN CILUAR 1	SD	Bogor Utara	571.687	368.000.000		368.571.687	55.560.000	231.089.456	58.500.000	6.500.000	-	351.649.456	16.922.231		176.409	1.843	-
182	SDN CILUAR 2	SD	Bogor Utara	2.112.500	463.840.000		465.952.500	68.400.000	313.417.786	60.000.000	-	-	441.817.786	24.134.714		225.140	-	-
183	SDN CILUAR 3	SD	Bogor Utara	5.108.843	317.920.000		323.028.843	47.700.000	173.402.900	47.443.700	44.871.300	-	313.417.900	9.610.943		124.505	1	-
184	SDN CIMAHPAR 1	SD	Bogor Utara	50.427	395.360.000		395.410.427	55.200.000	277.793.000	62.247.300	-	-	395.240.300	170.127		148.856	-	-
185	SDN CIMAHPAR 2	SD	Bogor Utara	1.807.283	398.720.000		400.527.283	58.800.000	286.136.000	54.984.000	-	-	399.920.000	607.283		121.278	-	-
186	SDN CIMAHPAR 3	SD	Bogor Utara	36.520	269.440.000		269.476.520	40.200.000	187.280.083	32.685.000	-	-	260.165.083	9.311.437		68.968	-	-
187	SDN CIMAHPAR 4	SD	Bogor Utara	83.420	212.480.000		212.563.420	33.312.000	161.647.938	16.590.000	-	-	211.549.938	1.013.482		68.384	-	-
188	SDN CIMAHPAR 5	SD	Bogor Utara	833.128	102.560.000		103.393.128	14.760.000	78.318.124	10.315.000	-	-	103.393.124	4		31.916	-	-
189	SDN CIPARIGI	SD	Bogor Utara	10.034.500	384.480.000		394.514.500	53.400.000	276.451.005	63.510.295	-	-	393.361.300	1.153.200		216.640	-	-
190	SDN KAMPUNG SAWAH	SD	Bogor Utara	290.686	243.040.000		243.330.686	36.000.000	179.625.042	27.650.000	-	-	243.275.042	55.644		46.856	-	-
191	SDN KAUMSARI	SD	Bogor Utara	234.448	147.360.000		147.594.448	21.480.000	96.694.247	27.000.000	2.300.000	-	147.474.247	120.201		49.716	-	-
192	SDN KAWUNGLUWUK	SD	Bogor Utara	1.110.974	585.760.000		586.870.974	83.310.000	436.445.355	57.326.500	9.613.500	-	586.695.355	175.619	1.085.974	244.519	-	-
193	SDN KEDUNG HALANG 1	SD	Bogor Utara	1.114.208	402.720.000		403.834.208	60.840.000	265.835.524	77.100.000	-	-	403.775.524	58.684		135.529	-	-
194	SDN KEDUNG HALANG 2	SD	Bogor Utara	649.484	266.400.000		267.049.484	39.000.000	146.211.131	70.650.000	8.900.000	-	264.761.131	2.288.353		103.968	-	-
195	SDN KEDUNG HALANG 3	SD	Bogor Utara	1.214.750	303.040.000		304.254.750	45.480.000	229.784.750	22.300.000	6.690.000	-	304.254.750	-		88.342	-	-
196	SDN KEDUNG HALANG 5	SD	Bogor Utara	602.888	282.080.000		282.682.888	39.300.000	203.401.570	39.980.000	-	-	282.681.570	1.318		81.854	-	-

No	NamaSekolah	Jenjang	Kecamatan	Saldo bos Th Lalu	Pen Pendapatan Dapodik 1 s.d 4 th 2019	Pendapatan BOS Kinerja 2019	JUMLAH PENDAPATAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bel M. Peralatan Mesin	Bel Modal Lainnya	Bel Modal gedung Ged	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS	Koreksi Saldo yang Belum Tercatat	Jas TW 1,2,dan 3 Th 2019	Sisa Bunga Bank Kekurangan Setor Th 2018	Disetor ke KASDA
197	SDN NEGLASARI	SD	Bogor Utara	4.948.710	292.480.000		297.428.710	45.240.000	214.637.990	37.540.000	-	-	297.417.990	10.720		115.843	-	-
198	SDN SELAAWI	SD	Bogor Utara	3.215.261	334.400.000		337.615.261	51.120.000	213.826.181	67.760.000	400.000	-	333.106.181	4.509.080		132.463	-	-
199	SDN SINDANGSARI	SD	Bogor Utara	162.146	589.440.000		589.602.146	86.220.000	380.330.662	90.650.000	-	-	557.200.662	32.401.484		160.539	-	-
200	SDN TUNGILIS	SD	Bogor Utara	1.259.651	158.880.000		160.139.651	22.350.000	99.805.777	31.800.000	2.405.000	-	156.360.777	3.778.874		41.716	-	-
201	SDN BUBULAK	SD	Tanah Sareal	282.878	172.320.000		172.602.878	25.800.000	125.961.128	15.300.000	4.900.000	-	171.961.128	641.750		36.745	-	-
202	SDN CIBADAK	SD	Tanah Sareal	448.038	296.800.000		297.248.038	45.360.000	211.750.066	35.000.000	5.120.000	-	297.230.066	17.972		85.948	-	-
203	SDN CIMANGGU	SD	Tanah Sareal	1.118.925	488.000.000		489.118.925	69.600.000	364.705.781	41.200.000	13.612.500	-	489.118.281	644		174.637	-	-
204	SDN JULANG	SD	Tanah Sareal	256.383	462.240.000		462.496.383	70.175.000	339.688.796	44.500.000	8.000.000	-	462.363.796	132.587		103.218	157.195	-
205	SDN KAYUMANIS 1	SD	Tanah Sareal	537.705	518.560.000		519.097.705	81.360.000	346.283.110	90.830.000	354.000	-	518.827.110	270.595		230.085	-	-
206	SDN KAYUMANIS 2	SD	Tanah Sareal	8.504.317	207.040.000		215.544.317	30.000.000	132.695.437	46.300.000	1.200.000	-	210.195.437	5.348.880		59.509	-	-
207	SDN KEBON PEDES 1	SD	Tanah Sareal	563.076	630.720.000		631.283.076	76.500.000	532.989.000	19.720.000	-	-	629.209.000	2.074.076		488.495	-	-
208	SDN KEBON PEDES 3	SD	Tanah Sareal	1.432.097	564.800.000		566.232.097	84.000.000	434.664.939	46.657.197	-	-	565.322.136	909.961		203.393	-	-
209	SDN KEBON PEDES 5	SD	Tanah Sareal	2.469.658	581.760.000		584.229.658	88.800.000	380.470.539	108.140.000	-	-	577.410.539	6.819.119		224.268	-	-
210	SDN KEBON PEDES 7	SD	Tanah Sareal	71.417	344.960.000		345.031.417	57.600.000	263.456.827	22.500.000	720.000	-	344.276.827	754.590		74.393	-	-
211	SDN KEDUNG BADAQ 1	SD	Tanah Sareal	1.061.261	311.360.000		312.421.261	45.180.000	241.241.261	26.000.000	-	-	312.421.261	-		100.587	-	-
212	SDN KEDUNG BADAQ 2	SD	Tanah Sareal	2.847.067	251.360.000		254.207.067	38.400.000	181.818.097	24.400.000	-	-	244.618.097	9.588.970		91.482	-	-
213	SDN KEDUNG BADAQ 3	SD	Tanah Sareal	1.841.504	128.320.000		130.161.504	19.800.000	78.163.008	32.000.000	-	-	129.963.008	198.496		34.709	-	-
214	SDN KEDUNG BADAQ 4	SD	Tanah Sareal	318.191	318.560.000		318.878.191	46.800.000	240.381.838	31.000.000	-	-	318.181.838	696.353		70.430	-	-
215	SDN KEDUNG JAYA 1	SD	Tanah Sareal	2.798.979	268.000.000		270.798.979	32.400.000	212.543.040	22.765.000	-	-	267.708.040	3.090.939		92.109	-	-
216	SDN KEDUNG JAYA 2	SD	Tanah Sareal	2.083.259	298.720.000		300.803.259	42.000.000	198.205.876	48.914.100	6.000.000	-	295.119.976	5.683.283		121.588	-	-
217	SDN KEDUNG WARINGIN	SD	Tanah Sareal	6.714.667	318.880.000		325.594.667	46.800.000	240.465.262	38.165.000	-	-	325.430.262	164.405		122.086	245.003	245.003
218	SDN KENCANA 1	SD	Tanah Sareal	1.021.238	431.520.000		432.541.238	61.750.000	305.141.442	62.018.800	-	-	428.910.242	3.630.996		231.741	-	-
219	SDN KENCANA 2	SD	Tanah Sareal	8.711.075	474.240.000		482.951.075	68.928.000	311.932.125	101.232.000	-	-	482.092.125	858.950		256.475	102.870	-
220	SDN KENCANA 3	SD	Tanah Sareal	330.585	413.760.000		414.090.585	61.440.000	308.805.622	35.000.000	-	-	405.245.622	8.844.963		83.523	-	-
221	SDN KUKUPU 1	SD	Tanah Sareal	12.575.034	391.840.000		404.415.034	49.200.000	219.237.700	94.000.000	16.569.500	-	379.007.200	25.407.834		187.165	23.405	-
222	SDN KUKUPU 2	SD	Tanah Sareal	1.290.387	494.720.000		496.010.387	64.312.500	341.243.460	64.490.000	-	-	470.045.960	25.964.427		221.302	-	-
223	SDN KUKUPU 3	SD	Tanah Sareal	1.121.841	264.000.000		265.121.841	39.000.000	164.417.371	61.668.441	-	-	265.085.812	36.029		85.368	-	-
224	SDN PONDOK RUMPUT	SD	Tanah Sareal	976.580	596.480.000		597.456.580	82.350.000	392.280.442	102.250.000	20.000.000	-	596.880.442	576.138		234.510	-	-
225	SDN SITUPETE	SD	Tanah Sareal	2.666.280	395.840.000		398.506.280	58.800.000	254.567.651	72.100.000	8.372.000	-	393.839.651	4.666.629		127.935	-	-
226	SDN SUKADAMAI 1	SD	Tanah Sareal	1.119.434	282.880.000		283.999.434	32.850.000	232.506.621	6.050.000	10.850.000	-	282.256.621	1.742.813		94.961	-	-
227	SDN SUKADAMAI 2	SD	Tanah Sareal	667.348	363.040.000		363.707.348	38.700.000	252.048.102	65.800.000	3.756.000	-	360.304.102	3.403.246		158.745	13.922	-
228	SDN SUKADAMAI 3	SD	Tanah Sareal	12.189.226	684.960.000		697.149.226	85.750.000	489.751.834	71.600.000	-	-	647.101.834	50.047.392		316.027	262.274	-
229	SDN SUKARESMI	SD	Tanah Sareal	284.709	228.160.000		228.444.709	34.680.000	176.161.668	17.417.000	-	-	228.258.668	186.041		46.319	-	-
230	SDN TANAH SAREAL 1	SD	Tanah Sareal	4.742.151	281.440.000		286.182.151	41.850.000	162.423.808	81.000.000	-	-	285.273.808	908.343		85.601	-	-
231	SDN TANAH SAREAL 4	SD	Tanah Sareal	1.197.727	253.280.000		254.477.727	37.200.000	172.895.190	38.423.000	1.445.000	-	249.963.190	4.514.537		100.091	-	-
	JUMLAH			410.956.121	85.232.640.000	3.096.000.000	88.739.596.121	12.528.279.600	59.797.366.661	10.757.641.176	1.461.137.310	-	84.544.424.747	4.195.171.374	3.254.765	28.285.221	7.005.099	4.060.043

Lampiran 7

Saldo Akhir
621.182.345
645.300.078
19.804.936
28.297.305
1.947.856
5.901.581
4.470.085
18.940.928
11.919.878
36.749.349
621.306.913
7.584.735
2.259.479
3.227.445
31.373.930
342.698
10.989.908
25.789.705
4.236.976
25.344.135
381.606
968.317
57.211
704.847
1.514.737
109.657
1.938.849
7.575.650
10.763.868
3.351.462
11.296.163
6.631.829
29.630
888.478
251.490
1.152.001
237.402
1.114.041
598.711
5.265.018
337.703
300.000
129.530.017

Saldo Akhir
54.258
276.953
438.642
313.539
67.210
3.686.399
140.432
1.000.503
8.414.868
10.196.607
29.246.507
4.223.365
46.920.412
2.713.553
2.380.270
2.083.090
535.988.389
54.185
88.529
77.853
349.755
24.904
44.986
60.259
103.719
2.367
381.909
24.662.544
1.530.069
181.347
171.754
409.450
916.295
842.318
617.140
35.170.385
1.665.911
2.871.707
643.051
411.286
2.127.454
33.746.300
13.447.875
181.672
529.818
5.391.472
1.138.775
1.074.665
118.785
33.517
6.508.080

Saldo Akhir
1.334.660
1.321.468
25.837.546
24.411.143
1.022.628
130.144
2.615.803
3.840.966
8.947.147
915.628
254.455
1.481.724
5.170.299
522.393
127.298
4.787.436
77.312
609.728
6.624.672
124.969
299.309
192.229
2.203.624
128.825
385.497
902.587
50.618
37.806
108.390
158.101
2.183.961
885.203
2.039.686
76.000
1.483.531
220.056
226.772
1.538.215
2.616.122
110.159
615.634
51.107
7.066.396
938.956
72.515
205.040
148.591
75.265
300.351
4.523.089
799.286

Saldo Akhir
83.546
206.515
8.106.792
94.673
2.154.654
133.208
128.447
112.496
2.381.171
569.488
3.357.331
330.093
200.342
358.800
1.253.833
7.241.401
221.755.708
191.437.850
109.075
5.620.870
11.106.410
540.232
848.494
163.714.501
3.262.873
333.392
93.333
191.660
404.147
3.870.896
78.261.709
13.294.078
386.019
110.647
9.028.581
17.100.483
24.359.854
9.735.449
318.983
728.561
9.380.405
1.081.866
31.920
1.369.840
102.500
169.917
1.506.112
194.213
2.392.321
88.342
83.172

Saldo Akhir
126.563
4.641.543
32.562.023
3.820.590
678.495
103.920
175.281
393.000
500.680
5.408.389
2.562.571
1.113.354
7.043.387
828.983
100.587
9.680.452
233.205
766.783
3.183.048
5.804.871
286.491
3.862.737
1.218.295
8.928.486
25.618.404
26.185.729
121.397
810.648
4.794.564
1.837.774
3.575.913
50.625.693
232.360
993.944
4.614.628
4.229.656.416

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Pajak Daerah
(Yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah)
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Jenis Pajak	Saldo Awal 31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Piutang s.d 31 Des 2018 (Rp)	Saldo Piutang s.d 31 Des 2018 Setelah Koreksi (Rp)	Ketetapan Tahun 2019 (Rp)	Penerimaan 2019 (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2019 (Rp)
1	2	3	4			5	10 =(3+7-8)+(4-5)
1	HOTEL	116.470.519	(25.660.000)	90.810.519	95.718.234.230	95.247.182.735	561.862.014
2	RESTORANT	1.528.716.726	(401.232.210)	1.127.484.516	153.607.453.018	153.466.175.721	-
3	PAJAK REKLAME	1.533.717.072	79.856.269	1.613.573.341	11.379.539.919	11.708.055.331	1.268.761.813
4	PARKIR	180.985.454	(3.222.701)	177.762.753	15.400.849.046	15.424.581.199	-
5	HIBURAN	44.016.265	(16.443.960)	27.572.305	33.022.062.922	33.017.933.672	1.285.057.929
6	PAJAK AIR TANAH	607.736.246		607.736.246	4.200.530.906	4.665.857.092	-
7	PPJ				53.438.870.690	53.438.870.690	154.030.600
8	PBB P2	272.281.736.640	(1.415.417.358)	270.866.319.282	192.549.185.329	144.559.249.268	-
	J u m l a h	276.293.378.922	(1.782.119.960)	274.511.258.962	559.316.726.060	511.527.905.708	318.856.255.343
							322.300.079.314

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Retribusi Jasa Usaha
(Yang dipungut oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2018	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d 2018	Penambahan piutang 2019	Saldo Akhir Piutang 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 3 - 5 + 6</i>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	39.625.000,00	872.760.000,00	23.675.000,00	13.925.000,00	29.875.000,00
	Jumlah	39.625.000,00	872.760.000,00	23.675.000,00	13.925.000,00	29.875.000,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor)
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2018	Progres Penyelesaian Piutang Pokok	Piutang 2019	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)													
	Tahun 2009	51.142.345,00	-	-	51.142.345,00				51.142.345,00				51.142.345,00	51.142.345,00
	Tahun 2010	60.480.365,00	-	-	60.480.365,00				60.480.365,00				60.480.365,00	60.480.365,00
	Tahun 2011	40.396.240,00	-	-	40.396.240,00				40.396.240,00				40.396.240,00	40.396.240,00
	Tahun 2012	51.275.140,00	-	-	51.275.140,00				51.275.140,00				51.275.140,00	51.275.140,00
	Tahun 2013	214.732.458,00	-	-	214.732.458,00				214.732.458,00				214.732.458,00	214.732.458,00
	Tahun 2014	1.173.203.259,00	-	-	1.173.203.259,00				1.173.203.259,00				1.173.203.259,00	1.173.203.259,00
	Tahun 2015	46.322.219,00	-	-	46.322.219,00				46.322.219,00				46.322.219,00	46.322.219,00
	Tahun 2016	246.621.971,00	-	-	246.621.971,00				246.621.971,00				246.621.971,00	246.621.971,00
	Tahun 2017	158.522.532,00	-	-	158.522.532,00				158.522.532,00				158.522.532,00	158.522.532,00
	Tahun 2018	73.280.452,00	-	-	73.280.452,00				73.280.452,00				73.280.452,00	73.280.452,00
	Tahun 2019			1.535.089.124,00	1.535.089.124,00	1.144.873.874,00	268.942.536,00	121.272.714,00		5.724.369,37	26.894.253,60	60.636.357,00		93.254.979,97
	Jumlah	2.115.976.981,00	-	-	1.535.089.124,00	1.144.873.874,00	268.942.536,00	121.272.714,00	2.115.976.981,00	5.724.369,37	26.894.253,60	60.636.357,00	2.115.976.981,00	2.209.231.960,97
2	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PPTR)													
	Tahun 2009	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2010	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2011	51.007.926,00	-	-	51.007.926,00				51.007.926,00				51.007.926,00	51.007.926,00
	Tahun 2012	3.910.950,00	-	-	3.910.950,00				3.910.950,00				3.910.950,00	3.910.950,00
	Tahun 2013	18.079.550,00	-	-	18.079.550,00				18.079.550,00				18.079.550,00	18.079.550,00
	Tahun 2014	49.089.900,00	-	-	49.089.900,00				49.089.900,00				49.089.900,00	49.089.900,00
	Tahun 2015	18.103.650,00	-	-	18.103.650,00				18.103.650,00				18.103.650,00	18.103.650,00
	Tahun 2016	6.630.300,00	-	-	6.630.300,00				6.630.300,00				6.630.300,00	6.630.300,00
	Tahun 2017	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2018	1.256.700,00	1.256.700,00	-	-				-				-	-
	Tahun 2019			-	-				-				-	-
	Jumlah	148.078.976,00	1.256.700,00	-	146.822.276,00	-	-	-	146.822.276,00	-	-	-	146.822.276,00	146.822.276,00
3	Retribusi Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan (HO)													
	Tahun 2009	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2010	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2011	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2012	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2013	21.114.150,00	-	-	21.114.150,00				21.114.150,00				21.114.150,00	21.114.150,00
	Tahun 2014	5.955.680,00	-	-	5.955.680,00				5.955.680,00				5.955.680,00	5.955.680,00
	Tahun 2015	81.109.570,00	-	-	81.109.570,00				81.109.570,00				81.109.570,00	81.109.570,00
	Tahun 2016	9.015.725,00	-	-	9.015.725,00				9.015.725,00				9.015.725,00	9.015.725,00
	Tahun 2017	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2018	-	-	-	-				-				-	-
	Tahun 2019			-	-				-				-	-
	Jumlah	117.195.125,00	-	-	117.195.125,00				117.195.125,00				117.195.125,00	117.195.125,00
	Jumlah	2.381.251.082,00	1.256.700,00	1.535.089.124,00	3.915.083.506,00	1.144.873.874,00	268.942.536,00	121.272.714,00	2.379.994.382,00	5.724.369,37	26.894.253,60	60.636.357,00	2.379.994.382,00	2.473.249.361,97

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2018	Penambahan Piutang s/d 2018	Pembayaran Piutang s/d 2018	Sisa Piutang s/d tahun 2018	Penerimaan Tahun Berjalan	Penambahan piutang 2019	Saldo Akhir Piutang 2019
1	2	3		5		4	6	7 = 3 - 5 + 6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)	102.420.840,00	178.927.032,00	24.804.408,00	256.543.464,00	118.987.426,00	-	256.543.464,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (Usaha)	15.063.504,00	88.174.400,00	7.665.960,00	95.571.944,00	4.277.084.493,00	386.256.909	481.828.853,00
	Jumlah	117.484.344,00	267.101.432,00	32.470.368,00	352.115.408,00	4.396.071.919,00	386.256.909,00	738.372.317,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/ Pembayaran	Saldo Akhir 2019
1	piutang retribusi pelayanan kesehatan (Dana Non Kapitasi pada Puskesmas kepada BPJS Kesehatan)	-	111.160.000,00	-	111.160.000,00
-	Puskesmas Bogor timur		2.845.000		
-	Puskesmas Bogor Utara		14.890.000		
-	Puskesmas Cipaku		19.640.000		
-	Puskesmas Gang Kelor		965.000		
-	Puskesmas Kayu Manis		460.000		
-	Puskesmas Merdeka		3.500.000		
-	Puskesmas Pancasan		1.265.000		
-	Puskesmas Pasirmulya		7.650.000		
-	Puskesmas Mekarwangi		17.200.000		
-	Puskesmas Sempur		3.750.000		
-	Puskesmas Sindangbarang		10.500.000		
-	Puskesmas Tanah Sareal		13.230.000		
-	Puskesmas Tegal Gundil		15.265.000		
		-	111.160.000,00	-	111.160.000,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
(Yang dipungut oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Nama Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang Denda per 31 Desember 2018	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d 2018	Penambahan piutang 2019	Saldo Akhir Piutang 2019
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 5 + 6
1	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	26.575.000,00	272.225.000,00	23.500.000,00	89.500.000,00	92.575.000,00
	Jumlah	26.575.000,00	272.225.000,00	23.500.000,00	89.500.000,00	92.575.000,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Denda Pajak Daerah
(Yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah)
Per 31 Desember 2019

No	Jenis Pajak	Piutang Denda per 31 Des 2018	Koreksi Denda Tahun Pajak s/d 2018	Penambahan Denda berjalan	Pembayaran Denda s/d Tahun Pajak 2018	Sisa Piutang Tahun Pajak s/d 2018	Piutang Denda 2019	Saldo Piutang Denda per 31 Des 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pajak Hotel	14.587.314	3.108.201	9.673.300	6.064.400	15.088.013	18.631.950	33.719.963,22
2	Pajak Restoran	519.446.299	(119.545.022)	33.563.879	38.848.057	394.617.099	41.756.262	436.373.361,34
3	Pajak Reklame	354.018.645	(52.215.321)	59.449.760	44.231.625	421.452.101	20.766.426	442.218.526,50
4	Pajak Parkir	60.454.005	795.061	3.329.701	9.358.952	55.219.815	2.310.503	57.530.318,00
5	Pajak Hiburan	12.322.855	332.879	195.406	133.275	12.052.106	921.600	12.973.706,00
6	Pajak Air Tanah	38.203.743	-	7.360.896	12.479.617	33.085.023	4.302.877	37.387.899,76
7	PBB P2	51.080.952.460	2.820.961.432	18.352.231.846	4.600.472.283	62.011.750.592	6.377.206.641	68.388.957.233,00
	JUMLAH	52.079.985.321,08	2.653.437.231	18.465.804.786	4.711.588.209	62.943.264.749	6.465.896.259	69.409.161.007,82

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Denda Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor)
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2018	Progres Penyelesaian Piutang Denda	Penambahan Piutang Denda 2019	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Kriteria Kualitas Piutang Denda				Penyisihan Piutang Denda				Jumlah Penyisihan Piutang Denda
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)													
	Tahun 2009	1.138.000,00	-	-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	1.138.000,00
	Tahun 2010	1.387.107,00	-	-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	1.387.107,00
	Tahun 2011	1.163.296,00	-	-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	1.163.296,00
	Tahun 2012	22.019.458,00	-	-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	22.019.458,00
	Tahun 2013	118.687.425,00	-	-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	118.687.425,00
	Tahun 2014	440.935.944,00	-	-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	440.935.944,00
	Tahun 2015	22.234.665,00	-	-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	22.234.665,00
	Tahun 2016	118.378.546,00	-	-	118.378.546,00	-	-	-	118.378.546,00	-	-	-	118.378.546,00	118.378.546,00
	Tahun 2017	62.978.180,00	-	13.112.635,00	76.090.815,00	-	-	-	76.090.815,00	-	-	-	76.090.815,00	76.090.815,00
	Tahun 2018	7.719.986,00	-	17.587.308,00	25.307.294,00	-	-	-	25.307.294,00	-	-	-	25.307.294,00	25.307.294,00
	Tahun 2019			40.906.718,00	40.906.718,00	11.355.079,00	13.872.740,00	15.678.899,00		56.775,40	1.387.274,00	7.839.449,50		9.283.498,90
	Jumlah	796.642.607,00	-	71.606.661,00	868.249.268,00	11.355.079,00	13.872.740,00	15.678.899,00	827.342.550,00	56.775,40	1.387.274,00	7.839.449,50	827.342.550,00	836.626.048,90
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PPTR)													
	Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2010	(91.126,00)	-	-	(91.126,00)	-	-	-	(91.126,00)	-	-	-	(91.126,00)	(91.126,00)
	Tahun 2011	1.030.425,00	-	-	1.030.425,00	-	-	-	1.030.425,00	-	-	-	1.030.425,00	1.030.425,00
	Tahun 2012	292.982,00	-	-	292.982,00	-	-	-	292.982,00	-	-	-	292.982,00	292.982,00
	Tahun 2013	17.683.872,00	-	-	17.683.872,00	-	-	-	17.683.872,00	-	-	-	17.683.872,00	17.683.872,00
	Tahun 2014	16.971.465,00	-	-	16.971.465,00	-	-	-	16.971.465,00	-	-	-	16.971.465,00	16.971.465,00
	Tahun 2015	8.689.752,00	-	-	8.689.752,00	-	-	-	8.689.752,00	-	-	-	8.689.752,00	8.689.752,00
	Tahun 2016	3.182.544,00	-	-	3.182.544,00	-	-	-	3.182.544,00	-	-	-	3.182.544,00	3.182.544,00
	Tahun 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2018	50.268,00	75.402,00	25.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2019													
	Jumlah	47.810.182,00	75.402,00	25.134,00	47.759.914,00	-	-	-	47.759.914,00	-	-	-	47.759.914,00	47.759.914,00
3	Retribusi Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan (HO)													
	Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2013	15.968.501,00	-	-	15.968.501,00	-	-	-	15.968.501,00	-	-	-	15.968.501,00	15.968.501,00
	Tahun 2014	50.021.021,00	-	-	50.021.021,00	-	-	-	50.021.021,00	-	-	-	50.021.021,00	50.021.021,00
	Tahun 2015	38.932.594,00	-	-	38.932.594,00	-	-	-	38.932.594,00	-	-	-	38.932.594,00	38.932.594,00
	Tahun 2016	4.327.548,00	-	-	4.327.548,00	-	-	-	4.327.548,00	-	-	-	4.327.548,00	4.327.548,00
	Tahun 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2019													
	Jumlah	109.249.664,00	-	-	109.249.664,00	-	-	-	109.249.664,00	-	-	-	109.249.664,00	109.249.664,00
	Jumlah	953.702.453,00	75.402,00	71.631.795,00	1.025.258.846,00	11.355.079,00	13.872.740,00	15.678.899,00	984.352.128,00	56.775,40	1.387.274,00	7.839.449,50	984.352.128,00	993.635.626,90

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PADA PPKD
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/ Pembayaran	Saldo Akhir 2019
1	Piutang Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PPKD atas kontribusi Bangun Guna Serah PT Propindo dari tahun 2010 s.d 2018	-	86.512.463,00	-	86.512.463,00
		-	86.512.463,00	-	86.512.463,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Jenis Piutang	SKPD	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/pembayaran	Saldo Akhir 2019
Sesuai PMK 36						
1	PPh 21	PPKD		13.064.989.891,00		13.064.989.891,00
2	PPh 25/29			1.935.688.390,00		1.935.688.390,00
3	PBB Bagi Rata			196.640.935,00		196.640.935,00
4	PBB Migas			228.779.671,00		228.779.671,00
5	PBB Panas Bumi			60.851,00		60.851,00
6	PBB Sektor Lainnya			23.555.748,00		23.555.748,00
7	PBB Migas Biaya Pungut			9.055.811,00		9.055.811,00
8	PBB Panas Bumi Biaya Pungut			2.479,00		2.479,00
9	PBB Sektor Lainnya Biaya Pungut			932.429,00		932.429,00
10	Kehutanan PSDH			12.733.574,00		12.733.574,00
11	Mineral dan Batubara Royalti			37.878.707,00		37.878.707,00
12	Minyak Bumi 15%			1.067.750.884,00		1.067.750.884,00
13	Minyak Bumi 0,5%			35.295.931,00		35.295.931,00
14	Gas Bumi 30%			158.059.143,00		158.059.143,00
15	Gas Bumi 0,5%			2.622.875,00		2.622.875,00
16	Panas Bumi Iuran Tetap			2.009.839,00		2.009.839,00
17	Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah			6.324.655.031,00		6.324.655.031,00
18	Perikanan			170.627.903,00		170.627.903,00
		Jumlah	-	23.271.340.092,00	-	23.271.340.092,00
Sesuai PMK 20						
1	PPh 21	PPKD		3.908.530.248,00	-	3.908.530.248,00
2	PPh 25/29			305.059.989,00	-	305.059.989,00
3	PBB Bagi Rata			585.974.334,00		585.974.334,00
4	PBB Migas			7.099.717,00		7.099.717,00
5	PBB Sektor Lainnya			37.346.498,00		37.346.498,00
6	PBB Migas Biaya Pungut			281.030,00		281.030,00
7	PBB Sektor Lainnya Biaya Pungut			1.478.299,00		1.478.299,00
8	Cukai Hasil Tembakau			135.077.978,00		135.077.978,00
9	Mineral dan Batubara Royalti			161.588.948,00		161.588.948,00
10	Minyak Bumi 15%			1.550.191.611,00		1.550.191.611,00
11	Minyak Bumi 0,5%			51.284.882,00		51.284.882,00
12	Gas Bumi 30%			176.466.689,00		176.466.689,00
13	Gas Bumi 0,5%			3.173.913,00		3.173.913,00
14	Kehutanan PSDH			9.223.446,00		9.223.446,00
15	Perikanan			3.677.289,00		3.677.289,00
16	Panas Bumi Iuran Tetap			16.159.509,00	-	16.159.509,00
17	Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah			15.140.019.820,00	-	15.140.019.820,00
		Jumlah	-	22.092.634.200,00	-	22.092.634.200,00
		TOTAL	-	45.363.974.292,00	-	45.363.974.292,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Jenis Piutang	SKPD	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/pembayaran	Saldo Akhir 2019
<i>Sesuai Kepgub No 973/Kep.205-Bapenda/2020</i>						
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	PPKD	3.985.277.910,00	4.094.763.960,00	3.985.277.910,00	4.094.763.960,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	PPKD	2.163.308.700,00	2.768.093.250,00	2.163.308.700,00	2.768.093.250,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	PPKD	5.000.675.562,00	4.487.919.173,00	5.000.675.562,00	4.487.919.173,00
4	Air Permukaan (APER)	PPKD	30.776.700,00	12.655.200,00	30.776.700,00	12.655.200,00
5	Pajak Rokok	PPKD	65.140.723,00	-	65.140.723,00	-
		Jumlah	11.245.179.595,00	11.363.431.583,00	11.245.179.595,00	11.363.431.583,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG LAINNYA PADA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/ Pembayaran	Saldo Akhir 2019
1	Pemutusan Kontrak Kerja PT. Indocitra Intiperkasa Kegiatan DED Revitalisasi Terminal Baranang Siang (luncuran) berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 510.2/18-TSP/DED.TBS/IX/2010	63.100.000,00	-	-	63.100.000,00
		63.100.000,00	-	-	63.100.000,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
SALDO PIUTANG PERUSAHAAN/ASURANSI
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	NAMA	PIUTANG PER 31 DES 2018	PEMBAYARAN SALDO PIUTANG 2018	PENAMBAHAN PIUTANG 2019	PEMBAYARAN 2019	SALDO AKHIR 2019
1	Ad Medika Ish Project	82.000	-	-	-	82.000
2	Ad Medika Adira	594.200	594.200	8.605.755	5.298.355	3.307.400
3	Ad Medika BNI Life	2.048.740	2.048.740	97.611.348	78.084.721	19.526.627
4	Ad Medika Manulife	3.693.695	3.693.695	3.343.306	3.114.506	228.800
5	Ad Medika Pacific International	1.780.890	-	50.781.198	6.278.931	46.283.157
6	Ad Medika Reliance	120.500	60.000	8.132.952	6.243.552	1.949.900
7	Ad Medika TMS	8.492.604	8.236.904	-	-	255.700
8	Asuransi Abda	13.181.960	811.450	1.694.400	1.358.300	12.706.610
9	Asuransi BPJS Kesehatan I	43.852.820.152	43.852.820.152	158.495.183.715	100.703.394.099	57.791.789.616
10	Dinkes Kota Bogor (JAMKOT)	537.646.200	537.646.100	4.452.121.140	2.074.620.840	2.377.500.400
11	Jamkesda Kabupaten (JAMKAB)	238.429.878	238.429.878	3.766.830.800	3.063.578.900	703.251.900
12	Jamsostek/BPJSTK	66.475.960	59.557.785	391.866.307	347.455.996	51.328.486
13	Asuransi Jiwa Recapital	3.071.400	-	-	-	3.071.400
14	Asuransi Sinar Mas	988.700	906.700	45.957.799	45.796.299	243.500
15	PT.Ande Kerta Sejahtera	5.581.750	-	-	-	5.581.750
16	PDAM Tirta Pakuan Bogor	1.521.072	-	-	-	1.521.072
17	Sepatu Mas Idaman	4.108.500	-	-	-	4.108.500
18	Yakespen Aneka Tambang	3.265.500	3.265.500	4.789.800	4.789.800	-
19	Adhi Karya - RSUD Kota Bogor	340.700	-	-	-	340.700
20	FWD Group Ad-Medika	711.720	711.720	22.586.881	21.740.881	846.000
21	TUGU MANDIRI A.J	344.400	117.400	-	-	227.000
22	Ad Medika CAR	3.409.696	3.409.696	2.950.615	2.328.315	622.300
23	Ad Medika HLGRP	153.200	153.200	-	-	-
24	Kereta Api	1.709.900	138.900	5.411.959	5.057.159	1.925.800
25	A.J Sinarmas MSIG	178.200	178.200	9.398.678	9.315.188	83.490
26	Ad Medika Askrida	82.000	82.000	448.600	448.600	-
27	GRAHA WISATA KENCANA	9.127.324	-	-	-	9.127.324
28	TELKOMEDIKA	137.300	137.300	-	-	-
29	APLIKANUSALINTASARTA	2.596.110	2.019.060	104.763.340	94.683.974	10.656.416
30	TUGU PRATAMA	227.000	200.000	-	-	27.000
31	AA INTERNATIONAL INDONESIA	-	-	22.091.991	22.091.991	-
32	AD-MEDIKA ABDA	-	-	4.239.950	4.223.550	16.400
33	AD-MEDIKA ACA	-	-	2.316.529	2.316.529	-
34	AD-MEDIKA AIA R.INAP	-	-	6.418.020	6.418.020	-
35	AD-MEDIKA AIA R.JALAN	-	-	7.587.863	7.297.163	290.700
36	AD-MEDIKA AIA FINANCIAL	-	-	1.406.271	1.406.271	-
37	AD-MEDIKA SEQUIS LIFE	-	-	734.040	337.950	396.090
38	AD-MEDIKA ANGKASAPURA	-	-	146.800	146.800	-
39	AD-MEDIKA ASTRABUANA	-	-	2.522.267	2.522.267	-
40	AD-MEDIKA AXA FINANCIAL	-	-	3.158.862	3.158.862	-
41	AD-MEDIKA BINTANG	-	-	183.500	89.400	94.100
42	AD-MEDIKA BUMIDA	-	-	11.695.258	9.591.957	2.103.301
43	AD-MEDIKA CIGNA EASY	-	-	244.701	244.701	-
44	AD-MEDIKA EQUITY	-	-	6.508.300	6.426.300	82.000
45	AD-MEDIKA GENERALLI	-	-	8.128.905	8.128.905	-
46	AD-MEDIKA GREAT EASTERN	-	-	230.300	230.300	-
47	AD-MEDIKA HANWA	-	-	379.420	248.520	130.900
48	AD-MEDIKA HARTA AMAN GROUP	-	-	3.413.600	3.413.600	-
49	AD-MEDIKA INTRA ASIA	-	-	265.000	265.000	-
50	AD-MEDIKA JALIN	-	-	140.600	140.600	-
51	AD-MEDIKA MAGNA	-	-	44.631.759	44.631.759	-
52	AD-MEDIKA MEGALIFE	-	-	3.239.278	2.322.840	916.438
53	AD-MEDIKA MNC LIFE	-	-	141.350	141.350	-
54	AD-MEDIKA NICI	-	-	197.800	197.800	-
55	AD-MEDIKA RAMAYANA	-	-	9.323.440	6.068.871	3.254.569
56	AD-MEDIKA SINARMAS	-	-	9.399.345	9.031.245	368.100
57	AD-MEDIKA SQFG	-	-	3.743.800	3.743.800	-
58	AD-MEDIKA TMLI	-	-	240.500	240.500	-
59	AD-MEDIKA TUGU MANDIRI	-	-	6.006.996	6.006.996	-
60	AD-MEDIKA YKP ANTAM	-	-	30.613.100	29.823.700	789.400
61	AD-MEDIKA SOMPO	-	-	1.132.980	889.680	243.300
62	INHEALTH	-	-	102.677.832	91.896.711	10.781.121
63	JASA RAHARJA	-	-	954.989.445	952.039.833	2.949.612
64	BKPSDA	-	-	33.043.000	33.043.000	-
65	DPRD	-	-	24.960.000	24.000.000	960.000
66	KEMENKES RI PONGKOR	-	-	6.719.000	6.719.000	-
67	ABADI SMILYNKS	-	-	1.522.850	1.522.850	-
68	BANK BTN	-	-	4.849.182	4.849.182	-
69	TASPEN	-	-	9.928.563	1.109.100	8.819.463

70	RS.KARYA BHAKTI PRATIWI	-	-	1.641.416	1.641.416	-
71	TRI KENCANA SAKTI	-	-	6.806.510	1.041.660	5.764.850
72	UNIVERSITAS INDONESIA	-	-	22.000.000	6.400.000	15.600.000
73	PIUTANG PASIEN UMUM	2.168.588.281	7.703.266	792.592.965	297.054.235	2.656.423.745
JUMLAH		46.931.509.532	44.722.921.846	169.624.691.881	108.076.702.630	63.756.576.937

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
PIUTANG LAINNYA PADA PPKD
PER 31 DESEMBER 2019**

No.	Jenis Piutang	SKPD	Saldo Awal 2018	Penambahan 2019	Pengurangan/ Pembayaran	Saldo Akhir 2019
1	Hasil Pemeriksaan BPK-RI	PPKD	10.140.927.594,98	-	-	10.140.927.594,98
2	Penggunaan langsung kontribusi PT Bina Citra atas pengelolaan Plaza Bogor untuk kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	PPKD	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3	Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman	PPKD	82.271.492.651,00	-	5.484.766.178,00	76.786.726.473,00
	- Saldo Per 31 Desember 2018 Rp		82.271.492.651,00			
	- Pengurangan 2019 Rp		5.484.766.178,00			
	- Saldo Per 31 Desember 2019 Rp		76.786.726.473,00			
4	Piutang ke PDAM TP terkait kekurangan setoran bagian laba PDAM	PPKD	88,40	-	-	88,40
		Jumlah	92.442.420.334,38	-	5.484.766.178,00	86.957.654.156,38

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG
Tahun Anggaran 2019**

No	Jenis Penyisihan Piutang	SKPD	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah - Penyisihan Pajak Hotel - Penyisihan Pajak Restoran - Penyisihan Pajak Reklame - Penyisihan Pajak Parkir - Penyisihan Pajak Hiburan - Penyisihan Pajak Air Tanah - Penyisihan PBB	Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda	Rp 16.229.199 Rp 354.573.878 Rp 519.428.543 Rp 83.921.069 Rp 19.780.633 Rp 47.968.603 Rp 166.580.675.162	Rp 167.622.577.087,59
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - Penyisihan Retribusi IMB - Penyisihan Retribusi PPTR - Penyisihan Retribusi HO - Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Tanah - Penyisihan Piutang Retribusi / Penyewaan Tanah dan Bangunan	DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP BPKAD Disperumkim	Rp 2.209.231.960,97 Rp 146.822.276,00 Rp 117.195.125,00 Rp 80.271.820,03 Rp 29.875.000,00	Rp 2.583.396.182,00
3	Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah - Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Penyisihan Denda Pajak Hotel - Penyisihan Denda Pajak Restoran - Penyisihan Denda Pajak Reklame - Penyisihan Denda Pajak Parkir - Penyisihan Denda Pajak Hiburan - Penyisihan Denda Pajak Air Tanah - Penyisihan Denda PBB - Penyisihan Denda Retribusi IMB - Penyisihan Denda Retribusi PPTR - Penyisihan Denda Retribusi HO	Disperumkim Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda Bapenda DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP	Rp 75.277.500,00 Rp 5.942.241 Rp 169.196.606 Rp 245.925.091 Rp 40.180.235 Rp 9.483.488 Rp 22.946.188 Rp 23.215.183.384 Rp 836.626.048,90 Rp 47.759.914,00 Rp 109.249.664,00	Rp 24.777.770.359,90
4	Penyisihan Piutang Lainnya - Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman PDAM - Penyisihan Piutang Lainnya	PPKD BLUD	Rp 383.933.632,38 Rp 2.276.455.758,87	Rp 2.660.389.391,25
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				Rp 197.644.133.020,74

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Badan Pendapatan Daerah
Daftar Penyisihan Piutang Pajak
Tahun 2019

No	Nama Jenis Pajak	Piutang	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Di ragukan	Macet	Lancar	Kurang Lancar	Di ragukan	Macet	
1	HOTEL	561.862.014	515.814.319	31.832.425	7.496.770	6.718.500	2.579.072	3.183.242	3.748.385	6.718.500	16.229.199
2	RESTORANT	1.268.761.813	404.422.160	312.365.897	461.317.158	90.656.598	2.022.111	31.236.590	230.658.579	90.656.598	354.573.878
3	PAJAK REKLAME	1.285.057.929	333.439.638	482.063.273	-	469.555.018	1.667.198	48.206.327	-	469.555.018	519.428.543
4	PARKIR	154.030.600	38.478.850	3.605.500	57.156.250	54.790.000	192.394	360.550	28.578.125	54.790.000	83.921.069
5	HIBURAN	31.701.555	6.593.000	3.443.210	4.523.996	17.141.349	32.965	344.321	2.261.998	17.141.349	19.780.633
6	PAJAK AIR TANAH	142.410.060	75.150.790	21.081.762	1.385.670	44.791.838	375.754	2.108.176	692.835	44.791.838	47.968.603
7	PBB	318.856.255.343	64.373.773.923	66.345.428.421	57.025.579.098	131.111.473.901	321.868.870	6.634.542.842	28.512.789.549	131.111.473.901	166.580.675.162
8	PPJ						-	-	-	-	-
		322.300.079.314	65.747.672.680	67.199.820.488	57.557.458.942	131.795.127.204	328.738.364	6.719.982.048	28.778.729.471	131.795.127.204	167.622.577.088

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Badan Pendapatan Daerah
Daftar Penyisihan Piutang Denda Pajak
Tahun 2019

No	Nama Jenis Denda Pajak	Piutang	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Total Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Di ragukan	Macet	Lancar	Kurang Lancar	Di ragukan	Macet	
1	HOTEL	33.719.963	18.631.950	7.670.413	3.594.720	3.822.880	93.160	767.041	1.797.360	3.284.680	5.942.241
2	RESTORANT	436.373.361	22.918.673	148.507.285	221.432.236	43.515.167	114.593	14.850.728	110.716.118	43.515.167	169.196.606
3	PAJAK REKLAME	442.218.527	12.047.676	204.784.442	-	225.386.409	60.238	20.478.444	-	225.386.409	245.925.091
4	PARKIR	57.530.318	2.274.503	1.521.615	27.435.000	26.299.200	11.373	152.162	13.717.500	26.299.200	40.180.235
5	HIBURAN	12.973.706	921.600	1.652.741	2.171.518	8.227.847	4.608	165.274	1.085.759	8.227.847	9.483.488
6	PAJAK AIR TANAH	37.387.900	4.302.877	10.919.820	665.122	21.500.081	21.514	1.092.031	332.561	21.500.082	22.946.188
7	PBB	68.388.957.233	6.377.350.592	28.089.368.893	27.095.756.012	6.826.481.736	31.886.753	2.808.936.889	13.547.878.006	6.826.481.736	23.215.183.384
		69.409.161.008	6.438.447.871	28.464.425.209	27.351.054.608	7.155.233.320	32.192.239	2.846.442.569	13.675.527.304	7.154.695.121	23.708.857.233,00

REKAP REKONSILIASI PER JENIS PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NAMA PIUTANG
SUMBER DATA

NO	NAMA SKPD	SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)	Kriteria Piutang				Jumlah	UMUR SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)				
			4 (1+2-3)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan		Macet	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR											
	A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH											
	1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (RUMAH TINGGAL)											
	1. Tahun 2018	255.675.096,00	255.675.096,00	-		255.675.096	1.278.375,48	-				
	2. Tahun 2019	-				-						
	2. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (USAHA)											
	1. Tahun 2018	95.571.944,00	18.597.600,00		10.344,00	76.964.000,00	95.571.944	92.988,00	-	5.172,00	76.964.000,00	
	2. Tahun 2019	386.256.909,00	386.256.909,00	-	-	-	386.256.909	1.931.284,55	-	-	-	
	JUMLAH	737.503.949,00	660.529.605,00	-	10.344,00	76.964.000,00	737.503.949,00	3.302.648,03	-	5.172,00	76.964.000,00	

Lampiran 22c

JUMLAH
1.278.375
-
77.062.160
1.931.285
80.271.820,03

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2018	Koreksi	Saldo Awal setelah koreksi	Progres Penyelesaian Piutang Pokok	Piutang 2019	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
								Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN															
	Tahun 2019	39.625.000	-	39.625.000	24.725.000	14.975.000	29.875.000	-	-	-	29.875.000	-	-	-	29.875.000	29.875.000
2	HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH															
	Tahun 2019	26.575.000	-	26.575.000	23.500.000	89.500.000	92.575.000	-	12.275.000	12.500.000	67.800.000	-	1.227.500	6.250.000	67.800.000	75.277.500
	Jumlah	66.200.000	-	66.200.000	48.225.000	104.475.000	122.450.000	-	12.275.000	12.500.000	97.675.000	-	1.227.500	6.250.000	97.675.000	105.152.500

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Piutang Lainnya pada PPKD
Per 31 Desember 2019

No.	Nama Piutang	Piutang 2019	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank)	76.786.726.473,00	#####				383.933.632,38				383.933.632,38
Jumlah		76.786.726.473	76.786.726.473	-	-	-	383.933.632	-	-	-	383.933.632

ANALISIS UMUR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2019
PIUTANG PASIEN UMUM/PERORANGAN

Usia Piutang	Kurang dari 1 bulan	1-5 bulan	6- 12 bulan	13-24bulan	Diatas 24 Bulan	Jumlah
						-
Piutang Tahun 2014					186.189.481	186.189.481
Piutang Tahun 2015					543.648.085	543.648.085
Piutang Tahun 2016					545.093.284	545.093.284
Piutang Tahun 2017					337.754.224	337.754.224
Piutang Tahun 2018				526.410.158		526.410.158
Piutang Tahun 2019	60.462.525	175.036.613	261.829.375			497.328.513
Jumlah	60.462.525	175.036.613	261.829.375	526.410.158	1.612.685.074	2.636.423.745

Persentase Penyisihan Piutang	5%	20%	50%	94%	100%	
Cadangan Penyisihan Piutang yang dibentuk Tahun 2019	3.023.126	35.007.323	130.914.688	494.825.549	1.612.685.074	2.276.455.758,87
Cadangan Penyisihan Piutang yang sudah diakui Tahun 2018 (Audited, BPK)						1.791.252.980,75
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019		[(1) - (2)]				485.202.778,12

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Beban di Bayar di Muka
Per 31 Desember 2019

1 BPKAD

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT Asuransi Ramayana, Tbk	BPKAD	62012119000191	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	3 September 2019 s.d 3 September 2020	365	245	530.781.346,00	356.277.889,78
2	PT Asuransi Ramayana, Tbk	BPKAD	62022219000550	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia	3 September 2019 s.d 3 September 2020	365	245	256.414.476,67	172.113.826,81
								787.195.822,67	528.391.716,59

2 SEKERTARIAT DPRD

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA	Sekretariat DPRD	1017022119070002	Asuransi Kendaraan Dinas kendaraan bermotor (mobil)	01 Juli 2019 s/d 01 Juli 2020	366	182	99.743.300,00	49.599.127,32
2	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA	Sekretariat DPRD	1017022119120051	Asuransi Kendaraan Dinas kendaraan bermotor (motor)	28 Desember 2019 s/d 28 Desember 2020	366	362	2.600.000,00	2.571.584,70
3	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA	Sekretariat DPRD	1017022119120052	Asuransi Kendaraan Dinas kendaraan bermotor (mobil, bus dan elf)	28 Desember 2019 s/d 28 Desember 2020	366	362	95.419.382,00	94.376.547,22
								197.762.682,00	146.547.259,25

3 RSUD (BLUD)

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT Asuransi JasaRaharja Putra	RSUD Kota Bogor	1270200221101800017	Asuransi Kendaraan Bermotor	16 Oktober 2019 sd 16 Oktober 2020	365	289	6.344.000,00	5.023.057,53
								6.344.000,00	5.023.057,53

4 RUMKIM

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	Asuransi Bumida Bumiputra	Dinas Perumahan dan Permukiman	1017090118120001	Asuransi Kendaraan Bermotor	12 Desember 2019 sd 12 Desember 2020	365	346	174.000.000,00	164.942.465,75
								174.000.000,00	164.942.465,75

TOTAL BEBAN DIBAYAR DIMUKA

844.904.499,12

Pemerintah Kota Bogor
REKAPITULASI PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2019

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Persediaan														Saldo Persediaan TA 2019
		ATK	Alat Listrik	Peralatan Kebersihan	Bahan Bakar Minyak/Gas	Cetakan	Habis Pakai Lainnya	Bahan Makanan Pokok	Perlengkapan Rumah Tangga- BLUD	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan Obat-obatan	Bahan Kimia	Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	Bahan Baku Bangunan	barang yg akan diserahkan kpd pihak ketiga	
1	Dinas Pendidikan	216.286.451,00	5.544.500,00	15.166.750,00	-	1.715.118.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952.116.007,00
2	Dinas Kesehatan	67.453.320,00	4.916.570,00	21.253.097,00	-	30.628.000,00	458.296.210,00	-	-	-	9.067.800.922,00	-	-	-	-	9.650.348.119,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	122.632.465,65	-	-	-	-	-	23.525.078,00	364.228.455,50	-	6.520.134.815,00	-	-	-	-	7.030.520.814,15
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	36.402.740,00	4.082.210,00	5.072.650,00	-	36.560.700,00	44.424.490,00	-	-	-	-	-	-	42.551.500,00	1.625.627.900,00	1.794.722.190,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	5.781.000,00	5.037.118.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.042.899.140,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.928.300,00	244.000,00	468.000,00	-	1.415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.055.300,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.230.200,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.200,00
9	Dinas Sosial	1.106.727,00	20.000,00	130.000,00	-	4.825.000,00	1.650.924,00	3.547.500,00	-	-	-	-	-	-	-	11.280.151,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	78.000,00	-	-	-	-	-	85.987.184,00	-	-	-	-	-	-	-	86.065.184,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.199.167,00	-	1.056.888.460,00	311.796.613,00	175.419.288,00	305.588.720,00	-	-	9.941.000,00	-	-	-	-	-	1.882.833.248,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	338.439.000,00	-	-	-	710.107.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.048.546.015,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.321.800,00	-	217.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.613.800,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	64.506.420,00	-	-	-	3.899.600,00	-	-	-	-	353.230.681,00	-	-	-	-	421.636.701,00
17	Dinas Perhubungan	330.139.046,00	-	-	-	593.315.640,00	-	-	-	-	-	-	-	245.525.900,00	-	1.168.980.586,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2.855.195,00	-	-	-	7.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.115.195,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13.406.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.406.750,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.681.522,00	-	-	-	80.272.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.954.022,00
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	18.182.500,00	5.206.500,00	6.259.000,00	-	6.545.000,00	-	-	-	-	-	71.477.000,00	-	-	-	107.670.000,00
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.867.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.867.950,00
23	Dinas Kearsifan Dan Perpustakaan	20.188.000,00	810.000,00	2.100.000,00	-	6.672.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.770.000,00
24	Dinas Pertanian	2.338.500,00	582.000,00	422.500,00	-	5.725.000,00	14.200.000,00	-	-	2.187.500,00	127.600,00	41.240.000,00	870.000,00	-	-	67.693.100,00
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.037.500,00	40.000,00	104.000,00	-	1.105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.286.500,00
26	Sekretariat Daerah	20.445.680,00	9.180.000,00	15.000.000,00	-	41.059.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.684.680,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	77.738.900,00	32.659.900,00	-	-	5.470.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.869.500,00
28	Kecamatan Bogor Utara	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00
29	Kecamatan Bogor Selatan	8.352.600,00	1.173.000,00	1.818.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.343.600,00
30	Kecamatan Bogor Timur	7.336.000,00	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.236.000,00
31	Kecamatan Bogor Barat	611.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.500,00
32	Kecamatan Bogor Tengah	7.000.000,00	180.000,00	410.000,00	-	65.187.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.777.600,00
33	Kecamatan Tanah Sareal	1.851.000,00	-	-	-	1.663.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514.500,00
34	Inspektorat	4.461.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.461.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.335.300,00	-	-	-	2.484.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.819.300,00
36	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.002.690,00	850.000,00	468.700,00	-	8.589.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.910.640,00
37	Badan Pendapatan Daerah	338.971.924,00	-	-	-	1.380.254.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.226.290,00

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Persediaan														Saldo Persediaan TA 2019
		ATK	Alat Listrik	Peralatan Kebersihan	Bahan Bakar Minyak/Gas	Cetakan	Habis Pakai Lainnya	Bahan Makanan Pokok	Perlengkapan Rumah Tangga- BLUD	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan Obat-obatan	Bahan Kimia	Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	Bahan Baku Bangunan	barang yg akan diserahkan kpd pihak ketiga	
38	Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	13.995.568,33	-	-	-	13.812.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.808.326,33
	JUMLAH	1.873.444.715,98	5.105.506.820,00	1.125.778.157,00	311.796.613,00	4.890.294.223,00	831.420.344,00	113.059.762,00	364.228.455,50	12.128.500,00	15.941.294.018,00	112.717.000,00	870.000,00	288.077.400,00	1.625.627.900,00	32.596.243.908,48

PEMERINTAH KOTA BOGOR
 INVESTASI NON-PERMANEN - DANA BERGULIR GARDA EMAS YANG BERADA DI MASYARAKAT
 PER 31 DESEMBER 2019

Tahun	Revolving Fund	Angsuran /Pengembalian	Jumlah	Keterangan
2005	1.750.000.000	-	1.750.000.000	Pinbuk
2009	-	1.686.257.900	63.742.100	Pinbuk dan KPKNL
2010	-	-	63.742.100	
2011	-	-	63.742.100	
2012	-	-	63.742.100	
2013	-	-	63.742.100	
2014	-	-	63.742.100	
2015	-	-	63.742.100	
2016	-	-	63.742.100	
2017	-	-	63.742.100	
2018	-	-	63.742.100	
2019	-	-	63.742.100	MACET dalam proses permohonan penghapusan melalui KPKNL

**Penyertaan Modal Pemda
(Pencatatan Berdasarkan Metode Biaya dan Metode Ekuitas)
Per 31 Desember 2019**

No.	Nama Rekening	Metode Pencatatan	Prosentase (%)	Ekuitas Perusahaan Daerah (Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 2019) Audited						Saldo Akhir Per Desember 2019	31
				Saldo Investasi Akhir 31 Desember 2018	Penambahan Investasi Tahun 2019	Laba/(Rugi) Periode 2019	Pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau rugi penurunan Nilai Investasi (LO)	Pembagian Laba yang mengurangi Modal pemda	Jumlah Ekuitas Pemda di neraca BUMD 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+8-9	10 = 11	
1	Penyertaan Modal pada Bank Jabar	Biaya	-	11.684.452.323,00			-		11.684.452.323,00	11.684.452.323,00	
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor	Ekuitas	55	288.343.093.386,49	10.000.000.000,00	41.738.492.420,00	22.956.170.831,00	19.684.735.000,00	301.614.529.217,49	301.614.529.217,49	
3	Penyertaan Modal pada BPR Bank Kota Bogor	Ekuitas	50	57.093.433.177,85	6.000.000.000,00	8.801.995.972,00	4.400.997.986,00	4.220.612.637,00	63.273.818.526,85	63.273.818.526,85	
4	Penyertaan Modal pada PD Jasa Transportasi	Ekuitas	55	5.531.182.412,21	-	146.708.630,00	80.689.746,50	-	5.611.872.158,71	5.611.872.158,71	
5	Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan	Ekuitas	55	141.440.362.252,81		319.701.825,00	175.836.003,75	158.137.150,00	141.458.061.106,56	141.458.061.106,56	
			Jumlah	504.092.523.552,36	16.000.000.000,00	51.006.898.847,00	27.613.694.567,25	24.063.484.787,00	523.642.733.332,61	523.642.733.332,61	

Catatan:

- Pencatatan dengan metode biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada Bank Jabar.
- Pencatatan dengan metode ekuitas diterapkan pada:
 - Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor
 - Penyertaan Modal pada BPR Bank Kota
 - Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan Jaya
- Laba/(Rugi) Periode tahun 2019 pada Bank Jabar, PDAM Kota Bogor, BPR Bank Kota Bogor, PD Pasar Pakuan menggunakan data Audited sedangkan PD Jasa Transportasi menggunakan data unaudited

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR ASET TETAP
BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PER 31 DESEMBER 2019 (UNAUDITED)

No. Urut	NAMA SKPD	URAIAN	KLASIFIKASI BERDASARKAN KOMPONEN NERACA						JUMLAH ASET TETAP
			TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, BRIGAS, DAN JARANGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PROGRES	
1	Dinas Pendidikan	Saldo Awal	123.872.253,10,38	71.427.889,999,58	328.393.033,899,83	2.798.408,254,46	5.778.853,648,40	100.702.200,00	933.263.264,967,39
		PEMBAYARAN	-	20.261.490,261,71	14.879.138,724,00	-	1.524.497,318,00	-	37.077.306,714,71
		PENGUNGKAPAN	-	1.413.218,975,30	3.099.699,296,00	-	10.848,483,00	-	5.209.607,751,30
		Saldo Akhir	123.872.253,10,38	90.366.984,976,59	339.972.972,979,83	2.798.408,254,46	6.809.545,831,40	2.641.899,206,93	105.911.812,751,30
2	Dinas Kesehatan	Saldo Awal	26.589.986,536,00	66.602.261,497,10	33.882.781,927,00	-	1.281.000,00	-	188.957.249,111,10
		PEMBAYARAN	-	21.613.803,718,00	2.465.786,752,00	-	1.007.487,000,00	-	27.519.577,470,00
		PENGUNGKAPAN	-	5.237.638,721,02	114.309,000,00	-	1.007.487,000,00	-	6.359.755,721,02
		Saldo Akhir	26.589.986,536,00	83.066.379,526,08	35.452.177,677,00	-	1.281.000,00	-	195.946.794,111,10
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PK)	Saldo Awal	-	-	-	36.964.501,50	-	-	36.964.501,50
		PEMBAYARAN	-	31.441.349,834,95	40.407.338,263,00	-	1.207.895,100,00	-	73.156.541,467,95
		PENGUNGKAPAN	-	-	-	-	15.78.443,851	-	15.78.443,851
		Saldo Akhir	-	90.735.955,752,40	141.995.067,589,00	1.286.420,051,50	-	3.284.659,846,00	237.216.103,232,95
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Saldo Awal	807.300,000,00	22.924.151,509,34	11.801.850,000,00	28.964.701,50	-	-	40.868.946,946,84
		PEMBAYARAN	-	311.613,296,00	86.201.344,00	-	4.598.997,000,00	-	35.709.350,296,00
		PENGUNGKAPAN	-	1.200.789,994,00	948.000,00	-	-	-	8.477.110,644,00
		Saldo Akhir	807.300,000,00	22.612.558,213,34	11.053.546,000,00	28.964.701,50	-	-	44.597.611,894,84
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saldo Awal	2.875.520,343,01,00	25.610,638,521,00	2.413.575,480,00	-	281,000,00	10.421.251,289,33	4.607.491.766,684,68
		PEMBAYARAN	-	2.153.307,000,00	-	-	46.660.364,813,00	-	188.488.364,250,00
		PENGUNGKAPAN	-	1.610.000,000,00	-	-	7.855.469,316,01	-	8.465.469,316,01
		Saldo Akhir	2.875.520,343,01,00	27.050.336,418,10	2.413.575,480,00	1.835.088.199,261,28	291,000,00	30.322.348,628,33	4.785.354.963,612,69
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saldo Awal	462.025.291,000,00	16.714.638,518,00	80.223.223,00	-	20.280,000,00	-	569.029.442,518,00
		PEMBAYARAN	-	1.645.968,200,00	23.097.900,440,00	-	15.521.376,582,00	-	26.395.191,214,00
		PENGUNGKAPAN	-	227.213,852,00	-	-	-	-	65.498.906,254,00
		Saldo Akhir	462.025.291,000,00	17.066.362,425,28	228.232.027,572,28	95.743.887,847,18	50.288,000,00	18.473.604,928,00	6.067.747,652,71
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Saldo Awal	241.699,718,00	9.203.000,000,00	11.003.379,346,00	-	4.637.561,351,00	-	43.827.611,995,84
		PEMBAYARAN	-	120.074,300,03	189.677,000,00	-	14.500,000,00	-	345.701,300,03
		PENGUNGKAPAN	-	241.699,718,00	28.431.481,098,08	5.978.045,748,00	50.718,000,00	-	84.352.368,561,88
		Saldo Akhir	241.699,718,00	28.431.481,098,08	5.978.045,748,00	50.718,000,00	-	-	84.352.368,561,88
8	Badan Penganggaran Keuangan Daerah	Saldo Awal	-	1.479.899,275,24	-	-	83.840,000,00	-	1.763.739,275,24
		PEMBAYARAN	-	13.576,100,00	-	-	83.840,000,00	-	97.452,100,00
		PENGUNGKAPAN	-	7.672.428,254,94	-	-	-	-	7.672.428,254,94
		Saldo Akhir	-	7.672.428,254,94	-	-	-	-	7.672.428,254,94
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Saldo Awal	402.013,000,00	1.096.001,700,00	332.386,480,00	-	-	-	1.830.386,480,00
		PEMBAYARAN	-	90.987,718,00	-	-	-	-	90.987,718,00
		PENGUNGKAPAN	-	483.013,000,00	1.184.498,468,00	332.386,480,00	-	-	1.999.896,157,00
		Saldo Akhir	402.013,000,00	1.184.498,468,00	332.386,480,00	-	-	-	1.999.896,157,00
10	Dinas Sosial	Saldo Awal	1.034.598,000,00	3.844.178,282,59	2.545.298,603,00	-	-	55.755,000,00	8.379,829,885,59
		PEMBAYARAN	-	337.833,400,00	-	-	4.000,000,00	-	337.833,400,00
		PENGUNGKAPAN	-	3.467.295,494,00	2.545.298,603,00	-	-	-	37.771,799,99
		Saldo Akhir	1.034.598,000,00	3.844.178,282,59	2.545.298,603,00	-	-	-	8.379,829,885,59
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Saldo Awal	4.287.200,000,00	2.077.200,000,00	807.215,000,00	-	44.380,512,00	-	6.816.495,512,00
		PEMBAYARAN	-	316.656,213,00	-	-	-	-	316.656,213,00
		PENGUNGKAPAN	-	4.287.200,000,00	2.077.200,000,00	807.215,000,00	-	-	6.816.495,512,00
		Saldo Akhir	4.287.200,000,00	3.284.236,609,73	807.215,000,00	44.380,512,00	-	-	6.816.495,512,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	Saldo Awal	196.800,000,00	2.382.139,791,00	1.437.572,586,00	-	-	-	4.016.512,377,00
		PEMBAYARAN	-	100.000,000,00	-	-	-	-	100.000,000,00
		PENGUNGKAPAN	-	44.744,250,00	-	-	-	-	44.744,250,00
		Saldo Akhir	196.800,000,00	2.382.139,791,00	1.437.572,586,00	-	-	-	4.016.512,377,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Saldo Awal	196.800,000,00	2.440.409,757,00	1.437.572,586,00	-	-	-	4.074.782,323,00
		PEMBAYARAN	-	95.712.505,000,00	11.512.455,000,00	-	9.360.863,286,00	-	116.595.823,286,00
		PENGUNGKAPAN	-	2.440.409,757,00	3.776.470,512,00	-	2.889.361,100,00	-	8.466.641,212,00
		Saldo Akhir	196.800,000,00	2.440.409,757,00	1.437.572,586,00	-	-	-	125.552.747,512,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Saldo Awal	56.712.955,690,00	71.861.142,648,07	18.286.048,987,65	-	11.311.589,086,00	-	155.172.637,292,63
		PEMBAYARAN	-	11.024.628,628,00	3.275.405,196,00	-	21.830,000,00	-	15.349.883,824,00
		PENGUNGKAPAN	-	379.500,000,00	-	-	-	-	379.500,000,00
		Saldo Akhir	56.712.955,690,00	63.116.014,020,00	15.010.643,791,65	-	11.311.589,086,00	-	170.872,112,632,63
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Partisipasi Anak	Saldo Awal	313.239,114,00	3.109.378,457,52	3.819.548,120,00	-	-	-	7.242.158,890,52
		PEMBAYARAN	-	588,331,081,00	-	-	-	-	588,331,081,00
		PENGUNGKAPAN	-	3.109.378,457,52	3.819.548,120,00	-	-	-	7.020.919,578,52
		Saldo Akhir	313.239,114,00	3.109.378,457,52	3.819.548,120,00	-	-	-	7.242.158,890,52
16	Dinas Pengendalian Produk dan Kelangkaan Beracun	Saldo Awal	896.985,750,00	1.142.787,880,00	626.614,250,00	-	-	-	2.066.387,880,00
		PEMBAYARAN	-	196.518,600,00	-	-	-	-	196.518,600,00
		PENGUNGKAPAN	-	1.142.787,880,00	626.614,250,00	-	-	-	1.966.190,130,00
		Saldo Akhir	896.985,750,00	1.142.787,880,00	626.614,250,00	-	-	-	2.066.387,880,00
17	Dinas Perhubungan	Saldo Awal	32.745.850,397,00	43.973.996,976,33	15.958.181,101,78	-	3.403.431,895,22	-	95.023.917,870,29
		PEMBAYARAN	-	10.188.058,000,00	2.400.638,865,00	-	43.950,000,00	-	12.641.646,865,00
		PENGUNGKAPAN	-	43.973.996,976,33	15.958.181,101,78	-	3.403.431,895,22	-	63.335.606,873,33
		Saldo Akhir	32.745.850,397,00	33.795.938,976,33	13.557.542,236,78	-	3.403.431,895,22	-	118.379.165,043,33
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Saldo Awal	61.517.000,00,00	2.780.716,000,00	6.247.288,222,00	-	-	656.272,420,00	70.561.266,642,00
		PEMBAYARAN	-	326.476,000,00	466.753,500,00	-	-	-	824.229,500,00
		PENGUNGKAPAN	-	2.454.240,000,00	5.780.534,722,00	-	30.260,000,00	-	8.265.034,722,00
		Saldo Akhir	61.517.000,00,00	2.780.716,000,00	6.247.288,222,00	-	-	-	8.265.034,722,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Saldo Awal	43.517.930,961,00	3.094.811.713,100,00	6.719.802,832,00	-	-	628.373.433,00	15.356.826,528,00
		PEMBAYARAN	-	715,956,381,38	-	-	-	-	715,956,381,38
		PENGUNGKAPAN	-	2.400,761,197,38	-	-	-	-	2.400,761,197,38
		Saldo Akhir	43.517.930,961,00	3.094.811.713,100,00	6.719.802,832,00	-	-	-	15.356.826,528,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Saldo Awal	60.429.760,000,00	3.101.683,000,00	38.114.813,113,00	-	-	1.660.265,000,00	103.206.521,113,00
		PEMBAYARAN	-	180.340,000,00	152.278,811,00	-	36.300,250,00	-	469.029,061,00
		PENGUNGKAPAN	-	3.101.683,000,00	38.114.813,113,00	-	-	-	82.907,540,57
		Saldo Akhir	60.429.760,000,00	3.101.683,000,00	38.114.813,113,00	-	36.300,250,00	-	103.206.521,113,00
21	Dinas Perencanaan dan Kebijakan	Saldo Awal	90.126.760,000,00	3.560.811.713,100,00	30.186.480,574,00	-	678.042,832,00	-	126.511.976,292,00
		PEMBAYARAN	-	4.482.761,778,00	1.887.917,319,00	-	145.075,000,00	-	6.415.754,097,00
		PENGUNGKAPAN	-	3.560.811,713,100,00	30.186.480,574,00	-	678.042,832,00	-	126.511,976,292,00
		Saldo Akhir	90.126.760,000,00	3.560.811,713,100,00	30.186.480,574,00	-	678.042,832,00	-	126.511,976,292,00
22	Dinas Kesehatan dan Perputakaan	Saldo Awal	1.114.333,878,00	5.835.922,531,19	7.608.122,531,00	-	62.331,600,00	-	16.011.391,508,82
		PEMBAYARAN	-	748.765,779,00	3.289.895,820,00	-	70.040,627,00	-	4.108.642,222,00
		PENGUNGKAPAN	-	5.835.922,531,19	7.608.122,531,00	-	62.331,600,00	-	13.845.176,659,19
		Saldo Akhir	1.114.333,878,00	5.835.922,531,19	7.608.122,531,00	-	62.331,600,00	-	16.011.391,508,82
23	Dinas Pertanian	Saldo Awal							

No. Urut	NAMA SKPD	URAIAN	KLASIFIKASI BERDASARKAN KOMPONEN NERACA					JUMLAH ASSET TETAP
			TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, BRIGASAL, DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	
36		PEMBAYARAN	-	676.483.000,00	195.038.447,89	-	-	871.521.447,89
		PENGANGGARAN	-	4.985.100,00	355.938.447,00	-	-	400.923.547,00
		Saldo Akhir	1.920.000,00,00	7.004.640.647,64	4.029.369.300,00	-	-	12.954.009.947,64
37	Badan Pengkajian Keuangan dan Asst Daerah	Saldo Awal	-	6.716.000.368,11	-	-	-	6.716.000.368,11
		PEMBAYARAN	-	721.798.717,00	-	-	-	1.051.600.798,00
		PENGANGGARAN	-	1.016.881.357,00	-	-	-	388.000.248,00
Saldo Akhir	6.267.142.919,11	6.267.142.919,11	-	-	-	6.267.142.919,11		
38	Badan Pendapatan Daerah	Saldo Awal	-	798.624.000,00	42.531.896.720,00	-	-	56.768.184.999,48
		PEMBAYARAN	-	133.298.288,63	230.288.000,00	-	-	338.000.293,63
		PENGANGGARAN	-	482.819.557,50	-	-	-	516.814.557,50
Saldo Akhir	798.624.000,00	13.260.644.912,51	42.722.186.720,00	-	-	56.768.434.632,51		
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Saldo Awal	-	1.261.000,00	6.029.575,39	-	-	8.094.624.193,80
		PEMBAYARAN	-	1.274.606.325,00	475.461.980,00	11.396.000,00	-	3.064.524.335,00
		PENGANGGARAN	-	115.623.628,57	-	-	-	95.020.628,57
Saldo Akhir	2.974.600,00,00	5.139.978.088,43	475.461.980,00	-	-	8.976.239.068,43		
40	PPKD	Saldo Awal	-	664.427.880,14	7.188.167.138,17	84.800.384,88	103.648.591.237,39	790.614.130.418,75
		PEMBAYARAN	-	1.000.000,00	800.000,00	-	-	1.120.000,00
		PENGANGGARAN	-	99.800,00	-	-	-	388.000,00
Saldo Akhir	664.427.880,14	7.248.998.308,17	18.930.188.549,00	103.648.591.237,39	103.648.591.237,39	790.614.130.418,75		
SELURUH SKPD		Saldo Awal	-	4.760.329.013.961,63	627.793.307.368,29	1.064.887.694.865,05	1.904.629.267.613,01	9.114.038.408.116
		PEMBAYARAN	-	31.431.629.000,00	134.955.298.227,58	171.402.838.870,00	2.065.221.399,00	10.167.488.231,00
		PENGANGGARAN	-	1.366.120.000,00	193.123.628,11	31.483.666.993,41	21.948.021.376,01	1.903.223.913,00
Saldo Akhir	4.767.414.431.962,63	7.433.613.689.335,72	1.206.887.131.745,41	2.124.872.812.527,01	8.905.925.846,82	57.861.964.006,16	8.910.475.941.420,79	

Sekretariat Daerah KOTA BOGOR,
selaku PENGELOLA BARANG

Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Madya
NP. 19400910 198003 1 003

PENAMBAHAN ASET TETAP DARI BELANJA MODAL, BELANJA OPERASIONAL DAN HIBAH TAHUNAN ANGGARAN 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	HIBAH (+)	NON BM DIKAPITALISASI (+)	Kewajiban (+)
1	2			9
1	Dinas Pendidikan	526.428.000,00	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	-	-	226.848.484,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.916.127.459,01	-	36.864.000,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.857.665.184,00	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-
10	Dinas Sosial	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	271.700.000,00	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	220.000.000,00	66.000.000,00	-
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	8.335.000,00	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-
26	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	-	-	-
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Selatan	-	-	12.400.000,00
30	Kecamatan Bogor Timur	-	-	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	-
32	Kecamatan Bogor Barat	-	-	-
33	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-
34	Kecamatan Tanah Sareal	-	-	-
35	Inspektorat	-	-	-
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-
38	Badan Pendapatan Daerah	-	34.826.780,63	-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	-	-
40	PPKD	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	4.791.920.643,01	109.161.780,63	276.112.484,00

PENAMBAHAN ASET TETAP DARI HASIL INVENTARISASI TAHUN 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	Reklas ke Aset Rusak Berat (+)	Reklas ke Aset Lain-lain (+)	Reklas ke Aset Kemitraan (+)	KOREKSI ASUT Nilai Perolehan (+)	Belum Tercatat (+)
1	2	13	14		16	18
1	Dinas Pendidikan	174.430.023,00	-	-	-	9.690.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	2.750.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	8.241.361.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	-	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	16.577.500,00	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-	-	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	161.955.697,38	-	-	-	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	93.189.948,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
26	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	353.620.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bogor Selatan	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Timur	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Bogor Barat	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tanah Sereal	-	-	-	-	-
35	Inspektorat	-	-	-	-	-
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
38	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-
40	PPKD	-	-	-	-	1,00
	JUMLAH TOTAL	336.385.720,38	16.577.500,00	-	-	8.700.610.949,00

PENGURANGAN ASET TETAP DARI BELANJA MODAL, BELANJA OPERASIONAL DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	BM Reklas ke Extra Comptable (-)	BM Reklas ke Aset Tidak Berwujud (-)	BM Tidak Jadi Aset	BM Reklas ke Aset Lain lain (-)	Kewajiban (-)
1	2	21	22	23		9
1	Dinas Pendidikan	908.274.553,00	-	263.356.442,00	-	-
2	Dinas Kesehatan	492.330.470,62	118.480.000,00	4.789.449.750,40	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	9.724.500,00	-	-	-	64.259.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	4.840.500,00	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	199.677.000,00	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	83.840.000,00	-	-	12.536.364,00
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	-	-	15.487.179,49	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	98.180.000,00	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	-	43.950.000,00	-	-	-
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	30.200.000,00	-	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	48.950.000,00	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	154.615.000,00	-	-	-	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38.347.173,50	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
26	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	26.564.524,42	-	3.198.829,79	-	-
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	986.420.000,00	-	-
29	Kecamatan Bogor Selatan	3.425.000,00	40.210.000,00	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Timur	7.064.275,88	49.610.000,00	294.656.000,00	-	-

31	Kecamatan Bogor Tengah	10.000.000,00	-	-	-	-
32	Kecamatan Bogor Barat	21.063.500,00	-	-	-	-
33	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tanah Sareal	3.600.000,00	-	39.700.700,00	-	-
35	Inspektorat	-	-	-	-	-
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	50.000.000,00	200.623.547,00	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
38	Badan Pendapatan Daerah	-	33.995.000,00	65.175.000,00	-	-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	57.970.000,00	-	-	-
40	PPKD	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		1.675.008.997,42	625.185.000,00	6.892.784.948,68	-	76.796.164,00

PENGURANGAN ASET TETAP DARI HASIL INVENTARISASI TAHUN 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	< Kapitalisasi (-)	Reklas ke Aset Rusak Berat (-)	Reklas ke Aset Lain-Lain (-)	Koreksi Nilai Perolehan (-)	Dihapus/Double Catat (-)
1	2	25	27	28	29	30
1	Dinas Pendidikan	-	1.020.766.976,30	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	-	918.000.000,00	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	1.011.030.000,00	-	-	-
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	3.019.128,79	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	-	8.400.000,00	9.800.000,00	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	44.744.250,00	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	158.209.433,36	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1.412.797.888,07	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	535.030.958,74	-	-	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	20.600.000,00	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.075.000,00	-	-	-	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	5.858.290,57	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	75.950.000,00	-	-	-
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	169.241.333,33	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	100.907.458,43	-	-	81.000.000,00
26	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1.159.644.772,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	377.000.000,00
29	Kecamatan Bogor Selatan	-	281.108.358,16	-	-	-
30	Kecamatan Bogor Timur	-	103.572.081,00	-	-	-
31	Kecamatan Bogor Tengah	-	267.862.920,00	-	-	-
32	Kecamatan Bogor Barat	-	95.214.626,00	-	-	-
33	Kecamatan Bogor Utara	-	1.419.550.081,59	-	-	-
34	Kecamatan Tanah Sareal	-	-	-	-	-
35	Inspektorat	-	-	-	-	-
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
38	Badan Pendapatan Daerah	-	227.344.557,60	-	-	-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	77.416.628,57	-	-	-
40	PPKD	-	-	-	-	99.800.000,00
	JUMLAH TOTAL	15.075.000,00	7.956.624.970,53	9.800.000,00	-	1.717.444.771,99

DAFTAR ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
PEMERINTAH KOTA BOGOR
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama /Jenis Barang	Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tanggal, Bulan, Tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Ket.
				Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Sekolah	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cibeureum 2, Jl. Cibeureum Rt.03/Xi Mulyaharja			2017	APBD BM	41.272.558,38	Dinas Pendidikan
2	Tanah Dalam Pengerjaan	1	Studi Kelayakan Pembebasan Lahan SDN Cibuluh 3			2018	APBD BM	50.901.460,06	Dinas Pendidikan
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Pamoyanan 2			2018	APBD BM	51.090.700,38	Dinas Pendidikan
4	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cijahe			2018	APBD BM	35.517.907,69	Dinas Pendidikan
5	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru SD dan SMP Satu Atap Kelurahan Kencana			2018	APBD BM	51.014.574,42	Dinas Pendidikan
6	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Tajur 1 (Tahap 2)			2019	APBD BM	78.760.000,00	Dinas Pendidikan
7	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Lawanggingtung 2			2019	APBD BM	74.019.000,00	Dinas Pendidikan
8	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cimahpar 2 (Tahap 2)			2019	APBD BM	55.440.000,00	Dinas Pendidikan
9	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Kedung Halang 2 (Tahap 2)			2019	APBD BM	99.660.000,00	Dinas Pendidikan
10	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Marga Jaya 1 (Tahap 2)			2019	APBD BM	77.816.750,00	Dinas Pendidikan
11	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Kebon Pedes 5			2019	APBD BM	81.950.000,00	Dinas Pendidikan
12	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cimanggu			2019	APBD BM	77.385.000,00	Dinas Pendidikan
13	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Curug 3			2019	APBD BM	54.120.000,00	Dinas Pendidikan
14	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Rehabilitasi SDN Dewi Sartika 1, 2, 3			2019	APBD BM	99.495.000,00	Dinas Pendidikan
15	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan RKB SDN Cimanggu Kecil			2019	APBD BM	98.197.000,00	Dinas Pendidikan
16	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan RKB SDN Situgede 5			2019	APBD BM	43.725.000,00	Dinas Pendidikan
17	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cijahe (Tahap 2)			2019	APBD BM	54.890.000,00	Dinas Pendidikan
18	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Tegallega 1 dan 2			2019	APBD BM	74.390.250,00	Dinas Pendidikan
19	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Kampung Sawah			2019	APBD BM	55.242.000,00	Dinas Pendidikan
20	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Bubulak 3 (TAHAP 2)			2019	APBD BM	98.197.000,00	Dinas Pendidikan
21	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Kedung Waringin			2019	APBD BM	82.610.000,00	Dinas Pendidikan
22	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cibuluh 3			2019	APBD BM	55.242.000,00	Dinas Pendidikan
23	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cimahpar 1			2019	APBD BM	99.500.500,00	Dinas Pendidikan
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Ciheuleut 1,2			2019	APBD BM	99.269.500,00	Dinas Pendidikan
25	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Restorasi SDN Papandayan			2019	APBD BM	47.575.000,00	Dinas Pendidikan

No.	Nama /Jenis Barang	Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tanggal, Bulan, Tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Ket.
				Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Revitalisasi SDN Cibalagung			2019	APBD BM	92.818.000,00	Dinas Pendidikan
27	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	UKL UPL Unit Sekolah Baru Satu Atap SD dan SMP Kelurahan Kencana			2019	APBD BM	69.465.000,00	Dinas Pendidikan
28	Tanah Dalam Pengerjaan	1	Jasa Appraisal Pembebasan Lahan SDN Cibuluh 3			2019	APBD BM	28.325.000,00	Dinas Pendidikan
29	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Penyusunan Andal Lalu Lintas USB 1 Atap SD dan SMP Kelurahan Kencana			2019	APBD BM	49.060.000,00	Dinas Pendidikan
30	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		Konsultan Perencanaan Revitalisasi dan Rehabilitasi SMP			2019	APBD BM	664.950.000,00	Dinas Pendidikan
31	Penyusunan DED Gedung RSUD Tahap III (4 Blok)	1	Dr .Sumeru No 120		26/SPMK/DED-RSUD/PPK/VI/2017	2017	APBD	3.284.659.840,00	RSUD SKPD
32	Jasa Konsultasi DED Mesjid RSUD	1	Jl. Dr. Semeru No.122			2018	APBD BM	44.556.000,00	RSUD BLUD
33	Jalan Kabupaten/kota Kelas II	1	Pembangunan Jalan Inner Ring Road			2014	APBD	478.964.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Jalan Kabupaten/kota Kelas III	1	Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar - Sukaresmi-Kec. Tanah Sareal			2014	APBD	5.572.492.244,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Pembangunan Jalan R3	1				2015	APBD	12.068.771.338,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Tanah Jalan	1	Pembebasan Inner Ring Road (Muarasari-Wangun) Kel Muarasari -			2010	Tanah Negara	84.732.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Jembatan Beton	1	Konsultan perencanaan Pelebaran jembatan Kali Ciharakas RT 05 RW 01 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kec. Bogor Tengah			2016	APBD	18.425.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Talud Sungai Ciparigi di RW.07 Kelurahan Ciparigi Kec. Bogor Utara	1	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Talud Sungai Ciparigi di RW.07 Kelurahan Ciparigi Kec. Bogor Utara			2017	APBD	29.865.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Talud Sungai Ciparigi di RW.01 Kelurahan Tanah Baru Kec. Bogor Utara	1	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Talud Sungai Ciparigi di RW.01 Kelurahan Tanah Baru Kec. Bogor Utara			2017	APBD	23.485.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 01 Kelurahan Cipaku Kec. Bogor Selatan	1	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 01 Kelurahan Cipaku Kec. Bogor Selatan			2017	APBD	14.575.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 15 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	1	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 15 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan			2017	APBD	26.510.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 17 Kelurahan Cipaku Kec. Bogor Selatan	1	Perencanaan Pembangunan Talud DAS Cisadane di RW. 17 Kelurahan Cipaku Kec. Bogor Selatan			2017	APBD	17.380.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Perencanaan Pembangunan Talud di RW.04 Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah	1	Perencanaan Pembangunan Talud di RW.04 Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah			2017	APBD	17.380.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	Perencanaan Pembangunan Kirmir di RW 11 Kelurahan Gudang Kec. Bogor Tengah	1	Perencanaan Pembangunan Kirmir di RW 11 Kelurahan Gudang Kec. Bogor Tengah			2017	APBD	14.740.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup IPAL dan IPLT	1	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup IPAL dan IPLT IPAL dan IPLT Tegal Gundil			2017	APBD	279.158.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Penyusunan Laporan Monev IPAL dan IPLT	1	Penyusunan Laporan Monev IPAL dan IPLT IPAL dan IPLT Tegal Gundil			2017	APBD	48.922.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama /Jenis Barang	Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tanggal, Bulan, Tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Ket.
				Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	perencanaan Pembangunan septik tank individu di Kota Bogor	1	perencanaan Pembangunan septik tank individu di Kota Bogor			2017	APBD	49.450.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	perencanaan pembangunan infrastruktur air minum non PDAM	1	perencanaan pembangunan infrastruktur air minum non PDAM			2017	APBD	29.720.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Jembatan Trotoar dan Drainase Wilayah II lokasi 5	1	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Jembatan Trotoar dan Drainase Wilayah II lokasi 5			2018	APBD BM	49.335.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Pembangunan Saluran dari Katulampa- Bantar Kemang - Vila Duta	1	Pembangunan Saluran dari Katulampa- Bantar Kemang - Vila Duta			2018	APBD BM	3.580.860.307,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	100 x 152 m ²	Pembangunan dan penataan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru Pembangunan Kolam Retensi (Bankeu DKI 2018)			2019	APBD BM	7.832.662.331,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Mesjid Agung Kota Bogor			2016	Banprov	18.437.635.920	Dinas Perumahan dan Permukiman
53	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Konsultan Penyusunan DED Pembangunan dan Penataan Taman Manunggal Tahap 1			2018	APBD BM	35.969.000,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja			2017	APBD	49.450.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
55	Pembangunan Gedung HI/PPK	1	Jl. Merdeka No. 142 Bogor			2014	APBD Prov	22.800.000,00	Dinas Sosial
56	DED Revitalisasi Gedung naker Penlukturtrans Disnakersostrans	1	Jl. Merdeka No. 142 Bogor			2016	APBD Kota	32.955.000,00	Dinas Sosial
57	Perencanaan dan Penyusunan Gedung BLK Kota Bogor	1				2017	APBD	280.820.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58	Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi	1	Jl. Achmad Adnawijaya Kec. Bogor Utara			2014	APBD	609.622.425,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
59	Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	1	Bangunan Tempat Berdagang Jalan Heulang Tanah Sareal			2017	APBD	15.750.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
60	Pembuatan Masterplan Komplek Olahraga (GOR)	1	Jl. Pemuda No. 4 Tanah sareal Bogor	09 - 05 - 2016	027.01/PP /SP- MP.GOR/K ANPORA	2016	APBD	481.205.000,00	Kantor Pemuda dan Olah Raga
61	Pembuatan DED Renovasi Stadion GOR Pajajaran	1	Jl. Pemuda No. 4 Tanah sareal Bogor	11 - 10 - 2016	931/00148 0/LS/2016	2016	APBD	1.170.080.000,00	Kantor Pemuda dan Olah Raga
62	DED Taman sepanjang kali baru Katulampa	1	DED Taman sepanjang kali baru Katulampa			2015	APBD BM	47.950.000,00	Kantor Kecamatan Bogor Timur
63	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Konsultan perencana pengaman sungai			2019	DAU	11.500.000,00	Kantor Kecamatan Bogor Tengah
64	Pembangunan Bangunan gedung tempat pembuangan sampah sementara rw.07	1				2019	DAU	6.504.000,00	Kantor Kecamatan Tanah Sareal
65	Gedung Pendidikan Permanen (DED Gedung Diklat)	1	Kertamaya Bogor Selatan	19 Juli 2016	027/02/SP /DED- DIKLAT/PP K/VII/2016	2016	APBD	366.259.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
66	Tanah (Penilaian/Appraisal PengadaanTanah Untuk PembangunanJembatan Otista)	1	Jembatan Otista			2019	APBD	84.920.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH		65						57.861.964.006,16	

No.	Nama /Jenis Barang	Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tanggal, Bulan, Tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Ket.
				Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tagihan Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	
1	Penjualan Rumah Golongan III	5.491.595,00
2	Penjualan Kendaraan Roda Dua	4.642.470,00
3	Penjualan Kendaraan Roda Empat	15.442.500,00
	Jumlah I	25.576.565,00
4	Penjualan Tanah Eks Tanah Sewa :	
	- Kelurahan Kebon Pedes	41.188.781,00
	- Kelurahan Babakan Pasar	150.218.160,00
	- Kelurahan Sukasari	659.376.582,00
	Jumlah II	850.783.523,00
	J u m l a h (I d a n I I)	876.360.088,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Daftar Nominatif
Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Per 31 Desember 2019

No	Nama Penanggungjawab	Jumlah Kerugian (Rp)	Saldo Per 31 Des.2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Angsuran Tahun 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Des. 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	M. Djumli, BBA.	20.783.660,00	16.471.522,00	-	-	16.471.522,00
2	Tj. Sukriawidjaja (Alm.)	20.903.159,00	17.290.659,00	-	-	17.290.659,00
3	Alimin Zaini	4.175.000,00	-	-	-	-
4	Eva Yuslinda, S.E.	2.223.424.202,00	2.201.423.452,00	-	-	2.201.423.452,00
	J U M L A H	2.269.286.021,00	2.235.185.633,00	-	-	2.235.185.633,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Daftar Nominatif
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
per 31 Desember 2019

Per Desember 2018

No	Nama Penanggungjawab	Jumlah Kerugian (Rp)	Angsuran Tahun 2017 (Rp)	Saldo Per 31 Desember (Rp)	Penambahan Tahun 2018	Angsuran Tahun 2018 (Rp)	Saldo awal 31 Des 2018	Koreksi	Saldo Awal Setelah (Rp)	Angsuran Tahun 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Desember (Rp)
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10=8-9
1	Letkol. Inf. Soemardji	14.000.000,00		12.000.000,00			12.000.000,00	-	12.000.000,00		12.000.000,00
2	Drh. Nana Supriatna, M.Phil	16.500.000,00		11.687.500,00			11.687.500,00	-	11.687.500,00		11.687.500,00
3	Surtiwa Iskandar	40.000.000,00		36.650.000,00			36.650.000,00	-	36.650.000,00		36.650.000,00
4	Dedy Supardi	2.000.000,00		-			-	-	-		Lunas
5	H.R. Sudradjat H.	14.000.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00	-	7.500.000,00		7.500.000,00
6	Syamsudin	3.750.000,00		-			-	-	-		Lunas
7	Prihatno	3.960.000,00		-			-	-	-		Lunas
8	Arwandi	4.004.000,00		-			-	-	-		Lunas
9	Dyah Herawati	7.304.000,00		5.874.000,00		5.500.000,00	874.000,00	- 500.000,00	374.000,00	374.000,00	Lunas
10	Deddy Mulyadi	3.600.000,00		-			-	-	-		Lunas
11	Dedi Hidayat	6.424.000,00		2.509.000,00			2.509.000,00	-	2.509.000,00		2.509.000,00
12	Hidayatullah	2.000.000,00		-			-	-	-		Lunas
	SK Tahun 2010										
13	Ilyas	7.200.000,00		-			-	-	-		Lunas
14	Deni Aviantara, SE.	3.960.000,00		-			-	-	-		Lunas
15	Ir. H. Asep Yayat Suryana	23.200.000,00		-			-	-	-		Lunas
16	Iswan Muhamad, AMKL.	6.156.000,00		5.756.000,00			5.756.000,00	-	5.756.000,00		5.756.000,00
17	Rully Syachrul	4.200.000,00		-			-	-	-		Lunas
18	Atik Misna	7.392.000,00	800.000,00	6.592.000,00		3.600.000,00	3.292.000,00	- 300.000,00	2.992.000,00	3.600.000,00	608.000,00
19	Drs. Ayep Ruhayat, SE.	5.700.000,00		4.900.000,00			4.900.000,00	-	4.900.000,00		4.900.000,00
20	Sanusi	6.384.000,00		1.330.000,00		1.330.000,00	-	-	-		Lunas
21	Drs. Bambang Suhermawan	31.200.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00	-	-	-		Lunas
22	Ir. Daud Irsandi	12.000.000,00		-			-	-	-		Lunas
23	Drs. Hermen	2.320.000,00		-			-	-	-		Lunas
24	Titik Supiati, B.Sc.	7.800.000,00		-			-	-	-		Lunas
25	R. Andri Koesnendar	71.100.000,00		48.600.000,00		4.500.000,00	45.600.000,00	- 1.500.000,00	44.100.000,00	6.000.000,00	38.100.000,00
26	H. Anwar Hadi, SE	4.368.000,00		3.094.000,00			3.094.000,00	-	3.094.000,00		3.094.000,00
	SK Tahun 2011										
27	Haris Munandar	1.460.000,00		-			-	-	-		Lunas
	SK Tahun 2012										
28	Ir. Soni Gumilar, M.Si	18.200.000,00		7.582.400,00		7.582.400,00	-	-	-		Lunas
	SK Tahun 2015										
29	Herlin Meiningtyas, SH. M.Si	45.682.000,00		-			-	-	-		Lunas
	SK Tahun 2017										
30	Wahyudin		6.000.000,00	6.000.000,00		4.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Lunas
31	Agus Salim		11.100.000,00	8.787.500,00			8.787.500,00	-	8.787.500,00		8.787.500,00
32	Cucu Hanapi		8.781.143,00	4.711.143,00		4.712.000,00	641.143,00	- 642.000,00	857,00		Lunas
	SK Tahun 2017										
33	Mochamat Fattah S.Kom		18.000.000,00	-			-	-	-		Lunas
34	Udin Zaenudin, SE		3.571.429,00	3.421.429,00		300.000,00	3.121.429,00	-	3.121.429,00		3.121.429,00
35	Erwin Subastian,SE		12.135.714,00	12.135.714,00		6.006.600,00	5.127.914,00	1.001.200,00	6.129.114,00	3.504.200,00	2.624.914,00
36	Purba Warsita		6.586.765,00	4.111.765,00		3.300.000,00	811.765,00	-	811.765,00	812.000,00	Lunas
	SKTJM Tahun 2017										
37	Heryaningsih Eka S,AP,SAP,MAP		9.893.000,00	7.893.000,00		8.893.000,00	-	- 1.000.000,00	1.000.000,00		Lunas
38	Abdur Rakhman,SE.,M.Si		13.560.000,00	13.560.000,00			13.560.000,00	-	13.560.000,00	13.560.000,00	Lunas
	SKTJM Tahun 2018										
39	Eru Sukendra				11.198.400,00	933.200,00	9.332.000,00	933.200,00	10.265.200,00	5.599.200,00	4.666.000,00
40	Atep Supriatna				28.707.600,00		28.707.600,00	-	28.707.600,00	14.353.800,00	14.353.800,00
	J U M L A H	375.864.000,00	90.428.051,00	234.195.451,00	39.906.000,00	70.657.200,00	204.451.851,00	- 1.007.600,00	203.444.251,00	49.303.200,00	155.142.143,00

No	Nama Penanggungjawab	Jumlah Kerugian (Rp)	Angsuran Tahun 2017 (Rp)	Saldo Per 31 Desember (Rp)	Penambahan Tahun 2018	Angsuran Tahun 2018 (Rp)	Saldo awal 31 Des 2018	Koreksi	Saldo Awal Setelah (Rp)	Angsuran Tahun 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Desember (Rp)
----	----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

154.141.051,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
TANAH YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA
BANGUN, GUNA, SERAH (BGS)
PER 31 DESEMBER 2019

NO	LOKASI	TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BOGOR		BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH PIHAK		PERJANJIAN KERJASAMA		JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		LUAS TANAH (M ²)	NILAI TANAH (Rp.)	LUAS BANGUNAN (M ²)	NILAI BANGUNAN (Rp.)	MITRA BGS	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054	4.871.684.310,00	13.806	-	PT. PROPINDO MULIA UTAMA	1. Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Plaza dan Pasar Kebon Kembang Kotamadya Bogor Nomor 644/SP.08-Huk/1996, tanggal 30 Desember 1996	30 TAHUN
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	2. Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Plaza dan Pasar Kebon Kembang Kotamadya Bogor Nomor 644/SP.08-Huk/1998, tanggal 30 Desember 1998	
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	3. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Blok C, D dan E Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Nomor 644/SP.09-Huk/2000, tanggal 30 Juni 2000.	
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	4. Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, Nomor 644/SP.10-Huk/2000, tanggal 11 Oktober 2000.	
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	5. Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama Nomor 644/SP.10-Huk/2000, tanggal 11 Oktober 2000 antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor. Nomor 511.2/Perj.4-PPKA/2010 dan Nomor 168/PMU-PKS PB/2010, tanggal 9 Februari 2010.	
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex.Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285	6.142.500.000,00	65.710	-	PT BOGOR INTERNUSA PLAZA	No. 511.21/Perj.01-Huk/2003 tentang Pembangunan Kembali/Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Gedung Bogor Internusa Plaza, tanggal 19 Februari 2003	30 TAHUN
						PT GIRIMULIA PERKASA JAYA	No. 640/Perj.32-BPKAD/2015 dan Nomor 001/LGL-GPJA/PKS/IX/2015 tentang Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Pangrango Plasa, tanggal 1 September 2015	

3	Tanah di Dreded Kelurahan Empang	33.500	41.512.000.000,00	-	-	PT ALIYAH PANCAHA'FAT	Perjanjian nomor : 591/SP.08 Tapem/1996 tentang Penggunaan Tanah Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Dreded Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan untuk Pembuatan Jembatan / Jalan Masuk ke komplek perumahan Graha Bogor Indah Taman /Jalur Hijau dan fasilitas sosial serta fasilitas umum, tanggal 19 Agustus 1996	30 TAHUN
	JUMLAH	51.839	52.526.184.310					

BATAS AKHIR PERJANJIAN
24/09/2027
04/04/2033

19/08/2026

PEMERINTAH KOTA BOGOR
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2019

No	Nama Aplikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Program Manajemen Layanan Pendidikan (PSB Online)	2014	90.000.000,0000	Dinas Pendidikan
2	Software	2014	50.440.000	Dinas Kesehatan
3	Software	2014	24.390.000	Dinas Kesehatan
4	Software	2014	40.160.000	Dinas Kesehatan
5	Program Komputer (Software e-SIR)	2015	330.000.000	Dinas Kesehatan
6	Program Komputer Software Pengelolaan Obat	2015	28.325.000	Dinas Kesehatan
7	Software	2016	29.810.000	Dinas Kesehatan
8	Pengadaan Komputer Lainnya Pengembangan Software SIMPUS	2016	27.807.000	Dinas Kesehatan
9	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian DBD	2016	79.090.000	Dinas Kesehatan
10	Aplikasi Pelaporan Imunisasi Berbasis WEB	2018	47.948.000	Dinas Kesehatan
11	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Siswa	2018	45.450.000	Dinas Kesehatan
12	Software Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Siswa	2019	118.480.000	Dinas Kesehatan
13	Media WEB	2016	62.009.600	RSUD SKPD
14	Software	2016	49.500.000	RSUD BLUD
15	Lisensi Entreprise Aplikasi SISMADAK	2018	5.000.000,00	RSUD BLUD
16	Software AutoCAD Civil 3D 2015 Commercial New/Licence Only + Package	2015	75.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Program Komputer/Software (Penyusunan Sistem Informasi Prasarana Permukiman)	2014	1.069.957.750	Dinas Perumahan dan Permukiman
18	Sistem aplikasi pemetaan	2015	174.900.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Sistem aplikasi perancangan/desain	2015	116.270.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Software	2017	98.615.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Aplikasi sistem penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	2019	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	aplikasi dan informasi manajemen rambu kebencanaan	2019	43.840.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Aplikasi Finger Spot	2013	10.532.500,00	Dinas Sosial
24	Website Informasi Pasar Kerja	2016	48.950.000,00	Dinas Sosial
25	Aplikasi penerima bantuan iuran BPJS	2017	19.100.000,00	Dinas Sosial
26	Aplikasi informasi pasar kerja online	2018	44.220.000,00	Dinas Tenaga Kerja
27	SIM Retribusi	2014	91.630.000	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Komputer (Software)	2015	22.440.000	Dinas Lingkungan Hidup
29	Program Komputer (Software Perbengkelan)	2016	49.058.500	Dinas Lingkungan Hidup
30	Software aplikasi Data Siak E-KTP	2014	45.375.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
31	Software	2014	34.952.500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
32	Sistem Aplikasi	2015	69.212.500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
33	Pembuatan Sistem Informasi Geografis Kependudukan2	2016	38.969.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
34	Kompersi Data Base Pendamping Program SIAK CAPIL	2016	43.450.250	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
35	Program Aplikasi Digitalisasi Arsip	2016	40.890.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
36	Pembuatan Aplikasi Mobil Keliling	2016	46.170.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
37	Pembuatan Web Site Disdukcapil	2016	41.495.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
38	Kompersi Data Base	2016	43.741.750	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
39	Aplikasi Informasi Pelayanan Adminduk (SMS Gateway)	2016	43.915.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
40	Benrollment Mobile E-KTP	2017	18.730.854	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
41	Aplikasi Sitanduk Wilayah	2019	98.180.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
42	System Informasi KUBE	2014	45.435.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
43	Pembuatan Data Base UEK-SP	2014	9.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Sistem aplikasi SIL	2015	107.706.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	Sistem Informasi Lingkungan SIL	2016	137.527.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	Software	2014	89.510.000,00	Dinas Perhubungan
47	Pembuatan Animasi Keselamatan LLAJ	2015	99.550.000,00	Dinas Perhubungan
48	Program Komputer (Software)	2015	29.920.000,00	Dinas Perhubungan
49	Aplikasi Server - ATCS	2017	28.528.726	Dinas Perhubungan
50	Aplikasi Client - ATCS	2017	22.501.530	Dinas Perhubungan

No	Nama Aplikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Organisasi Perangkat Daerah
51	Aplikasi Server - NVR	2017	11.652.578	Dinas Perhubungan
52	Aplikasi Client - Video-Manager	2017	10.447.139	Dinas Perhubungan
53	Aplikasi Audio Annaoncer	2017	11.853.485	Dinas Perhubungan
54	Aplikasi Server - ATCS	2017	12.140.327	Dinas Perhubungan
55	Aplikasi Client - ATCS	2017	9.575.469	Dinas Perhubungan
56	Aplikasi Server - NVR	2017	9.917.450	Dinas Perhubungan
57	Aplikasi Client - Video-Manager	2017	8.891.507	Dinas Perhubungan
58	Aplikasi Audio Annaoncer	2017	5.044.220	Dinas Perhubungan
59	Aplikasi DIS-Manager (VMS)	2017	4.616.744	Dinas Perhubungan
60	Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)	2018	48.300.000	Dinas Perhubungan
61	Aplikasi SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	2019	43.950.000	Dinas Perhubungan
62	e-Government	2013	600.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
63	Program Komputer Software pengembangan aplikasi e-Gov	2014	551.425.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
64	Software Komputer Datawarehouse	2014	85.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
65	Asoftware Lisensi Teleconference / V meet server dengan 10 user lisensi	2014	200.885.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
66	Program Komputer (Software) Lisensi Teleconference	2015	200.390.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
67	Program Komputer (Software)	2015	48.371.500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
68	Program Komputer (Software)	2015	50.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
69	Program Komputer (Software)	2015	60.110.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
70	Program Komputer (Software) Call Centre	2015	47.430.900	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
71	Program Komputer (Software) Pengelolaan e-gov	2015	215.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
72	Website Radio Sipatahunan	2016	47.995.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
73	Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	2016	49.950.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
74	Pengembangan & Pengelolaan E-GOV SIM Inf.Pemerintahan	2016	45.605.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
75	Program SP TV Sipatahunan TV)	2016	24.640.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
76	Data Warehouse	2016	140.450.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
77	CCTV Analytic	2016	188.925.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
78	Pembangunan Aplikasi Walikota menyapa	2017	40.402.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
79	Software webmail Server	2017	44.450.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
80	Pengembangan dan Pendampingan Sim Wilayah	2017	47.915.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
81	Pengembangan dan Pendampingan Sim Paten	2017	47.915.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
82	Pengembangan dan Pendampingan Sim e - Surat	2017	47.915.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
83	Pengembangan dan Pembangunan SISKUM	2017	45.330.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
84	Pembangunan SIM Pendataan Kesetaraan	2017	47.915.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
85	Pembuatan WEB PPID	2017	50.060.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
86	Aplikasi SIM Wilayah (Smart Posyandu)	2018	35.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
87	Pengembangan Sistem Informasi Kota(SIMATA)	2018	50.170.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
88	Aplikasi C Panel Manajemen Server	2018	20.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
89	Webmail	2018	44.285.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

No	Nama Aplikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Organisasi Perangkat Daerah
90	Sistem Aplikasi Data UKM	2015	44.725.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
91	Software Komputer Sistem Aplikasi Data UKM	2018	79.203.200	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
92	Web Bazar UKM	2019	48.950.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
93	Aplikasi Sistem Rancang Bangun	2003	208.054.000,00	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
94	Aplikasi System	2003	367.544.000,00	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
95	Aplikasi Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi aset tak berwujud	2003	138.930.000,00	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
96	Pembuatan dan Integrasi Aplikasi Perizinan dgn OPD Dinas Terkait	2016	49.335.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
97	Pembangunan DB Digital	2016	49.500.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
98	Aplikasi Perizinan Berbasis Mobiling	2017	49.225.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
99	Aplikasi dgn Lembaga Kementrian	2017	48.972.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM
100	Aplikasi Penunjang PAD	2017	45.055.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
101	Aplikasi Arsip dan Perpustakaan	2003	25.475.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
102	Aplikasi Pengolah Data Arsip	2016	171.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
103	Software Komputer Internet Aplikasi Pengolah Data Arsip (SIMARDI)	2018	46.375.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
104	Software Metode Pelaporan Online	2015	29.700.000	Dinas Pertanian
105	Aplikasi Disperindag	2016	66.687.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
106	Software	2014	86.023.900,00	Sekretaris Daerah
107	Software	2014	295.754.250,00	Sekretaris Daerah
108	Sistem E-Procurement	2014	262.119.000,00	Sekretaris Daerah
109	Software	2014	23.764.400,00	Sekretaris Daerah
110	Software Bansos	2018	44.200.000,00	Sekretaris Daerah
111	Aplikasi Reporting Barang / Jasa secara Elektronik	2015	38.500.000,00	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
112	Sistem Aplikasi	2015	47.968.182,00	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
113	Sistem Aplikasi	2015	24.914.000,00	Bagian Administrasi Perekonomian
114	Sistem Aplikasi	2015	30.000.000,00	Bagian Hubungan Masyarakat
115	Sistem Aplikasi Aplikasi Keuangan Sekretariat Daerah	2016	21.934.000,00	Bagian Hubungan Masyarakat
116	Sistem Aplikasi Aplikasi Keuangan Sekretariat Daerah	2016	49.307.500,00	Bagian Hubungan Masyarakat
117	SIM DPRD	2013	165.000.000	Sekretariat DPRD
118	Sistem Aplikasi Work Group	2015	48.315.000	Sekretariat DPRD
119	Aplikasi Maintenance Waring System (Aplikasi Simawar)	2019	40.210.000	Kecamatan Bogor Selatan
120	Pengembangan Aplikas e-Commerce	2019	49.610.000	Kecamatan Bogor Timur
121	Software	2014	48.510.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
122	Sistem Aplikasi	2015	49.362.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
123	Sistem Aplikasi	2016	49.785.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
124	Sistem Informasi Pelaporan TGSL/CSR	2019	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
125	Aplikasi Gaji	2003	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
126	Pembangunan SIMBADA	2015	684.472.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
127	Aplikasi Pengelolaan Barang Pakai Habis (SIDIA)	2017	23.760.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
128	Software Sistem Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (SITU GARUDA)	2018	29.700.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
129	Software Sistem Administrasi Barang Daerah (SISADA)	2018	584.320.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
130	Aplikasi BPHTB	2014	94.423.000	Badan Pendapatan Daerah
131	Lisensi Sistem Operasi Server	2014	164.410.000	Badan Pendapatan Daerah
132	Aplikasi Pengendalian Berkas	2014	22.327.500	Badan Pendapatan Daerah
133	Host to Host PBB	2014	44.795.000	Badan Pendapatan Daerah
134	Host to Host BPHTB	2014	44.410.000	Badan Pendapatan Daerah
135	Aplikasi POS PBB	2014	43.695.000	Badan Pendapatan Daerah
136	Aplikasi PBB online	2014	314.147.500	Badan Pendapatan Daerah
137	Aplikasi SIRINE (Sistem Informasi Reklame Non Permanen)	2015	40.073.571	Badan Pendapatan Daerah
138	Aplikasi Benda Berharga	2015	97.800.000	Badan Pendapatan Daerah
139	Aplikasi Integrasi PBB & BPHTB	2015	48.410.000	Badan Pendapatan Daerah
140	Aplikasi E SSPD BPHTB	2015	48.410.000	Badan Pendapatan Daerah
141	Aplikasi Inventori	2015	47.750.000	Badan Pendapatan Daerah
142	Aplikasi Fix Payment BPHTB	2015	48.410.000	Badan Pendapatan Daerah
143	Sistem informasi integrasi perijinan dan pajak daerah	2018	52.525.000	Badan Pendapatan Daerah
144	System Informasi Verifikasi Pajak Daerah	2019	33.995.000	Badan Pendapatan Daerah
145	Aplikasi Simpeg	2003	64.746.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

No	Nama Aplikasi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Organisasi Perangkat Daerah
146	Program Komputer / Software	2003	9.393.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
147	Aplikasi Absensi Berbasis Android	2016	39.700.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
148	Aplikasi Absensi Berbasis I-OS	2016	47.950.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
149	Aplikasi Absensi Berbasis Windows Mobile	2016	48.150.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
150	Aplikasi Absensi Berbasis Blackberry OS	2016	47.950.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
151	Aplikasi Arsip	2016	49.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
152	Aplikasi E-Kinerja Berbasis Mobile IOS	2018	48.245.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
153	Aplikasi E-Kinerja Berbasis Mobile Android	2018	47.970.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
154	Aplikasi Sipohan Pintar (Sistem informasi Proses hukuman disiplin terintegrasi)	2018	48.795.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
155	Aplikasi Pengembangan Kompetensi	2019	57.970.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
JUMLAH			13.345.818.781,80	

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR ASET LAINNYA - ASET RUSAK BERAT
 BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PER 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2019	ASET LAINNYA ASET RUSAK BERAT
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	28.658.836.286,76 1.020.766.976,30 174.430.023,00 29.505.173.240,06
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	6.472.331.604,03 - - 6.472.331.604,03
3	1.03.04	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	1.899.000,00 - - 1.899.000,00
4	1.03.05	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	1.085.389.891,79 918.000.000,00 110.160.000,00 1.893.229.891,79
5	1.06.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	9.770.755.362,67 1.011.030.000,00 - 10.781.785.362,66
6	1.07.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	1.168.400.912,67 - - 1.168.400.912,67
7	1.08.03	Satuan Polisi Pamong Praja	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	2.892.771.951,45 3.019.128,79 3.019.128,79 2.892.771.951,45
8	1.08.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	78.674.826,97 3.019.128,78 - 81.693.955,76
9	1.10.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	47.807.833,00 - - 47.807.833,00
10	1.13.01	Dinas Sosial	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	502.750.070,17 247.926.687,00 - 750.676.757,17
11	1.15.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	152.666.264,21 - - 152.666.264,21
12	1.16.01	Dinas Ketahanan Pangan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	153.128.331,50 44.744.250,00 - 197.872.581,50

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2019	ASET LAINNYA ASET RUSAK BERAT
13	1.17.01	Dinas Lingkungan Hidup	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	8.826.127.720,53 - - 8.826.127.720,53
14	1.18.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	770.700.222,67 - - 770.700.222,67
15	1.19.04	Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perempuan Anak	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	247.626.572,43 158.209.433,36 - 405.836.005,79
16	1.19.05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	974.649.678,00 1.412.797.888,08 - 2.387.447.566,08
17		Dinas Perhubungan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	2.866.036.205,69 - - 2.866.036.205,69
18	1.20.02	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	535.803.637,40 535.030.958,75 - 1.070.834.596,15
19	1.20.03	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	45.890.976,00 20.600.000,00 - 66.490.976,00
20	1.20.05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	1.110.129.557,80 - 185.826.697,38 924.302.860,42
21	1.20.06	Dinas Pemuda dan Olahraga	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	344.830.123,22 5.858.290,57 - 350.688.413,79
22	1.20.07	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	4.412.002.437,00 75.950.000,00 - 4.487.952.437,00
23	1.20.08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	979.001.424,54 169.241.333,33 - 1.148.242.757,87
24	1.20.08	Dinas Pertanian	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	2.891.231.963,70 - - 2.891.231.963,70
25	1.20.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	710.336.526,73 100.907.458,43 - 811.243.985,16
26	1.20.09	Walikota dan Wakil Walikota	Saldo Awal Penambahan Pengurangan	7.234.000,00 - -

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2019	ASET LAINNYA ASET RUSAK BERAT
			Saldo Akhir	7.234.000,00
27	1.20.12	Sekretariat Daerah	Saldo Awal	27.127.010.257,11
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	27.127.010.257,11
28	1.20.13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Saldo Awal	182.486.819,00
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	182.486.819,00
29	1.20.14	Kecamatan Bogor Selatan	Saldo Awal	1.215.625.941,72
			Penambahan	281.108.358,16
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	1.496.734.299,88
30	1.20.15	Kecamatan Bogor Timur	Saldo Awal	676.237.126,00
			Penambahan	103.572.081,00
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	779.809.207,00
31	1.21.01	Kecamatan Bogor Tengah	Saldo Awal	952.946.640,67
			Penambahan	267.862.920,00
			Pengurangan	85.716.134,40
			Saldo Akhir	1.135.093.426,27
32	1.22.02	Kecamatan Bogor Barat	Saldo Awal	802.276.473,84
			Penambahan	95.214.626,00
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	897.491.099,84
33	1.24.01	Kecamatan Bogor Utara	Saldo Awal	745.641.358,00
			Penambahan	1.419.550.081,59
			Pengurangan	482.647.027,74
			Saldo Akhir	1.682.544.411,85
34	1.25.02	Kecamatan Tanah Sereal	Saldo Awal	528.418.607,51
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	528.418.607,51
35	2.01.02	Inspektorat	Saldo Awal	132.686.774,55
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	132.686.774,55
36	2.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Saldo Awal	485.725.024,92
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	485.725.024,92
37	1.20.16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Saldo Awal	651.251.524,89
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	651.251.524,89
38	1.02.02	Badan Pendapatan Daerah	Saldo Awal	652.158.723,02
			Penambahan	227.344.557,60
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	879.503.280,62
39		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Saldo Awal	432.120.217,00
			Penambahan	77.416.628,57
			Pengurangan	183.260.000,00
			Saldo Akhir	326.276.845,57
40		PPKD	Saldo Awal	259.199.853,00

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2019	ASET LAINNYA ASET RUSAK BERAT
			Penambahan	23.871.000,00
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	283.070.853,00
		Jumlah Seluruh SKPD	Saldo Awal	110.550.798.722,16
			Penambahan	8.223.041.786,33
			Pengurangan	1.225.059.011,32
			Saldo Akhir	117.548.781.497,17

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN
 BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PER 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2010	ASET LAINNYA ASET LAIN-LAIN
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	Saldo Awal	14.844.092.279,39
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	14.844.092.279,39
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	Saldo Awal	1.173.340.175,98
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	1.173.340.175,98
3	1.03.04	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	Saldo Awal	-
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	-
4	1.03.05	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Saldo Awal	22.009.342,94
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	22.009.342,94
5	1.06.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saldo Awal	2.008.406.076,52
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	2.008.406.076,52
6	1.07.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saldo Awal	3.078.093.360,33
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	3.078.093.360,33
7	1.08.03	Satuan Polisi Pamong Praja	Saldo Awal	197.807.031,55
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	197.807.031,55
8	1.08.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saldo Awal	2.098.971.764,90
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	2.098.971.764,90
9	1.10.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Saldo Awal	146.984.127,00
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	146.984.127,00
10	1.13.01	Dinas Sosial	Saldo Awal	636.424.521,00
			Penambahan	9.800.000,00
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	646.224.521,00
11	1.15.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Saldo Awal	64.320.749,33
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	64.320.749,33
12	1.16.01	Dinas Ketahanan Pangan	Saldo Awal	85.357.247,50
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	85.357.247,50

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2010	ASET LAINNYA ASET LAIN-LAIN
13	1.17.01	Dinas Lingkungan Hidup	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	14.429.978.193,91 - 91.157.500,00 14.338.820.693,91
14	1.18.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	316.074.764,56 - - 316.074.764,56
15	1.19.04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	185.682.721,33 - - 185.682.721,33
16	1.19.05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	85.406.598,40 - - 85.406.598,40
17		Dinas Perhubungan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	355.709.244,00 - - 355.709.244,00
18	1.20.02	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	296.793.226,00 - - 296.793.226,00
19	1.20.03	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	27.354.220,00 - - 27.354.220,00
20	1.20.05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	111.684.657,00 - - 111.684.657,00
21	1.20.06	Dinas Pemuda dan Olahraga	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	62.979.905,00 - - 62.979.905,00
22	1.20.07	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	81.964.301,00 - - 81.964.301,00
23	1.20.08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	792.782.211,11 - - 792.782.211,11
24	1.20.08	Dinas Pertanian	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	1.186.773.829,00 - - 1.186.773.829,00
25	1.20.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	970.125.093,80 - - 970.125.093,80

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2010	ASET LAINNYA ASET LAIN-LAIN
26	1.20.09	Walikota dan Wakil Walikota	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	505.932.000,00 - - 505.932.000,00
27	1.20.12	Sekretariat Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	7.261.503.190,91 - - 7.261.503.190,91
28	1.20.13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	660.116.000,00 - - 660.116.000,00
29	1.20.14	Kecamatan Bogor Selatan	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	331.943.052,00 - - 331.943.052,00
30	1.20.15	Kecamatan Bogor Timur	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	44.973.700,00 - - 44.973.700,00
31	1.21.01	Kecamatan Bogor Tengah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	461.077.170,09 - - 461.077.170,09
32	1.22.02	Kecamatan Bogor Barat	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	107.642.484,00 - - 107.642.484,00
33	1.24.01	Kecamatan Bogor Utara	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	528.020.021,00 - - 528.020.021,00
34	1.25.02	Kecamatan Tanah Sereal	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	660.431.966,00 - - 660.431.966,00
35	2.01.02	Inspektorat	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	- - - -
36	2.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	50.115.930,00 - - 50.115.930,00
37	1.20.16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	55.550.675,00 - - 55.550.675,00
38	1.02.02	Badan Pendapatan Daerah	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir	967.148.806,33 - - 967.148.806,33

No. Urut	KODE SKPD	NAMA SKPD	Mutasi 2010	ASET LAINNYA ASET LAIN-LAIN
39		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Saldo Awal	78.838.400,00
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	78.838.400,00
40	PPKD		Saldo Awal	3.240.125.410,00
			Penambahan	-
			Pengurangan	-
			Saldo Akhir	3.240.125.410,00
		Jumlah Seluruh SKPD	Saldo Awal	58.212.534.446,87
			Penambahan	9.800.000,00
			Pengurangan	91.157.500,00
			Saldo Akhir	58.131.176.946,87

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
Per 31 Desember 2019

(Dalam Rp)

No	Nama SKPD	URAIAN	Saldo Utang per 31 Desember 2018	Penambahan 2019	Pengurangan / Pembayaran	Saldo Utang Per 31 Desember 2019
1	Rumah Sakit umum Daerah (BLUD)	Taspen	0,00	-	0,00	-
		Iuran Jaminan Kesehatan	23.805.678,00	22.985.038	23.805.678,00	22.985.038,00
		PPH Pusat	17.501.761,00	-	17.501.761,00	-
		PPN Pusat	0,00	-	0,00	-
		Taperum	0,00	-	0,00	-
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	93.593.378	0,00	93.593.378,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	76.752.140,00	146.957.381	76.752.140,00	146.957.381,00
		JUMLAH	118.059.579,00	263.535.797,00	118.059.579,00	263.535.797,00
2	Dinas Kesehatan	Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPH Pusat	0,00	645.825,00	0,00	645.825,00
		PPN Pusat	0,00	4.575.500,00	0,00	4.575.500,00
		Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	5.221.325,00	0,00	5.221.325,00
TOTAL			118.059.579,00	268.757.122,00	118.059.579,00	268.757.122,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG BUNGA
(Pada Rumah Sakit Umum Daerah)
Per 31 Desember 2019

No Rekening	Tanggal Pencairan	Saldo Utang Pokok	Saldo Utang Bunga
A60-1191220000214	20/12/2019	8.255.339.172,00	-
A60-1191022000068	22/10/2019	458.707.949,00	82.058.286,00
A60-1191129000154	29/11/2019	5.932.447.673,00	44.544.789,00
A60-1191122000181	22/11/2019	3.954.985.400,00	29.299.306,00
Total		18.601.480.194,00	155.902.381,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2019

No.	No. Medik	Uraian			Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2019
		Nama Pasien	Alamat	Jenis	
a	b	c	d	e	f
1	'134192	SITI KHODIJAH BY,NY (2)		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
2	'135133	YUNINGSIH,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	500.000
3	'135680	SYAFRIADI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
4	'135750	AZLAN ZAYDAN IBRAHIM		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
5	'135884	AGUNG PERMANA,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	500.000
6	'116674	NAUFAL MUHAMAD F, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
7	'116674	NAUFAL MUHAMAD F, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
8	'136038	SITI NURIKA,BY,NY (1)		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
9	'135309	WIWI,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
10	'133071	MAHESSA FALLAH, AN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
11	'058536	PUTRI SEPTIANI,NN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
12	'136570	ATIKAH,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
13	'084372	NURHAYATI, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
14	'133797	EMBAY SUBARNA, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
15	'116674	NAUFAL MUHAMAD F, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
16	'135133	YUNINGSIH,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	5.627.684
17	'136647	M SAHRUL MAULANA SIDIQ,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
18	'136742	MUHAMAD ZIBRAN,AN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
19	'136788	SUWANDI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	350.000
20	'136788	SUWANDI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	1.000.000
21	'136788	SUWANDI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	650.000
22	'136649	SUKARDI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	300.000
23	'136698	MARYADI,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	4.000.000
24	'132595	PIPIN LUTHFIAH, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	450.000
25	'135133	YUNINGSIH,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	3.900.000
26	'135307	IDA FARIDA HOEDIONO,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	700.000
27	'133978	RIKA AGUS MUHARTINI, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	600.000
28	'136871	BURHAN,TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	250.000
29	'136862	MUHAIMIN HAQQI,AN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	1.000.000
30	'118652	EVA SUSANTI, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
31	'084372	NURHAYATI, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
32	'135133	YUNINGSIH,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	480.000
33	'135133	YUNINGSIH,BY,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	1.500.000
34	'116674	NAUFAL MUHAMAD F, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
35	'136974	LANI SURYATI,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	2.000.000
36	'136107	MUMUN,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	68.900
37	'136975	ROHAYATI,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	150.000
38	'123763	ILHAM, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
39	'118652	EVA SUSANTI, NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
40	'133797	EMBAY SUBARNA, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	70.000
41	'133797	EMBAY SUBARNA, TN		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	5.000
42	'135307	IDA FARIDA HOEDIONO,NY		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	75.000
43		Fullerton		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	66.705.717
44		Yayasan PUSRI Medika		Pend.Diterima Dimuka Deposit Pasien	2.317.738
45		BJB		Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung Kantor & ATM	425.333.333
46		Permata		Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM	8.944.444
47		Mandiri		Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM	36.116.665
JUMLAH					565.094.482

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2019

No.	No. SKRD	Uraian			Penerima Retribusi IMTA Tahun 2018	Masa Berlaku (hari)	Jumlah Hari Tahun 2019	Jumlah Hari Tahun 2020	Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2019
		Nama Tenaga Asing	Alamat	Nama Perusahaan					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j = i/g x f
1	201841203120001	SUN SHOUHONG	JL. PEMUDA NO.27 KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	13.980.000	304	304	0	-
2	201841203120002	ALI SAUL TROMPIZ GUTIERREZ	JL. PEMUDA NO.27 KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	16.620.000	366	337	29	1.316.885,246
3	201841203120003	ALDRIN CARO BUCAL	JL. PEMUDA NO.27 KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	16.836.000	366	280	86	3.956.000,000
4	201841203120004	KAZUMA HONDA	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	16.911.600	366	278	88	4.066.177,049
5	201841203120005	CAMEROON DOUGAL KENNEDY	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	17.280.000	366	278	88	4.154.754,098
6	201841203120006	EVELYN CHIAM LYE HIANG	JL. PAJAJARAN NO.35 KEL. BABAKAN KEC. BOGOR TENGAH KOTA BOGOR	PT. Permata Mulia Jaya Indah	17.286.000	366	274	92	4.345.114,754
7	201841203120007	BRYAN FAIGAO GREGORIO	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	17.244.000	366	265	101	4.758.590,164
8	201841203120008	GERRIT WILLEM KROON	JL. PAMOYANAN RAYA NO.14 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN KOTA BOGOR	Woven + BV	17.160.000	366	247	119	5.579.344,262
9	201841203120009	NAGATOSHI HASHIMOTO	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	PT. Unitex Tbk	16.890.000	366	240	126	5.814.590,164
10	201841203120010	NORHIKO FUKUMOTO	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	PT. Unitex Tbk	16.890.000	366	240	126	5.814.590,164
11	201841203120011	TOMONORI TANAKA	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	PT. Unitex Tbk	16.890.000	366	240	126	5.814.590,164
12	201841203120012	JOSEPH TORRES LARDIZABAL	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	17.341.200	366	238	128	6.064.681,967
13	201841203120013	SUMEDHA THILINA DE TISSERA	JL. KH. SHOLEH ISKANDAR KEDUNG BADAK – TANAH SAREAL KOTA BOGOR	PT.Indonesia Tea Traders	16.950.000	366	198	168	7.780.327,869
14	201841203120014	BENEDICT EMIL RINNE	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	17.310.000	366	194	172	8.134.754,098
15	201841203120015	ADAM MARRA PAUL	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA KOTA BOGOR	Yayasan Danasha	17.310.000	366	194	172	8.134.754,098
16	201841203120016	ANANTA WIRAKRAMA MARAK	Jl. Papandayan 7 Bogor 16151 Bogor	Yayasan Pendidikan Anak- anak Bangsa Asing	15.317.500	336	166	170	7.749.925,595
17	201841203120017	SELVAKUMAR GUNASEKAR	JI PEMUDA NO 27 KEL.KEBON PEDES KEC.TANAH SAREAL KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	16.740.000	366	98	268	12.257.704,918
18	201841203120018	BAIS DHARMENDRA PRATAP Singh	BUKIT CIMANGGU CITY BLOK G3 NO 6 RT 001 RW 011	Dharmatek Berkat Utama,PT	16.770.000	366	97	269	12.325.491,803
19	201841203120019	TAKAYUKI MIYOSHI	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	PT. Unitex Tbk	16.710.000	366	48	318	14.518.524,590
20	201841203120020	RANDEEP SINGH KANWAR	JL. PEMUDA NO.27 KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	16.698.000	366	36	330	15.055.573,770
21	201841203120021	SUN SHOUHONG	JL. PEMUDA NO.27 KOTA BOGOR	PT. Goodyear Indonesia	16.698.000	366	36	330	15.055.573,770
22	201841203120022	RYO YOSHIOKA	JL. RAYA TAJUR No.1 KOTA BOGOR	PT. Unitex Tbk	4.279.500	92	34	58	2.697.945,652

23	201841203120023	HARISH GOPAL	Jl.KP PULO ARMIN B NO.11 KEL.BARANANGSIANG BOGOR TIMUR	PT. Pevall Group International	17.089.200	366	33	333	15.548.370,492
JUMLAH					373.201.000				170.944.264,69

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
RINCIAN PENDAPATA
TAHUN

NO	NAMA	DATA OBJEK	NOP	NAMA SPPT	MULAI PERJANJIAN	BERAKHIR PERJANJIAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
14	ASTRIEN AZRA	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	32.71.030.016.005.0068.0	Astried Azra	28/08/2017	28/08/2022	1.521.900
21	THUNG SOEI HOK	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	32.71.030.016.005.0086.0	Irwan Turana	28/08/2017	28/08/2022	1.368.000
131	LAW LIE HA	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan			28/08/2017	28/08/2022	1.299.600
132	LAW LIE HA	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan			28/08/2017	28/08/2022	1.231.200
156	MONDRIAN	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	32.71.030.016.005.0210.0	Mondrian	28/08/2017	28/08/2022	1.436.400
208	YUSUF PANDI	Babakan Baru Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	32.71.030.016.005.0262.0	Mulyadi	28/08/2017	28/08/2022	1.385.100
218	Burhanudin Hanafi	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	259.200
219	Samiran Heriyanto	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	422.400
220	Ridwan Mardi	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	480.000
221	Sarwin/Siti Rokoyah	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	480.000
222	Sutrisno	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	480.000
223	Chodijah	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	480.000
224	Eni Suhaeni	Kp. Dekeng Jaya Rt.001/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	480.000
225	Dedi Sarifudin/Siti Sopiah	RT.02 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
226	Mintarsih/Jayadi	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
227	Sutinah	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
228	Suparman	Rt.01/VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	576.000
229	Wartini	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	614.400

230	Dedeh	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	518.400
231	M. Irfan Asmara	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
232	Nuryati	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
233	Wiwin Nawati	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	499.200
234	Enung	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	499.200
235	Dede Sumarni/Supriyatna	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
236	Titi	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	787.200
237	Parlindungan Nainggolan	Rw.VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	1.142.400
238	Herni	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
239	Nali	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
240	Nining Sariningsih	Rt.01/VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	556.800
241	Suhaya	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
242	Cecep Surya	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
243	Tini Martini	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
244	Ade Suherman	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
245	Komar	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	662.400
246	BH Tambunan	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	825.600
247	Oloan Simanjuntak/Roside Gultom	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	384.000
248	Baharudin	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
249	Gunawan	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	758.400
250	Hotben Gultom	RT.02 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000

251	Sainah/Ahmad Jumhari	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
252	Enung Nurhani	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	528.000
253	Hisar Tampubolon	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
254	Rodiah/Saripudin	Rt.01 Rw.VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	460.800
255	Suhendar	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	940.800
256	Nuryanti	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	537.600
257	Murni	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	384.000
258	Jajat Sudrajat	Kp. Dekeng Jaya RT.002/RW.008, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	384.000
259	Suherni	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	384.000
260	Satib	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	460.800
261	Daerobi	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	384.000
262	Fitriawati	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	230.400
263	Nurlela	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	787.200
264	Hinsa Marroha Tambunan	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	796.800
265	Dana Sobari/Endang Wahyu	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
266	Ramdani	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
267	Imas Pupah	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	633.600
268	Mulyana Chotib	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	633.600
269	Rosita	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
270	Nuryati Murni	RT.02 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000
271	Susi Susilawati	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	480.000

272	Andre Karuniana	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	652.800
273	Sumarni	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	864.000
274	Hery	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	672.000
275	Agus SN	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	672.000
276	Aman Sulaeman	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	672.000
277	Maryati Dudung	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	1.132.800
278	Oding Wijaya	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	547.200
279	Restu Damayanti	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	604.800
280	Achmad Djaelani	RT.01 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	576.000
281	Siti Sopiah/Atin Supriatin	RT. 01 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	403.200
282	A. Kusnadi	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	547.200
283	Atikah	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	556.800
284	Ica Suwarsa/Yana Supriatna	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	508.800
285	Lintang Kartika	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	384.000
286	Asnaria Gultom	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	393.600
287	Mulyati	Rt.02 Rw.VIII Dekeng Jaya			12/12/2017	13/12/2022	364.800
288	Yuyun	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	432.000
289	Jelita Tambunan	RT.02 RW.VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	393.600
290	Hasan	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	595.200
291	Ade Suganda	RT. 02 RW. VIII Dekeng Jaya Kel. Genteng			12/12/2017	13/12/2022	604.800
292	Zulkarnaen Yakob	RT.003 RW.003 Dekeng Jaya Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	307.200
293	Mamah	RT.001 RW.008 Dekeng Jaya Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan			12/12/2017	13/12/2022	576.000

335	SITI AISAH	Babakan Perumnas RT.09 RW.06, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur			16 November 2017	17 November 2022	4.176.960
	JUMLAH						53.948.760

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR
DITAMBAH DARI PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
DAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN 2019**

CARA PEMBAYARAN	KEWAJIBAN BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN 2018	PENDAPATAN LO 2018	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2018	PIUTANG SEWA 2018	JUMLAH PEMBAYARAN 2019	PENDAPATAN LO 2019	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2019
Per tahun	304.380		304.380,00	-	304.380,00	1.217.520,00	304.380,00	608.760,00
Per tahun	273.600	273.600,00	273.600,00	-	-	547.200,00	273.600,00	273.600,00
Per tahun	259.920	259.920,00	259.920,00	-	-	519.840,00	259.920,00	259.920,00
Per tahun	246.240	246.240,00	246.240,00	-	-	492.480,00	246.240,00	246.240,00
Per tahun	287.280		287.280,00	-	287.280,00	1.231.200,00	287.280,00	656.640,00
Per tahun	277.020		277.020,00	-	277.020,00	1.385.100,00	277.020,00	1.108.080,00
Per tahun	259.200	259.200,00	51.840,00	207.360,00	-		51.840,00	155.520,00
Per tahun	422.400	422.400,00	84.480,00	337.920,00	-		84.480,00	253.440,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-		96.000,00	288.000,00
Per tahun	576.000	576.000,00	115.200,00	460.800,00	-		115.200,00	345.600,00
Per tahun	614.400	614.400,00	122.880,00	491.520,00	-		122.880,00	368.640,00

Per tahun	518.400	518.400,00	103.680,00	414.720,00	-	103.680,00	311.040,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	499.200	499.200,00	99.840,00	399.360,00	-	99.840,00	299.520,00
Per tahun	499.200	499.200,00	99.840,00	399.360,00	-	99.840,00	299.520,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	787.200	787.200,00	157.440,00	629.760,00	-	157.440,00	472.320,00
Per tahun	1.142.400	1.142.400,00	228.480,00	913.920,00	-	228.480,00	685.440,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	111.360	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	662.400	662.400,00	132.480,00	529.920,00	-	132.480,00	397.440,00
Per tahun	825.600	825.600,00	165.120,00	660.480,00	-	165.120,00	495.360,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	758.400	758.400,00	151.680,00	606.720,00	-	151.680,00	455.040,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00

Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	528.000	528.000,00	105.600,00	422.400,00	-	105.600,00	316.800,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	460.800	460.800,00	92.160,00	368.640,00	-	92.160,00	276.480,00
Per tahun	940.800	940.800,00	188.160,00	752.640,00	-	188.160,00	564.480,00
Per tahun	537.600	537.600,00	107.520,00	430.080,00	-	107.520,00	322.560,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	460.800	460.800,00	92.160,00	368.640,00	-	92.160,00	276.480,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	230.400	230.400,00	46.080,00	184.320,00	-	46.080,00	138.240,00
Per tahun	787.200	787.200,00	157.440,00	629.760,00	-	157.440,00	472.320,00
Per tahun	796.800	796.800,00	159.360,00	637.440,00	-	159.360,00	478.080,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	633.600	633.600,00	126.720,00	506.880,00	-	126.720,00	380.160,00
Per tahun	633.600	633.600,00	126.720,00	506.880,00	-	126.720,00	380.160,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00
Per tahun	480.000	480.000,00	96.000,00	384.000,00	-	96.000,00	288.000,00

Per tahun	652.800	652.800,00	130.560,00	522.240,00	-	130.560,00	391.680,00
Per tahun	864.000	864.000,00	172.800,00	691.200,00	-	172.800,00	518.400,00
Per tahun	672.000	672.000,00	134.400,00	537.600,00	-	134.400,00	403.200,00
Per tahun	672.000	672.000,00	134.400,00	537.600,00	-	134.400,00	403.200,00
Per tahun	672.000	672.000,00	134.400,00	537.600,00	-	134.400,00	403.200,00
Per tahun	1.132.800	1.132.800,00	226.560,00	906.240,00	-	226.560,00	679.680,00
Per tahun	547.200	547.200,00	109.440,00	437.760,00	-	109.440,00	328.320,00
Per tahun	604.800	604.800,00	120.960,00	483.840,00	-	120.960,00	362.880,00
Per tahun	576.000	576.000,00	115.200,00	460.800,00	-	115.200,00	345.600,00
Per tahun	403.200	403.200,00	80.640,00	322.560,00	-	80.640,00	241.920,00
Per tahun	547.200	547.200,00	109.440,00	437.760,00	-	109.440,00	328.320,00
Per tahun	556.800	556.800,00	111.360,00	445.440,00	-	111.360,00	334.080,00
Per tahun	508.800	508.800,00	101.760,00	407.040,00	-	101.760,00	305.280,00
Per tahun	384.000	384.000,00	76.800,00	307.200,00	-	76.800,00	230.400,00
Per tahun	393.600	393.600,00	78.720,00	314.880,00	-	78.720,00	236.160,00
Per tahun	364.800	364.800,00	72.960,00	291.840,00	-	72.960,00	218.880,00
Per tahun	432.000	432.000,00	86.400,00	345.600,00	-	86.400,00	259.200,00
Per tahun	393.600	393.600,00	78.720,00	314.880,00	-	78.720,00	236.160,00
Per tahun	595.200	595.200,00	119.040,00	476.160,00	-	119.040,00	357.120,00
Per tahun	604.800	604.800,00	120.960,00	483.840,00	-	120.960,00	362.880,00
Per tahun	307.200	307.200,00	61.440,00	245.760,00	-	61.440,00	184.320,00
Per tahun	576.000	576.000,00	115.200,00	460.800,00	-	115.200,00	345.600,00

Per tahun	835.392		835.392,00	-	835.392,00	868.368,00	835.392,00	32.976,00
		42.309.360	10.789.752	33.223.680	1.704.072	6.261.708	10.789.752	28.103.976

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN 2019

NO	NAMA	MULAI PERJANJIAN	BERAKHIR PERJANJIAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)	KEWAJIBAN BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN 2018	PENDAPATAN LO 2018	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2018	PIUTANG SEWA 2018	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN 2019	PENDAPATAN LO 2019	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2019
2	PT. DAS Utama	30/01/18	30/01/23	3.494.400	3.494.400,00	3.494.400,00	698.880,00	2.795.520,00	-	-	698.880,00	2.096.640,00
3	PT. Nippindo Indah	30/01/18	30/01/23	25.956.000	25.956.000,00	25.956.000,00	5.191.200,00	20.764.800,00	-	-	5.191.200,00	15.573.600,00
10	Chairil Anwar	06/04/18	06/04/23	8.208.000	8.208.000,00	8.208.000,00	1.641.600,00	6.566.400,00	-	-	1.641.600,00	4.924.800,00
11	Jimmy Sutanta	06/04/18	06/04/23	24.624.000	24.624.000,00	24.624.000,00	4.924.800,00	19.699.200,00	-	-	4.924.800,00	14.774.400,00
12	Karyanto wiroshardjo	06/04/18	06/04/23	12.312.000	12.312.000,00	-	2.462.400,00	-	2.462.400,00	12.312.000,00	2.462.400,00	7.387.200,00
13	Waris Susanto	04/06/18	06/04/23	12.312.000	12.312.000,00	-	2.462.400,00	-	2.462.400,00	12.312.000,00	2.462.400,00	7.387.200,00
15	H Slamet Aji Waluyo	06/04/18	06/04/23	12.312.000	12.312.000,00	12.312.000,00	2.462.400,00	9.849.600,00	-	-	2.462.400,00	7.387.200,00
16	H Ramelan	06/04/18	06/04/23	12.312.000	12.312.000,00	12.312.000,00	2.462.400,00	9.849.600,00	-	-	2.462.400,00	7.387.200,00
18	Yan Widagdo, SH	06/04/18	06/04/23	12.312.000	12.312.000,00	12.312.000,00	2.462.400,00	9.849.600,00	-	-	2.462.400,00	7.387.200,00
19	PT Agro Apis Palacio	06/04/18	06/04/23	38.475.000	38.475.000,00	38.475.000,00	7.695.000,00	30.780.000,00	-	-	7.695.000,00	23.085.000,00
20	PT Sahabat Tanifarm	06/04/18	06/04/23	212.847.300	212.847.300,00	212.847.300,00	42.569.460,00	170.277.840,00	-	-	42.569.460,00	127.708.380,00
21	PT Tri Putra Panganindo	06/04/18	06/04/23	31.236.000	31.236.000,00	31.236.000,00	6.247.200,00	24.988.800,00	-	-	6.247.200,00	18.741.600,00
22	Mulyono Prayitno	09/04/18	09/04/23	10.870.200	10.870.200,00	10.870.200,00	2.174.040,00	8.696.160,00	-	-	2.174.040,00	6.522.120,00
24	PT Bali Towerindo Sentra, Tbk	25/06/18	24/06/23	381.012.000	381.012.000,00	381.012.000,00	76.202.400,00	304.809.600,00	-	-	76.202.400,00	228.607.200,00
25	Abdul Latief	07/08/18	12/02/23	217.800.000	217.800.000,00	217.800.000,00	43.560.000,00	174.240.000,00	-	-	43.560.000,00	130.680.000,00
26	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Cabang Bogor)	11/12/17	10/12/22	431.130.000	431.130.000,00	431.130.000,00	86.226.000,00	344.904.000,00	-	-	86.226.000,00	258.678.000,00
27	Ny. Mary Wewengkang	06/04/18	06/04/23	101.250.000	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	-	-	-	20.250.000,00	60.750.000,00
28	PAUD Cikita	29/06/18	28/06/19	2.364.000	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	-	-	-	-	-
29	Yayasan Mutiara Kartini	29/06/18	28/06/23	21.276.000	21.276.000,00	21.276.000,00	4.255.200,00	17.020.800,00	-	-	4.255.200,00	12.765.600,00
	JUMLAH					2.158.908.464,00	1.010.661.328,00	1.156.226.640,00	15.063.504,00	294.740.160,00	670.631.900,00	941.843.340,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Utang Beban

PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama SKPD	Telepon	Air	Listrik	Surat Kabar	Kawat/Fax/Internet	BBM/Gas	Pemeliharaan	Premi Asuransi Kesehatan	Total
1	Dinas Pendidikan	144.910,00	150.400,00	16.364.446,00	995.000,00					17.654.756,00
2	Dinas Kesehatan	426.123,00	28.509.620,00	91.511.008,00		1.167.000,00				121.613.751,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah									-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	272.683,00	5.179.900,00	22.254.990,00		3.064.250,00		15.421.160,00	2.361.718,00	48.554.701,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	968.384,00	7.594.200,00	2.838.949.712,00					26.575.759,00	2.874.088.055,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	110.980,00	6.769.100,00	3.908.824,00		830.500,00				11.619.404,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	226.750,00	148.400,00	9.625.303,00	200.000,00	793.250,00				10.993.703,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	157.413,00	587.100,00	1.023.324,00						1.767.837,00
8	Dinas Sosial	917.961,00	2.510.100,00	5.524.807,00					1.229.572,00	10.182.440,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.156.613,00	2.046.200,00	5.076.214,00						9.279.027,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	656.040,00	511.800,00	2.105.493,00	420.000,00					3.693.333,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	310.092,00	10.629.671,00	15.282.998,00		637.750,00			23.864.326,00	50.724.837,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	99.480,00	1.115.000,00	16.459.013,00	320.000,00					17.993.493,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	159.980,00	1.426.500,00	6.936.437,00	350.000,00					8.872.917,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	126.479,00	386.200,00	2.671.863,00		175.000,00				3.359.542,00
15	Dinas Perhubungan	74.822,00	1.900.914,00	35.882.871,00					1.320.123,00	39.178.730,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	230.280,00								230.280,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	562.425,00	749.900,00	6.066.090,00						7.378.415,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	319.553,00	1.327.300,00							1.646.853,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	114.978,00	75.280.900,00	26.827.860,00		636.900,00				102.860.638,00
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	239.749,00	469.400,00	7.200.945,00						7.910.094,00
21	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	437.121,00	3.788.000,00	11.227.796,00			13.380,00			15.466.297,00
22	Dinas Pertanian	1.087.153,00	245.100,00	18.668.399,00						20.000.652,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	168.875,00	1.045.500,00	8.167.629,00						9.382.004,00
24	Sekretariat Daerah	2.316.450,00	47.834.500,00	117.088.980,00						167.239.930,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	110.179,00	10.272.200,00	83.587.035,00						93.969.414,00
26	Kecamatan Bogor Utara	1.078.393,00	2.909.900,00	8.509.504,00						12.497.797,00
27	Kecamatan Bogor Selatan	2.939.835,00	6.360.100,00	10.524.137,00						19.824.072,00
28	Kecamatan Bogor Timur	610.550,00	540.900,00	4.620.133,00						5.771.583,00
29	Kecamatan Bogor Barat	1.339.370,00	8.490.690,00	12.946.841,00						22.776.901,00
30	Kecamatan Bogor Tengah	868.619,00	2.361.100,00	3.531.165,00						6.760.884,00
31	Kecamatan Tanah Sareal	863.946,00	2.666.100,00	12.827.936,00						16.357.982,00
32	Inspektorat	920.747,00	1.232.700,00	6.428.745,00	720.000,00		143.500,00			9.445.692,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72.470,00	920.700,00	10.653.429,00						11.646.599,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	234.968,00				282.850,00				517.818,00
35	Badan Pendapatan Daerah	1.087.286,00	13.519.300,00	64.994.654,00						79.601.240,00
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	475.056,00	6.343.300,00	10.163.208,00						16.981.564,00
	Jumlah (I)	22.886.713,00	255.822.695,00	3.497.611.789,00	3.005.000,00	7.587.500,00	156.880,00	15.421.160,00	55.351.498,00	3.857.843.235,00

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Barang/ Jasa	Total
1	BLUD	1.732.517.166,00	2.586.310.930,00	4.318.828.096,00
			Jumlah (II)	4.318.828.096,00
			Total Jumlah Utang Beban (I + II)	8.176.671.331,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019

Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)**Utang Jangka Pendek Lainnya**

1. Utang Usaha - Obat	Rp.	4.736.279.489,00	
2. Utang Usaha - Bahan Makanan	Rp.	53.321.367,00	
3. Utang Usaha - Alat Tulis Kantor	Rp.	218.697.325,00	
4. Utang Usaha - Cetakan	Rp.	216.345.800,00	
5. Utang Usaha - Perlengkapan Rumah Tangga	Rp.	209.179.200,00	
6. Utang Usaha - Jasa Pihak Ketiga	Rp.	665.407.354,00	
7. Utang Usaha - Uninvoice	Rp.	7.098.982.653,00	
8. Utang Usaha - Lainnya	Rp.	34.040.000,00	
9. Bagian Lancar Sektor Perbankan	Rp.	<u>18.601.479.194,00</u>	
			Rp. 31.833.732.382,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp. **31.833.732.382,00**

PEMERINTAH KOTA BOGOR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (UTANG PENGADAAN ASET TETAP)
PER 31 DESEMBER 2019

NO.	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan / Perbaikan Drainase Wilayah III	36.864.000,00
Jumlah			36.864.000,00
2	Kecamatan Bogor Selatan	Pembangunan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada paket pekerjaan:	
		1.) Konsultan Pengawas Pekerjaan Jembatan Penyebrangan Orang di RW 02	1.500.000,00
		2.) Konsultan Pengawas Pekerjaan Tembok Penahan Tanah RT 03/RW 03	3.400.000,00
		3.) Konsultan Pengawas Pekerjaan Drainase RT 03, 04/RW 03, RT 03/RW 10, RT 01/RW 05	7.500.000,00
Jumlah			12.400.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Utang Pengadaan Aset Tetap	230.637.984,00
Jumlah			230.637.984,00
TOTAL			279.901.984,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
RSUD KOTA BOGOR
REKAP PENERIMAAN DANA TALANGAN TAHUN 2019

NO	TANGGAL	BANK	KETERANGAN	TANGGAL BERITA ACARA	TANGGAL BERITA ACARA VERIFIKASI KLAIM BPJS	JUMLAH	TOTAL	
1	04/01/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	20/12/2018	3009/BA/IV-07/1218	Rp 5.450.415.300		
2	17/01/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	20/12/2018	3009/BA/IV-07/1218	Rp 3.408.852.200		
3	01/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/01/2019	281/BA/IV-07/0119	Rp 3.360.294.900		
4	01/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/01/2019	281/BA/IV-07/0119	Rp 4.313.951.000		
5	21/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	08/02/2019	621/BA/IV-07/0219	Rp 1.173.725.100		
6	21/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	08/02/2019	634/BA/IV-07/0219	Rp 2.200.035.900		
7	21/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	08/02/2019	634/BA/IV-07/0219	Rp 67.025.200		
8	28/02/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/02/2019	845/BA/IV-07/0219	Rp 3.809.676.900		
9	05/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/02/2019	10020119000028	Rp 5.310.829.600		
10	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	06/03/2019	10020317000013	Rp 3.247.500		
11	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	06/03/2019	10020317000014	Rp 50.555.500		
12	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/03/2019	1100/BA/IV-07/0319	Rp 54.721.100		
13	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/03/2019	1098/BA/IV-07/0319	Rp 91.010.700		
14	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/03/2019	1099/BA/IV-07/0319	Rp 252.776.500		
15	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/03/2019	1100/BA/IV-07/0319	Rp 1.596.811.000		
16	20/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/03/2019	1098/BA/IV-07/0319	Rp 1.815.498.300		
17	29/03/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/03/2019	1356/BA/IV-07/0319	Rp 4.841.147.800		
18	08/04/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/03/2019	1356/BA/IV-07/0319	Rp 3.769.271.900		
19	10/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	2048/BA/IV-07/0419	Rp 4.070.608.300		
20	10/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	2048/BA/IV-07/0419	Rp 6.380.981.100		
21	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	10021118000106	Rp 3.055.700		
22	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	30/04/2019	2195/BA/IV-07/0419	Rp 4.457.360		
23	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	30/04/2019	2196/BA/IV-07/0419	Rp 5.812.884		
24	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	10/05/2019	2455/BA/IV-07/0519	Rp 6.173.959		
25	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	14/05/2019	2570/BA/IV-07/0519	Rp 6.609.218		
26	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	10020517000030	Rp 13.986.600		
27	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	10/05/2019	2429/BA/IV-07/0519	Rp 100.992.700		
28	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	10020517000029	Rp 168.915.100		
29	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	13/05/2019	2525/BA/IV-07/0519	Rp 237.125.200		
30	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	10/05/2019	2426/BA/IV-07/0519	Rp 250.970.300		
31	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	30/04/2019	2194/BA/IV-07/0419	Rp 253.986.762		
32	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	25/04/2019	10021118000105	Rp 264.989.800		
33	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	14/05/2019	2571/BA/IV-07/0519	Rp 277.611.222		
34	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	13/05/2019	2523/BA/IV-07/0519	Rp 455.025.800		
35	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	10/05/2019	2426/BA/IV-07/0519	Rp 514.981.300		
36	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	13/05/2019	2523/BA/IV-07/0519	Rp 879.595.600		
37	28/05/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	10/05/2019	2429/BA/IV-07/0519	Rp 1.359.204.400		
38	20/06/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/05/2019	2763/BA/IV-07/0519	Rp 6.156.309.000		
39	20/06/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	22/05/2019	2763/BA/IV-07/0519	Rp 3.863.399.700		
40	09/07/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	26/06/2019	3122/BA/IV-07/0619	Rp 5.751.418.600		
41	17/07/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	26/06/2019	3122/BA/IV-07/0619	Rp 3.803.980.800		
42	31/07/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	28/06/2019	3170/BA/IV-07/0619	Rp 3.139.778.700		
43	19/08/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	23/07/2019	3652/BA/IV-07/0719	Rp 5.037.526.500		
44	23/08/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	02/08/2019	3860/BA/IV-07/0819	Rp 1.481.232.800		
45	23/08/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	12/07/2019	3463/BA/IV-07/0719	Rp 1.767.210.800		
46	23/08/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	23/07/2019	3652/BA/IV-07/0719	Rp 3.296.410.600		
47	06/09/2019	MANDIRI	DANA TALANGAN	26/08/2019	4193/BA/IV-07/0819	Rp 4.196.277.600	95.318.474.805,00	
48	13/09/2019	BJB	DANA TALANGAN	13/09/2019	900/1961-RSUD/IX/2019	Rp 15.778.658.300	SURAT TAKE OVER	
49	25/09/2019	BJB	DANA TALANGAN	23/09/2019	900/001-RSUD/X/2019	Rp 9.900.838.670		
50	09/10/2019	BJB	DANA TALANGAN	04/10/2019	900/1533-RSUD/X/2019	Rp 4.194.691.500		
51	21/10/2019	BJB	DANA TALANGAN	15/10/2019	900/1601-RSUD/X/2019	Rp 1.966.707.530		
52	22/10/2019	BJB	DANA TALANGAN	18/10/2019	900/1613-RSUD/X/2019	Rp 8.039.821.999		
53	22/11/2019	BJB	DANA TALANGAN	18/11/2019	900/1620-RSUD/IX/2019	Rp 4.074.850.400		
54	29/11/2019	BJB	DANA TALANGAN	26/11/2019	900/1808-RSUD/IX/2019	Rp 8.002.057.873		
55	20/12/2019	BJB	DANA TALANGAN	16/12/2019	900/1924-RSUD/XII/2019	Rp 8.255.338.172	60.212.964.444	
TOTAL							155.531.439.249,00	
Utang Bank Mandiri yang ditake-over oleh Bank BJB							15.778.658.300,00	
Pinjaman Dalam Negeri dari BANK pada RSUD-BLUD							139.752.780.949,00	



RSUD KOTA BOGOR
REKAP PEMBAYARAN DANA TALANGAN TAHUN 2019

NO	TANGGAL	BANK	KETERANGAN	PEMBAYARAN UNTUK TAHUN 2018	PEMBAYARAN TAHUN 2019	TOTAL PEMBAYARAN
1	14/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 3.463.405.000		
2	14/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 5.551.000.000		
3	14/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 28.581.400		
4	14/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 52.229.300		
5	14/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 1.639.568.900		
6	29/01/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.408.852.200	
7	12/02/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.360.294.900	
8	12/02/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 5.450.415.300	
9	08/03/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 67.025.200	
10	08/03/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 2.200.035.900	
11	08/03/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.313.951.000	
12	14/03/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN	Rp 2.124.756.300		
13	04/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 50.555.500	
14	04/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 252.776.500	
15	04/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.809.676.900	
16	04/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 54.721.100	
17	08/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.173.725.100	
18	08/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.247.500	
19	08/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 91.010.700	
20	08/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.815.498.300	
21	08/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 5.310.829.600	
22	11/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.841.147.800	
23	16/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.596.811.000	
24	16/04/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.769.271.900	
25	23/05/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.070.608.300	
26	23/05/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 6.380.981.100	
27	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.457.360	
28	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 100.992.700	
29	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 237.125.200	
30	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 250.970.300	
31	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 514.981.300	
32	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 879.595.600	
33	25/06/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.359.204.400	
34	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 5.812.884	
35	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 6.173.959	
36	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 168.915.100	
37	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.055.700	
38	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 6.609.218	
39	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 13.986.600	
40	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 264.989.800	
41	01/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 277.611.222	
42	07/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 6.156.309.000	
43	08/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 253.986.762	
44	08/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 455.025.800	
45	08/07/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.863.399.700	
46	16/08/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.803.980.800	
47	19/08/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 5.751.418.600	
48	29/08/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.139.778.700	
49	13/09/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.481.232.800	
50	13/09/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.767.210.800	
51	13/09/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 3.296.410.600	
52	13/09/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.196.277.600	
53	13/09/2019	MANDIRI	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 5.037.526.500	
				Rp 12.859.540.900	Rp 95.318.474.805	Rp 108.178.015.705
54	09/10/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.767.210.800	
55	10/10/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 83.709.200	
56	17/10/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 8.333.937.100	
57	17/10/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 174.861.037	
58	19/11/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.481.232.800	
59	19/11/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 2.301.499.800	
60	27/11/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.196.277.600	
61	27/11/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 7.340.768.633	
62	27/11/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 1.966.707.530	
63	04/12/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 91.938.700	
64	04/12/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 4.194.691.500	
65	27/12/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 7.489.175.350	
66	27/12/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 119.865.000	
67	27/12/2019	BJB	PEMBAYARAN PINJAMAN DANA TALANGAN		Rp 2.069.610.200	
						Rp 41.611.485.250,00
						Rp 149.789.500.955,00
			Utang Bank Mandiri yang ditake-over oleh Bank BJB			Rp 15.778.658.300,00
			Jumlah Pembayaran Pokok Utang BLUD			Rp 134.010.842.655,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR
REKAPITULASI PENDAPATAN HIBAH
Periode 31 Desember 2019

No	Uraian	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah			
	- Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis Zonasi yang berasal dari bantuan Kemendikbud tahun 2019	Dinas Pendidikan	1.587.792.000,00	Bantuan Keuangan
		Dinas Pendidikan	526.428.000,00	Hibah Barang
		Sub Jumlah	2.114.220.000,00	
	- Pendapatan Hibah dari Badan Geologi Kementerian ESDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.916.127.459,00	Sumur Bor dalam PJU tenaga surya
	- Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.857.665.184,00	
	- Pendapatan Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Satuan Polisi Pamong Praja	8.241.361.000,00	10 Unit Mobil Pemadam Kebakaran
	- Pendapatan Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Molin	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	271.700.000,00	Mobil Perlindungan Perempuan dan anak
	- Pendapatan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	301.830.890,00	Persediaan obat-obatan
	- Pendapatan Hibah dari Kemendagri berupa Blanko KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.347.802.500,00	blanko KTP
	- Koreksi Lebih Catat pada Utang berupa hibah obat dari Pemrov	RSUD (BLUD)	184.913.129,00	Persediaan obat-obatan
		JUMLAH	16.235.620.162,00	
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO			
	- Pendapatan Hibah dari Buka Lapak berupa sepeda	Dinas Perhubungan	220.000.000,00	Sepeda
3	Pendapatan Hibah Dana BOS			
	- Pendapatan Hibah Dana BOS - SD	Dinas Pendidikan	68.863.240.000,00	Dana BOS
	- Pendapatan Hibah Dana BOS - SMP	Dinas Pendidikan	19.465.400.000,00	Dana BOS
		JUMLAH	88.328.640.000,00	
		TOTAL	104.784.260.162,00	

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR RINCIAN KOREKSI EKUITAS
Per 31 Desember 2019

No	Nama Akun	Uraian
1	HASIL INVENTARISASI - ASET TETAP (PERALATAN DAN MESIN)	SALDO BERTAMBAH Aset yang Belum Tercatat Reklas Dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Reklas dari Aset Rusak Berat BERKURANG Reklas ke Aset Rusak Berat Reklas Ke Aset Tetap - Aset tetap Lainnya Penghapusan / Double catat Aset yang dibawah Kapitalisasi
2	HASIL INVENTARISASI - ASET TETAP (GEDUNG DAN BANGUNAN)	SALDO: BERTAMBAH BERKURANG Reklas Ke Aset Lainnya Reklas Ke Aset Tetap - Jalan Irigasi Jaringan
3	HASIL INVENTARISASI - ASET TETAP (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)	SALDO: BERTAMBAH Reklas Ke Aset Tetap - Aset tetap Lainnya BERKURANG Reklas Ke Aset Lainnya
4	HASIL INVENTARISASI - ASET TETAP (ASET TETAP LAINNYA)	SALDO: BERTAMBAH Reklas dari Aset Tetap - Peralatan Mesin BERKURANG Reklas Ke Aset Lainnya Reklas dari Aset Tetap - Peralatan Mesin
5	HASIL INVENTARISASI - ASET LAINNYA	SALDO:

		<p>PENAMBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Reklas dari Aset Tetap Gedung Bangunan Reklas dari Aset Tetap - Jalan Irigasi Jaringan Reklas dari Aset Tetap - aset tetap Lainnya Reklas dari Aset tetap - peralatan mesin Aset Yang belum tercatat <p>PENGURANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Reklas ke Aset tetap - peralatan mesin Penghapusan / Double catat
6	HASIL INVENTARISASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	<p>SALDO</p> <p>PENAMBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> koreksi tambah saldo awal dari perubahan kode barang serta masa manfaat barang reklas akumulasi penyusutan dari dari aset rusak berat menjadi aset tetap reklas akumulasi penyusutan dari dari aset lain-lain menjadi aset tetap reklas akumulasi penyusutan antar kib reklas akumulasi penyusutan dari dari aset KDP menjadi aset tetap JIJ <p>PENGURANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> koreksi kurang saldo awal dari perubahan kode barang serta masa manfaat barang aset yang dibawah nilai kapitalisasi reklas akumulasi penyusutan dari aset tetap ke aset rusak berat reklas akumulasi penyusutan dari aset tetap ke aset lain-lain penghapusan / double catat reklas akumulasi penyusutan antar kib pencatatan akumulasi penyusutan dari aset tetap JIJ
7	HASIL INVENTARISASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	<p>SALDO</p> <p>PENAMBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset lain lain
8	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	<p>SALDO:</p> <p>PENAMBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian saldo awal di kas bendahara Bos APBN tahun 2019 koreksi kurang atas saldo piutang awal pajak (perbaikan atas catatan piutang unaudited) <p>PENGURANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> koreksi saldo awal piutang pajak Koreksi Pengakuan sisa kas dana BOS Kota Koreksi atas jasa Giro yang diterima dari pengakuan sisa kas dana BOS Kota Penyetoran Jasa Giro Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Penyesuaian atas Koreksi Saldo Awal Dana Kapitasi JKN PKM Mulyaharja(prolanis) Koreksi saldo awal progress angsuran tuntutan ganti rugi th 2019 pada PPKD

Jumlah
(5.677.129.797,55)
935.231.737,38
459.249.948,00
297.448.592,00
178.533.197,38
6.612.361.534,94
4.831.911.462,94
47.930.300,00
1.717.444.772,00
15.075.000,00
406.561.683,00
-
(406.561.683,00)
330.352.433,00
76.209.250,00
72.439.250,00
76.209.250,00
76.209.250,00
3.770.000,00
3.770.000,00
(270.066.342,00)
47.930.300,00
47.930.300,00
317.996.642,00
20.548.050,00
297.448.592,00
4.280.394.469,56

#REF!

#REF!

4.716.767.666,94
(330.352.433,00)
(3.770.000,00)
(20.548.050,00)
4.831.911.462,94
239.526.687,00
436.373.197,38
178.533.197,38
257.840.000,00

(43.956.012.161,71)

80.171.789.350,55
70.406.935.331,87
72.395.107,36
5.888.100.178,57
3.802.703.232,75
1.655.500,00
124.127.801.512,26
114.452.121.582,75
6.030.000,00
4.853.505.252,60
9.800.000,00
1.717.444.772,00
3.088.899.904,91
1.655.500,00

(117.612.965.360,87)

(117.612.965.360,87)

(117.612.965.360,87)

(1.976.671.353,00)

12.355.747,00
3.254.765,00
9.100.982,00
1.989.027.100,00
1.791.220.942,00
136.239.819,00
37.391.845,00
20.548.894,00
2.618.000,00
1.007.600,00



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER REKENING OBYEK

Per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN - LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	43.276.927.941,86	104,45
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	644.546.554.586,00	689.543.006.040,00	44.996.451.454,00	106,98
41106	- Pajak Hotel - LRA	84.660.000.000,00	95.247.182.735,00	10.587.182.735,00	112,51
41107	- Pajak Restoran - LRA	136.550.494.812,00	153.467.175.721,00	16.916.680.909,00	112,39
41108	- Pajak Hiburan - LRA	29.580.000.000,00	33.017.933.672,00	3.437.933.672,00	111,62
41109	- Pajak Reklame - LRA	11.000.000.000,00	11.708.055.331,00	708.055.331,00	106,44
41110	- Pajak Penerangan Jalan - LRA	53.000.000.000,00	53.438.870.690,00	438.870.690,00	100,83
41111	- Pajak Parkir - LRA	14.645.000.000,00	15.424.581.199,00	779.581.199,00	105,32
41112	- Pajak Air Tanah - LRA	5.250.000.000,00	4.665.857.092,00	(584.142.908,00)	88,87
41115	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	136.500.000.000,00	144.563.137.359,00	8.063.137.359,00	105,91
41116	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	173.361.059.774,00	178.010.212.241,00	4.649.152.467,00	102,68
412	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	(2.084.636.208,00)	96,10
41201	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	11.500.000.000,00	9.129.454.647,00	(2.370.545.353,00)	79,39
41202	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	9.968.684.400,00	10.314.145.250,00	345.460.850,00	103,47
41204	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	560.000.000,00	570.265.625,00	10.265.625,00	101,83
41205	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	3.234.648.000,00	2.716.141.000,00	(518.507.000,00)	83,97
41207	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.432.440.000,00	1.633.271.600,00	200.831.600,00	114,02
41208	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	92.800.000,00	91.794.500,00	(1.005.500,00)	98,92
41210	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	130.000.000,00	182.050.000,00	52.050.000,00	140,04
41211	- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	30.000.000,00	30.696.720,00	696.720,00	102,32
41212	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	174.000.000,00	150.887.600,00	(23.112.400,00)	86,72
41215	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.426.256.000,00	5.589.829.990,00	2.163.573.990,00	163,15
41218	- Retribusi Terminal - LRA	710.460.000,00	746.788.000,00	36.328.000,00	105,11
41219	- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	120.048.000,00	150.281.000,00	30.233.000,00	125,18
41221	- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	529.078.000,00	565.358.140,00	36.280.140,00	106,86

41223	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	1.189.000.000,00	1.282.452.500,00	93.452.500,00	107,86
41226	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	19.600.000.000,00	17.517.398.120,00	(2.082.601.880,00)	89,37
41229	- Retribusi Izin Trayek - LRA	349.375.000,00	318.137.500,00	(31.237.500,00)	91,06
41232	- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	400.000.000,00	373.201.000,00	(26.799.000,00)	93,30
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	158.137.150,00	100,56
41301	- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	158.137.150,00	100,56
414	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	206.975.545,86	100,08
41401	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	60.000.000,00	42.756.885,00	(17.243.115,00)	71,26
41403	- Penerimaan Jasa Giro - LRA	19.000.000.000,00	12.530.596.605,00	(6.469.403.395,00)	65,95
41405	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	49.303.200,00	49.303.200,00	
41407	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	115.748.512,00	115.748.512,00	
41408	- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0,00	6.254.155.598,00	6.254.155.598,00	
41409	- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	39.273.363,00	39.273.363,00	
41411	- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
41413	- Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.450.887.877,00	3.450.887.877,00	
41416	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	2.370.237.231,00	795.698.400,00	(1.574.538.831,00)	33,57
41418	- Pendapatan BLUD - LRA	170.000.000.000,00	171.573.201.544,86	1.573.201.544,86	100,93
41419	- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	1.300.000.000,00	1.134.955.000,00	(165.045.000,00)	87,30
41423	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	46.800.000.000,00	44.165.589.650,00	(2.634.410.350,00)	94,37
41425	- Penerimaan Bunga atas Penerusan Pinjaman - LRA	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	(421.953.858,00)	93,97
42	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.536.924.660.710,00	1.414.571.339.874,00	(122.353.320.836,00)	92,04
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	(55.695.614.186,00)	95,21
42101	- Bagi Hasil Pajak - LRA	73.713.874.000,00	53.495.246.384,00	(20.218.627.616,00)	72,57
42102	- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	(3.657.240.105,00)	86,85
42103	- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	856.297.349.000,00	838.948.449.000,00	(17.348.900.000,00)	97,97
42104	- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	204.362.379.000,00	189.891.532.535,00	(14.470.846.465,00)	92,92
423	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	1.524.585.050,00	100,61
42301	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	1.524.585.050,00	100,61
424	Bantuan Keuangan - LRA	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	(68.182.291.700,00)	45,07
42401	- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	(68.182.291.700,00)	45,07
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	130.438.611.000,00	129.401.651.000,00	(1.036.960.000,00)	99,21
431	Pendapatan Hibah - LRA	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	(1.036.960.000,00)	98,84
43106	- Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	(1.036.960.000,00)	98,84
435	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	0,00	100,00

43501	- Dana Penyesuaian - LRA	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	2.639.970.560.688,00	2.559.857.207.793,86	(80.113.352.894,14)	96,97
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	(210.437.740.992,33)	90,59
511	Belanja Pegawai	1.303.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	(121.623.310.963,52)	90,67
51101	- Belanja Gaji dan Tunjangan	553.858.270.659,52	474.675.837.587,00	(79.182.433.072,52)	85,70
51102	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	457.662.568.641,00	430.063.148.526,00	(27.599.420.115,00)	93,97
51103	- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.360.938.957,00	16.066.860.000,00	(294.078.957,00)	98,20
51105	- Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	32.227.327.729,00	25.425.320.280,00	(6.802.007.449,00)	78,89
51107	- Honorarium PNS	14.128.393.000,00	11.859.459.500,00	(2.268.933.500,00)	83,94
51108	- Honorarium Non PNS	125.898.994.916,00	121.851.695.045,00	(4.047.299.871,00)	96,79
51109	- Uang Lembur	2.896.748.000,00	2.350.190.000,00	(546.558.000,00)	81,13
51110	- Belanja Pegawai BOS	37.167.317.300,00	36.273.535.838,00	(893.781.462,00)	97,60
51111	- Belanja Pegawai BLUD	63.312.113.590,00	63.323.315.053,00	11.201.463,00	100,02
512	Belanja Barang dan Jasa	789.887.964.541,00	711.101.422.815,19	(78.786.541.725,81)	90,03
51201	- Belanja Bahan Pakai Habis	58.936.400.813,00	54.014.522.236,00	(4.921.878.577,00)	91,65
51202	- Belanja Bahan/Material	33.365.572.021,00	28.652.169.395,00	(4.713.402.626,00)	85,87
51203	- Belanja Jasa Kantor	158.641.523.844,00	142.075.683.327,00	(16.565.840.517,00)	89,56
51204	- Belanja Premi Asuransi	74.113.922.689,00	47.939.753.631,00	(26.174.169.058,00)	64,68
51205	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.085.676.640,00	27.477.425.210,00	(2.608.251.430,00)	91,33
51206	- Belanja Cetak dan Penggandaan	18.626.035.063,00	16.060.426.015,00	(2.565.609.048,00)	86,23
51207	- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.186.555.000,00	1.912.647.612,00	(273.907.388,00)	87,47
51208	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	509.206.000,00	451.432.000,00	(57.774.000,00)	88,65
51209	- Belanja Sewa Alat Berat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
51210	- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.861.284.614,00	4.716.688.007,00	(1.144.596.607,00)	80,47
51211	- Belanja Makanan dan Minuman	31.128.518.000,00	27.472.472.168,00	(3.656.045.832,00)	88,25
51212	- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.687.815.215,00	1.657.095.515,00	(30.719.700,00)	98,18
51213	- Belanja Pakaian Kerja	3.260.695.800,00	3.175.946.095,00	(84.749.705,00)	97,40
51214	- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.275.907.500,00	1.152.019.800,00	(123.887.700,00)	90,29
51215	- Belanja Perjalanan Dinas	107.743.295.542,00	98.925.696.726,00	(8.817.598.816,00)	91,82
51218	- Belanja Pemeliharaan	47.655.390.110,00	45.151.691.038,00	(2.503.699.072,00)	94,75
51219	- Belanja Jasa Konsultansi	20.941.268.038,00	18.517.863.294,00	(2.423.404.744,00)	88,43
51220	- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.750.605.620,00	2.622.584.740,00	(128.020.880,00)	95,35
51222	- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.388.441,00	69.000.000,00	(61.388.441,00)	52,92

51223	- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.548.852.225,00	9.355.501.800,00	(1.193.350.425,00)	88,69
51229	- Belanja Barang Dana BOS	71.061.792.531,00	69.368.288.719,00	(1.693.503.812,00)	97,62
51231	- Belanja Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah	103.795.493.835,00	104.996.686.337,19	1.201.192.502,19	101,16
51238	- Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	854.020.000,00	842.198.250,00	(11.821.750,00)	98,62
51240	- Uang Untuk di Berikan Kepada Masyaakat	4.722.745.000,00	4.493.630.900,00	(229.114.100,00)	95,15
513	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	(421.953.858,00)	93,97
51301	- Belanja Bunga Utang Pinjaman	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	(421.953.858,00)	93,97
515	Belanja Hibah	85.099.234.000,00	79.149.334.000,00	(5.949.900.000,00)	93,01
51501	- Belanja Hibah kepada Pemerintah	16.034.084.000,00	14.834.084.000,00	(1.200.000.000,00)	92,52
51505	- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	33.601.800.000,00	32.264.300.000,00	(1.337.500.000,00)	96,02
51506	- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	5.635.000.000,00	5.635.000.000,00	0,00	100,00
51507	- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah	10.001.250.000,00	9.875.550.000,00	(125.700.000,00)	98,74
51508	- Belanja Hibah Bidang BOP PAUD	9.547.200.000,00	7.738.800.000,00	(1.808.400.000,00)	81,06
51509	- Belanja Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	10.279.900.000,00	8.801.600.000,00	(1.478.300.000,00)	85,62
516	- Belanja Bantuan Sosial	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	(3.656.034.445,00)	92,75
51601	- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	(3.656.034.445,00)	92,75
52	BELANJA MODAL	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	(129.316.587.801,00)	79,48
521	Belanja Modal Tanah	23.520.000.000,00	18.044.020.000,00	(5.475.980.000,00)	76,72
52111	- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.020.000.000,00	3.000.000.000,00	(20.000.000,00)	99,34
52113	- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	20.500.000.000,00	15.044.020.000,00	(5.455.980.000,00)	73,39
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	(17.378.637.420,00)	85,16
52203	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.180.200.000,00	854.245.364,00	(325.954.636,00)	72,38
52204	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.504.120.000,00	9.450.936.150,00	(4.053.183.850,00)	69,99
52205	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.587.378.000,00	1.548.790.700,00	(38.587.300,00)	97,57
52207	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	600.000.000,00	591.444.000,00	(8.556.000,00)	98,57
52209	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	70.975.000,00	29.869.400,00	(41.105.600,00)	42,08
52210	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	203.775.000,00	195.420.500,00	(8.354.500,00)	95,90
52211	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.774.400.000,00	1.734.103.758,00	(40.296.242,00)	97,73
52212	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	93.068.000,00	89.851.400,00	(3.216.600,00)	96,54
52213	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	180.700.000,00	173.839.100,00	(6.860.900,00)	96,20
52214	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.596.246.529,00	3.178.352.941,00	(417.893.588,00)	88,38
52215	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.438.875.950,00	9.830.410.024,00	(1.608.465.926,00)	85,94
52216	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.899.822.766,00	13.169.118.766,00	(1.730.704.000,00)	88,38
52217	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.611.100.000,00	2.423.479.518,00	(187.620.482,00)	92,81

52218	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.447.476.051,00	3.013.112.369,00	(434.363.682,00)	87,40
52219	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	579.590.000,00	514.681.399,00	(64.908.601,00)	88,80
52220	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	19.000.000,00	18.914.000,00	(86.000,00)	99,55
52221	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	32.174.413.405,00	27.570.925.865,00	(4.603.487.540,00)	85,69
52222	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.196.282.252,00	2.054.499.719,00	(141.782.533,00)	93,54
52223	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.582.179.925,00	3.316.385.437,00	(265.794.488,00)	92,58
52229	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	81.000.000,00	79.365.000,00	(1.635.000,00)	97,98
52232	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	87.000.000,00	85.920.000,00	(1.080.000,00)	98,76
52235	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.335.181.510,00	1.271.041.800,00	(64.139.710,00)	95,20
52236	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin dari dana BOS	18.998.167.829,00	15.672.816.701,00	(3.325.351.128,00)	82,50
52237	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin dari dana BLUD	2.892.392.575,00	2.887.183.461,00	(5.209.114,00)	99,82
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.100.280.110,00	144.703.165.317,00	(17.397.114.793,00)	89,27
52301	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.609.380.110,00	142.253.347.284,00	(17.356.032.826,00)	89,13
52305	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	40.500.000,00	40.397.228,00	(102.772,00)	99,75
52309	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.450.400.000,00	2.409.420.805,00	(40.979.195,00)	98,33
52321	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan dari dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	(88.804.512.366,00)	72,66
52401	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	148.058.772.767,00	138.168.757.985,00	(9.890.014.782,00)	93,32
52402	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.708.941.000,00	4.067.298.180,00	(1.641.642.820,00)	71,24
52403	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.636.148.000,00	2.621.566.664,00	(14.581.336,00)	99,45
52406	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	49.959.539.120,00	44.544.554.624,00	(5.414.984.496,00)	89,16
52407	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	782.594.500,00	771.060.060,00	(11.534.440,00)	98,53
52408	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	100.918.000,00	98.128.900,00	(2.789.100,00)	97,24
52409	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	27.406.758.850,00	25.202.765.436,00	(2.203.993.414,00)	91,96
52411	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	67.087.941.500,00	1.378.336.908,00	(65.709.604.592,00)	2,05
52412	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.248.580.000,00	1.213.868.522,00	(34.711.478,00)	97,22
52413	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	845.602.500,00	731.090.800,00	(114.511.700,00)	86,46
52420	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	726.000.000,00	721.690.791,00	(4.309.209,00)	99,41
52421	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	20.208.023.200,00	16.446.188.201,00	(3.761.834.999,00)	81,38
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.109.630.240,00	1.910.823.018,00	(198.807.222,00)	90,58
52501	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	70.882.900,00	70.043.627,00	(839.273,00)	98,82
52508	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	521.425.000,00	379.642.081,00	(141.782.919,00)	72,81
52510	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari dana BOS	1.517.322.340,00	1.461.137.310,00	(56.185.030,00)	96,30
526	Belanja Modal Aset Lainnya	716.921.000,00	655.385.000,00	(61.536.000,00)	91,42

52601	- Belanja Modal Aset Lainnya	716.921.000,00	655.385.000,00	(61.536.000,00)	91,42
53	BELANJA TAK TERDUGA	4.968.939.487,00	9.455.600,00	(4.959.483.887,00)	0,19
531	Belanja Tak Terduga	4.968.939.487,00	9.455.600,00	(4.959.483.887,00)	0,19
53101	- Belanja Tak Terduga	4.968.939.487,00	9.455.600,00	(4.959.483.887,00)	0,19
	JUMLAH BELANJA	2.871.218.762.599,52	2.526.504.949.919,19	(344.713.812.680,33)	87,99
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	(3.161.363.173,00)	38,70
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	4.042.013.000,00	1.023.845.129,00	(3.018.167.871,00)	25,33
62102	- Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	4.042.013.000,00	1.023.845.129,00	(3.018.167.871,00)	25,33
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.115.203.192,00	972.007.890,00	(143.195.302,00)	87,16
62301	- Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	1.115.203.192,00	972.007.890,00	(143.195.302,00)	87,16
	JUMLAH TRANSFER	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	(3.161.363.173,00)	38,70
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.876.375.978.791,52	2.528.500.802.938,19	(347.875.175.853,33)	87,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	(236.405.418.103,52)	31.356.404.855,67	267.761.822.959,19	(13,26)
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	139.740.514.867,00	153,32
711	Penggunaan SILPA	256.564.582.703,52	256.564.582.703,52	0,00	100,00
71101	- Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	250.009.876.273,67	256.564.582.703,52	6.554.706.429,85	102,62
71102	- Koreksi SILPA	6.554.706.429,85	0,00	(6.554.706.429,85)	0,00
714	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	139.752.780.949,00	139.752.780.949,00	
71401	- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0,00	139.752.780.949,00	139.752.780.949,00	
715	Penerimaan Kembali Piutang	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	(12.266.082,00)	99,78
71505	- Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	(12.266.082,00)	99,78
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.656.196.860,00	155.495.608.833,00	129.839.411.973,00	606,07
722	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.159.164.600,00	16.000.000.000,00	(4.159.164.600,00)	79,37
72202	- Penyertaan Modal pada BUMD	20.159.164.600,00	16.000.000.000,00	(4.159.164.600,00)	79,37
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.497.032.260,00	139.495.608.833,00	133.998.576.573,00	2.537,65
72301	- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	5.497.032.260,00	139.495.608.833,00	133.998.576.573,00	2.537,65
	PEMBIAYAAN NETTO	236.405.418.103,52	246.306.520.997,52	9.901.102.894,00	104,19
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	277.662.925.853,19	277.662.925.853,19	0,00



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
*FINANCIAL STATEMENTS***
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
For The Years ended December 31, 2019

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
Jl. Siliwangi Gardu Tinggi No. 31, Sukasari, Bogor Timur
Telp : (0251) 8330313**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman / Pages	
▶ Surat Pernyataan Direksi		<i>Management Statement</i> ◀
▶ Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i> ◀
▶ Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i> ◀
■ Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i> ■
■ Laporan Laba Rugi	2	<i>Statement of Income or Loss</i> ■
■ Laporan Perubahan Ekuitas	3	<i>Statement of Change in Equity</i> ■
■ Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i> ■
■ Catatan Atas Laporan Keuangan	5	<i>Notes to The Financial Statements</i> ■

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019**

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

On behalf of the board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Ir. Muzakkir
Alamat : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Denny Ari Wibowo, S.E.Ak
Alamat : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Jenal Abidin, S.Pt, MP
Alamat : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Jabatan : Direktur Umum

1. Name : Ir. Muzakkir
Address : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Position : President Director
2. Name : Denny Ari Wibowo, S.E.Ak
Address : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Position : Operational Director
3. Name : Jenal Abidin, S.Pt, MP
Address : Jl. Siliwangi Jl. Gardu Tinggi No.31, Bogor Timur
Position : General Director

Menyatakan bahwa:

Declare that

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD Pasar Pakuan Jaya;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal.

1. *We are responsibility for the preparation and presentation of the financial statement of PD Pasar Pakuan Jaya;*
2. *The Financial statement have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountable;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements;*
b. *The Financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material informatioan or facts;*
4. *We are responsible for internal control systems.*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

For and on behalf of the Board of Director.

Bogor, 23 Maret 2020/ March 23, 2020

Direktur Umum /
General Director

Direktur Utama /
President Director

Direktur Operasional /
Operational Director

(Jenal Abidin, S.Pt, MP)

(Ir. Muzakkir)

(Denny Ari Wibowo, S.E.Ak)



No : 00008/2.0376/AU.2/05/0891-1/1/III/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungjawab auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyedikan suatu basis bagi opini kami.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

No : 00008/2.0376/AU.2/05/0891-1/1/III/2020

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

*The Board of Commissioner and Director
Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor*

We have audited the accompanying financial statements of Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Company"), which comprise of the statement of financial position as of December 31, 2019, and statement of profit loss, statement of changes in equity, and statement of cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Drs. Haryo Tienmar

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Jl. Buaran Raya No. 2, Duren Sawit, Jakarta 13440
Phone : 8660 3743 - 8660 4038 Fax : 8660 9287
e-mail : haryo.tienmar2004@gmail.com
Izin Praktek : AP. 0891 Izin Usaha : 99.2.0376

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Hal Lainnya

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggungjawab manajemen Perusahaan. Tanggungjawab kami terdapat pada pernyataan pendapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kami melaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit Seksi 800 yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan perundang-undangan dan laporan kinerja disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami Nomor: 006/HT/LAI/III/20 dan Nomor: 007/HT/LAI/III/20 tanggal 23 Maret 2020.

Laporan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 tidak dilakukan audit.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor as of December 31, 2019, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability in Indonesia.

Others

We also conduct tests of compliance with the specific legislation. Compliance with legislation is the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion of compliance with legislation based on our audit. The testing of compliance with laws and regulations that we have implemented based on the State Audit Standards issued Financial Investigation Bureau of Republic Indonesia and Auditing Standards Section 800 established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

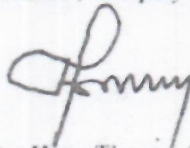
The report compliance to regulations and performance report submitted separately to management in our report Number: 006/HT/LAI/III/20 and Number: 007/HT/LAI/III/20 dated March 23, 2020.

The financial statements of Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor on the date and for the year ended 31 December 2018 were not audited.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant

Drs. Haryo Tienmar

NTU-KAP / Company Reg. No. : 99.2.0376



Drs. Haryo Tienmar, Ak., ME., CPA., CA

NIAP / Private Reg. No: AP. 0891

23 Maret 2020 / March 23, 2020

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018 (Tidak diaudit / Unaudited)	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Bank	2.d, 3	26.273.515.089	18.879.383.814	Cash and Bank
Piutang Usaha	2.f, 4	21.333.724.388	16.579.754.736	Account Receivable
Piutang Lain-lain	5	4.026.087.181	4.922.095.990	Others Receivables
Uang Muka	6	-	50.303.500	Advances
Biaya Dibayar Dimuka	2.g, 7	-	218.510.777	Prepaid Expense
Jumlah Aset Lancar		51.633.326.658	40.650.048.817	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Aset Tetap - bersih	2.i, 8	185.896.039.865	190.000.982.005	Fixed Asset - net
Aset Tak Berwujud - bersih	9	19.643.540	92.129.620	Intangible Asset - net
Aset Lainnya - bersih	2.j, 10	-	261.342.000	Others Asset - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		185.915.683.405	190.354.453.625	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		237.549.010.063	231.004.502.442	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITY AND EQUITY
Liabilitas Lancar				Current Liabilities
Utang Usaha	2.k, 11	234.035.415	234.035.415	Account Payables
Utang Pajak	12	16.161.725.669	17.931.494.022	Taxes Payable
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	13	301.137.624	484.334.747	Accrued Cost
Titipan Retribusi	14	11.897.637.991	12.565.278.989	Entrusted Retribution
Utang Lainnya	15	1.607.471.873	1.204.400.143	Others Current Liability
Pendapatan Diterima Dimuka	16	15.535.911.054	6.599.815.173	Unearned Revenue
Jumlah Liabilitas Lancar		45.737.919.626	39.019.358.489	Total Current Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar				Non Current Liabilities
Imbalan Pasca Kerja	2.n, 17	6.052.208.757	6.545.964.098	Employee Benefit
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		6.052.208.757	6.545.964.098	Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		51.790.128.383	45.565.322.587	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal	1.d, 18	263.756.732.240	263.756.732.240	Capital
Cadangan umum		932.657.928	932.657.928	General Allowance
Saldo Laba		(78.930.508.488)	(79.250.210.313)	Retained Earnings
Jumlah Ekuitas		185.758.881.680	185.439.179.855	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		237.549.010.063	231.004.502.442	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

See Accompanying Notes which are an Integral Part of Financial Statements.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
INCOME STATEMENT
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in rupiah, except the otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018 (Tidak diaudit / Unaudited)	
Pendapatan	2.1, 20	27.760.305.767	28.110.320.593	Income
Beban Operasional	2.1, 21	(27.318.734.299)	(27.624.811.730)	Operational Expense
Laba Kotor		441.571.468	485.508.863	Gross Profit
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				Other Income (Expense)
Pendapatan Lain-lain	22	1.510.644.235	599.258.097	Others Income
Beban Lain-lain	23	(1.405.899.980)	(3.472.201.792)	Others Expense
Jumlah Pendapatan(Biaya) Lain-lain - bersih		104.744.255	(2.872.943.695)	Total Other Income(Expense) - net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		546.315.723	(2.387.434.832)	Profit (Loss) Before Tax
Pajak Penghasilan	2.m, 11	(226.613.898)	(322.979.317)	Income Tax
Laba (Rugi) Bersih		319.701.825	(2.710.414.149)	Net Profit (Loss)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

See Accompanying Notes which are an Integral Part of Financial Statements.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in rupiah, except the otherwise stated)

	Modal Dasar yang Ditempatkan yang Ditektor / dan Ditektor /		Cadangan Umum General Allowance	Saldo Rugi / Retained Earnings	Jumlah / Total	
	Issued and Paid-Up Capital					
Saldo 31 Desember 2017	263.756.732.240		760.144.674	(29.839.164.620)	234.677.712.294	Balance as of December 31, 2017
Pembagian Dividen (PAD) 2017	-	-	-	(948.822.899)	(948.822.899)	Dividen Distribution 2017
Pembagian Laba Tahun 2017	-	-	172.513.254	(345.026.509)	(172.513.255)	Profit Sharing in 2017
Rugi Tahun 2018	-	-	-	(2.710.414.149)	(2.710.414.149)	Loss in 2018
Denda Pajak	-	-	-	(27.321.262.512)	(27.321.262.512)	Tax Penalty
Tambahan Paska Kerja	-	-	-	(4.140.084.318)	(4.140.084.318)	Post-Employment Benefits
Pendapatan Sewa Pihak Ketiga	-	-	-	8.539.776.000	8.539.776.000	Third Party Rental Income
Saldo 31 Desember 2018	263.756.732.240		932.657.928	(56.764.999.007)	207.924.391.161	Balance as of December 31, 2018
Koreksi	-	-	-	(22.485.211.306)	(22.485.211.306)	Correction
Saldo 1 Januari 2018 (tidak diaudit)	263.756.732.240		932.657.928	(79.250.210.313)	185.439.179.855	Balance as of January 1, 2018 (Unaudited)
Labar Tahun Berjalan	-	-	-	319.701.825	319.701.825	Profit for the Year
Saldo 1 Januari 2019	263.756.732.240		932.657.928	(78.930.508.488)	185.758.881.680	Balance as of January, 1 2019

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

See Accompanying Notes which are an Integral Part of Financial Statements.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2019

(Expressed in rupiah, except the otherwise stated)

		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	(Tidak diaudit / Unaudited)
Laba Bersih Th. Berjalan		319.701.825	(2.710.414.149)
Penyesuaian untuk:			
Koreksi saldo laba		-	(46.780.031.983)
Beban Penyusutan dan amortisasi		4.371.646.843	4.096.981.542
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aktivitas Operasi		<u>4.691.348.668</u>	<u>(45.393.464.590)</u>
			<i>Net Profit For The Year</i>
			<i>Adjustment for:</i>
			<i>Correction of retained earnings</i>
			<i>Depreciation and amortization Expense</i>
			<i>Profit(Loss) Operation Before Changing in Activity</i>
ARUS KAS DARI / UNTUK AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Kenaikan(Penurunan) untuk:			<i>Increase(Decrease) for:</i>
Piutang Usaha		(4.753.969.652)	(4.415.118.906)
Piutang Lain-lain		896.008.809	4.707.370.396
Uang Muka		50.303.500	(37.303.500)
Biaya Dibayar Dimuka		218.510.777	267.653.959
Pajak Dibayar Dimuka		-	3.230.175.645
Utang Usaha		-	-
Utang Pajak		(1.769.768.353)	11.803.236.180
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		(183.197.123)	182.467.027
Titipan Retribusi		-	667.640.998
Utang Lainnya		403.071.730	1.003.855.904
Pendapatan diterima dimuka		8.936.095.881	(1.102.666.425)
Imbalan Pasca Kerja		(493.755.341)	187.776.229
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>7.327.007.898</u>	<u>(17.005.218.081)</u>
			<i>Net Cash Flows Provided by (used for) Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI / UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES
Kenaikan(Penurunan) untuk:			<i>Increase(Decrease) for:</i>
Perolehan Aset Tetap		(194.218.623)	(49.998.071)
Pelepasan aset tetap		247.550.000	12.200.680.000
Deposito		-	375.000.000
Investasi		-	750.000.000
Aset Tetap Dalam Penyelesaian		-	1.160.008.091
Aset Lainnya		13.792.000	(261.342.000)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi		<u>67.123.377</u>	<u>14.174.348.020</u>
			<i>Net Cash Flow Provided by Investing Activities</i>
ARUS KAS DARI / UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FOR FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan(Penurunan) untuk:			<i>Increase(Decrease) of Cash</i>
Cadangan Umum		-	172.513.254
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>-</u>	<u>172.513.254</u>
			<i>Cash Flow Provided by Financing Activities</i>
Kenaikan(Penurunan) Kas dan Bank		7.394.131.275	(2.658.356.807)
			<i>Increase(Decrease) of Cash and Banks</i>
Kas dan Bank Awal Tahun		18.879.383.814	21.537.740.621
			<i>Cash and Banks Beginning of the Year</i>
Kas dan Bank Akhir Tahun		<u>26.273.515.089</u>	<u>18.879.383.814</u>
			<i>Cash and Banks The End Of The Year</i>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum

1. General

1.a. Latar Belakang

Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Perusahaan") didirikan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Laporan Keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah.

1.b. Badan Pengawas dan Dewan Direksi

Struktur organisasi Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No.27 tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

Anggota Badan Pengawas

Susunan badan pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-137 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Periode 2017-2020, Walikota Bogor mengangkat Badan Pengawas Pengganti pada Perusahaan Periode 2017-2020 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua
Sekretaris
Anggota

Drs. Hanafi, M.Si
Ir. Suprpto

Head of Commissioners
Secretary
Member

Susunan Direksi berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bogor No. 820.45-23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasional
Direktur Umum

Ir. Muzakkir
Denny Ari Wibowo, SE.Ak
Jenal Abidin, S.Pt, MP

Board of Directors

President Director
Operational Director
General Director

1.a. Background

Perumda of Pasar Pakuan Jaya in Bogor City ("The Company") was established in Bogor on July 7, 2009, based on the Bogor City Regulation No. 4 of 2009 dated July 7, 2009 concerning Establishment of Pasar Pakuan Jaya Regional Company.

The Financial Statements of Company is expressed in Rupiah.

1.b. Board of Commissioners and Directors

The Company's organization structural was formed based on Bogor Mayor Regulation No. 27 pf 2009 dated November 2, 2009 concerning the Organization and Work Procedures of the Bogor Pakuan Jaya Regional Market in the composition of the city as follows:

Members of The Board of Commissioners

The composition of the supervisory body based on the Decree of the Mayor of Bogor No. 539.45-137 of 2019 concerning the Determination of the Composition of Members of the Supervisory Board of the Company 2017-2020 Period, the Mayor of Bogor appoints the Substitute Supervisory Board of the Company 2017-2020 Period with the arrangement as follows:

The composition of the Directors is based on Bogor Mayor Decree No. 820.45-23 of 2019 concerning the Appointment of Directors of the Company, the 2019-2024 period is as follows:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1.b. Badan Pengawas dan Dewan Direksi (Lanjutan)

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh 6 (enam) bagian, 1 (satu) satuan pengawas intern, 2 (dua) staff ahli dan 9 unit pasar yakni:

- Bagian Umum & Kepegawaian
- Bagian Hukum & Humas
- Bagian Keuangan
- Bagian Usaha Jasa
- Bagian Teknik Pemeliharaan & Pembangunan
- Bagian Keamanan, Ketertiban & Kebersihan
- Satuan Pengawas Intern
- Staff Ahli
- Unit Pasar

Jumlah pegawai dan Pengurus Perusahaan periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebanyak 210 orang dan 209 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Status Kepegawaian	2019	2018	Employment Status
Pengurus	5	6	Manager
Pegawai Tetap	128	114	Permanent Employee
Calon Pegawai	6	24	Prospective Employee
Kontrak	70	64	Contract
THL	1	1	Freelance
Jumlah	210	209	Total

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	2019	2018	Education
Sarjana (S1 dan S2)	79	80	Bachelor's Degree
Sarjana Muda (D III)	20	19	Associate Degree
SLTA	111	110	Senior High School
Jumlah	210	209	Total

1.c. Tujuan Pendirian

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 Pasal 4 dan Pasal 6 tujuan dan bidang usaha Perusahaan adalah:

Tujuan Perusahaan:

- Meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih dan teratur.
- Mendorong perekonomian daerah
- Menunjang pembangunan daerah
- Meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar
- Meningkatkan pendapatan asli daerah

1. General (Continued)

1.b. Board of Commissioners and Directors (Continued)

In carrying out its duties the Board of Directors is assisted by 6 (six) division, 1 (one) unit, 2 (two) professionals, and 9 (nine) markets namely:

- *General & Staff Division*
- *Law & PR Division*
- *Finance Division*
- *Service Business Division*
- *Maintenance & Development Division*
- *Safety, Cleanliness, and Order Division*
- *Internal Control Unit*
- *Professional*
- *Unit Markets*

Number of staff and management Company for the period 31 December 2019 and 31 December 2018 is 210 people and 209 people, with the following composition:

The composition of employees based on their level of education is as follows:

1.c. Objectives

Based on the Regional Regulation (Perda) of Bogor City Number 4 of 2009 Article 4 and Article 6 the objectives and business fields of Company are:

The objectives of establishment

- *Improve the market services and infrastructure that are comfortable, clean and orderly*
- *Drive the Regional Economy*
- *Support regional development*
- *Improve the professionalism and efficiency of market management*
- *Increase local revenue*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1.c. Tujuan Pendirian (Lanjutan)

Bidang usaha Perusahaan:

- Perusahaan menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar, seperti tempat berdagang, parkir, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota atas usulan Direksi.

Pasar yang dikelola oleh Perusahaan

- 1) Pasar Baru Bogor
- 2) Pasar Kebon Kembang
- 3) Pasar Merdeka
- 4) Pasar Sukasari
- 5) Pasar Gunung Batu
- 6) Pasar Jambu Dua
- 7) Pasar Padasuka
- 8) Plaza Bogor
- 9) Pasar Devris
- 10) Pasar Taman Kencana
- 11) Pasar Pamoyanan
- 12) Pasar Tanah Baru

1.d. Modal Saham Perusahaan

Modal dasar Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 adalah:

1. Modal dasar dan disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp45.000.000.000 (Empat puluh lima milyar rupiah) dan telah dipenuhi sebesar Rp40.000.000.000 (Empat Puluh milyar rupiah) telah dialokasikan dalam:
 - 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah)
 - 1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

1. General (Continued)

1.c. Objectives (Lanjutan)

The Company's line of business:

- Company are conducts business of managing and leasing market facilities and infrastructure, such as trading places, parking lots, loading and unloading places, cleaning management as well as other businesses related to market operations.
- Other types of business as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Mayor upon the proposal of the Board of Directors.

The markets that are managed by Company's

- Baru Bogor Market
- Kebon Kembang Market
- Merdeka Market
- Sukasari Market
- Gunung Batu Market
- Jambu Dua Market
- Padasuka Market
- Plaza Bogor
- Devris Market
- Taman Kencana Market
- Pamoyanan Market
- Tanah Baru Market

1.d. Company Stock Capital

The authorized capital of the Company based on Bogor City Regulation Number 7 of 2015 is:

1. Authorized capital and paid up Regional Government until the enactment of Bogor City Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendment to Bogor City Regulation Number 8 of 2013 concerning Regional Capital Participation to Company as follows:

- 1) The obligation to include the authorized capital of the regional government in the amount of IDR 45,000,000,000 (forty five billion rupiah) and has been fulfilled in the amount of IDR 40,000,000,000 (forty billion rupiah) has been allocated in:
 - 1.1 Regional Budget Revenues and Expenditures for Fiscal Year 2010 of IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah)
 - 1.2 Regional Revenue and Expenditure Budget 2012 Fiscal Year of Rp7,500,000,000 (Seven billion five hundred million rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1.d. Modal Saham Perusahaan (Lanjutan)

- 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)
- 1.5 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

- 2) Tanah, bangunan serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.732.240 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)
 - 2.1 Tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - 2.2 Peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

2. Sisa penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal daerah secara bertahap berdasarkan rencana bisnis Perusahaan dan kemampuan keuangan daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa penyertaan modal dasar dimaksud pada ayat (2).

1. General (Continued)

1.d. Company Stock Capital (Continued)

- 1.3 Regional Budget Revenue and Expenditures for the 2013 Budget Year of IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah)
- 1.4 Regional Budget Revenues and Expenditures for the 2014 Fiscal Year of Rp. 15,000,000,000 (fifteen billion rupiah)
- 1.5 Changes to the 2016 Regional Revenue and Expenditure Budget of Rp 7,500,000,000 (Seven billion and five million rupiah)

- 2) Land, buildings and equipment and machinery valued at Rp 218,756,732,240 (Two Hundred Eighteen Billion Seven Hundred Fifty Six Million Seven Hundred Thirty Two Thousand Two Hundred Forty Rupiah)
 - 2.1 Land and buildings valued at Rp.218,629,683,000 (Two Hundred Eighteen Billion Six Hundred Twenty Nine Million Six Hundred Eighty Three Thousand Rupiah)
 - 2.2 Equipment and machinery valued at Rp 127,049,240 (One Hundred Twenty-Seven Million Forty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Rupiah)

2. The remaining equity participation as referred to in paragraph (1) letter a in the amount of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah) will be met through gradual participation in regional capital based on the Company business plan and regional financial capability, the amount of which is budgeted in the Regional Regulation on Regional Revenue and Expenditure Budget for the year in accordance with statutory provisions.

3. Authorized capital that has been deposited by the Regional Government up to the Bogor City Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendments to the Bogor City Regulation Number 8 of 2013 concerning Regional Capital Participation to Company is determined as referred to in paragraph (1) and the remaining equity participation referred to in paragraph (2).

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1.d. Modal Saham Perusahaan (Lanjutan)

4. Pemerintah Daerah mengurangi penyertaan modal dasar kepada Perusahaan berupa tanah dan bangunan Pasar Taman Anggrek senilai Rp1.649.625.716 (Satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah)
5. Struktur modal Perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah daerah sampai dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2015 diundangkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah)
 - 2) Tanah senilai Rp135.615.803.000 (seratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
 - 3) Gedung dan bangunan senilai Rp83.013.880.000 (delapan puluh tiga milyar tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 4) Peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Rincian penyertaan modal dasar berupa uang:

- 1) Modal dasar disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan tahun 2010-2016 sejumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah)
- 2) Modal Dasar yang akan disetor pada tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan dan kemampuan keuangan daerah

Rincian penyertaan modal berupa tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin:

Pasar	Luas Large (m ²)	Nilai Value	Market
Pasar Gunung Batu			Gunung Batu Market
Tanah	2.495	3.261.960.000	Land
Gedung	2.778	1.998.700.000	Building
Peralatan & Mesin	0	23.059.000	Equipment & Vehicle
Jumlah		5.283.719.000	Total

1. General (Continued)

1.d. Company Stock Capital (Continued)

4. Local Government reduces equity participation to Company in the form of land and buildings in the Taman Anggrek Market worth Rp1,649,625,716 (One billion six hundred forty nine million six hundred twenty-five thousand seven hundred sixteen rupiah)
5. Capital structure Company originating from the participation of regional government capital until Regional Regulation No.7 of 2015 is promulgated, with the following details:
 - 1) Amount of money IDR 45,000,000,000 (fourty five billion rupiah)
 - 2) Land worth Rp135,615,803,000 (one hundred thirty-five billion six hundred and fifteen million eight hundred and three thousand rupiahs)
 - 3) Buildings worth Rp.83,013,880,000 (eighty three billion thirteen million eight hundred eighty thousand rupiah)
 - 4) Equipment and machinery worth Rp 127,049,240 (one hundred twenty seven million forty nine thousand two hundred forty rupiah)

Details of equity participation in the form of money:

- 1) Authorized capital is paid up to the Bogor City Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendments to the Bogor City Regulation Number 8 of 2013 concerning Regional Capital Participation to Company in 2010-2016 amounting to Rp40,000,000,000 (forty billion rupiah)
- 2) The authorized capital to be paid up in 2017 is IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah) in accordance with the Company business plan and regional financial capabilities

Details of equity participation in the form of land, buildings and buildings as well as equipment and machinery:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

1.d. Modal Saham Perusahaan (Lanjutan)

1.d. Company Stock Capital (Continued)

Pasar	Luas <i>Large (m²)</i>	Nilai <i>Value</i>	Market
Pasar Sukasari			Sukasari Market
Tanah	5.450	21.342.200.000	Land
Gedung	4.702	3.025.180.000	Building
Peralatan & Mesin	0	19.323.330	Equipment & Vehicle
Jumlah		24.386.703.330	Total
Pasar Taman Kencana			Taman Kencana Market
Tanah	104	368.698.000	Land
Gedung	104	88.800.000	Building
Peralatan & Mesin	-	-	Equipment & Vehicle
Jumlah		457.498.000	Total
Pasar Kebon Kembang			Kebon Kembang Market
Tanah	9.665	24.713.405.000	Land
Gedung	15.560	19.793.000.000	Building
Peralatan & Mesin	-	-	Equipment & Vehicle
Jumlah		44.506.405.000	Total
Pasar Padasuka			Padasuka Market
Tanah	2.168	3.154.440.000	Land
Gedung	1.282	738.400.000	Building
Peralatan & Mesin	-	426.000	Equipment & Vehicle
Jumlah		3.893.266.000	Total
Pasar Devris			Devris Market
Tanah	400	906.800.000	Land
Gedung	160	47.100.000	Building
Peralatan & Mesin	-	-	Equipment & Vehicle
Jumlah		953.900.000	Total
Pasar Jambu Dua			Jambu Dua Market
Tanah	6.124	17.006.300.000	Land
Gedung	3.844	3.916.100.000	Building
Peralatan & Mesin	-	-	Equipment & Vehicle
Jumlah		20.922.400.000	Total
Pasar Baru Bogor			Baru Bogor Market
Tanah	7.367	25.739.000.000	Land
Gedung	27.594	35.869.700.000	Building
Peralatan & Mesin	-	48.353.580	Equipment & Vehicle
Jumlah		61.657.053.580	Total
Pasar Merdeka			Merdeka Market
Tanah	5.985	14.034.000.000	Land
Gedung	6.290	8.311.000.000	Building
Peralatan & Mesin	-	6.859.000	Equipment & Vehicle
Jumlah		22.351.859.000	Total

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

1. Umum (Lanjutan)

1.d. Modal Saham Perusahaan (Lanjutan)

Pasar	Luas <i>Large (m²)</i>	Nilai <i>Value</i>	Market
Pasar Pamoyanan			
Tanah	2.700	2.643.000.000	<i>Land</i>
Gedung	294	26.800.000	<i>Building</i>
Peralatan & Mesin	-	-	<i>Equipment & Vehicle</i>
Jumlah		2.669.800.000	<i>Total</i>
Pasar Tanah Baru			
Tanah	2.404	3.109.000.000	<i>Land</i>
Gedung	695	23.600.000	<i>Building</i>
Peralatan & Mesin	-	-	<i>Equipment & Vehicle</i>
Jumlah		3.132.600.000	<i>Total</i>
Pasar Kebon Kembang Blok. F			
Tanah	4.800	17.483.000.000	<i>Land</i>
Gedung	6.081	9.128.600.000	<i>Building</i>
Peralatan & Mesin	-	-	<i>Equipment & Vehicle</i>
Jumlah		26.611.600.000	<i>Total</i>
Pasar Kebon Kembang Blok. G			
Tanah	480	1.854.000.000	<i>Land</i>
Gedung	384	46.900.000	<i>Building</i>
Peralatan & Mesin	-	-	<i>Equipment & Vehicle</i>
Jumlah		1.900.900.000	<i>Total</i>

1. General (Continued)

1.d. Company Stock Capital (Continued)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

2.a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai Perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2012.

Apabila dibandingkan dengan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diterapkan oleh Perusahaan untuk tahun-tahun buku sebelumnya maka persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana. Demikian juga apabila dibandingkan dengan perkembangan terkini SAK yang saat ini sedang dalam proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standard (IFRS), maka persyaratan dalam SAK ETAP juga lebih sederhana.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Implementations of Indonesian Accounting Standard For Non-Publicly-Accountable Entities

In accordance with the criteria requirements of Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities (SAK ETAP), The Company is eligible as a non-publicly-accountable entity and therefore, the management decided to implement SAK ETAP as the basis of its financial statements, effective since January 1, 2012.

When compared with statements under Financial Accounting Standards (SAK) which has been implemented by The Company in the previous years, statements under SAK ETAP is more modest. Even when compared to the current development of SAK which is in the middle of a convergence with International Financial Reporting Standard (IFRS), SAK ETAP is still deemed to be more modest with its regulations.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (Lanjutan)

2.a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik (Lanjutan)

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi Perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

2.b. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2019 dengan angka komparatif 2018 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2.c. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan tidak menyusun laporan laba rugi dan saldo laba, sebagaimana yang di ijinakan oleh SAK ETAP, karena terdapat transaksi yang diakui langsung dalam perubahan ekuitas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis berkesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan prestasi terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, masa pembukuan adalah 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

2.a. Implementations of Indonesian Accounting Standard For Non-Publicly-Accountable Entities (Continued)

The Company decided to implement SAK ETAP, with considerations that the informations presented in the financial statements using SAK ETAP is still able to present the economic substances in its operational and business activities fairly. Other consideration includes SAK ETAP which is deemed to make less expenditures and more benefits in efficiency to The Company.

Despite the modesty of SAK ETAP compared with the previously implemented, SAK and its current development, The Company still puts fair and complete presentation of relevant financial information upfront, as required by the standards. Therefore, the objective of financial statements presentation for its users are fulfilled.

2.b. Statement of obedience to SAK ETAP

Management of The Company stated that the financial statements of year 2019 with the comparative value of year 2018 are presented in accordance with SAK ETAP and has fulfilled all of its requirements.

2.c. Basis of Completion of Financial Statement

The Company's financial statements consist of Statements of Financial Position, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. The company does not prepare an income statement and retained earnings, as permitted by SAK ETAP, because there are transactions that are recognized directly in changes in equity.

The surrounding financial statements use the basis of going concern of business and historical costs. The financial statements are also made in accordance with the accrual basis, excluding the statement of cash flow which uses the cash basis.

The cash flow statement presents information on historical changes in the entity's cash and cash equivalents, which shows the separate achievements of changes that occurred during one period of operating, investing and financing activities. Investments are generally classified as cash equivalents only if they are due within three months or less from the date of acquisition.

The financial statements are presented in Rupiah, the bookkeeping period is 1 January 2019 to 31 December 2019

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (Lanjutan)

2.d. Kas & Bank

Kas dan bank mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Deposito mencakup simpanan yang hanya bisa di cairkan pada saat jatuh tempo. Investasi ini bersifat jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun dan bersifat jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

2.e. Transaksi-Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.f. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah netto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pada pihak ketiga.

2.g. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan metode penggunaannya dengan metode garis lurus.

2.h. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang sudah di tangan, tetapi belum dibukukan. Biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode pembukuan antara tanggal 27 s/d 31 setiap bulannya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

2.d. Cash & Bank

Cash and bank include cash, deposits which can be withdrawn at any time and other short-term liquid investments with maturities of three months or less.

Deposits include deposits that can only be disbursed when due. This investment is short term with a period of less than or equal to one year and is long term with a term of more than one year.

2.e. Transactions with Related Parties

The Company conducts transactions with certain parties as special relationship transactions as stipulated in SAK ETAP Chapter 28, "Disclosures of parties that have special relationships". All significant transactions with parties that have a special relationship with the same or different terms and conditions if done with third parties have been disclosed in the financial statements.

2.f. Accounts Receivable

Accounts receivable are presented in net value after deduction from impairment of doubtful accounts. Impairments are valued with consideration of empirical judgment, business and industrial prospects, financial position with emphasis on cash flows, solvability, and managed collaterals. Accounts receivable are segmented under related and third parties.

2.g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized based on its period using straight-line method.

2.h. Accrued Income

Revenue that has been hand in hand, but has not yet been recorded. Usually occurs at the end of the month or the end of the accounting period between the 27th to the 31st of every month.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (Lanjutan)

2.i. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Aset dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai beban/ peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan, beban bunga bank, serta biaya umum yang timbul dalam masa pembangunan. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan. pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan, hak guna dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan. Kecuali tanah, penyajian aset tetap didasarkan pada harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengelompokan aset dan penyusutannya dihitung dengan mengacu pada Keputusan Direksi PERUMDA Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Nomor 900/Kep.09.1-PDPPJ/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Kebijakan Akuntansi aset untuk Pengeluaran Barang Modal, aset Tetap dan penyusutannya. Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

Jenis Aset	Penyusutan/ Depreciation (%)	Type of Asset
Bangunan		Building
Permanen	5	Permanent
Tidak Permanen	10	Non-Permanent
Bukan Bangunan		Non-Building
Kelompok I	25	Category I
Kelompok II	12	Category II

Beban penyusutan yang diserahkan dari PEMDA yang sudah tidak memiliki umur manfaat ekonomis diakui dalam laporan ekuitas, sedangkan yang masih memiliki umur manfaat ekonomis diakui dalam laporan laba rugi adalah Pasar Taman Kencana, Pasar Jambu Dua dan Pasar Merdeka. Dan untuk bangunan Pasar Gunung Batu, Pasar Sukasari, Pasar Kebon Kembang, Pasar Padasuka, Pasar Bogor, Pasar Pamoyanan, Pasar Tanah Baru, dan Pasar Taman Anggrek diakui pada laporan ekuitas dengan mendebit akun laba ditahan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

2.i. Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are recorded at cost, which is the purchase price including all costs incurred until the asset is ready for use. Assets built by themselves are recorded at the total value of the expenses / equipment used, construction costs, bank interest expenses, and general costs incurred during the construction period. Expenditures to obtain tangible fixed assets that have a useful life of more than 1 (one) year must be charged as a cost to obtain, collect and maintain income by allocating expenses over the useful life of the asset through depreciation. expenses for acquiring land, including land with building rights, usufruct and usufructuary rights, must not be depreciated for the first time. Except for land, the presentation of fixed assets is based on the acquisition cost after accumulated depreciation. The grouping of assets and their depreciation is calculated by referring to the Decree of the Directors of PERUMDA of Pakuan Jaya Market in Bogor City Number 900 / Kep.09.1-PDPPJ / 2011 dated February 16, 2011 concerning the Accounting Policies on assets for the Expenditures of Capital Goods, Fixed Assets and their depreciation. Depreciation method uses the straight line method (straight line method) based on the economic benefits of the relevant fixed assets, namely as follows:

Depreciation expenses surrendered from PEMDA that do not have an economic useful life are recognized in the statement of equity, while those that still have an economic useful life are recognized in the income statement are Taman Kencana Market, Jambu Dua Market and Merdeka Market. And for the building of Gunung Batu Market, Sukasari Market, Kebon Kembang Market, Padasuka Market, Bogor Market, Pamoyanan Market, Tanah Baru Market, and Taman Anggrek Market, the equity statement is recognized in the statement of equity by debiting the retained earnings account

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (Lanjutan)

2.i. Aset Tetap dan Penyusutannya (Lanjutan)

Kapitalisasi Beban Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi dan / atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset yang bersangkutan. Setelah diperoleh, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap seperti biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*) penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran barang modal adalah pengeluaran untuk pembelian barang siap pakai atau dibangun lebih dulu atau pengeluaran pengedaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dengan batasan jumlah harga.

Nilai Satuan Minimum Pengeluaran Barang Modal dan Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diatas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut. Dikecualikan atas hal tersebut (tetap diakui sebagai beban atau tidak dikapitalisasi) adalah pengeluaran untuk gedung dan bangunan oleh Perusahaan, seperti biaya penataan, perbaikan, rehab dan sejenisnya.

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

- 1 Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 2 Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3 Alat bengkel, alat ukur, alat keamanan yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 4 Alat kantor dan rumah tangga yang sama atau lebih dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 5 Alat studio dan komunikasi yang sama atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 6 Pengeluaran untuk persatuan aset tetap lainnya berupa buku-buku koleksi / referensi yang sama dengan atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

2.i. Fixed Assets and Depreciation (Continued)

Expenses Capitalization Become Fixed Assets

Capitalization is the determination of the accounting value of all expenses to obtain fixed assets until they are ready to use to increase capacity, efficiency and / or extend their technical life in order to increase the value of the assets concerned. Once obtained, there are still costs that arise during the use of fixed assets such as maintenance costs, additions, replacements or repairs.

Capital expenditures are expenditures for the purchase of ready-made or pre-built goods or expenditures for new deductions and the addition of fixed assets from the results of development, reclassification, renovation and restoration. These items are not intended to be sold but rather to be used in normal company activities with a limited amount of price.

The Minimum Unit Value for Capital Expenditures and Capitalization of Fixed Assets includes:

Expenditures for buildings and buildings that are equal to or more than Rp 10,000,000 (ten million rupiah) and above 10% of the acquisition value of the buildings and buildings. Excluded for that matter (still recognized as an expense or not capitalized) are expenditures for buildings and buildings by Company, such as the costs of structuring, repairs, rehabilitation and the like.

Expenditures for per unit of equipment and machinery are as follows:

- 1 Large equipment equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)
- 2 Transport means which are equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)
- 3 Workshop tools, measuring tools, security devices that are equal to or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)
- 4 Office and household appliances which are the same or more than Rp. 200,000.00 (two hundred thousand rupiah)
- 5 The same studio and communication equipment or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)
- 6 Expenditures for each unit of other fixed assets in the form of collection / reference books that are equal to or more than Rp 100,000.00 (one hundred thousand rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

2.j. Aset lain-lain

Aset lain-lain meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan pendirian Perusahaan, pra operasi termasuk biaya-biaya yang memberi manfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun seperti biaya Riset dan Pengembangan. Terhadap biaya-biaya tersebut dilakukan amortisasi dengan estimasi masa manfaat ditetapkan tiga tahun.

2.k. Kewajiban / Utang

Utang dinyatakan dengan lengkap agar laporan keuangan dapat menggambarkan seluruh kewajiban Perusahaan yang terutang pada akhir tahun. Semua kewajiban / Hutang yang diketahui harus dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Jika kewajiban yang telah terjadi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya maka dapat dinilai dengan taksiran yang wajar.

2.l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun diluar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada saat prestasi dinikmati walaupun penerimaan uangnya terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi tunai. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual)

2.m. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

2.n. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 "imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuann Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah imbalan pasti.

2.j. Other Assets

Other assets include costs related to the Company's establishment, pre-operations including costs that provide benefits for more than one year, such as Research and Development costs. Amortization of these costs is carried out with an estimated useful life of three years.

2.k. Liability

Liabilities are stated in full so that the financial statements can reflect all of the Company's outstanding liabilities at the end of the year. All known obligations / debts must be recorded regardless of whether the amount can be determined precisely or not. If the obligations that have occurred cannot be determined with certainty then the amount can be assessed with a reasonable estimate.

2.l. Recognition of Revenue and Expense

All revenues, both operating income and non-business income are recognized when the transaction arises and / or when the achievement is enjoyed even if the receipt of the money occurs later or when the money is received for cash transactions. Expenses are recognized when incurred (accrual basis)

2.m. Income Tax

The company recognizes liability for all income tax for the current period and the prior unpaid period. If the amount paid for the current period and the previous period exceeds the amount due for the period, the company must recognize the excess as an asset. The company does not recognize deferred tax.

2.n. Post-Employment Benefits

The company recognizes post-employment benefit obligations as stipulated in SAK ETAP chapter 23 "employee benefits". Recognition of these obligations is based on the provisions of Labor Law No. 13/2003. Under these provisions the Company is required to pay employee benefits to employees when they stop working in the case of resignation, normal retirement, death and permanent disability. The amount of post-employment benefits is mainly based on the length of service and compensation of employees at the time of the completion of the employment relationship. Basically, employee benefits are based on Labor Law No. 13/2003 is a definite reward.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:

31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan/kerugian aktuarial diakui langsung di laporan laba rugi tahun berjalan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:

December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

Actuarial gains / losses are recognized immediately in the statement of income for the year.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

3. Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank sesuai dengan saldo Perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018
Kas	330.257.624	71.055.118
Bank BNI	17.964.512.451	15.513.556.936
Bank Mega	4.925.656.236	-
Bank BJB	3.002.715.153	2.532.235.620
Bank Pasar CMS	46.221.537	-
BPR Bank Pasar	2.823.283	762.536.140
Bank Syariah Mandiri	1.328.805	-
Cek dalam Peredaran	-	-
Jumlah Kas dan Bank	26.273.515.089	18.879.383.814

3. Cash dan Bank

Cash and Bank balances are in accordance with the Company's balance as of December 31, 2019 and 2018, consisting of:

	2019	2018
Cash	330.257.624	71.055.118
Bank BNI	17.964.512.451	15.513.556.936
Bank Mega	4.925.656.236	-
Bank BJB	3.002.715.153	2.532.235.620
Bank Pasar CMS	46.221.537	-
BPR Bank Pasar	2.823.283	762.536.140
Bank Syariah Mandiri	1.328.805	-
Outstanding Check	-	-
Total Kas dan Bank	26.273.515.089	18.879.383.814

4. Piutang Usaha

Saldo piutang usaha pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 21.333.724.388 dan Rp 16.579.754.736 merupakan piutang pedagang pasar.

4. Accounts Receivable

The balance of accounts receivable in year of 2019 and 2018 is Rp 21.333.724.388 and Rp 16.579.754.736 represents market trader receivables.

5. Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu:

	2019	2018
PT Fortunindo	4.013.217.181	-
CV Raqilla	12.870.000	25.740.000
PT Link	-	265.000.000
PT Mulyagiri	-	3.850.000.000
PT Javana	-	591.515.990
Bongkar Muat Pihak Ke-3	-	189.840.000
Jumlah Piutang Lain-lain	4.026.087.181	4.922.095.990

5. Others Account Receivable

The balance of others account receivable as of December, 31 2019 and 2018, consists of:

	2019	2018
PT Fortunindo	4.013.217.181	-
CV Raqilla	12.870.000	25.740.000
Parking PT Link	-	265.000.000
PT Mulyagiri	-	3.850.000.000
PT Javana	-	591.515.990
Load&Unload Third Parties	-	189.840.000
Total Other Acc. Receivable	4.026.087.181	4.922.095.990

6. Uang Muka

Saldo biaya dibayar dimuka pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp 50.303.500

6. Advances

The balance of advances in year of 2019 and 2018 is nihil dan Rp 50.303.500

7. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp 218.510.777

7. Prepaid Expense

The balance of prepaid expense in year of 2019 and 2018 is nihil and Rp 218.510.777

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

8. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 & 2018
terdiri dari:

8. Fixed Asset

Fixed Assets as of December 31 2019 & 2018
consisted of:

		Tahun (Year) 2019			
1 Januari 2018 / January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember 2018 / December, 31 2018		
Harga Perolehan:			<i>Cost of Goodsold:</i>		
Tanah	135.615.803.000	-	135.615.803.000	Land	
Bangunan	73.093.363.126	-	73.093.363.126	Building	
Kendaraan	1.006.007.318	-	1.006.007.318	Vehicles	
Mebeulair	556.557.991	50.545.700	607.103.691	Meubelair	
Peralatan	1.532.910.533	143.672.923	1.676.583.456	Equipment	
Jumlah	211.804.641.968	194.218.623	211.998.860.591	Total	
Akumulasi Penyusutan:			<i>Accumulated Depreciation</i>		
Bangunan	19.298.747.299	4.044.704.239	23.343.451.538	Building	
Kendaraan	596.182.860	122.063.368	718.246.228	Vehicle	
Mebeulair	525.003.385	30.616.170	555.619.555	Mebeulair	
Peralatan	1.383.726.419	101.776.986	1.485.503.405	Equipment	
Jumlah	21.803.659.963	4.299.160.763	26.102.820.726	Total	
Nilai Buku	190.000.982.005		185.896.039.865	Book Value	
		Tahun (Year) 2018			
1 Januari 2018 / January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember 2018 / December, 31 2018		
Harga Perolehan:			<i>Cost of Goodsold:</i>		
Tanah	135.615.803.000	-	135.615.803.000	Land	
Bangunan	76.165.443.126	-	73.093.363.126	Building	3.072.080.000
Kendaraan	1.006.007.318	-	1.006.007.318	Vehicles	
Mebeulair	546.125.740	10.432.251	556.557.991	Meubelair	
Peralatan	1.493.344.713	39.565.820	1.532.910.533	Equipment	
Jumlah	214.826.723.897	49.998.071	211.804.641.968	Total	3.072.080.000
Akumulasi Penyusutan:			<i>Accumulated Depreciation</i>		
Bangunan	16.529.360.006	3.663.456.480	19.298.747.299	Building	894.069.187
Kendaraan	471.046.540	125.136.320	596.182.860	Vehicle	
Mebeulair	474.160.927	50.842.458	525.003.385	Mebeulair	
Peralatan	1.230.526.420	153.199.999	1.383.726.419	Equipment	
Jumlah	18.705.093.893	3.992.635.257	21.803.659.963	Total	894.069.187
Nilai Buku #	196.121.630.004		190.000.982.005	Book Value	

9. Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud kantor pusat per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

9. Intangible Assets

The balance of intangible asset as of December 31, 2019 and 2018 consist of:

	2019	2018	
Nilai perolehan	745.112.999	745.112.999	Acquisition Value
Akumulasi Amortisasi	(725.469.459)	(652.983.379)	Amortization Accumulated
Total Aset Tidak Berwujud	19.643.540	92.129.620	Total Intangible Asset

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

10. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Nihil dan Rp 261.342.000.

11. Utang Usaha

Saldo utang usaha per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018
CV. Dharmawangsa	97.164.144	97.164.144
CV. Kinarya Teknika	45.000.001	45.000.001
CV. Marga Jaya	21.154.546	21.154.546
Intan Selaras Consultant	14.000.000	14.000.000
CV. Minora	12.600.000	12.600.000
CV. Sisasti Bakhya Asasta	8.929.091	8.929.091
CV. Griya Cipta	8.910.363	8.910.363
PT Visi Kreatif Cemerlang	7.500.000	7.500.000
CV. Cipta Selaras	6.363.636	6.363.636
CV. Rancang Bangun Cipta	3.954.545	3.954.545
CV. Tachenda	3.500.000	3.500.000
CV. Surya Cipta Lestari	2.936.363	2.936.363
CV. Karya Abadi	2.022.726	2.022.726
Jumlah Hutang Usaha	234.035.415	234.035.415

12. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	9.861.716.535	10.447.750.828
PPN Keluaran	4.905.822.507	5.923.217.339
Pajak Penghasilan Pasal 21	489.894.788	820.785.915
Pajak Penghasilan Pasal 29	438.557.560	211.943.662
Hutang Pajak Lain-lain	315.480.000	315.480.000
Pajak Penghasilan Pasal 23	149.079.279	192.364.928
Pajak Parkir	1.175.000	19.951.350
Jumlah Utang Pajak	16.161.725.669	17.931.494.022

Rekonsiliasi laba sebelum taksiran pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2019	2018
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	546.315.723	(2.387.434.832)
Beda tetap:		
Pendapatan final	(10.113.337.038)	12.875.647.464
Biaya terkait pendapatan final	10.104.421.151	(10.165.233.315)
Laba fiskal	537.399.836	322.979.317

10. Others Asset

The balance of others asset as of December 31, 2019 and 2018 each amounted Nihil and Rp 261,342,000.

11. Account Payable

The balance of account payable as of December 31, 2019 and 2018 consist of:

	2019	2018
CV. Dharmawangsa	97.164.144	97.164.144
CV. Kinarya Teknika	45.000.001	45.000.001
CV. Marga Jaya	21.154.546	21.154.546
Intan Selaras Consultant	14.000.000	14.000.000
CV. Minora	12.600.000	12.600.000
CV. Sisasti Bakhya Asasta	8.929.091	8.929.091
CV. Griya Cipta	8.910.363	8.910.363
PT. Visi Kreatif Cemerlang	7.500.000	7.500.000
CV. Cipta Selaras	6.363.636	6.363.636
CV. Rancangan Bangun Cipta	3.954.545	3.954.545
CV. Tachenda	3.500.000	3.500.000
CV. Surya Cipta Lestari	2.936.363	2.936.363
CV. Karya Abadi	2.022.726	2.022.726
Total Account Payable	234.035.415	234.035.415

12. Taxes Payable

The balance of taxes payable as of December 31, 2019 and 2018 consist of:

	2019	2018
Withholding tax art 4 (2)	9.861.716.535	10.447.750.828
VAT out	4.905.822.507	5.923.217.339
Withholding tax art 21	489.894.788	820.785.915
Withholding tax art 29	438.557.560	211.943.662
Others Tax Payable	315.480.000	315.480.000
Withholding tax art 23	149.079.279	192.364.928
Parking Tax Payable	1.175.000	19.951.350
Total Taxes Payable	16.161.725.669	17.931.494.022

Reconciliation between earnings before estimated income taxes, as presented in the statement of profit or loss, with the taxed income for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019	2018
Earnings (Loss) Before Tax	546.315.723	(2.387.434.832)
Permanent difference		
Kiosk Rental Fee Revenue	(10.113.337.038)	12.875.647.464
Los Rental Fee Revenue	10.104.421.151	(10.165.233.315)
Profit fiscal	537.399.836	322.979.317

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

12. Utang Pajak (Lanjutan)

Beban pajak penghasilan:

Tarif PPh pasal 31E

Kena fasilitas 11.615.124

Tidak kena fasilitas 111.119.502

Jumlah 122.734.626

Kredit pajak:

Pajak penghasilan pasal 25 -

Pajak penghasilan pasal 29 122.734.626

12. Taxes Payable (Continued)

Income tax expense:

Tariff Wht art 31E

Hit the facility

Not subject facility

Total

Tax credit:

Withholding tax art 25

Withholding tax art 29

13. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018
Listrik	257.503.780	201.823.914
Air	33.346.600	97.759.405
Telepon	3.247.244	2.218.212
Koran	1.290.000	1.110.000
Lainnya	5.750.000	181.423.216
Jumlah Hutang Biaya	301.137.624	484.334.747

13. Accrued Cost

The balance of Accrued Cost as of December 31, 2019 and 2018 consist of:

Electricity

Water

Telephone

Newspapper

Others

Total Cost Payable

14. Titipan Retribusi

Titipan retribusi yang terdapat pada hutang lancar tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 11.897.637.991 dan Rp 12.565.278.989

14. Entrusted Retribution

The balance of entrusted retribution in current liability in year of 2019 and 2018 is Rp11.897.637.991 dan Rp12.565.278.989

15. Hutang Lancar Lainnya

Saldo Hutang Lancar Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018
Titipan Lainnya	932.157.024	384.000.478
Hutang Kepada Pemkot Bogor	632.548.599	790.685.749
Jamsostek	42.766.250	26.300.207
Hutang Simpanan Koperasi	-	75.000
Titipan Zakat Pegawai	-	3.338.709
Jumlah Hutang Lancar Lainnya	1.607.471.873	1.204.400.143

15. Other Current Liability

The Balance of Other Current Liability as of December 31, 2019 and 2018 consist of:

Others Deposit

Liabilities to Bogor Government

Jamsostek

Cooperative Savings Payable

Entrusted from Employee

Total Others Current Liability

16. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 15.535.911.054 dan Rp 6.599.815.173

16. Unearned revenue

The balance of unearned revenue in year of 2019 and 2018 is Rp 15.535.911.054 and Rp 6.599.815.173

17. Imbalan Pasca Kerja

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau

17. Employee Benefit

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.13 / 2003 concerning employment, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees at the time of termination of employment or when employees retire. Employee benefits are based on length of service and employee compensation at the time of termination of employment or retirement

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

17. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2019 dilakukan oleh PT. Padma Radya Aktuarial sebagai aktuaris independen dengan asumsi utama sebagai berikut:

17. Employee Benefit (Continued)

The calculation of employee benefits debts per December 31, 2018 by PT Padma Radya Aktuarial as of the independent actuarial with principle assumption consists of:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	8,00%	8,50%	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	Yearly Salaries Escalation Rate
Tabel mortalitas	100% TMI3	100% TMI3	Mortality Table
Tingkat cacat	5% TMI3	5% TMI3	Disabled Rate
Tingkat pengunduran diri	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56	Resigned Rate
Tingkat ekspektasi imbal hasil aset	N/A	N/A	Early retirement age
Tkt. pengembalian pensiun normal	100%	100%	The proportion of taking a normal
Tingkat PHK Lainnya	Nil	Nil	Others Level of Layoffs
Usia pensiun normal	58	58	Normal Pension Years Old

Saldo Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

The Balance of Employee Benefits as of December 31, 2017 and 2018 consist of:

Rekonsiliasi Saldo Awal dan Saldo Akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

Reconciliation of Initial Balance and Final Balance of the Present Value of a Defined Benefit Obligation (NKKIP)

	2019	2018	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti awal periode	6.545.964.098	6.358.187.868	The Present Value of the Post-Employment Benefit
Biaya Jasa Kini	1.395.024.182	1.546.663.546	Current service cost
Biaya Bunga	412.322.051	404.335.757	Interest cost
Biaya Jasa Lalu	(163.446.606)	-	Past service costs
Pembayaran Manfaat	(1.657.526.968)	(27.543.521)	Payment of benefits
Keuntungan(Rugi) Aktuarial	(480.128.000)	(1.735.679.552)	Profit(Loss) Actuarial
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Akhir Periode	6.052.208.757	6.545.964.098	

Rekonsiliasi Aktiva/Kewajiban yang diakui di Neraca

Reconciliation of Assets / Liabilities recognized in the Balance Sheet

	2019	2018	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	6.052.208.757	6.545.964.098	Present Value of Post-Employment
Nilai Wajar Aktiva Program	-	-	Fair Value of Plan Asset
Surplus yang bisa dipulihkan melalui pengurangan iuran masa mendatang melalui pengembalian	-	-	A surplus that can be recovered by reducing future contributions or through repayment
Hutang Imbalan Pasca Kerja	6.052.208.757	6.545.964.098	Post-Employment Benefits

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

17. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Rekonsiliasi Beban yang diakui di Laporan Laba/Rugi

Beban bersih yang diakui di Laporan Laba/Rugi

	2019
Biaya Jasa Kini	1.395.024.182
Biaya Bunga	412.322.051
Biaya Jasa Lalu	(163.446.606)
Dampak Pengurangan Pegawai (Keuntungan) Kerugian aktuarial yang diakui di Laba/Rugi	(480.128.000)
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	1.163.771.627

17. Employee Benefit (Continued)

Reconciliation of expenses recognized in the Profit/Loss Statement

Recognized net expense in the profit(loss)

	2018
Current service cost	1.546.663.546
Interest cost	404.335.757
Past service costs	-
The Impact of Employee Reduction (Profit)Loss Actuarial Recognized in Profit(Loss) Statement	(1.735.679.552)
Total Post-Employee Benefits	215.319.751

18. Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.7 tahun 2015 tentang penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pakuan Jaya Kota Bogor. Modal perusahaan terdiri atas:

	2019
Aset	218.756.732.240
Uang	45.000.000.000
Jumlah Modal	263.756.732.240

18. Share Capital

Based on the Bogor City Regulation No.7 of 2015 concerning the inclusion of Regional Capital To the Bogor City Pakuan Jaya Regional Corporation. The company's capital consists of:

	2018
Assets	218.756.732.240
Money	45.000.000.000
Total Share Capital	263.756.732.240

Modal Penyertaan PEMDA merupakan modal yang dianggarkan oleh PEMDA Kota Bogor ke PD. Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015, menyatakan bahwa jumlah modal dasar perusahaan terdiri dari modal disetor (uang) sebesar Rp45.000.000.000 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp218.756.732.240.

The Local Government Participation Capital is the capital budgeted by the City Government of Bogor to PD. Pakuan Jaya Market in accordance with Bogor City Regulation Number 7 of 2015, states that the total authorized capital of the company consists of paid up capital (money) of Rp45,000,000,000 and separated regional assets of Rp218,756,732,240.

19. Cadangan Umum

Cadangan umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 merupakan penggunaan laba tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 tahun 2009 pasal 43 yaitu sebesar masing-masing 10%

	2019	2018
Cadangan Umum	932.657.928	932.657.928
Jumlah	932.657.928	932.657.928

19. General Reserves

General reserves as of December 31, 2019 and 2018 are the use of profits in 2013 in accordance with Regional Regulation No.4 of 2009 article 43, amounting to 10% each

General Reserves
Total

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPOPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal:
31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the Year Ended:
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless stated otherwise)

20. Pendapatan

Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018	
Pengelolaan Pasar	15.522.944.585	13.750.080.236	Market Management
Sewa	7.511.748.275	9.767.645.684	Rent
Perparkiran	1.709.085.118	1.390.632.100	Parking
Kontribusi pihak ketiga	852.973.745	1.018.679.591	Third-Party Contribution
Pengelolaan Listrik	562.641.692	306.658.146	Electricity Management
Sewa Ruang	524.033.813	735.841.780	Room Rent
Perijinan	276.523.370	237.534.405	Licensing
Pengelolaan MCK	235.912.169	213.352.721	MCK Management
Pengelolaan Air	197.346.000	185.675.842	Water Management
Pengelolaan Kebersihan	189.221.000	206.451.083	Cleanliness Management
Bongkar Muat	177.876.000	297.769.005	Unloading & Loading
Total Pendapatan	27.760.305.767	28.110.320.593	Total Revenue

20. Revenue

The Income as of December 31, 2019 and 2018, consisting of:

21. Beban Operasional

Saldo Beban Operasional yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:

	2019	2018	
Beban Tenaga Kerja	15.386.952.166	13.919.492.994	Indirect Labour Expense
Beban Umum	6.418.419.614	8.466.850.498	Tax/Retribution Expense
Beban Penyusutan	4.371.646.843	4.096.981.542	Activities Cost
Beban Pengelolaan Pasar	779.871.089	892.714.278	Holiday Allowance
Beban Tenaga Ahli	351.662.987	239.031.818	Licensing Expense
Beban Pajak	10.181.600	9.740.600	Electricity Expense
Jumlah Beban Operasional	27.318.734.299	27.624.811.730	Total Operational Expense

21. Operational Expense

The balance of Operational Expense as of December 31, 2019 and 2018, consist of:

22. Pendapatan Lain-lain

Saldo Pendapatan Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018	
Pendapatan Bunga	406.055.226	370.017.387	Interest Income
Pendapatan Lain-lain	1.104.589.009	229.240.710	Others Revenue
Total Pendapatan Lain-lain	1.510.644.235	599.258.097	Total Others Revenue

22. Others Revenue

The balance of Other Revenues for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of:

23. Beban Lain-lain

Saldo Beban Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018	
Pajak/Retribusi Lainnya	493.840.000	832.755.000	Others Tax/Retribution

23. Others Expense

The balance of Other Expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of:



COPY

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
Jl. Siliwangi No.121 Kota Bogor 16142- West Java - Indonesia
Telp : (0251) 8324111 (Hunting) Fax : (0251) 8321575
Website : <http://www.pdamkotabogor.go.id>
e-mail : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id



COPY

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DAFTAR ISI

Halaman

- Surat Pernyataan Direksi	
- Laporan Auditor Independen	
- Laporan Keuangan	
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2019 dan 2018	1 - 2
- Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	3
- Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	4
- Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	5
- Catatan Atas Laporan Keuangan	6
- Daftar Aset Tetap	



Tirta Pakuan

PEMERINTAH KOTA BOGOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jln. Siliwangi No. 121 Bogor 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575
e-mail : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id web : www.pdamkotabogor.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : H. Deny Surya Senjaya, ST
Alamat : Jl. Siliwangi No.121 Kota Bogor 16142- West Java - Ind
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rino Indira Gusniawan
Alamat : Jl. Siliwangi No.121 Kota Bogor 16142- West Java - Indonesia
Jabatan : Direktur Umum
3. Nama : Ir. H. Syaban Maulana, MM
Alamat : Jl. Siliwangi No.121 Kota Bogor 16142- West Java - Indonesia
Jabatan : Direktur Teknik

Menyatakan bahwa :


1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Dewan Direksi.

Bogor, 18 Maret 2020


Direktur Umum


(Rino Indira Gusniawan)



(H. Deny Surya Senjaya, ST)

Direktur Teknik


(Ir. H. Syaban Maulana, MM)

COPY



No : 00007/2.0376/AU.2/04/0891-2/1/III/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor (perusahaan) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungjawab auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

COPY

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Indonesia.

Laporan atas Ketentuan Perundang-Undangan

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, kami melaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit Seksi 800 yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan perundang-undangan dan laporan kinerja disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami Nomor : 004/HT/LAI/III/2020 dan Nomor : 003/HT/LAI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant

Drs. Haryo Tienmar

NIU-KAP / Company Reg. No : 99.2.0376



Drs. Haryo Tienmar, Ak., MM, CPA., CA

NIAP / Private Reg. No: AP.0891

18 Maret 2020

COPY

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Nilai Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	61.369.617.559,80	65.215.070.258,74
Deposito	4	53.000.000.000,00	28.000.000.000,00
Piutang Usaha - Bersih	2.c, 5	34.949.568.513,00	31.645.337.105,70
Piutang Lain-lain	6	603.525.259,00	501.795.303,00
Pendapatan Yang Akan Diterima	7	134.351.069,89	50.778.320,00
Persediaan	2.d, 8	21.230.781.832,61	17.668.632.339,10
Biaya Dibayar Dimuka	9	972.872.921,00	3.545.905.037,00
Total Aset Lancar		172.260.717.155,30	146.627.518.363,54
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	2.e, 10	405.246.153.356,72	389.147.288.286,62
ASET LAIN-LAIN			
Aset Tidak Berwujud - Bersih	2.g, 11	315.715.729,24	480.436.979,20
Aset Tetap dalam Penyelesaian	2.h,12	2.607.959.475,00	2.473.647.445,00
Uang Jaminan	13	313.469.449,00	313.469.449,00
Sewa Dibayar Dimuka	14	294.011.767,50	575.391.799,50
Total Aset Lain-lain		3.531.156.420,74	3.842.945.672,70
Properti Investasi - Bersih	15	97.240.620,63	104.227.970,67
TOTAL ASET		581.135.267.553,39	539.721.980.293,53

COPY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUMDA 'TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Nilai Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang Usaha	16	4.325.165.332,00	1.931.299.214,00
Utang Lain-lain	17	861.639.494,00	936.144.950,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	18	27.150.907.900,00	15.411.844.965,00
Pendapatan Diterima Dimuka	19	1.291.173.182,67	1.308.231.268,06
Utang Pajak	2.t, 20	5.772.679.095,00	4.658.859.110,00
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo	2.j, 21	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Titipan Retribusi	22	703.370.500,00	680.985.000,00
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	23	10.270.375.023,00	10.579.525.355,00
Total Liabilitas Lancar		55.860.076.702,67	40.991.656.038,06
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Jangka Panjang	24	71.301.960.302,00	76.786.726.478,00
Total Liabilitas Jangka Panjang		71.301.960.302,00	76.786.726.478,00
Liabilitas Lain-lain			
Uang Jaminan Pelanggan	25	3.003.617.925,00	3.027.742.575,00
Imbalan Pasca Kerja	21, 26	22.844.116.018,00	30.709.119.762,00
Total Liabilitas Lain-lain		25.847.733.943,00	33.736.862.337,00
Total Liabilitas		153.009.770.947,67	151.515.244.853,06
Ekuitas			
Modal Pemerintah Kota Bogor	1.b, 27	249.494.063.007,13	239.494.063.007,13
Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditentukan Statusnya	1.b, 27	32.762.894.200,00	32.762.894.200,00
Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1.b, 27	4.379.090.301,87	4.379.090.301,87
Modal Pihak Ketiga	1.b, 27	1.959.088.691,00	1.959.088.691,00
Cadangan Umum	28	27.248.237.755,68	25.458.716.477,00
Saldo Laba	29	70.543.630.229,12	48.362.457.189,80
Laba Tahun Berjalan		41.738.492.420,92	35.790.425.573,67
Total Ekuitas		428.125.496.605,72	388.206.735.440,47
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		581.135.267.553,39	539.721.980.293,53

COPY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENDAPATAN	2.o		
Penjualan Air	30	275.546.803.271,00	228.586.131.600,00
Pendapatan Non Air	31	19.203.323.550,00	19.734.620.334,00
Total Pendapatan		294.750.126.821,00	248.320.751.934,00
BEBAN LANGSUNG USAHA	2.p		
Beban Sumber Air	32	15.163.283.250,13	11.367.684.120,04
Beban Pengolahan Air	33	43.470.314.425,01	31.413.265.246,02
Beban Transmisi dan Distribusi	34	57.335.830.209,70	56.047.731.259,03
Beban Perpompaan	35	1.038.670.224,30	385.283.448,73
Beban Perencanaan Teknik	36	4.241.872.048,46	3.612.771.278,58
Total Beban Langsung Usaha		121.249.970.157,60	102.826.735.352,40
LABA KOTOR		173.500.156.663,40	145.494.016.581,60
BEBAN TIDAK LANGSUNG	2.p		
Beban Umum dan Administrasi	37	94.588.845.174,57	78.003.711.910,16
Beban Hubungan Pelanggan	38	26.662.469.170,85	24.483.639.974,00
Total Beban Tidak Langsung		121.251.314.345,42	102.487.351.884,16
LABA USAHA		52.248.842.317,98	43.006.664.697,44
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	2.o, 39	6.139.895.436,94	6.256.920.032,23
Beban Lain-lain	2.p, 40	27.223.834,00	15.415.656,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain (Bersih)		6.112.671.602,94	6.241.504.376,23
LABA SEBELUM PAJAK		58.361.513.920,92	49.248.169.073,67
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2.t, 20	16.623.021.500,00	13.457.743.500,00
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan		16.623.021.500,00	13.457.743.500,00
LABA BERSIH		41.738.492.420,92	35.790.425.573,67

COPY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditemukan statusnya	Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Modal pihak ketiga	Saldo Laba Yang Telah Ditemukan Penggunaannya		Saldo Laba Yang Belum Ditemukan Penggunaannya	Saldo Laba Yang Tahun Berjalan	Jumlah Modal
					Cadangan Tujuan	Cadangan Umum			
Modal:									
Penyetoran Pemerintah Pusat Yang Belum Ditemukan Statusnya	-	32.762.894.200,00	-	-	-	-	-	-	32.762.894.200,00
Penyetoran Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	4.379.090.301,87	-	-	-	-	-	4.379.090.301,87
Modal Pihak Ketiga	-	-	-	1.959.088.691,00	-	-	-	-	1.959.088.691,00
Modal Pemerintah Kota Bogor	239.494.063.007,13	-	-	-	-	-	-	-	239.494.063.007,13
Cadangan Umum	-	-	-	-	23.792.439.309,00	-	-	-	23.792.439.309,00
Saldo Laba	-	-	-	-	-	68.169.358.181,40	-	-	68.169.358.181,40
Saldo Per 31 Desember 2017	239.494.063.007,13	32.762.894.200,00	4.379.090.301,87	1.959.088.691,00	23.792.439.309,00	68.169.358.181,40	-	33.325.544.280,57	403.882.477.970,97
Penambahan selama tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Pemerintah Kota Bogor	-	-	-	-	1.666.277.168,00	-	-	(33.325.544.280,57)	1.666.277.168,00
Ditemukan Untuk Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.325.544.280,57)
Pembagian Laba tahun 2017	-	-	-	-	-	(33.039.438.808,00)	-	-	(33.039.438.808,00)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	(83.953.125,00)	-	-	(83.953.125,00)
Pengembalian kelebihan pembayaran Bank BJB	-	-	-	-	-	(13.726.770,83)	-	-	(13.726.770,83)
Amortisasi aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	13.330.217.712,23	-	-	13.330.217.712,23
Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-	35.790.425.573,67	35.790.425.573,67
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	48.362.457.189,80	48.362.457.189,80
Saldo Per 31 Desember 2018	239.494.063.007,13	32.762.894.200,00	4.379.090.301,87	1.959.088.691,00	25.458.716.477,00	-	48.362.457.189,80	35.790.425.573,67	388.206.735.440,47
Tambahan modal disetor	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000,00
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	7.865.003.744,00	-	7.865.003.744,00
Pembagian laba tahun 2018	-	-	-	-	1.789.521.278,68	-	14.316.169.295,32	(35.790.425.573,67)	(19.684.734.999,66)
Amortisasi aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutasi tahun 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	41.738.492.420,92	41.738.492.420,92
Saldo Per 31 Desember 2019	249.494.063.007,13	32.762.894.200,00	4.379.090.301,87	1.959.088.691,00	27.248.237.755,68	-	70.543.630.229,12	41.738.492.420,92	428.125.496.605,72

COPY

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :			
- Laba Bersih		41.738.492.420,92	35.790.425.573,67
Penyesuaian untuk:			
- Koreksi imbalan kerja		7.865.003.744,00	-
- Beban Penyusutan Aset Tetap		46.015.981.076,91	41.780.367.859,71
- Beban Penyusutan Properti investasi		6.987.350,04	6.987.350,04
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja		95.626.464.591,87	77.577.780.783,42
Perubahan Modal Kerja :			
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha		(3.304.231.407,30)	(7.892.351.309,70)
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain		(101.729.956,00)	143.493.317,00
- Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Yang Akan Diterima		(83.572.749,89)	(37.434.236,00)
- Penurunan (Kenaikan) Persediaan		(3.562.149.493,51)	210.129.506,95
- Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka		2.573.032.116,00	1.334.042.588,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha		2.393.866.118,00	437.028.664,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-lain		(74.505.456,00)	(54.009.012,44)
- Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar		11.739.062.935,00	(16.062.877.430,00)
- Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka		(17.058.085,39)	595.834.634,77
- Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak		1.113.819.985,00	1.340.128.421,00
- Kenaikan (Penurunan) Bagian Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo		-	1.294.652.544,00
- Kenaikan (Penurunan) Titipan Retribusi		22.385.500,00	18.445.900,00
- Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Pendek Lainnya		(309.150.332,00)	(5.141.980.218,00)
Jumlah Perubahan Modal Kerja		10.389.769.173,91	(23.814.896.630,42)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		106.016.233.765,78	53.762.884.153,00
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi :			
- Penurunan (Penambahan) Aset Tetap		(61.950.124.897,06)	(85.843.695.149,65)
- Penurunan (Penambahan) Deposito		(25.000.000.000,00)	10.000.000.000,00
- Penurunan (Penambahan) Aset Tetap dalam Penyelesaian		(134.312.030,00)	8.153.342.341,00
- Penurunan (Penambahan) Uang Jaminan		-	(169.251.792,00)
- Penurunan (Penambahan) Sewa Dibayar Dimuka		281.380.032,00	281.380.032,00
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi		(86.803.056.895,06)	(67.578.224.568,65)
Arus Kas bersih untuk Aktivitas Pendanaan :			
- Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang		(5.484.766.176,00)	(4.799.170.404,00)
- Kenaikan (Penurunan) Uang Jaminan Pelanggan		(24.124.650,00)	(20.420.300,00)
- Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		(7.865.003.744,00)	28.401.797.535,00
- Kenaikan (Penurunan) Modal Dikurangi Laba Tahun Berjalan		(9.684.734.999,66)	(51.466.168.103,72)
Jumlah Arus Kas bersih untuk Aktivitas Pendanaan :		(23.058.629.569,66)	(27.883.961.272,72)
Penurunan bersih kas dan setara kas (I+II+III)		(3.845.452.698,94)	(41.699.301.688,37)
Kas dan setara kas pada awal periode		65.215.070.258,74	106.914.371.947,11
Kas dan setara kas pada akhir periode	3	61.369.617.559,80	65.215.070.258,74

COPY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Mempakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

I. UMUM

I.a. Sejarah Singkat

Penusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bogor No. 07 Tahun 1977 seri D dan perubahan No. 4 Tahun 1990 tanggal 10 Januari 1990, Perda No. 04 tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, kemudian Perda No. 16 tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Penusahaan Umum Daerah (Penumda) Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor, Nomor 21 Tahun 2019, tentang Penusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Nama dan Alamat

Nama : Perusahaan Umum Daerah (Penumda) Tirta Pakuan Kota Bogor.
Alamat : Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142.

Visi dan Misi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Sesuai Keputusan Direksi Penumda Tirta Pakuan Kota Bogor No. 060/KEP.70/PERUMDA/2001 tanggal 21 November 2001, sebagai berikut:

- Visi** : Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sehat melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.
- Misi** : Meningkatkan cakupan pelayanan dengan terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk mencapai masyarakat sehat, dan;
Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan dengan SDM yang berkualitas.

Moto kerja Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah "Handal dalam Pekerjaan Prima dalam Pelayanan".

Tugas Pokok:

- Memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bogor secara memadai, adil, dan merata secara berkesinambungan.
- Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bogor.

I.b. Permodalan

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 20 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No. 07 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Penumda) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Jumlah modal disetor pada akhir tahun 2019 sebagai berikut:

Modal Pemda Kota Bogor 255.832.242.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

Modal dasar Perumda Tirta Pakuan kota Bogor 182.000.000.000,00

- Jumlah Modal disetor pada akhir tahun 2012:

- Modal Pemda s/d tahun 2011 65.608.665.588,83

Perda No. 16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011, terdiri dari:

- Modal Pemerintah Pusat 1.681.686.801,44

- Modal Provinsi Jawa Barat 4.379.090.301,87

- Modal Pemda Kota Bogor 57.588.799.794,52

- Dana Pihak Ketiga 1.959.088.691,00

Jumlah Modal 65.608.665.588,83

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM.

1.a. Sejarah Singkat

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bogor No. 07 Tahun 1977 seri D dan perubahan No. 4 Tahun 1990 tanggal 10 Januari 1990, Perda No. 04 tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, kemudian Perda No. 16 tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor, Nomor 21 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Nama dan Alamat

Nama : Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor.
Alamat : Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142.

Visi dan Misi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Sesuai Keputusan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor No. 060/KEP.70/PERUMDA/2001 tanggal 21 November 2001, sebagai berikut:

- Visi** : Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sehat melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.
- Misi** : Meningkatkan cakupan pelayanan dengan terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk mencapai masyarakat sehat, dan;
Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan dengan SDM yang berkualitas.

Moto kerja Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah "Handal dalam Pekerjaan Prima dalam Pelayanan".

Tugas Pokok:

- a. Memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bogor secara memadai, adil, dan merata secara berkesinambungan.
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bogor.

1.b. Permodalan

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 20 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No. 07 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Jumlah modal disetor pada akhir tahun 2019 sebagai berikut:

Modal Pemda Kota Bogor 255.832.242.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

Modal dasar Perumda Tirta Pakuan kota Bogor 182.000.000.000,00

- Jumlah Modal disetor pada akhir tahun 2012:

- Modal Pemda s/d tahun 2011 65.608.665.588,83

Perda No. 16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011, terdiri dari:

- Modal Pemerintah Pusat	1.681.686.801,44
- Modal Provinsi Jawa Barat	4.379.090.301,87
- Modal Pemda Kota Bogor	57.588.799.794,52
- Dana Pihak Ketiga	1.959.088.691,00
Jumlah Modal	65.608.665.588,83

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM

1.a. Sejarah Singkat

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor didinkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bogor No. 07 Tahun 1977 seri D dan perubahan No. 4 Tahun 1990 tanggal 10 Januari 1990, Perda No. 04 tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, kemudian Perda No. 16 tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor, Nomor 21 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Nama dan Alamat

Nama : Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor.
Alamat : Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142.

Visi dan Misi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Sesuai Keputusan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor No. 060/KEP.70/PERUMDA/2001 tanggal 21 November 2001, sebagai berikut:

- Visi** : Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sehat melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.
- Misi** : Meningkatkan cakupan pelayanan dengan terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk mencapai masyarakat sehat, dan;
Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan dengan SDM yang berkualitas.

Moto kerja Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah "Handal dalam Pekerjaan Prima dalam Pelayanan".

Tugas Pokok:

- a. Memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bogor secara memadai, adil, dan merata secara berkesinambungan.
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bogor.

1.b. Permodalan

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 20 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No. 07 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat, Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Modal dasar perusahaan sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Jumlah modal disetor pada akhir tahun 2019 sebagai berikut:

Modal Pemda Kota Bogor 255.832.242.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

Modal dasar Perumda Tirta Pakuan kota Bogor 182.000.000.000,00

- Jumlah Modal disetor pada akhir tahun 2012:

- Modal Pemda s/d tahun 2011 65.608.665.588,83

Perda No. 16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011, terdiri dari:

- Modal Pemerintah Pusat	1.681.686.801,44
- Modal Provinsi Jawa Barat	4.379.090.301,87
- Modal Pemda Kota Bogor	57.588.799.794,52
- Dana Pihak Ketiga	1.959.088.691,00
Jumlah Modal	65.608.665.588,83

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

1.b. Permodalan (Lanjutan)

Modal tambahan Pemda Kota Bogor yang belum ditetapkan dalam Perda:

- Setoran bagian laba tahun 2010	9.940.701.000,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada program <i>water</i> hibah (hibah air minum) tahun 2011	3.000.000.000,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia tahun 2011 (UWSSP)	6.437.000.000,00	
Jumlah Modal yang telah disetor	<u>19.377.701.000,00</u>	
- Setoran bagian laba tahun 2011	11.202.823.000,00	
- Kekurangan Setoran bagian laba tahun 2010	1.076.612.000,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada program <i>water</i> hibah (hibah air minum) tahun 2012	2.000.000.000,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia tahun 2012 (UWSSP)	5.429.000.000,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan di Katulampa	10.000.000.000,00	
Jumlah Modal yang telah disetor	<u>29.708.435.000,00</u>	
- Setoran bagian laba tahun 2012	15.122.405.000,00	
- Penyertaan pembebasan lahan Intake	4.088.235.294,00	
- Penyertaan dana pendamping resevoir zona 4	2.400.000.000,00	
- Penyertaan dana pendamping jaringan Dist.	1.200.000.000,00	
- Penyertaan program kehilangan air	2.500.000.000,00	
Jumlah Modal yang telah disetor	<u>25.310.640.294,00</u>	
- Setoran bagian laba tahun 2013	17.651.447.956,00	
- Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada program <i>water</i> hibah (hibah air minum) tahun 2012	6.000.000.000,00	
- Penyertaan dana pendamping jaringan dist.	5.300.000.000,00	
- Penyertaan program kehilangan air	2.122.000.000,00	
Jumlah Modal yang telah disetor	<u>31.073.447.956,00</u>	
- Setoran bagian laba tahun 2015	10.921.110.161,17	
- Setoran bagian laba tahun 2016	52.898.242.000,00	
- Setoran bagian laba tahun 2017	10.934.000.000	
- Penyertaan Modal Pemda Kota Bogor	10.000.000.000	
Jumlah Modal yang telah disetor		<u><u>255.832.242.000,00</u></u>

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

1.b. Permodalan (Lanjutan)

Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Adanya pengakuan penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ada Berita Acara Serah Terima ke PEMDA Kota Bogor, dimana aset tersebut dioperasikan/digunakan sebesar Rp 32.762.894.200,00 terdiri dari:

Modal Pemerintah Pusat		32.762.894.200,00
- Pemasangan Pipa HDPE tahun 2010	12.885.773.000,00	
- Instalasi Pengolahan Air Palsari tahun 2010	3.642.752.200,00	
- Bangunan Prasedimentasi & Saluran Trandist	16.234.369.000,00	
Jumlah	<u>32.762.894.200,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal		<u><u>288.595.136.200,00</u></u>

1.c. Pembagian Laba

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengelolaan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 23 ayat (1) menetapkan penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- Dana APBD Pemerintah Kota Bogor	55%
- Dana Sosial dan Pendidikan	10%
- Jasa Produksi	5%
- Dana Pensiun dan Pesangon	20%
- Dana Cadangan Umum	10%

Rincian lebih lanjut penggunaan laba bersih setelah pajak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900-45-110 Tahun 2014 tentang rincian penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

1.d. Manajemen Perusahaan

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bogor. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa:

Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:

- Pejabat pemerintah daerah
- Perorangan/profesional
- Masyarakat konsumen

Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016, tentang organ dan kepegawaian Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyatakan bahwa :

- a. 2 (dua) orang dari Pejabat Daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. 1 (satu) orang dari perorangan yang memiliki kemampuan profesional di bidang per air minuman dan atau dari mantan unsur pimpinan Perumda;
- c. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat konsumen yaitu tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen Perumda dan mampu menjembatani antara Perumda dengan masyarakat pelanggan;

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

1.d. Manajemen Perusahaan (Lanjutan)

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 539.45-131 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2017-2020; memutuskan dan menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan periode 2017-2020 sebagai berikut :

Ketua, merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah Kota Bogor
Sekretaris, merangkap Anggota	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Anggota	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Anggota	: H. Dody Rosadi, M.Eng
Anggota	: Dra. Hj. Anna Setiana, M.M

Dewan Direksi

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 539.45-275 Tahun 2016 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2016-2020; memutuskan dan menetapkan mengangkat Direksi Perumda Tirta Pakuan periode 2016-2020 sebagai berikut :

Susunan Dewan Direksi Tahun 2019 sebagai berikut:

- Direktur Utama	: H. Deny Surya Senjaya, ST
- Direktur Umum	: Rino Indra Gusniawan
- Direktur Teknik	: Ir. H. Syaban Maulana, MM

Direktur Utama membawahi:

- 1) Direktur Teknik
- 2) Direktur Umum
- 3) Manajer Satuan Pengawasan Internal
- 4) Manajer QHSE
- 5) Sekretaris Perusahaan

Direktur Teknik membawahi 4 Departemen, terdiri dari:

- 1) Manajer Perencanaan & Pengawasan Teknik
- 2) Manajer Produksi
- 3) Manajer NRW Dan Transmisi dan Distribusi.
- 4) Manajer Perawatan

Direktur Umum membawahi 4 Departemen, terdiri dari:

- 1) Manajer Keuangan
- 2) Manajer Sumber Daya Manusia
- 3) Manajer Humas Dan Pelayanan Pelanggan
- 4) Manajer Perlengkapan

Dalam tahun 2019 Jumlah karyawan Perumda Tirta Pakuan kota Bogor sebanyak 638 orang, yang terdiri dari:

- Pegawai Tetap	401	Orang
- PKWT	37	Orang
- Pegawai <i>outsourcing</i>	200	Orang
Jumlah	<u>638</u>	<u>Orang</u>

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Surat Nomor : 03 0223 Tanggal 27 April 2012 dari Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Penhal Himbauan untuk menggunakan SAK ETAP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Perumda tahun 2011 yang belum ditetapkan dengan SK Walikota sebagai pemilik perusahaan.

Dasar Akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Laba Rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode akrual. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Laporan Arus Kas disusun dengan metode tidak langsung.

PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2019 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponden untuk tahun 2018 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi persyaratannya.

2.a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep beban historis (*historical cost*) dan berdasarkan prinsip kesinambungan (*going concern*).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Pencatatan akuntansi dan pelaporan menggunakan mata uang rupiah.

2.b. Periode Pembukuan

Periode Pembukuan (*Accounting Period*) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.c. Piutang Usaha

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif/keompok pelanggan (pelanggan rumah tangga, niaga, sosial, industri, instansi pemerintah, dan lain-lain), yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan menurut umur piutang dengan prosentase sebagai berikut:

- Diatas 3 bulan s.d 6 bulan	30%
- Diatas 6 bulan s.d 12 bulan	50%
- Diatas 1 tahun s.d 2 tahun	75%
- Diatas 2 tahun	100%

Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun dicadangkan penyisihannya sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapusbukukan (*Write-off*). Penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui pada masing-masing kelompok pelanggan.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

2.d. Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: - Persediaan bahan operasi yang terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya. - Persediaan bahan instalasi yang terdiri dari pipa, meter air, dan perlengkapan lapangan.

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh beban pembelian dan beban yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan instalasi adalah *Perpetual Inventory Method*, sedangkan persediaan bahan operasi menggunakan *Physical Inventory Method*.

Barang/bahan yang dibeli untuk keperluan investasi termasuk pemeliharaan instalasi dikelompokkan kedalam bahan instalasi. Pembebanan pemakaian bahan instalasi dan bahan kimia ke dalam pos beban dicatat dengan metode *First in First Out (FIFO)*.

Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut: memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, mutu atau meningkatkan standar kerja.

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

2.c. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya hukum, dan broker, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Sedangkan penyusutannya dilakukan berdasarkan Undang-undang Perpajakan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994) yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1994 (telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009). Pada setiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai aset. Aset tetap yang mengalami penurunan diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut.

Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam pos beban penurunan nilai aset.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%
II. Bangunan		
Permanen	20 Tahun	5%
Tidak Permanen	10 Tahun	10%

2.f. Pengeluaran Barang Modal/Aset Tetap

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan jumlah diatas Rp 200.000,00 dan mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dimasukkan sebagai pengeluaran untuk modal /aset tetap (dikapitalisasi).



Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

2.g. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat diakui hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tsb.
2. Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan handal.

Aset dapat diidentifikasi sebagai aset tidak berwujud jika:

1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui satu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama, atau;
2. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Aset tidak berwujud diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya, umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaatnya termasuk periode yang diperbarui hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak tersebut yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tanpa biaya yang signifikan. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 4 tahun.

2.h. Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan akumulasi pengeluaran dalam rangka pembangunan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Pada saat pekerjaan selesai, jumlah yang terakumulasi dalam perkiraan ini dipindahkan ke perkiraan aset tetap masing-masing.

2.i Bunga Pinjaman Dalam Masa Konstruksi

Beban bunga atas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai pekerjaan konstruksi dibukukan sebagai penambahan biaya konstruksi selama masa pembangunan sampai aset tersebut selesai dan beroperasi. Setelah konstruksi selesai, bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya tahun berjalan dalam biaya operasional kelompok biaya keuangan.

2.j. Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo

Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun mendatang setelah tanggal neraca disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

2.k. Aset Lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap, aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud, disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

2.1. Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun pegawai Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diterapkan berdasarkan Keputusan Pendiri DAPENMA PAMSI No. 842/Kep.60-Perumda/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 174/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007. Jumlah iuran normal dan iuran tambahan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, untuk perhitungan 31 Desember 2018 dengan Laporan Aktuaris Nomor No. S 07/DP.06/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 oleh kantor aktuaris PT. Bina Putera Jaga Hikmah yang diikutsertakan sebanyak 457 orang.

Di samping itu Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melaksanakan program Jaminan Hari Tua dengan perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwasraya Nomor 01/Perumda/PKS/1982 tanggal 1 Oktober 1982. Jumlah pegawai yang diikutsertakan yang preminya masih dibayar per 31 Desember 2018 sebanyak 3 orang.

Imbalan Pasca Kerja pegawai lainnya mendapat uang penghargaan (katineung) sesuai Surat Keputusan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 1992. Seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada perusahaan selama periode pelaporan diakui dan dicatat sebagai biaya.

Imbalan Pasca Kerja yang ditetapkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dikategorikan menjadi : Program imbalan pasti, dibedakan kepada Direksi dan seluruh karyawan, adalah program imbalan pasca kerja dimana Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja atau mantan pekerja, dan risiko aktuarial serta risiko investasi secara substantif berada pada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan kerugian aktuarial diakui selama periode berjalan laporan laba rugi.

2.m. Pencatatan Utang/Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber dana yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Kewajiban bunga atas kewajiban jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan kewajiban bunga masa tenggang.

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi perubahan dan ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.

2.n. Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

Kewajiban diestimasi diakui didalam neraca sebagai kewajiban dan sebagai beban di dalam laporan laba rugi, apabila kemungkinan terjadi perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara handal. Termasuk di dalam liabilitas diestimasi adalah pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, uang kompensasi dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan Direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Kewajiban kontijensi merupakan liabilitas potensial yang belum pasti atau liabilitas kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut : - Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyesuaian. - jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan handal.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

2.o. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan penjualan air diakui, dicatat, dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan diwajibkan membayar liabilitasnya secara tunai, maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya.
- Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat memenuhi liabilitasnya dengan cara mengangsur, maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dan piutang dilakukan penyesuaian hanya pendapatan piutang dan pendapatan pada tahun berjalan saja.
- Pendapatan atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima (*Cash Basis*).
- Pengakuan pendapatan jasa giro diakui secara *Accrual Basis*.

2.p. Pengakuan Beban

Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi.

2.q. Beban yang Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang mempunyai manfaat untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

2.r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan perubahan kebijakan akuntansi dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) kecuali yang berhubungan dengan Perda Nomor 17 tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor pasal 23 ayat (1).

2.s. Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Laporan keuangan ini disusun dengan anggapan bahwa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (*going concern*). Tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk melanjutkan usaha.

2.t. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas terdiri dari:

	2019	2018
Bank	61.319.617.559,80	65.020.186.366,44
Kas	50.000.000,00	194.883.892,30
Jumlah Kas & Setara Kas	61.369.617.559,80	65.215.070.258,74
3.a. Kas terdiri dari:		
Kas	-	184.883.892,00
Kas Kecil	50.000.000,00	10.000.000,30
Jumlah Kas	50.000.000,00	194.883.892,30
3.b. Bank :		
- Rekening Giro BNI Bisnis	-	30.391.775.238,00
- PT BTN (Persero), Cab Bogor	9.251.324.646,23	3.981.820.160,67
- Rekening Giro Mega Syariah	2.064.942.203,06	4.796.849.656,63
- PT BPD Jabar dan Banten Cabang Bogor	17.642.086.126,00	6.741.548.428,00
- PT Bank Mandiri, Tbk	4.168.610.006,49	4.279.870.027,66
- Bank Bukopin	1.105.958.573,50	155.520.800,70
- PT Bank BRI	1.182.110.177,00	875.961.622,00
- PT Bank BNI (Persero)	2.969.710.167,00	1.909.630.727,00
- BPD Syariah	3.866.119.826,60	3.866.179.826,60
- Bank Pasar	1.032.286.545,00	807.544.385,00
- Rekening Giro BNI 46/PB	1.432.031.573,00	1.328.050.691,00
- PT Bank NISP	3.290.974.861,00	2.133.592.532,00
- PT Lippo Bank Cabang Bogor	2.030.188.651,33	448.823.372,48
- PT Bank Panin	430.586.324,34	129.369.469,73
- PT Bank BTPN	40.256.359,00	40.263.163,00
- Bank Syariah Mandiri	5.682.639.139,16	1.635.409.479,97
- BJB Syariah	3.127.528.986,00	1.497.976.786,00
- Mega Syariah 2	2.002.263.395,09	-
Jumlah Bank	61.319.617.559,80	65.020.186.366,44
Jumlah Kas dan Bank	61.369.617.559,80	65.215.070.258,74

Saldo Kas Besar, Kas Kecil, Kas di Tangan Per 31 Desember 2019 telah sesuai dengan hasil Opname Kas (Berita Acara Pemeriksaan Kas) yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Bank merupakan saldo giro Bank setelah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran masing-masing Bank.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

4. DEPOSITO

Saldo deposito terdiri dari :

	2019	2018
Deposito BJB	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Deposito Bank Pasar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Deposito Mandiri Syariah	25.000.000.000,00	-
Jumlah Deposito	53.000.000.000,00	28.000.000.000,00

BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat 002397, 002398 dan 002399 dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1 Milyar dan berjangka 1 (satu) tahun (07 Juni 2018 - 07 Juni 2019); 002398 berjangka 1 (satu) tahun (06 Juni 2018 - 06 Juni 2019); 002397 berjangka 1 (satu) tahun (07 Desember 2017 - otomatis) dengan tingkat suku bunga 8% per tahun. Deposito yang telah jatuh tempo otomatis diperpanjang kembali untuk waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

BJB Cabang Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat A 651768 jangka waktu 1 (satu) bulan (22 Desember 2018 - 22 Januari 2019) dengan tingkat suku bunga 7,75% per tahun dengan nominal Rp 25.000.000.000,- Deposito yang telah jatuh tempo, otomatis diperpanjang kembali untuk waktu yang sama dengan bunga yang berlaku.

Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat AA 0133967 jangka waktu 3 (tiga) bulan (8 Oktober 2019 - 8 Januari 2020) dengan tingkat suku bunga 7,5% / tahun, dengan nominal Rp 25.000.000.000,- Deposito yang telah jatuh tempo, otomatis diperpanjang kembali untuk waktu yang sama dengan bunga yang berlaku.

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha terdiri dari :

	2019	2018
Piutang Usaha	36.143.084.463,00	32.041.090.633,70
Piutang Ragu-ragu	2.785.983.706,00	2.217.774.226,00
Penyisihan Piutang	(3.979.499.656,00)	(2.613.527.754,00)
Jumlah Piutang Usaha	34.949.568.513,00	31.645.337.105,70

5.a. Piutang Usaha

1. Piutang Langganan Air

Umum	31.530.378.884,00	29.123.911.400,00
ABRI	2.845.562.550,00	1.873.505.950,00
Instansi	1.470.386.350,00	916.985.665,70
Sub Jumlah	35.846.327.784,00	31.914.403.015,70

2. Piutang Non Air

Piutang Retikulasi/PNPB	227.703.518,00	8.052.200,00
Piutang Non Air Lainnya	58.640.449,00	76.622.240,00
Piutang Pemasangan Baru	10.412.712,00	42.013.178,00
Sub Jumlah	296.756.679,00	126.687.618,00

Jumlah Piutang Usaha

36.143.084.463,00	32.041.090.633,70
--------------------------	--------------------------

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

5. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

5.b. Piutang Ragu-ragu

Piutang ragu-ragu yaitu piutang air dan non air yang benumur lebih dari setahun, terdiri dari :

	2019	2018
1. Piutang Langganan Air Umum	2.492.764.886,00	1.896.746.311,00
Sub Jumlah	2.492.764.886,00	1.896.746.311,00

5.b. Piutang Ragu-ragu (Lanjutan)

	2019	2018
2. Piutang Non Air		
Piutang Non Air Lainnya	61.545.000,00	80.087.295,00
Piutang Pemasangan Baru	231.673.820,00	240.940.620,00
Sub Jumlah	293.218.820,00	321.027.915,00

Jumlah Piutang Ragu-ragu	2.785.983.706,00	2.217.774.226,00
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah Piutang	38.929.068.169,00	34.258.864.859,70
-----------------------	--------------------------	--------------------------

5.c. Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Air	(3.979.499.656,00)	(2.613.527.754,00)
- Penyisihan Piutang Non Air	-	-

Jumlah	(3.979.499.656,00)	(2.613.527.754,00)
---------------	---------------------------	---------------------------

Piutang Usaha Bersih	34.949.568.513,00	31.645.337.105,70
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah melakukan opname atas saldo piutang rekening air dan rekening non air. Pelaksanaan opname atas saldo piutang tersebut dimaksudkan untuk menentukan besarnya penyisihan piutang yang berdasarkan saldo umur piutang usaha sesuai hasil opname yang dilakukan oleh tim opname. Hal ini sesuai dengan penjelasan pokok Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perumda.

Dalam tahun 2019 telah dilakukan penghapusan Piutang Rekening Air dan Non Air yang benumur diatas 2 tahun berdasarkan Surat Dinit Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 900/Kep.52-Perumda/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yaitu Piutang Rekening Air sebesar Rp.904.483.875,00 dan Piutang Rekening Non Air sebesar Rp. 100.030.295,00, jumlah Rp. 1.004.514.170,00. Dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, berdasarkan Surat Nomor 900/28-DP.Perumda/2019 perihal Penghapusan Piutang tanggal 10 Oktober 2019

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain merupakan sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca, terdiri dari:

	2019	2018
Uang muka dinas	385.608.432,00	283.878.476,00
Rupa-rupa piutang lainnya	120.646.176,00	120.646.176,00
Jamiman pekerjaan	60.000.000,00	60.000.000,00
Uang muka operasional PIU UWSSP	37.270.651,00	37.270.651,00
Jumlah Piutang Lain-Lain	603.525.259,00	501.795.303,00

Dari jumlah piutang lain-lain tersebut diatas baru dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 594.525.259,- yaitu pada bulan Januari & Februari 2020 dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

7. PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Bunga Deposito Yang Akan diterima	134.351.069,89	50.778.320,00
Jumlah Pendapatan Yang Akan Diterima	134.351.069,89	50.778.320,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan bunga deposito yang akan diterima dari Bank BJB Cabang Kota Bogor.

8. PERSEDIAAN

Saldo persediaan bahan operasi terdiri dari:

	2019	2018
Bahan Operasi		
- Meter Bekas	976.657.201,61	478.410.033,10
- Suku Cadang	731.205.540,00	778.713.055,00
- Bahan Kimia	694.401.670,00	319.127.970,00
- Alat Tulis Kantor	580.694.872,00	540.036.940,00
- Rupa-rupa Bahan Operasi	62.768.205,00	64.072.719,00
- Bahan Pembantu	45.706.348,00	57.001.248,00
- Bahan Teknik Pipa/Pipa Persil	10.234.660,00	10.320.760,00
- Bahan Bakar dan Pelumas	948.000,00	1.644.000,00
Jumlah Bahan Operasi	3.102.616.496,61	2.249.326.725,10
Bahan Instalasi		
- Rupa-rupa Bahan Instalasi	11.356.425.413,00	9.893.456.661,00
- Meter Air	3.761.280.276,00	2.406.184.736,00
- Pipa	3.010.459.647,00	3.119.664.217,00
Nilai Perolehan	18.128.165.336,00	15.419.305.614,00
Cadangan Penurunan Nilai Bahan Instalasi	-	-
Nilai Buku	18.128.165.336,00	15.419.305.614,00
Jumlah Persediaan	21.230.781.832,61	17.668.632.339,10

Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 tersebut telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2019.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo biaya dibayar di muka terdiri dari:

	2019	2018
- Uang muka lain-lain	780.784.700,00	3.383.582.573
- Asuransi Kendaraan	125.514.444,00	82.789.506,00
- Asuransi Bangunan	33.560.040,00	-
- Asuransi Pegawai	33.013.737,00	79.232.958,00
- Iuran Majalah Komputer	-	300.000,00
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	972.872.921,00	3.545.905.037,00

Uang Muka Lain-Lain sebesar Rp. 780.784.700,00 terdiri dari : Rp. 299.393.700,- Uang Muka pengadaan barang asesories pekerjaan ganti meter air & PLM. Rp. 481.391.000,- Uang Muka pembuatan gardu listrik dan instalasi listrik.



Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

10. ASET TETAP

Aset Tetap terdiri dari:

	Mutasi 2019			31-Des-19
	31-Des-18	Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Tanah dan Hak atas Tanah	41.116.336.531,00	-	-	41.116.336.531,00
Instalasi Sumber Air	16.540.377.354,00	569.916.000,00	-	17.110.293.354,00
Instalasi Perpompaan	12.292.574.557,00	3.851.264.317,00	-	16.143.838.874,00
Instalasi Pengolahan Air	130.220.847.750,00	3.816.847.300,01	-	134.037.695.050,01
Instalasi Transmisi dan Distribusi	447.157.563.312,73	43.722.412.486,00	819.618.721,00	490.060.357.077,73
Bangunan dan Gedung	17.050.160.535,00	587.447.500,08	-	17.637.608.035,08
Peralatan dan Perlengkapan	9.559.621.030,00	1.088.436.061,06	-	10.648.057.091,06
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	12.100.050.131,00	2.865.921.000,00	735.918.417	14.230.052.714,08
Perabot Inventaris Kantor	24.974.792.758,00	7.003.417.370,00	-	31.978.210.128,00
Jumlah	711.012.323.958,73	63.505.662.034,15	1.555.537.137,92	772.962.448.854,96
	31-Des-18	Penambahan	Pengurangan	31-Des-19
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber Air	(7.327.805.665,39)	(647.738.390,94)	-	(7.975.544.056,33)
Instalasi Perpompaan	(6.335.656.058,73)	(1.001.011.224,67)	-	(7.336.667.283,40)
Instalasi Pengolahan Air	(59.200.301.350,07)	(6.990.994.858,17)	-	(66.191.296.208,24)
Instalasi Transmisi dan Distribusi	(209.381.563.811,20)	(32.293.261.669,38)	(436.162.668,87)	(241.238.662.811,71)
Bangunan dan Gedung	(6.386.106.877,83)	(929.638.268,43)	-	(7.315.745.146,26)
Peralatan dan Perlengkapan	(7.408.037.435,28)	(924.821.273,62)	-	(8.332.858.708,90)
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	(6.956.177.227,37)	(1.629.444.062,06)	(735.918.416)	(7.849.702.873,29)
Perabot Inventaris Kantor	(18.740.390.765,80)	(2.597.859.225,05)	-	(21.338.249.990,85)
Amortisasi Hak Tanah	(128.996.479,24)	(8.571.939,54)	-	(137.568.418,78)
Jumlah	(321.865.035.670,91)	(47.023.340.911,86)	(1.172.081.085,01)	(367.716.295.497,76)
Nilai Buku	389.147.288.287,82			405.246.153.356,72

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

10. ASET TETAP (LANJUTAN)

	Mutasi 2018			
	31-Des-17	Penambahan	Pengurangan	31-Des-18
Nilai Perolehan				
Tanah dan Hak atas Tanah	31.748.589.031,00	9.367.747.500,00	-	41.116.336.531,00
Instalasi Sumber Air	11.345.470.154,00	5.194.907.200,00	-	16.540.377.354,00
Instalasi Perpompaaan	7.585.100.357,00	4.707.474.200,00	-	12.292.574.557,00
Instalasi Pengolahan Air	122.093.675.450,00	8.127.172.300,00	-	130.220.847.750,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	394.741.027.962,73	54.131.360.965,00	1.714.825.615,00	447.157.563.312,73
Bangunan dan Gedung	15.599.608.535,00	1.450.552.000,00	-	17.050.160.535,00
Peralatan dan Perlengkapan	8.517.754.530,00	1.041.866.500,00	-	9.559.621.030,00
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	11.606.375.131,00	493.675.000,00	-	12.100.050.131,00
Perabot Inventaris Kantor	21.931.027.658,00	3.043.765.100,00	-	24.974.792.758,00
Jumlah	625.168.628.808,73	87.558.520.765,00	1.714.825.615,00	711.012.323.958,73
	31-Des-17	Penambahan	Pengurangan	31-Des-18
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber Air	(6.864.930.438,00)	(462.875.227,39)	-	(7.327.805.665,39)
Instalasi Perpompaaan	(5.950.372.610,00)	(385.283.448,73)	-	(6.335.656.058,73)
Instalasi Pengolahan Air	(52.803.927.038,00)	(6.396.374.312,07)	-	(59.200.301.350,07)
Instalasi Transmisi dan Distribusi	(179.808.224.034,00)	(30.922.963.870,60)	(1.349.624.093,40)	(209.381.563.811,20)
Bangunan dan Gedung	(5.526.363.208,00)	(859.743.669,83)	-	(6.386.106.877,83)
Peralatan dan Perlengkapan	(6.632.827.701,00)	(775.209.734,28)	-	(7.408.037.435,28)
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	(5.740.026.832,00)	(1.216.150.395,37)	-	(6.956.177.227,37)
Perabot Inventaris Kantor	(16.816.019.431,00)	(1.924.371.334,80)	-	(18.740.390.765,80)
Amortisasi Hak Tanah	(120.424.541,20)	(8.571.939,24)	-	(128.996.480,44)
Jumlah	(280.263.115.833,20)	(42.951.543.932,31)	(1.349.624.093,40)	(321.865.035.672,12)
Nilai Buku	344.905.512.975,53			389.147.288.286,62

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang terdapat dalam beban langsung dan tidak langsung adalah sebesar Rp. 47,023,340,912 tahun 2019 dan Rp. 42,951,543,932 tahun 2018.

Manajemen tidak melakukan atau membuat cadangan penurunan nilai aset tetap.

11. ASET TIDAK BERWUJUD

Saldo aset tidak berwujud terdiri dari:

	2019	2018
Nilai perolehan aset tidak berwujud	658.885.000,00	658.885.000,00
Akumulasi amortisasi	(343.169.270,76)	(178.448.020,80)
Jumlah Aset Tidak Berwujud - Bersih	315.715.729,24	480.436.979,20

Saldo aset tidak berwujud terdiri dari pengadaan aplikasi management informasi system untuk keperluan dinas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 478.885.000 dan CD aplikasi pengadaan terintegrasi procurement system (i-Proc) sebesar Rp 180.000.000

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

12. ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

	2019	2018
- Ellyza SH - pembayaran pajak peralihan hak	2.225.000.000	-
- Pemasangan saluran transdist untuk ganti meter pelanggan	275.491.441	23.694.045
- Pemasangan saluran transdist untuk pelanggan	107.468.034	92.359.300,00
- CV. Muar Consult - Jasa konsultasi DED Reservoir	-	181.489.000,00
- PT. Jasuka - pemasangan pipa distribusi SPAM Katulampa	-	1.996.437.100,00
- CV. BALLORA MJ - pembongkaran rumah di Jl. Merdeka	-	179.668.000,00
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian	2.607.959.475,00	2.473.647.445,00

13. UANG JAMINAN

Uang jaminan terdiri dari:

	2019	2018
- Uang Jaminan Listrik	313.131.649,00	313.131.649,00
- Uang Jaminan Telepon	187.800,00	187.800,00
- Uang Jaminan Pos dan Giro	150.000,00	150.000,00
Jumlah Uang Jaminan	313.469.449,00	313.469.449,00

14. SEWA DIBAYAR DIMUKA

Sewa dibayar dimuka terdiri dari:

	2019	2018
Sewa tanah milik PT KAI	288.535.500,50	568.576.248,50
Sewa tanah milik H. Moh Natsir Yus	5.476.267,00	6.815.551,00
Jumlah Sewa Dibayar Dimuka	294.011.767,50	575.391.799,50

Jumlah tersebut adalah sewa dibayar di muka atas:

- a. Sewa tanah H Moh. Natsir Yus. di Jl. Tegallega No. 11 Kelurahan Tegal Gundil, 36 m2 selama 15 tahun terhitung Maret 2010, untuk jalur pipa distribusi dan retikulasi, dengan nilai sewa sebesar Rp. 18.750.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 695/ST.19-PDAM/2010 tanggal 4 Maret 2010.
- b. Persewaan tanah PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) di KM 6+810 s.d. 9+570 antara Batutulis-Maseng lintas Bogor-Yogyakarta, KM 52+265, KM 54+400 antara Cilebut Bogor, lintas Jakarta-Bogor KM 2+8/9 antara Bogor-Batutulis, lintas Bogor-Yogyakarta selama 5 Tahun terhitung sejak Mei 2016 dengan nilai sewa sebesar Rp 669.460.316,00 sesuai dengan perjanjian nomor KL.701/VI/48/KA-2016.

15. PROPERTI INVESTASI

Jumlah saldo properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
- Nilai perolehan	139.747.000,00	139.747.000,00
- Akumulasi penyusutan	(42.506.379,37)	(35.519.029,33)
Nilai Buku	97.240.620,63	104.227.970,67



Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

16. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

	2019	2018
- CV. Pentaco Daya Prima	1.774.626.909,00	
- PT. Tis Inovasi Sakti	477.815.800,00	
- CV. Rizky Mandiri	476.639.573,00	
- CV. Fajar Tyapra Bumi Tama	388.927.000,00	
- PT. Barindo Anggun Industri	345.015.000,00	
- CV. Budi Karya Sejahtera	191.205.000,00	
- PT. Permata Indah Utama	190.796.000,00	
- CV. Vita Rizky	171.093.000,00	
- PT. Khlorin Inti	88.178.750,00	
- CV. Kanaka Adi Jaya	78.988.800,00	
- PT. Mulya Agung	73.749.500,00	
- CV. Pentaco Daya Prima	68.130.000,00	
- PT. Dharma Nusa Putra	-	553.426.164,00
- CV. Wilo Pumps Indonesia	-	440.750.000,00
- PT. Khlorin Inti	-	220.767.050,00
- CV. Vitaloka Junior	-	177.100.000,00
- Universitas Indonesia	-	166.502.000,00
- CV. Karunia Abadi	-	113.774.000,00
- CV. Ratu Neni Jaya	-	109.500.000,00
- CV. Rizky Mandiri	-	86.681.000,00
- CV. NILAS JAYA	-	62.799.000,00
Jumlah Utang Usaha	4.325.165.332,00	1.931.299.214,00

17. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari:

	2019	2018
- Bunga Bank (IBRD Word Bank)	857.451.779,00	-
- Hutang Lain-lain/DHHD terbuka	4.187.715,00	17.446.615,00
- Bunga Bank (ADB)	-	918.698.335,00
Jumlah Utang Lain-Lain	861.639.494,00	936.144.950,00

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari:

	2019	2018
- Biaya YMH Dibayar lainnya	22.318.603.293,00	11.162.142.941,00
- Hutang Masa Pemeliharaan	3.140.380.450,00	2.089.468.278,00
- Biaya YMH Dibayar/DHHD Terbuka	1.666.422.250,00	2.134.111.240,00
- Premi Asuransi Pensiun	25.501.907,00	26.122.506,00
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	27.150.907.900,00	15.411.844.965,00

Biaya yang masih dibayar lainnya merupakan tunjangan perusahaan, tagihan listrik dan telepon, tagihan pihak ke-III atas masa pemeliharaan dan rupa-rupa lainnya.



Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

19. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka terdiri dari:

	2019	2018
- Uang muka lain-lain	635.615.608,38	800.129.355,77
- Uang muka sewa tanah PT.Bali Telkom	295.833.333,29	295.833.333,29
- Uang muka sewa ATM BNI	122.824.012,00	122.824.012,00
- Uang muka sewa Kantor Kas BJB	93.963.919,00	-
- Uang muka sewa ATM Mandiri	83.690.250,00	83.690.250,00
- Uang muka sewa ATM BRI	48.000.000,00	-
- Uang muka sewa tanah untuk jalur pipa	8.612.600,00	-
- Uang muka Hankam	2.633.460,00	5.754.317,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	1.291.173.182,67	1.308.231.268,06

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruang ATM & sewa tanah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Bank BNI No.: 695/SP.17.1-PDAM/2017 tgl. 10 Juli 2017; Bank Mandiri No.: 695/SP.71-PDAM/2019 bulan September 2019; Bank BRI No.: 695/SP.01.2-Perumda/2019, tgl. 8 Januari 2019; Bank BJB No.: 695/SP.32-PDAM/2017 tgl. 21 November 2017; PT. Bali Telekom No.: 695/SP.61/PDAM/2015 tgl. 03 Desember 2015, Kantor Kas BJB No. 9, tgl. 6 Desember 2018, Hengky Setiawan No. 690/SP.20-PDAM/2018, tgl. 19 Maret 2018.

20. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak terdiri dari :

	2019	2018
- PPh Pasal 21	2.973.354.030,00	1.877.754.961,00
- PPh Penghasilan	2.552.808.500,00	2.578.832.129,00
- PPN Keluaran	158.569.502,00	139.005.237,00
- PPh Pasal 23	76.646.669,00	32.537.340,00
- PPh Pasal 4 ayat 2 / Sewa	11.300.394,00	30.729.443,00
Jumlah Utang Pajak	5.772.679.095,00	4.658.859.110,00

Saldo Hutang PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN per 31 Desember 2019 telah disetor pada bulan Januari 2020 sedangkan PPh Badan masih terhutang.

Laba Sebelum Pajak	58.361.513.920,92	49.248.169.073,67
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Beban yang tidak diperkenankan (Koreksi Positif)

Beda tetap

- Biaya Olah Raga, Kesenian dan lain-lain	4.229.040.521,00	2.292.149.199,00
- PPh Pasal 21	2.973.354.030,00	1.877.754.961,00
- Biaya Representasi Direksi	1.998.000.000,00	1.998.650.000,00
- Sumbangan	1.176.344.275,00	893.389.130,00
- Biaya Telekomunikasi (pulsa)	82.972.128,00	82.972.128,00
- PPh Pasal 4 (2)	21.019.613,00	98.911.485,00
- Penyusutan Mess	5.617.765,19	5.617.765,19

Beda Temporer

- Penyisihan Piutang Usaha	2.370.486.072,00	1.151.281.069,00
----------------------------	------------------	------------------

Jumlah Koreksi Positif	12.856.834.404,19	8.400.725.737,19
-------------------------------	--------------------------	-------------------------

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

20. UTANG PAJAK (LANJUTAN)

	2019	2018
Koreksi Negatif		
- Bunga Deposito	3.721.747.543,00	3.158.097.698,95
- Penghapusan Piutang Usaha	1.004.514.170,00	659.823.100,00
Jumlah Koreksi Negatif	<u>4.726.261.713,00</u>	<u>3.817.920.798,95</u>
Laba Kena Pajak	<u>66.492.086.612,11</u>	<u>53.830.974.011,91</u>
Pembulatan Penghasilan / Laba Kena Pajak	<u>66.492.086.000,00</u>	<u>53.830.974.000,00</u>
PPH Terhutang		
- 25% x Rp 53.830.974.000	-	13.457.743.500,00
- 25% x Rp 66.492.086.000	16.623.021.500,00	-
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	<u>16.623.021.500,00</u>	<u>13.457.743.500,00</u>
Kredit Pajak yang telah disetor	(14.070.213.000,00)	(10.878.911.371,00)
Kurang (Lebih) Setor PPh Badan	<u>2.552.808.500,00</u>	<u>2.578.832.129,00</u>

21. BAGIAN UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo terdiri dari:

	2019	2018
- IBRD Word Bank	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Jumlah Bagian Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	<u>5.484.766.176,00</u>	<u>5.484.766.176,00</u>

Jumlah tersebut adalah bagian hutang kepada World Bank yang akan jatuh tempo tahun 2019.

22. TITIPAN RETRIBUSI

Titipan retribusi terdiri dari:

	2019	2018
Titipan retribusi	703.370.500,00	680.985.000,00
Jumlah Titipan Retribusi	<u>703.370.500,00</u>	<u>680.985.000,00</u>

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari:

	2019	2018
- Sambungan Baru Yang Masih Harus Dipasang	6.792.615.665,00	520.380.438,00
- Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	2.631.833.846,00	9.036.681.588,00
- Utang jangka pendek pasang baru	720.614.280,00	866.529.197,00
- Titipan Rekening Air	125.311.232,00	155.934.132,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	<u>10.270.375.023,00</u>	<u>10.579.525.355,00</u>

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA (LANJUTAN)

Saldo sambungan baru yang masih harus dipasang adalah saldo pemasangan baru yang sudah dibayar pelanggan tetapi belum dilakukan pemasangan.
Saldo titipan rekening air adalah saldo double bayar rekening pelanggan yang belum dikembalikan.

24. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang terdiri dari :

	2019	2018
- IBRD World Bank	71.301.960.302,00	76.786.726.478,00
Jumlah	71.301.960.302,00	76.786.726.478,00

IBRD SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009

Saldo Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2019 merupakan penarikan dana yang sudah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019. Utang tersebut karena adanya perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tentang Pelaksanaan Penerusan Pinjaman Pembiayaan UWSSP Kota Bogor dengan ketentuan:

- Loan Agreement (NPPLN) Ln 7730-ID/1 September 2009
- Sub Loan (NPPP) SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009
- Pagu Pinjaman Rp. 85.204.000.000
- Bunga NPPLN LIBOR + Variable Spread+5,02 % per tahun dihitung sejak penarikan pinjaman.
- Bunga Tunggal 0,5 % diatas tingkat suku bunga.
- Jangka Waktu 24,5 tahun termasuk masa tenggang 9 tahun.
- Jumlah Utang Pokok Pinjaman Penerusan, dibayar dalam 31 kali angsuran setiap 15 April dan 15 Oktober.
- Angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2033.

25. UANG JAMINAN PELANGGAN

Uang jaminan pelanggan terdiri dari:

	2019	2018
Uang Jaminan Pelanggan	3.003.617.925,00	3.027.742.575,00
Jumlah Uang Jaminan Pelanggan	3.003.617.925,00	3.027.742.575,00

Jumlah tersebut merupakan Uang Jaminan Pelanggan Air (UJPA) yang telah disetor oleh para pelanggan sampai dengan 31 Desember 2000, mulai tahun 2003 para pelanggan tidak dikenakan UJPA sesuai dengan Kep.Men OTDA No.8 Tahun 2000. Pengurangan terjadi karena dikompensasikan dengan tunggakan para pelanggan.

26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja terdiri dari:

	2019	2018
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	22.844.116.018,00	30.709.119.762,00
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	22.844.116.018,00	30.709.119.762,00

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh Dapenna Pamsi, dengan asumsi utama sebagai berikut:

Tabel Mortalita	: Annuity 1949 Modified
Tingkat Bunga	: 8,00%
Tingkat Kenaikan PhDP	: 4,50%
Usia Pensiun normal	: 56
Maksimum Manfaat Pensiun Peserta	: 80% x PhDP
Maksimum Manfaat Pensiun Direksi	: 75% x PhDP

Rekonsiliasi liabilitas imbalan kerja yang diakui di neraca:

	2019	2018
Saldo Awal Liabilitas Imbalan Kerja	39.745.801.350,00	15.248.238.579,00
Iuran tahun berjalan	(10.148.638.257,00)	(12.427.652.598,00)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(7.865.003.744,00)	33.217.613.996,00
Beban imbalan pasca kerja tahun berjalan	3.743.790.515,00	3.707.601.373,00
Saldo Akhir Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	25.475.949.864,00	39.745.801.350,00

Liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek akan jatuh tempo dalam tahun 2019 sebagai iuran tambahan:

	2019	2018
Liabilitas imbalan pasca kerja lancar	2.631.833.846,00	9.036.681.588
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	2.631.833.846,00	9.036.681.588,00
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	22.844.116.018,00	30.709.119.762,00

27. MODAL

Saldo modal terdiri dari:

	2019	2018
a) Modal Pemerintah Kota Bogor		
- Modal Pemerintah Pusat		
Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tegal Gundil Kota Bogor, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pengelolaan sementara Nomor : 02/BA/ca.09/1998 tanggal 25 Mei 1998.	644.946.000,00	644.946.000,00
Berasal dari nilai DIP : nilai tanah, bangunan, mesin dan perlengkapan, pipa induk, rupa-rupa pabrik air, persediaan, dll. Tahun 1987.	1.036.740.801,44	1.036.740.801,44
Jumlah sampai dengan tahun 2009, telah tercantum dalam Perda No.16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011.	1.681.686.801,44	1.681.686.801,44
Modal awal berupa kekayaan dikurangi hutang atau kekayaan bersih.	518.176.260,19	518.176.260,19
Penyertaan Pemda Kota Bogor 1992 s/d 2009, setelah dikompensasi dengan hutang Rp 471.186.802,67.	10.778.813.197,33	10.778.813.197,33

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

27. MODAL (LANJUTAN)

	2019	2018
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2003 s/d tahun 2008.	24.143.699.078,00	24.143.699.078,00
Dana Pendamping tahun 2007 dan 2008.	2.848.275.259,00	2.848.275.259,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2010.	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Urban Water Supply & Sanitation Project (UWSSP), tahun 2010.	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2009.	10.862.102.432,00	10.862.102.432,00
Tambahan Penyertaan Modal tahun 2010. (Dana Pendamping)	617.733.568,00	617.733.568,00
Jumlah sampai dengan tahun 2010, yang telah tercantum dalam Perda No. 16 tahun 2011 dan lampiran Perda No. 20 tahun 2011	57.588.799.794,52	57.588.799.794,52
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2010.	9.940.701.000,00	9.940.701.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2011.	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2011.	6.437.000.000,00	6.437.000.000,00
Jumlah	19.377.701.000,00	19.377.701.000,00
Saldo modal terdiri dari:		
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2011.	12.279.435.000,00	12.279.435.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2012.	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2012.	5.429.000.000,00	5.429.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2012.	15.122.405.000,00	15.122.405.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	4.088.235.294,00	4.088.235.294,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada pembebasan reservoir zona 4.	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada perluasan jaringan distribusi.	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada program kehilangan air.	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah	55.019.075.294,00	55.019.075.294,00

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

7. MODAL (LANJUTAN)

	2019	2018
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor tahun 2013	17.651.447.956,00	17.651.447.956,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program water hibah, tahun 2014.	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada perluasan jaringan distribusi	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada program kehilangan air	2.622.000.000,00	2.622.000.000,00
Pengembalian kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000,00)	(500.000.000,00)
Jumlah	31.073.447.956,00	31.073.447.956,00
Penyertaan modal pemda kota Bogor tahun 2015	10.921.110.161,17	10.921.110.161,17
Penyertaan modal pemda kota Bogor tahun 2016	52.898.242.000,00	52.898.242.000,00
Penyertaan modal pemda kota Bogor tahun 2017	10.934.000.000,00	10.934.000.000,00
Penyertaan modal pemda kota Bogor tahun 2019	10.000.000.000,00	-
Jumlah Modal Pemerintah Kota Bogor	249.494.063.007,13	239.494.063.007,13

Saldo modal terdiri dari:

b) Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pemasangan Pipa HDPE distribusi dan retikulasi bantuan APBN 2009-2010 di lima kecamatan Kota Bogor, s/d Maret 2011 belum ada serah terima.	12.885.773.000,00	12.885.773.000,00
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lengkap Palasari, sesuai Berita Acara Serah Terima sementara Pengelolaan Sementara Nomor 099/BASTP/PSPAM-IKK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.	3.642.752.200,00	3.642.752.200,00
Jumlah Tambahan Penyertaan Modal sementara Pemerintah Pusat Tahun 2010	16.528.525.200,00	16.528.525.200,00
Bangunan prasedimentasi dan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi diameter 100 mm di Ciherang Pondok kab Bogor, yang dibangun oleh SVNT pelaksana pengelolaan SDA Ciliwung-Cisadane Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan amandemen II Mutual Check akhir (MC-100) No.KU08.10/PPK-PAB/SNVTPVSDACC/XII/1403 tanggal 27 Des 2010 yang oleh Perumda telah dioperasikan sejak 31 Desember 2010.	16.234.369.000,00	16.234.369.000,00
Jumlah Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat tahun 2011.	16.234.369.000,00	16.234.369.000,00
Jumlah Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya	32.762.894.200,00	32.762.894.200,00

c) Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penerimaan sarana dan prasarana, seperti bangunan konstruksi, pabrik air, kendaraan dll. (Berita Acara Nomor 64/BA/Pemb./1991/1992 tgl 25 April 1992).	457.433.050,00	457.433.050,00
Dana pendamping Pemda Provinsi Jabar pada Proyek P3KT, tahun 1995, 1996, dan 1997.	3.921.657.251,87	3.921.657.251,87
Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Jabar, telah tercantum dalam Perda No. 16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011.	4.379.090.301,87	4.379.090.301,87

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

27. MODAL (LANJUTAN)

	2019	2018
d) Modal Pihak Ketiga		
Bantuan Colombo Plan, tahun 1977, \$2.900.500 dengan kurs Rp 520,00.	1.508.260.000,00	1.508.260.000,00
Bantuan dari Negeri Belanda, tahun 1989, berupa komputer, alat laboratorium, peralatan bengkel, kendaraan dan logam detektor.	450.828.691,00	450.828.691,00
Jumlah Modal Pihak Ketiga, telah tercantum dalam Perda No. 16 tahun 2011 dan Lampiran Perda No. 20 tahun 2011	<u>1.959.088.691,00</u>	<u>1.959.088.691,00</u>

JUMLAH MODAL

2019	2018
<u>288.595.136.200,00</u>	<u>278.595.136.200,00</u>

Mutasi modal adalah :

Saldo per 31 Desember 2008	35.808.026.322,83	35.808.026.322,83
Tambahan Penyertaan Modal 2009	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00
Pembagian Laba Tahun 2008	9.030.803.266,00	9.030.803.266,00
Saldo per 31 Desember 2009	<u>46.308.829.588,83</u>	<u>46.308.829.588,83</u>

Tambahan Penyertaan modal 2010	8.437.733.568,00	8.437.733.568,00
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.528.525.200,00	16.528.525.200,00

Pembagian Laba Tahun 2009	10.862.102.432,00	10.862.102.432,00
Saldo per 31 Desember 2010	<u>82.137.190.788,83</u>	<u>82.137.190.788,83</u>

Tambahan Penyertaan modal 2011	9.940.701.000,00	9.940.701.000,00
Tambahan Penyertaan (Dana Pendamping)	9.437.000.000,00	9.437.000.000,00
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.234.369.000,00	16.234.369.000,00

Saldo per 31 Desember 2011	<u>117.749.260.788,83</u>	<u>117.749.260.788,83</u>
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Tambahan Penyertaan modal 2012	12.279.435.000,00	12.279.435.000,00
Penyertaan Dana Pendamping Water Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Dana Pendamping Bank Dunia	5.429.000.000,00	5.429.000.000,00
Penyertaan Pembebasan lahan Intake	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2012	<u>147.457.695.788,83</u>	<u>147.457.695.788,83</u>

Tambahan Penyertaan modal 2013	15.122.405.000,00	15.122.405.000,00
Penyertaan Pembebasan Lahan Intake	4.088.235.294,00	4.088.235.294,00
Penyertaan Dana Pendamping Reservoir Zona 4	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Penyertaan Dana Pendamping Jaringan Distribusi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Penyertaan Program Kehilangan Air	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2013	<u>172.768.336.082,83</u>	<u>172.768.336.082,83</u>

Tambahan Penyertaan modal 2014	17.651.447.956,00	17.651.447.956,00
Tambahan Penyertaan Program water hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Tambahan Penyertaan perluasan jaringan	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00
Tambahan Penyertaan Program kehilangan air	2.622.000.000,00	2.622.000.000,00
Pengembalian kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000,00)	(500.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2014	<u>203.841.784.038,83</u>	<u>203.841.784.038,83</u>

Tambahan Penyertaan modal 2015	10.921.110.161,17	10.921.110.161,17
Saldo per 31 Desember 2015	<u>214.762.894.200,00</u>	<u>214.762.894.200,00</u>

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

27. MODAL (LANJUTAN)

Tambahan Penyertaan modal 2016
 Saldo per 31 Desember 2016

Tambahan Penyertaan modal 2017
 Saldo per 31 Desember 2018

Tambahan Penyertaan modal 2019
 Saldo per 31 Desember 2019

2019	2018
52.898.242.000,00	52.898.242.000,00
<u>267.661.136.200,00</u>	<u>267.661.136.200,00</u>
10.934.000.000	10.934.000.000
<u>278.595.136.200,00</u>	<u>278.595.136.200,00</u>
10.000.000.000	-
<u>288.595.136.200</u>	<u>278.595.136.200</u>

28 CADANGAN UMUM

Cadangan umum terdiri dari:

Cadangan Umum

Jumlah Cadangan Umum

2019	2018
27.248.237.756,30	25.458.716.477,00
<u>27.248.237.756,30</u>	<u>25.458.716.477,00</u>

Saldo Cadangan umum tersebut merupakan dana yang tersedia berasal dari pembagian laba bersih untuk cadangan umum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor pasal 23 ayat (1) menetapkan penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan.

29. SALDO LABA

Saldo laba per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

Saldo Laba

Jumlah Saldo Laba

2019	2018
28.805.137.808,20	48.362.457.189,80
<u>28.805.137.808,20</u>	<u>48.362.457.189,80</u>

30. PENJUALAN AIR

Penjualan air terdiri dari:

- Harga Air
- Abodemen
- Penjualan Air Lainnya

Jumlah Penjualan Air

2019	2018
247.505.431.821,00	201.462.899.050,00
27.842.864.450,00	26.967.653.550,00
198.507.000,00	155.579.000,00
<u>275.546.803.271,00</u>	<u>228.586.131.600,00</u>

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 No.47 serie E tanggal 27 Agustus 2018, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penyesuaian tarif air minum yang berlaku untuk rekening Oktober 2018 & ditagihkan bulan November 2018.

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

30. PENJUALAN AIR (LANJUTAN)

Penyesuaian tarif air minum tahun 2018 menjadi sebagai berikut :

No	Golongan Pelanggan	Pemakaian Air (Water Using)		
		1 s.d 10 m3	>10 s.d 20 m3	> 20 m3
		(Rp/m3)	(Rp/m3)	(Rp/m3)
1	Sosial Umum (S1)	800	1.000	1.100
2	Sosial Khusus (S2)	1.800	2.700	2.900
3	Rumah Tangga (R1)	2.000	3.000	3.100
4	Rumah Tangga (R2)	2.500	3.500	4.000
5	Rumah Tangga (R3)	3.000	4.000	4.600
6	Rumah Tangga (R4)	3.500	5.000	5.200
7	Rumah Tangga (R5)	4.500	5.700	6.000
8	Rumah Tangga (R6)	6.600	9.000	9.200
9	Rumah Tangga (R7)	8.000	10.500	11.000
10	Rumah Tangga (R8)	9.000	12.000	12.500
11	Instansi Pemerintah (IP)	11.000	12.500	13.500
12	Niaga (N1)	9000	12.000	14.000
13	Niaga (N2)	10.000	13.000	15.500
14	Niaga (N3)	11.000	17.000	20.000
15	Niaga (N4)	12.000	18.000	22.000
16	Industri (I1)	14.000	20.000	23.000
17	Industri (I2)	15.000	21.000	25.000

31. PENDAPATAN NON AIR

Pendapatan non air terdiri dari:

	2019	2018
- Pendapatan Denda	9.326.390.531,00	8.028.723.795,00
- Pendapatan Sambungan Baru	7.559.568.437,00	10.175.379.303,00
- Pendapatan Administrasi Retikulasi	1.067.088.045,00	405.286.290,00
- Pendapatan PB Bukaana Kembali	903.594.732,00	699.977.120,00
- Pendapatan Reparasi Ganti Meter	176.263.657,00	191.629.614,00
- Pendapatan non Air Lainnya	156.290.080,00	214.728.660,00
- Pendapatan Balik Nama	14.128.068,00	18.895.552,00
Jumlah Penjualan Non Air	19.203.323.550,00	19.734.620.334,00

32. BEBAN SUMBER AIR

Beban sumber air terdiri dari:

	2019	2018
- Beban Pegawai	9.698.757.916,98	6.999.424.368,45
- Beban Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sumber Air	2.761.054.548,00	1.751.516.355,00
- Beban Pajak Pemanfaatan Air	714.004.853,00	835.480.840,00
- Beban Penyusutan Sumber Air	655.927.330,15	469.418.616,59
- Beban Bahan Kimia	595.843.980,00	633.680.000,00
- Beban Listrik/PLN	551.881.642,00	596.149.590,00
- Beban Operasi Lainnya	185.812.980,00	82.014.350,00
Jumlah Beban Sumber Air	15.163.283.250,13	11.367.684.120,04

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

33. BEBAN PENGOLAHAN AIR

Beban pengolahan air terdiri dari:

	2019	2018
- Beban Pegawai	11.783.914.488,76	10.192.000.902,72
- Beban Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Pengolahan Air	9.063.770.292,00	3.673.599.198,00
- Pemakaian Bahan Kimia	8.881.361.349,00	7.617.754.152,00
- Beban Penyusutan Pengolahan Air	6.990.994.858,25	6.392.081.796,30
- Beban Listrik/PLN	6.144.909.257,00	3.295.686.357,00
- Beban Operasional lainnya	605.364.180,00	242.142.840,00
Jumlah Beban Pengolahan Air	43.470.314.425,01	31.413.265.246,02

34. BEBAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Beban transmisi dan distribusi terdiri dari:

	2019	2018
- Beban Penyusutan Bangunan dan Instalasi Transmisi & Distribusi	32.176.614.813,04	30.862.453.919,80
- Beban Pegawai	16.708.130.872,66	15.668.898.923,23
- Beban Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Transdist	4.208.116.538,00	5.071.403.495,00
- Beban Pemakaian Bahan/Perengkapan Pipa Persil	1.594.010.390,00	2.012.421.349,00
- Beban listrik/PLN	1.418.251.631,00	1.190.817.053,00
- Beban Operasi Lainnya	972.431.345,00	987.845.000,00
- Beban Buka-an Tutupan	258.274.620,00	253.891.519,00
Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	57.335.830.209,70	56.047.731.259,03

35. BEBAN PERPOMPAAN

Beban perpompaaan terdiri dari:

	2019	2018
Beban Perpompaaan	1.001.011.224,30	385.283.448,73
Beban Listrik	37.659.000,00	-
Jumlah Beban Perpompaaan	1.038.670.224,30	385.283.448,73

36. BEBAN PERENCANAAN TEKNIK

Beban perencanaan teknik terdiri dari:

	2019	2018
- Beban Pegawai	4.217.593.068,46	3.548.508.828,58
- Rupa-rupa Beban Perencanaan Teknik	24.278.980,00	64.262.450,00
Jumlah Perencanaan Teknik	4.241.872.048,46	3.612.771.278,58

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

37. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum terdiri dari:

	2019	2018
- Rupa-Rupa Beban Umum	33.819.060.036,30	26.612.055.875,00
- Beban Kantor, Listrik, Telepon, dan Air	18.457.391.428,00	14.446.701.361,00
- Beban Pegawai	16.642.741.057,63	14.133.778.245,54
- Beban Keuangan	6.516.799.588,00	6.304.683.375,35
- Beban Penyusutan dan Amortisasi Non Pabrik Air	6.246.484.079,94	4.945.722.871,75
- Beban Direksi dan Badan Pengawas	5.905.367.145,66	5.431.351.985,48
- Beban Pemeliharaan dan Bahan Bakar	4.623.528.417,00	4.971.149.777,00
- Beban Penyisihan Piutang	2.370.486.072,00	1.151.281.069,00
- Beban penyusutan properti investasi	6.987.350,04	6.987.350,04
Jumlah Administrasi dan Umum	94.588.845.174,57	78.003.711.910,16

Rupa-Rupa Beban Umum terdiri dari:

- Biaya rupa-rupa Umum	5.479.171.807,30	5.934.426.269,00
- Biaya Jasa Profesional	5.360.828.445,00	3.020.509.112,00
- Beban Olah Raga, Kesenian dan lain-lain	4.229.040.521,00	2.292.149.199,00
- Biaya Imbalan Paska Kerja	3.743.790.515,00	3.707.601.373,00
- Honor tim	3.083.242.500,00	-
- Biaya Perjalanan Dinas	2.727.129.971,00	3.530.009.260,00
- Representasi Direksi/Pos Pimpinan	1.998.000.000,00	1.998.650.000,00
- Biaya Katinueng Karyawan/ti	1.707.087.971,00	1.303.482.639,00
- Sumbangan-sumbangan	1.176.344.275,00	893.389.130,00
- Biaya Pendidikan, Pelatihan & Diklat	945.149.269,00	784.182.240,00
- Biaya Zakat Perusahaan	894.760.600,00	833.138.600,00
- Biaya iuran bealngganan	729.725.280,00	603.667.828,00
- Biaya PBB	388.194.807,00	367.775.256,00
- Rapat dan koordinasi	346.664.564,00	-
- Biaya Sosial & Kesejahteraan	293.574.825,00	245.800.000,00
- Biaya sewa	288.880.032,00	281.380.032,00
- Asuransi kendaraan	155.734.262,00	-
- Biaya asuransi Bangunan	151.020.163,00	68.179.594,00
- Iuran dana asuransi pegawai	99.700.616,00	522.728.222,00
- Beban Pajak	21.019.613,00	98.911.485,00
- Retribusi pemakaian tanah	-	126.075.636,00
Jumlah Rupa-rupa Beban Umum	33.819.060.036,30	26.612.055.875,00

38. BEBAN HUBUNGAN PELANGGAN

Beban hubungan pelanggan terdiri dari:

	2019	2018
- Beban Pegawai	21.777.163.803,85	20.006.034.102,00
- Rupa Beban Hubungan Pelanggan	4.885.305.367,00	4.477.605.872,00
Jumlah Beban Hubungan Pelanggan	26.662.469.170,85	24.483.639.974,00

COPY

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

39. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

	2019	2018
- Pendapatan Bunga Deposito	3.058.824.990,77	1.537.214.789,00
- Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	1.488.680.988,39	2.970.585.764,28
- Keuntungan Penjualan Aset Tetap	789.832.156,00	-
- Pendapatan Jasa Giro	662.922.551,78	1.620.882.909,95
- Pendapatan Piutang yang Dihapus	139.634.750,00	128.236.569,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	6.139.895.436,94	6.256.920.032,23

40. BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain terdiri dari:

	2019	2018
- Kerugian Lainnya	15.238.434,00	1.633.979,00
- Beban Bank	11.985.400,00	13.781.677,00
Jumlah Beban Lain-lain	27.223.834,00	15.415.656,00

41. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggungjawab atas laporan keuangan ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Maret 2020

COPY

Unaudited

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Uraian	No Ref	Per 31 Des 2019 Rp	Uraian	No Ref	Per 31 Des 2019 Rp
ASSET			PASIVA		
ASSET LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas dan Bank	1	237.505.527	Utang Pihak ke 2	8	93.035.000
Piutang Usaha	2	-	Utang Pajak	9	21.932.832
Piutang Lain-lain	3	237.346.953	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	10	2.480.446.382
Pembayaran Dimuka	4	31.322.694	Cadangan Dana Pengembangan Usaha	11	500.000.000
Pajak dibayar dimuka	5	3.694.952			
Jumlah Asset Lancar		509.870.126	Jumlah Kewajiban Lancar		3.095.414.214
ASSET TETAP			KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	199.519.000	Utang Lain-lain	12	58.954.841,00
Kendaraan		13.093.301.271	EKUITAS		
Bangunan		291.354.900			
Inventaris/Perabot Kantor		534.537.400	Penyertaan Pemerintah Kota Bogor	13	35.519.390.000
Aktiva Tetap Renovasi		-			
Aktiva dalam Penyelesaian		-			
Aktiva Tidak Berfungsi	-				
Nilai Perolehan		14.118.712.571	LABA DITAHAN/AKUM. KERUGIAN		(37.658.390.670)
Akumulasi Penyusutan		(13.543.925.415)	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	14	70.788.896
Nilai Buku		574.787.156	Jumlah Ekuitas		(2.068.211.774)
Aset lainnya	7	1.500.000			
JUMLAH ASSET		1.086.157.281	JUMLAH PASIVA		1.086.157.281

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Bogor, Desember 2019

PD Jasa Transportasi Kota Bogor



Endang Suherman, SE., MSi.

PD. JASA TRANSPORTASI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

	<u>Catatan</u>	<u>Desember</u>	<u>Jan-Des</u>
PENDAPATAN	1	187.000.000	2.179.948.000
BEBAN USAHA	2	179.112.870	2.287.146.053
RUGI USAHA		7.887.130	(107.198.053)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	3		
Pendapatan lain-lain		138.821.500	178.614.860
Beban lain-lain		-	627.911
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih		138.821.500	177.986.949
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		146.708.630	70.788.896
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) BERSIH		146.708.630	70.788.896

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Kekayaan Pemerintah Kota Bogor Yang Dipisahkan	Rugi/Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2019	35.519.390.000,00		35.519.390.000,00
Mutasi Tahun 2019 :			
Tambahan modal disetor	-		-
LABA DITAHAN/AKUM. KERUGIAN		(37.658.390.670,00)	(37.658.390.670,00)
Keuntungan Tahun Berjalan 2019		70.788.896,00	70.788.896,00
Saldo per 30 Des 2019	35.519.390.000,00	(37.587.601.774,00)	(2.068.211.774,00)

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Jan-Des 2019</u>
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</u>	
Laba/Rugi bersih	70.788.896
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari kegiatan usaha	
- Biaya Penyusutan dan Amortisasi	188.271.198
	<u>259.060.094</u>
Arus Kas sebelum perubahan Modal Kerja	
Piutang Usaha	-
Piutang Lain-lain	(123.900.000)
Pembayaran Dimuka	(14.582.306)
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	(2.500.000)
Hutang Lain-lain	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>(140.982.306)</u>
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u>	
Pembelian Aktiva Tetap	-
Pembelian Aktiva Lain-lain	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>-</u>
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u>	
Modal disetor	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank	118.077.756
Saldo Awal Kas dan Bank	119.427.771
Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Des 2019	<u>237.505.527</u>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-pos Neraca

1 Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2019 adalah :

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Kas Besar	22.339.262	35.203.787
3	Kas di tangan Kondaktur	3.195.000	3.195.000
4	Kas di tangan Tiketing	2.550.000	2.550.000
5	Kas di tangan Pengemudi	250.000	250.000
6	Bank :		
	- Bank Jabar	804.917	804.917
	- Bank Pasar	162.802.609	186.939.609
	- Bank BCA	4.227.644	4.227.644
	- Bank BRI	4.334.570	4.334.570
	Jumlah	200.504.002	237.505.527

2 Piutang Usaha

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Piutang penjualan atas karcis	-	-
	Jumlah		

3 Piutang Lain-lain

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Piutang Pegawai	100.016.928	103.416.928
2	Rupa-rupa Piutang lainnya	33.730.025	133.930.025
	Jumlah	133.746.953	237.346.953

4 Pembayaran Di muka

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Izin Trayek	-	-
2	STNK Pariwisata	-	-
3	KIR Pariwisata	-	-
4	STNK Derek	-	-
5	Kir Derek	-	-
6	Perpanjangan STNK Bus	20.185.165	17.969.328
7	KIR Bus	371.638	210.000
8	STNK Kendaraan Dinas	-	2.593.366
9	Uang muka Kerja	2.700.000	5.400.000
10	Uang muka pembelian	5.150.000	5.150.000
	Jumlah	28.406.803	31.322.694

5 Pajak Dibayar Dimuka

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Pajak Dibayar Dimuka Tahun 2015	3.694.952	3.694.952
		3.694.952	3.694.952

6 Aktiva Tetap

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Peralatan dan Perlengkapan	199.519.000	199.519.000
2	Kendaraan	13.093.301.271	13.093.301.271
3	Inventaris Kantor	534.537.400	534.537.400
4	Bangunan	291.354.900	291.354.900
	Jumlah Nilai perolehan	14.118.712.571	14.118.712.571
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Operasional	(238.027.807)	(239.179.286)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	(199.389.369)	(199.421.661)
7	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(12.556.199.685)	(12.570.473.296)
8	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(533.699.768)	(534.851.172)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(13.527.316.629)	(13.543.925.415)
	Nilai Buku	591.395.942	574.787.156

7 ASSET LAINNYA

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Aktiva tidak berwujud	1.500.000	1.500.000
	Jumlah	1.500.000	1.500.000

8 UTANG USAHA

Utanga Usaha merupakan biaya-biaya yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Hutang Lainnya	19.210.000	19.210.000
2	Service AC bus	1.245.000	1.245.000
3	Audit 2016	24.000.000	24.000.000
4	Engine turbo	15.000.000	15.000.000
5	Hutang pihak ke-2	33.580.000	33.580.000
	Jumlah	93.035.000	93.035.000

9 Hutang Pajak

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	PPh Psl 21 Badan Pengawas	1.281.633	1.281.633
2	PPh Psl 21 Direksi	18.917.876	18.917.876
3	PPh Psl 21 Pegawai	1.733.323	1.733.323
4	PPh Psl 21 yang terutang		
	Jumlah	21.932.832	21.932.832

10 Biaya Yang Masih harus Dibayar Lainnya

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Hutang Lainnya	2.293.390	2.293.390
2	Pesangon & Penghargaann Direksi tahun 2015	100.889.550	100.889.550
3	Beban Gaji Des 2016	22.763.030	22.763.030
4	Gaji Karyawan Jan 2017	363.938.841	363.938.841
5	Gaji Karyawan Feb 2017	398.937.136	398.937.136
6	Gaji Karyawan Mar 2017	432.528.048	432.528.048
7	Gaji Karyawan Apr 2017	458.064.512	458.064.512
8	Honor Direktur Jan 2017	14.835.715	14.835.715
9	Honor Direktur Feb 2017	15.635.715	15.635.715
10	Honor Direktur Mar 2017	15.635.715	15.635.715
11	Honor Direktur Apr 2017	15.635.715	15.635.715
12	Bantuan Kesehatan Karyawan Tahun 2016	57.170.000	57.170.000
13	Kekurangan Gaji Jan 2017	46.880.000	46.880.000
14	Kekurangan gaji akibat penangguhan UMK 2017	134.668.980	134.668.980
15	BPJS Kesehatan Mei-Des 2017	192.204.233	192.204.233
16	BPJS Kesehatan Jan-Des 2018	102.871.345	102.871.345
17	BPJS Ketenagakerjaan Okt 2017-Des 2018	18.970.761	18.970.761
18	BPJS Ketenagakerjaan Jan-Des 2018	75.879.744	75.879.744
19	Kelebihan pembebanan BPJS Kesehatan Mar 2017	(12.170)	(12.170)
20	Biaya Listrik, telepon, PAM YMH Dibayar Feb 2017	1.185.374	1.185.374
21	Biaya PAM, Listrik, Telepon YMH Dibayar Mar 2017	1.185.374	1.185.374
22	Biaya PAM, Listrik, Telepon YMH Dibayar Apr 2017	1.185.374	1.185.374
23	Pinjaman Koperasi	7.100.000	7.100.000
	Jumlah	2.480.446.382	2.480.446.382

11 Cadangan Dana Pengembangan Usaha

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Cadangan Dana Pengembangan Usaha	500.000.000	500.000.000
	Jumlah	500.000.000	500.000.000

12 Imbalan Pasca Kerja

No	Uraian	30 Nopember 2019 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Imbalan Pasca Kerja	58.954.841	58.954.841
	Jumlah	58.954.841	58.954.841

13 Penyertaan Pemerintah Kota

Penyertaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2019 merupakan Penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sebagai Kekayaan Pemerintah Kota Bogor yang Dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp.)
1	Nilai perolehan 10 unit bis	3.045.000.000
2	Nilai perolehan 20 unit bus	6.270.000.000
3	Nilai Perolehan 1 unit mobil Derek	218.200.000
4	Setoran Modal (APBD th 2007)	1.506.068.700
5	Setoran Modal (APBD th 2008)	2.600.000.000
6	Setoran Modal (APBD th 2009)	2.000.000.000
7	Setoran Modal (APBD th 2011)	2.000.000.000
8	Setoran Modal (APBD th 2012)	5.000.000.000
9	Setoran Modal (APBD th 2013)	4.000.000.000
10	Setoran Modal (APBD th 2014)	3.360.731.300
11	Setoran Modal (APBD th 2015)	-
12	Setoran Modal (APBD th 2016)	5.519.390.000
	Jumlah	35.519.390.000

14 Laba/Rugi Tahun Berjalan

Keuntungan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp 146.708.630

PENJELASAN POS-POS LABA RUGI**1 Pendapatan Usaha**

Pendapatan Usaha pada bulan Desember 2019 Rp. 187,000,000,00 merupakan pendapatan dari hasil usaha perusahaan dengan rincian :

No	Uraian	Des 2019 (Rp.)	Jan-Des 2019 (Rp.)
1	Pendapatan Penjualan Tiket Bus	187.000.000	2.179.348.000
2	Pendapatan Jasa Derek	-	-
3	Pendapatan bus pariwisata	-	600.000
	Jumlah	187.000.000	2.179.948.000

2 Biaya Lanqsung Usaha

Biaya Langsung Usaha dari bulan Desember 2019 sebesar Rp. 151,716,846,00 merupakan total biaya langsung usaha yang terdiri dari:

No	Uraian	Des 2019 (Rp.)	Jan-Des 2019 (Rp.)
	Biaya Langsung Jasa Usaha		
1	Biaya Awak Bus	60.403.381	808.356.258
2	Bahan Bakar	30.603.884	367.162.268
3	Pelumas	-	420.000
4	Ban	11.250.000	77.000.000
5	Pemeliharaan	6.405.000	194.650.000
6	Biaya Penyusutan	15.425.090	185.101.080
7	Perpanjangan	2.377.501	19.002.098
8	Lain-lain	25.251.990	253.505.557
	Jumlah	151.716.846	1.905.197.261
	Biaya Langsung Jasa Derek		
1	Biaya Pegawai	-	-
2	Perpanjangan	-	582.996
	Jumlah	0	582.996
	Biaya Langsung Jasa Pariwisata		
1	Bahan Bakar	-	-
2	Pemeliharaan	-	36.500.000
3	Perpanjangan	-	2.196.917
	Jumlah	-	38.696.917
	TOTAL BIAYA LANGSUNG	151.716.846	1.944.477.174

Biaya Tidak Lanqsung Usaha:

Biaya Tidak Langsung Usaha dari bulan Desember 2019 sebesar Rp. 27,396,024,00 merupakan total biaya tidak langsung usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Des 2019 (Rp.)	Jan-Des 2019 (Rp.)
1	Biaya Pegawai	15.820.416	192.051.301
2	Biaya Direksi	3.955.104	53.886.448
3	Biaya Pembina dan Badan Pengawas	-	-
	Sub Jumlah	19.775.520	245.937.749
	Biaya Kantor :		
1	Biaya kantor & Rumah Tangga	1.596.500	21.953.154
2	Biaya Hubungan Langgan	-	-
3	Biaya Pemeliharaan	-	9.341.000
4	Biaya Bahan Bakar, Tol & Parkir	4.600.000	55.200.000
5	Biaya Perjalanan Dinas	-	1.195.500
6	Biaya Iuran/langganan Mass Media	-	-
7	Biaya Perizinan dan Pajak	240.308	3.005.358
8	Biaya Penyusutan	1.183.696	3.170.118
9	Biaya Pimpinan (Representasi)	-	-
10	Biaya Jasa Profesional	-	1.200.000
11	Kesejahteraan Karyawan	-	266.000
12	Bantuan & Sumbangan	-	1.400.000
13	Pembinaan Karyawan	-	-
14	Rupa-rupa Biaya Umum	-	-
	Sub Jumlah	7.620.504	96.731.130
	Jumlah	27.396.024	342.668.879

3 Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain dari bulan Desember 2019 sebesar Rp. 18,821,500,00 merupakan pendapatan di luar usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Des 2019 (Rp.)	Jan-Des 2019 (Rp.)
1	Bunga Deposito	-	-
2	Jasa Giro	-	2.864.551
3	Lain-lain	18.821.500	55.750.309
	Jumlah	18.821.500	58.614.860

Biaya Lain-Lain

Biaya Lain-lain dari bulan Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 merupakan biaya diluar usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Des 2019 (Rp.)	Jan-Des 2019 (Rp.)
1	Biaya Pajak dan Administrasi Bank	-	627.911
2	Kerugian Lain-lain	-	-
3	Rupa-rupa Biaya Lainnya		
4	Denda pajak		
	Jumlah	0	627.911

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Unit	Masa Manfaat	Harga Perolehan			Harga Perolehan		Total	Akumulasi penyusutan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
					Harga Perolehan	Tambah	Kurang	Tambahan	Pengurang			Saldo Akhir		
	Mesin Bor	30-Dec-08	1	4	363.000				363.000	362.999			362.999	1
	Alat-alat bengkel	14-Apr-09	4	4	1.900.000				1.900.000	1.899.999			1.899.999	1
	Alat-alat bengkel	08-May-09	4	4	475.000				475.000	474.999			474.999	1
	Alat-alat bengkel Dongkrak Buaya	01-Jul-09	1	4	4.250.000				4.250.000	4.249.999			4.249.999	1
	Tabung Oxygen	08-Jun-12	2	4	2.500.000				2.500.000	2.500.000			2.500.000	0
	Mesin Bor	03-Dec-13	1	4	710.000				710.000	710.000			710.000	-
	Mesin Pompa Air	03-Dec-13	1	4	380.000				380.000	380.000			380.000	-
	Mesin Gurinda	03-Dec-13	1	4	540.000				540.000	540.000			540.000	-
	Dongkrak Buaya	29-Aug-14	1	4	8.000.000				8.000.000	8.000.000			8.000.000	-
	Jack Stand	09-Dec-14	2	4	980.000				980.000	980.000			980.000	-
	Dongkrak Buaya	18-Mar-16	1	4	1.550.000				1.550.000	1.453.125	32.292		1.485.417	64.593
	Ruparupa Alat & Peralatan				27.296.000				28.846.000	28.749.114	32.292		28.781.405	64.594
	Tangga Shelter	06-Jun-07	5	4	2.230.000				2.230.000	2.229.995			2.229.995	-
	Pompa Air	26-Jun-07	1	4	475.000				475.000	474.999			474.999	-
	Tangga	04-Oct-07	1	4	375.000				375.000	374.999			374.999	-
	Mesin Rumpul	11-Oct-07	1	4	1.250.000				1.250.000	1.249.999			1.249.999	-
	Kamera Sony	05-Dec-07	1	4	2.601.000				2.601.000	2.600.999			2.600.999	-
	Display	26-Dec-07	1	4	5.250.000				5.250.000	5.249.999			5.249.999	-
	Shelter Portable	27-Feb-08	2	4	800.000				800.000	799.998			799.998	2
	Mic	29-Feb-08	1	4	945.000				945.000	944.999			944.999	1
	Tangga Shelter	04-Mar-08	1	4	400.000				400.000	399.999			399.999	1
	Lampu Sorot	07-Apr-08	1	4	2.000.000				2.000.000	1.999.999			1.999.999	1
	Mesin Steam	03-May-08	1	4	2.200.000				2.200.000	2.199.999			2.199.999	1
	Shelter Portable	10-Jul-08	2	4	3.000.000				3.000.000	2.999.998			2.999.998	2
	Genzet	28-Jul-08	1	4	2.580.000				2.580.000	2.579.999			2.579.999	1
	Speaker	06-Jul-09	1	4	850.000				850.000	849.999			849.999	1
	Pompa Air	29-Jul-09	1	4	518.000				518.000	517.999			517.999	1
	Seperangkat Alat TOA	26-Aug-09	1	4	730.000				730.000	729.999			729.999	1
	Pompa Air	26-Oct-09	1	4	369.000				369.000	368.999			368.999	1
	Antena & TV bus	11-Mar-10	2	4	7.363.000				7.363.000	7.363.000			7.363.000	-
	DVD D.R 700	11-Mar-10	2	4	2.200.000				2.200.000	2.200.000			2.200.000	-
	Speaker Wireless, USB port, tape mic	04-Jun-10	1	4	3.450.000				3.450.000	3.450.000			3.450.000	-
	APAR (Alat Pemadam Kebakaran)	03-Dec-10	1	4	1.260.975				1.260.975	1.260.975			1.260.975	-
	Kran air siap minum	22-Jun-10	1	4	2.500.000				2.500.000	2.500.000			2.500.000	-
	Kamera Nikon	15-Dec-11	1	4	1.969.025				1.969.025	1.969.025			1.969.025	-
	Pompa Air (Sanyo)	07-Sep-12	1	4	458.000				458.000	458.000			458.000	-
	1 set sound system	08-Jan-13	1	4	2.850.000				2.850.000	2.850.000			2.850.000	-
	Tower Toren	02-Jan-14	1	4	3.750.000				3.750.000	3.750.000			3.750.000	-
	Keranjang Mesin Air	02-Jan-14	1	4	650.000				650.000	650.000			650.000	-
	Lampu Hias	23-May-14	1	4	6.476.000				6.476.000	6.476.000			6.476.000	-
	JVC Video Camera	02-May-14	1	4	4.500.000				4.500.000	4.500.000			4.500.000	-
	Peralatan & Peralengkapan BCA Flazz				64.000.000				64.000.000	63.999.977			63.999.977	13
	Inverter AC-DC Pascal	23-Aug-10	10	4	15.000.000				15.000.000	14.999.990			14.999.990	10
	Inverter AC-DC Pascal	30-Aug-10	10	4	15.000.000				15.000.000	14.999.990			14.999.990	10
	Inverter AC-DC Pascal	20-Sep-10	10	4	15.000.000				15.000.000	14.999.990			14.999.990	10
	TOTAL				197.969.000				199.519.000	199.422.023	32.292		199.454.314	64.870
3	INVENTARIS KANTOR													
	Mejbelair Kantor	11-May-07	9	4	12.375.000				12.375.000	12.374.991			12.374.991	-
	Filing Cabinet 4 laci	11-May-07	3	4	6.105.000				6.105.000	6.104.997			6.104.997	-
	Kursi D 2001	11-May-07	6	4	9.900.000				9.900.000	9.899.994			9.899.994	-

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Unit	Masa Manfaat	Harga Perolehan		Harga Perolehan		Total	Akumulasi penyusutan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
					Tambah	Kurang	Tambah	Pengurang			Saldo Akhir		
	Kursi D 640	11-May-07	3	4	6.765.000				6.765.000	6.764.997		6.764.997	-
	Kursi D 830	11-May-07	8	4	9.240.000				9.240.000	9.239.992		9.239.992	-
	Lemari Arsip 2 pintu	11-May-07	1	4	1.650.000				1.650.000	1.649.999		1.649.999	-
	Meja 1 Biro D-2	11-May-07	1	4	3.795.000				3.795.000	3.794.999		3.794.999	-
	Meja 1/2 Biro	11-May-07	7	4	6.468.000				6.468.000	6.467.993		6.467.993	-
	Meja 1/2 Biro D-3	11-May-07	2	4	5.060.000				5.060.000	5.059.998		5.059.998	-
	Meja 3/4 Biro	11-May-07	3	4	3.465.000				3.465.000	3.464.997		3.464.997	-
	Meja Rapat	04-Jun-07	3	4	4.950.000				4.950.000	4.949.997		4.949.997	-
	Meja penerima tamu	04-Jun-07	1	4	4.702.500				4.702.500	4.702.499		4.702.499	-
	Kursi Tunggu	16-Jun-07	2	4	700.000				700.000	699.998		699.998	-
	Kursi Tunggu	30-Jun-07	2	4	700.000				700.000	699.998		699.998	-
	Kursi Tamu	17-Jul-07	1	4	1.300.000				1.300.000	1.299.999		1.299.999	-
	Meja Komputer	17-Jul-07	1	4	500.000				500.000	499.999		499.999	-
	Kursi Tunggu	03-Aug-07	1	4	700.000				700.000	699.999		699.999	-
	Lemari	06-Aug-07	1	4	600.000				600.000	599.999		599.999	-
	Kursi Tunggu	07-Sep-07	2	4	700.000				700.000	699.998		699.998	-
	Meja Makan	25-Sep-07	1	4	580.000				580.000	579.999		579.999	-
	Kursi Tunggu	19-Feb-08	4	4	1.400.000				1.400.000	1.399.996		1.399.996	-
	Meja Komputer	08-Apr-08	1	4	950.000				950.000	949.999		949.999	4
	Meja rapat	16-Jun-08	2	4	2.800.000				2.800.000	2.799.998		2.799.998	2
	Rak Besi	25-Jun-08	1	4	900.000				900.000	899.999		899.999	1
	Lemari Brother	31-Jul-08	1	4	2.000.000				2.000.000	1.999.999		1.999.999	1
	Lemari Besi	31-Jul-08	1	4	3.250.000				3.250.000	3.249.999		3.249.999	1
	Sofa Set	07-Nov-08	1	4	2.988.000				2.988.000	2.987.999		2.987.999	1
	Meja Komputer Tiketing	10-Nov-08	1	4	350.000				350.000	349.999		349.999	1
	Sofa Tamu 1 Set	31-Aug-09	1	4	3.750.000				3.750.000	3.749.999		3.749.999	1
	Lemari Besi	16-Nov-09	1	4	650.000				650.000	649.999		649.999	1
	Lemari Besi	24-Dec-08	1	4	1.150.000				1.150.000	1.149.999		1.149.999	1
	Lemari Besi	18-Jan-10	1	4	1.150.000				1.150.000	1.149.999		1.149.999	1
	Filling Kabinet 4 laci	18-Jan-10	1	4	750.000				750.000	749.999		749.999	1
	Meja Tiketing	04-Apr-10	1	4	3.200.000				3.200.000	3.199.999		3.199.999	1
	Brangkas	31-Aug-10	1	4	5.850.000				5.850.000	5.850.000		5.850.000	-
	Lemari kaca-kayu	31-Aug-10	1	4	1.450.000				1.450.000	1.450.000		1.450.000	-
	Meja dan Krsi rapat	14-Jan-11	1	4	2.800.000				2.800.000	2.800.000		2.800.000	-
	Brangkas	06-Apr-11	1	4	2.560.000				2.560.000	2.560.000		2.560.000	-
	Lemari VIP 202	29-Jul-11	1	4	2.150.000				2.150.000	2.150.000		2.150.000	-
	Meja Direktur	29-Jul-11	1	4	7.000.000				7.000.000	7.000.000		7.000.000	-
	Kursi Direktur	29-Jul-11	1	4	1.500.000				1.500.000	1.500.000		1.500.000	-
	Lemari pakalan Direktur	29-Jul-11	1	4	1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000	-
	Meja TV Swing	31-Jul-11	1	4	499.000				499.000	499.000		499.000	-
	Lemari Kantor + Kaca Grace 100KC	02-Aug-11	1	4	700.000				700.000	700.000		700.000	-
	Meja 1/2 Biro + Kaca	05-Aug-11	10	4	7.500.000				7.500.000	7.500.000		7.500.000	-
	Kursi Hadap Frontline	05-Aug-11	10	4	3.000.000				3.000.000	3.000.000		3.000.000	-
	Kursi Tamu 321 + Meja	18-Aug-11	1	4	6.500.000				6.500.000	6.500.000		6.500.000	-
	Kursi Tamu + Meja	28-Feb-12	1	4	1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000	-
	Kursi Tamu Dirit	13-Feb-13	1	4	3.000.000				3.000.000	3.000.000		3.000.000	-
	Kursi Putar	14-Aug-13	1	4	699.900				699.900	699.900		699.900	-
	Lemari Besi Arsip	11-Oct-13	1	4	850.000				850.000	850.000		850.000	-
	Meja Kerja	05-Dec-13	1	4	650.000				650.000	650.000		650.000	-
	Kursi Staff	27-Feb-14	1	4	450.000				450.000	450.000		450.000	-
	Meja Kerja	14-Mar-14	1	4	750.000				750.000	750.000		750.000	-
	Kursi Direktur	14-Mar-14	2	4	650.000				650.000	650.000		650.000	-
	Meja	04-Apr-14	1	4	450.000				450.000	450.000		450.000	-
	Lemari Rak Kecil	04-Apr-14	1	4	500.000				500.000	500.000		500.000	-
					157.052.400				157.052.400	157.052.324		157.052.324	18

No	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Unit	Masa Manfaat	Harga Perolehan		Harga Perolehan		Total	Akumulasi penyusutan		Nilai Buku
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		Akumulasi penyusutan	Pengurang	
	Mesin-mesin Kantor											
	Komputer Core Dou 2,8 Ghz	11-May-07	2	4	16.500.000				16.500.000			16.499.998
	Mesin Fax Sharp	11-May-07	1	4	1.320.000				1.320.000			1.319.999
	Mesin Tik 18 Inchi Olivetty	11-May-07	1	4	2.805.000				2.805.000			2.804.999
	Note Book Acer 5583	11-May-07	1	4	13.475.000				13.475.000			13.474.999
	Printer HP Desk Jet 1280	11-May-07	1	4	3.575.000				3.575.000			3.574.999
	Printer Epson 2180	11-May-07	1	4	7.975.000				7.975.000			7.974.999
	UPS	11-May-07	2	4	1.760.000				1.760.000			1.759.998
	AC 1 PK Panasonic	11-May-07	2	4	8.910.000				8.910.000			8.909.998
	AC 1,5 PK Panasonic	11-May-07	1	4	6.080.000				6.080.000			6.049.999
	AC 1/2 PK Panasonic	11-May-07	2	4	7.700.000				7.700.000			7.699.998
	Hard Disk Note Book Toshiba	11-May-07	1	4	1.870.000				1.870.000			1.869.999
	Proyektor	05-Jul-07	1	4	7.000.000				7.000.000			6.999.999
	Komputer	13-Jul-07	1	4	3.650.000				3.650.000			3.649.999
	Note Book AX100 NVG 858 C	13-Jul-07	1	4	4.860.000				4.860.000			4.859.999
	Printer HP D-1360	25-Jul-07	1	4	420.000				420.000			419.999
	Komputer	14-Aug-07	1	4	3.650.000				3.650.000			3.649.999
	UPS	14-Aug-07	1	4	530.000				530.000			529.999
	Printer F 380 HP	14-Aug-07	1	4	850.000				850.000			849.999
	Komputer PC Pentium 4 3,0 Ghz	04-Mar-08	1	4	5.300.000				5.300.000			5.299.999
	Printer HP D2486	04-Mar-08	1	4	500.000				500.000			499.999
	UPS Prolink	17-Mar-08	1	4	560.000				560.000			559.999
	Web Site	22-Apr-08	1	4	5.000.000				5.000.000			4.999.999
	Komputer P4 1,8 Ghz	16-Jun-08	1	4	4.650.000				4.650.000			4.649.999
	Note Book Acer Aspire 47202 160 Gb	16-Jun-08	1	4	6.860.000				6.860.000			6.859.999
	AC Panasonic Type CS/CU C9GKJ	7-Aug-08	2	4	7.440.000				7.440.000			7.439.998
	Printer HP D2566	18-Sep-08	1	4	490.000				490.000			489.999
	AC Panasonic	12-Nov-08	2	4	3.720.000				3.720.000			3.719.999
	AC Panasonic	27-Nov-08	1	4	7.440.000				7.440.000			7.439.998
	Internet	5-Dec-08	1	4	3.300.000				3.300.000			3.299.999
	Note Book Acer	13-Mar-09	1	4	8.525.000				8.525.000			8.524.999
	Stabilizer	26-May-09	1	4	400.000				400.000			399.999
	Router Wireles Keyboard	24-Jun-09	1	4	950.000				950.000			949.999
	Modem	7-Jul-09	1	4	1.200.000				1.200.000			1.199.999
	Komputer	6-Jul-09	1	4	5.200.000				5.200.000			5.199.999
	Syabilizer	7-Jul-09	1	4	400.000				400.000			399.999
	Hardisc	9-Jul-09	1	4	795.000				795.000			794.999
	UPS V6 Advance	24-Oct-09	1	4	600.000				600.000			599.999
	Stabilizer 1000 VA	24-Oct-09	1	4	700.000				700.000			699.999
	Laptop HP dv2-1203An	10-Mar-10	1	4	9.250.000				9.250.000			9.250.000
	Wireles Router TP Link 54Mbps	3-Aug-10	1	4	1.865.000				1.865.000			1.865.000
	AC Panasonic	12-Jan-11	1	4	3.250.000				3.250.000			3.250.000
	LCD Acer 15 6"	4-Apr-11	1	4	950.000				950.000			950.000
	Printer infus	15-Apr-11	1	4	2.044.000				2.044.000			2.044.000
	AC Panasonic 1/2 PK	30-Jul-11	1	4	4.600.000				4.600.000			4.600.000
	Note Book HP Compaq CQ 436 (AMD), Aplikasi, Skin	2-Aug-11	1	4	4.840.000				4.840.000			4.840.000
	Printer HP D 1660	2-Aug-11	1	4	525.000				525.000			525.000
	Samsung Galaxy Tab 16GD	2-Aug-11	1	4	5.475.000				5.475.000			5.475.000
	AC Panasonic	9-Aug-11	1	4	4.200.000				4.200.000			4.200.000
	Monitor LCD Acer, Logitech Mouse USB, Logitech C4	10-Aug-11	1	4	1.195.000				1.195.000			1.195.000

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Unit	Masa Manfaat	Harga Perolehan		Harga Perolehan		Total	Akumulasi penyusutan	Tambah	Kurang	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
					Harga Perolehan	Masa Manfaat	Tambah	Kurang					Pengurang	Saldo Akhir	
	Print Epson L200, Kabel USB Printer	22-Aug-11	1	4	1.880.000				1.880.000	1.880.000					1.880.000
	CPU PC Intel Dual core	27-Sep-11	1	4	2.800.000				2.800.000	2.800.000					2.800.000
	Printer Epson R230X	23-Dec-11	1	4	3.088.500				3.088.500	3.088.500					3.088.500
	Mesin Absensi	25-Jan-12	1	4	1.500.000				1.500.000	1.500.000					1.500.000
	Zahir Accounting	28-Feb-12	1	4	12.226.500				12.226.500	12.226.500					12.226.500
	Mesin Hitung uang	19-Apr-12	1	4	2.299.000				2.299.000	2.299.000					2.299.000
	Printer	20-Apr-12	1	4	1.970.000				1.970.000	1.970.000					1.970.000
	Komputer	8-May-12	1	4	3.400.000				3.400.000	3.400.000					3.400.000
	Notebook	8-May-12	1	4	4.400.000				4.400.000	4.400.000					4.400.000
	Notebook HP Compact	1-Aug-12	1	4	5.100.000				5.100.000	5.100.000					5.100.000
	Laptop Toshiba L 740	10-Aug-12	1	4	5.600.000				5.600.000	5.600.000					5.600.000
	Printer HP 2770	10-Aug-12	2	4	960.000				960.000	960.000					960.000
	Canoscan	10-Aug-12	1	4	620.000				620.000	620.000					620.000
	LED Acer 16"	10-Aug-12	1	4	750.000				750.000	750.000					750.000
	Note Book Acer Aspire one D 725	8-Sep-12	1	4	3.000.000				3.000.000	3.000.000					3.000.000
	Monitor LCD Acer	14-Sep-12	1	4	750.000				750.000	750.000					750.000
	PC Core Duo	26-Sep-12	1	4	4.250.000				4.250.000	4.250.000					4.250.000
	Printer Canon Ip 2770	23-Nov-12	1	4	850.000				850.000	850.000					850.000
	Stabilizer OKI 300 Watt	8-Nov-12	2	4	3.000.000				3.000.000	3.000.000					3.000.000
	Stabilizer OKI 200 Watt	8-Nov-12	1	4	1.000.000				1.000.000	1.000.000					1.000.000
	Monitor	21-Nov-12	1	4	1.450.000				1.450.000	1.450.000					1.450.000
	CPU Samsung	4-Mar-13	1	4	2.350.000				2.350.000	2.350.000					2.350.000
	Note Book Lenovo	21-Mar-13	1	4	3.855.000				3.855.000	3.855.000					3.855.000
	PC Samsung	2-Apr-13	1	4	2.150.000				2.150.000	2.150.000					2.150.000
	Mesin Absent	15-Nov-13	1	4	1.450.000				1.450.000	1.450.000					1.450.000
	Mesin Finger Print	15-Nov-13	1	4	1.999.000				1.999.000	1.999.000					1.999.000
	Mesin Fotocopy	14-Mar-14	1	4	6.250.000				6.250.000	6.250.000					6.250.000
	Laptop Asus	8-May-14	1	4	4.130.000				4.130.000	4.130.000					4.130.000
	Mesin faximile otomatis	23-Jun-14	1	4	1.650.000				1.650.000	1.650.000					1.650.000
	Printer epson	2-Jul-14	1	4	1.750.000				1.750.000	1.750.000					1.750.000
	Komputer	3-Sep-14	1	4	4.500.000				4.500.000	4.500.000					4.500.000
	Monitor	25-Sep-14	2	4	1.750.000				1.750.000	1.750.000					1.750.000
	Finger Print	29-Oct-14	1	4	4.298.000				4.298.000	4.298.000					4.298.000
	Printer dan Fotocopy	24-Nov-15	1	4	1.050.000				1.050.000	1.050.000					1.050.000
	Stabilizer	26-Mar-16	1	4	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.406.250	31.250				1.437.500
	Printer Epson L220	9-Aug-16	1	4	2.275.000	2.275.000			2.275.000	1.895.833	47.398				1.943.229
	Monitor AOC	25-Oct-16	2	4	1.750.000	1.750.000			1.750.000	1.385.417	36.468				1.421.875
	Peralatan dan perlengkapan bus pariwisata														
	Audio Bus F 7994 AA	2-Jul-14	1	4	14.875.000				14.875.000	14.875.000					14.875.000
	Audio Bus F 7993 AA	3-Jul-14	1	4	14.875.000				14.875.000	14.875.000					14.875.000
					323.335.000	5.525.000			328.860.000	328.022.455	115.104				722.419
	Ruparupa Inventaris kantor														
	Flash Disk Apacer 2G	11-May-07	5	4	1.732.500				1.732.500	1.732.495					1.732.495
	Kipas Angin	11-May-07	2	4	1.210.000				1.210.000	1.209.998					1.209.998
	White Board Besar	11-May-07	1	4	990.000				990.000	989.999					989.999
	Dispenser National	11-May-07	2	4	2.640.000				2.640.000	2.639.998					2.639.998
	Exous van	11-May-07	1	4	423.500				423.500	423.499					423.499
	TV LG	16-Jun-07	1	4	950.000				950.000	949.999					949.999
	TV LG	07-Aug-07	1	4	950.000				950.000	949.999					949.999
	Lemari Es	07-Aug-07	1	4	1.250.000				1.250.000	1.249.999					1.249.999
	USB FD 4 G	14-Aug-07	1	4	420.000				420.000	419.999					419.999
	Tape Mobil	26-Mar-08	1	4	1.500.000				1.500.000	1.499.999					1.499.999
	Sreen Projector	02-Jul-09	1	4	900.000				900.000	899.999					899.999
	TV LCD LG	03-Dec-09	1	4	3.675.000				3.675.000	3.674.999					3.674.999

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Unit	Masa Manfaat	Harga Perolehan		Harga Perolehan		Total	Akumulasi penyusutan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
					Tambah	Kurang	Tambah	Pengurang			Tambahan	Pengurang	
	TV LG	26-Jan-10	1	4	1.475.000	-	1.475.000	-	1.475.000	1.474.999	-	1.474.999	1
	TV LCD Samsung 32 "	29-Jul-11	1	4	3.900.000	-	3.900.000	-	3.900.000	3.900.000	-	3.900.000	-
	TV LCD Samsung 22 "	29-Jul-11	1	4	2.200.000	-	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-
	Lenari ES Toshiba	30-Jul-11	1	4	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
	Aquarium & Meja	22-Mar-12	1	4	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
	Lenari Es Toshiba Glacio	29-Sep-12	1	4	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
	Tabung Gas	26-Feb-13	1	4	425.000	-	425.000	-	425.000	425.000	-	425.000	(0)
	Tape Recorder	04-Mar-13	1	4	675.000	-	675.000	-	675.000	675.001	-	675.001	(1)
	Hardisk	05-Apr-13	1	4	600.000	-	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-
	Samsung Galaxy Tab dan power bank	17-May-13	1	4	4.400.000	-	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	(0)
	Kipas Angin	07-Oct-13	2	4	950.000	-	950.000	-	950.000	950.000	-	950.000	0
	Home Theatre	07-Nov-13	1	4	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-
	Mic wire less	23-Jan-14	1	4	500.000	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
	Stand mic meja	07-Feb-14	1	4	450.000	-	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
	mic kabel shuce	07-Feb-14	1	4	525.000	-	525.000	-	525.000	525.000	-	525.000	-
	Stabilizer Matsunaga	10-Apr-14	1	4	320.000	-	320.000	-	320.000	320.000	-	320.000	-
	Printer Canon Ip 2770	13-Jun-14	1	4	975.000	-	975.000	-	975.000	975.000	-	975.000	-
	Kipas Angin	19-Jun-14	2	4	900.000	-	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000	-
	kursi ticketing	20-Jun-14	2	4	900.000	-	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000	-
	Struktur Organisasi	8-Sep-14	1	4	1.650.000	-	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000	-
	Sepeda	24-Dec-14	1	4	3.550.000	-	3.550.000	-	3.550.000	3.550.000	-	3.550.000	-
	Kipas angin	16-Feb-15	1	4	450.000	-	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
	Hardisk	10-Aug-15	1	4	939.000	-	939.000	-	939.000	939.000	-	939.000	-
	TOTAL				48.625.000	-	48.625.000	-	48.625.000	48.624.982	-	48.624.982	3
4	BANGUNAN				529.012.400	-	529.012.400	-	534.937.400	533.899.760	-	533.814.865	722.441
	Bangunan Operasional												
	Instalasi Listrik	25-May-07	20	20	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	3.145.833	20.833	3.166.667	1.833.333
	Bangunan Shelter Bubulak	20-Jun-07	20	20	18.709.900	-	18.709.900	-	18.709.900	11.693.688	77.958	11.771.645	6.938.255
	Bangunan Shelter Cidangiang	29-Nov-07	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bangunan Kamar Mandi Cidangiang	17-Dec-07	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rancang Bangun (DED Shelter)	27-Jun-08	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Listrik	Nov '08	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolam Cidangiang	23-Feb-09	20	20	6.083.000	-	6.083.000	-	6.083.000	3.370.996	25.346	3.396.342	2.686.658
	Instalasi Listrik Rancamaya Cidangiang	31-Mar-09	20	20	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	5.416.967	41.667	5.458.333	4.541.667
	Pekerjaan Shelter Harjasari	13-Jul-09	20	20	3.168.000	-	3.168.000	-	3.168.000	1.702.800	13.200	1.716.000	1.452.000
	Instalasi Listrik & Pompa air Harjasari	18-Aug-09	20	20	89.389.000	-	89.389.000	-	89.389.000	46.556.773	372.454	46.929.227	42.459.773
	Shelter Curug & Bina Insani	12-Nov-10	20	20	17.679.000	-	17.679.000	-	17.679.000	9.134.150	73.663	9.207.813	8.471.188
	Shelter Hypemat	28-Dec-10	20	20	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	6.812.500	62.500	6.875.000	8.125.000
	Shelter Hypemat & Auto 2000	08-Feb-11	20	20	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	3.375.000	31.250	3.406.250	4.083.750
	Shelter Bina Insani & Semplak	09-Apr-11	20	20	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	6.625.000	62.500	6.687.500	8.312.500
	Shelter Cimanggung Wates dan Duta Kencana	26-May-11	20	20	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	6.437.500	62.500	6.500.000	8.437.500
	Shelter Hermina & Auro 2000	20-Jul-11	20	20	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	6.312.500	62.500	6.375.000	8.500.000
	Pembuatan Papan piang Pool Trans Pakuan	01-Nov-11	20	20	1.300.000	-	1.300.000	-	1.300.000	5.417	530.833	530.833	769.167
	Pengecoran Tiang Pagar	12-May-14	20	20	2.030.000	-	2.030.000	-	2.030.000	525.417	8.458	575.167	1.454.833
	perbaikan gerbang terminal trans pakuan	01-Jun-14	20	20	25.925.000	-	25.925.000	-	25.925.000	7.129.375	108.021	7.237.396	18.687.604
	perbaikan gudang BDF	02-Jun-14	20	20	8.220.000	-	8.220.000	-	8.220.000	2.260.500	34.250	2.294.750	5.925.250
	pembuatan gudang jelantah & tempat istirahat	06-Jun-14	20	20	5.640.000	-	5.640.000	-	5.640.000	1.551.000	23.500	1.574.500	4.065.500
	Pagar samping pool bubulak	16-Jun-14	20	20	711.000	-	711.000	-	711.000	195.525	2.963	198.488	512.513
	TOTAL				276.354.900	-	276.354.900	-	276.354.900	129.311.931	1.151.479	130.463.410	145.891.490

Perumda BPR Bank Kota Bogor
Laporan Keuangan
31 Desember 2019
dan
Laporan Auditor Independen



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: IBRAHIM, SE.
Alamat Kantor	: Jl. R.E. Martadinata No. 45 Kota Bogor
Alamat Rumah	: Kp. Tegalwaru RT. 02/02 Ciampea, Kab. Bogor.
Nomor Telepon Kantor	: 0251 - 832 4601
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Ir. BUDI SULISTIO
Alamat Kantor	: Jl. R.E. Martadinata No. 45 Kota Bogor
Alamat Rumah	: Jl. Mawar IIII No. 20 Taman Yasmin, Kota Bogor
Nomor Telepon Kantor	: 0251 - 832 4601
Jabatan	: Direktur Operasional
Nama	: ANJAS ASMARA
Alamat Kantor	: Jl. R.E. Martadinata No. 45 Kota Bogor
Alamat Rumah	: Jl. Situ Asih Kp. Pulo No. 104 Pancoran Mas, Depok
Nomor Telepon Kantor	: 0251 - 832 4601
Jabatan	: Direktur Kepatuhan

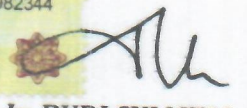
Untuk dan atas nama Perumda BPR Bank Kota Bogor menyatakan bahwa :


1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor;
2. Laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan simpan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 27 Januari 2020


IBRAHIM, SE.
Direktur Utama


Ir. BUDI SULISTIO
Direktur Operasional


ANJAS ASMARA
Direktur Kepatuhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK KOTA BOGOR

Jl. R.E. Martadinata No. 45 Bogor

☎ (0251) 8324601 📠 (0251) 8353772 ✉ infobkb@bankkotabogor.co.id

🌐 [https:// www.bankkotabogor.co.id](https://www.bankkotabogor.co.id)



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965, 085100554222
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00014/2.0923/AU.2/07/0005-2/1/1/2020

Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham
Perumda BPR Bank Kota Bogor
Bogor

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tanggal 31 Desember 2019, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.



Sabar, S.E., Ak., CPA.
Ijin Akuntan Publik No. AP.0005
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

27 Januari 2020

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Laporan Auditor Independen

	Halaman
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
NERACA
31 Desember 2019

A S E T

	Catatan	2019	2018
		Rp	Rp
Kas	4	1.503.877.100	937.307.900
Pendapatan bunga yang akan diterima	3c,5	1.167.168.588	1.126.374.708
Penempatan pada bank lain :	3b,3d		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3e,6	-	-
Pihak ketiga		46.542.098.824	50.214.783.145
Jumlah penempatan pada bank lain		46.542.098.824	50.214.783.145
Penyisihan kerugian		(117.341.736)	(188.889.905)
Bersih		46.424.757.088	50.025.893.240
Kredit yang diberikan	3b,3f,7		
Jumlah kredit yang diberikan		132.452.393.204	111.137.016.550
Provisi diterima dimuka		(3.275.510.453)	(2.756.565.802)
Penyisihan kerugian		(3.570.038.661)	(2.767.949.144)
Jumlah		125.606.844.090	105.612.501.604
Aset tetap	3h,8	4.925.546.663	4.326.036.084
Aset tidak berwujud	9	34.668.564	110.169.813
Biaya dibayar dimuka	10	41.275.661	52.450.677
JUMLAH ASET		179.704.137.754	162.190.734.026

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2019

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2019	2018
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Utang bunga	11	154.111.192	683.118.515
Utang pajak	3m,14b	1.002.733.849	558.034.525
Simpanan	3k,12	81.669.952.783	72.890.723.320
Simpanan dari bank lain	13	2.500.000.000	500.000.000
Kewajiban imbalan kerja	15	577.840.655	577.840.655
Pinjaman yang diterima	16	8.750.000.000	9.750.000.000
Kewajiban lain-lain	17	1.985.596.795	3.060.252.809
Jumlah kewajiban		96.640.235.274	88.019.969.824
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	18	54.000.000.000	39.300.000.000
Dana setoran modal – Ekuitas		-	8.700.000.000
Saldo laba			
Cadangan	3o,19	20.261.906.508	17.729.538.928
Belum ditentukan tujuannya		8.801.995.972	8.441.225.274
Jumlah ekuitas		83.063.902.480	74.170.764.202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		179.704.137.754	162.190.734.026

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2019

	Catatan	2019	2018
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :	3p,21		
Bunga		32.145.472.046	31.331.589.112
Provisi dan komisi		2.545.750.349	1.986.919.431
Jumlah pendapatan bunga		34.691.222.395	33.318.508.543
Beban bunga	3p,22	(5.473.502.532)	(5.865.219.058)
Pendapatan bunga, bersih		29.217.719.863	27.453.289.485
Pendapatan operasional lainnya	23	1.406.204.900	752.787.745
Pendapatan operasional		30.623.924.763	28.206.077.230
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian dan penyusutan	24	(1.463.685.117)	(1.891.448.757)
Tenaga kerja	25	(11.743.390.255)	(10.421.079.360)
Administrasi dan umum	26	(5.493.792.444)	(4.360.168.990)
Jumlah beban operasional		(18.700.867.816)	(16.672.697.107)
Pendapatan non operasional	27	207.239.457	145.872.214
Beban non operasional	28	(51.605.618)	(399.068.536)
Laba sebelum pajak penghasilan		12.078.690.786	11.280.183.801
Taksiran pajak penghasilan	3m 14a	(3.276.694.814)	(2.838.958.527)
Laba bersih		8.801.995.972	8.441.225.274

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2019

	Modal saham Rp	Dana setoran modal - Ekuitas Rp	Saldo Laba		Saldo laba - belum ditentukan tujuan Rp	Jumlah ekuitas Rp
			Cadangan umum Rp	Cadangan tujuan Rp		
Saldo per 31 Desember 2017	39.300.000.000	-	8.388.233.014	6.902.415.892	8.129.633.407	62.720.282.313
Penggunaan laba	-	-	-	-	(8.129.633.407)	(8.129.633.407)
Pembentukan cadangan	-	-	1.219.445.011	1.219.445.011	-	2.438.890.022
Penambahan modal	-	8.700.000.000	-	-	-	8.700.000.000
Laba bersih	-	-	-	-	8.441.225.274	8.441.225.274
Saldo per 31 Desember 2018	39.300.000.000	8.700.000.000	9.607.678.025	8.121.860.903	8.441.225.274	74.170.764.202
Penggunaan laba	-	-	-	-	(8.441.225.274)	(8.441.225.274)
Pembentukan cadangan	-	-	1.266.183.790	1.266.183.790	-	2.532.367.580
Penambahan modal	14.700.000.000	(8.700.000.000)	-	-	-	6.000.000.000
Laba bersih	-	-	-	-	8.801.995.972	8.801.995.972
Saldo per 31 Desember 2019	54.000.000.000	-	10.873.861.815	9.388.044.693	8.801.995.972	83.063.902.480

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2019

	2019	2018
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	8.801.995.972	8.441.225.274
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	339.941.271	260.941.092
Amortisasi aset tidak berujud	75.501.249	75.501.252
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penyisihan penempatan pada bank lain	58.474.535	114.150.022
Pemulihan penempatan pada bank lain	(130.022.704)	(5.306.360)
Penyisihan kredit yang diberikan	989.768.061	684.835.541
Pemulihan kredit yang diberikan	(187.678.544)	(281.213.816)
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	9.947.979.840	9.290.133.005
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Kenaikan pendapatan bunga yang akan diterima	(40.793.880)	(287.577.248)
Kenaikan kredit yang diberikan	(20.796.432.004)	(5.933.821.048)
Penurunan (kenaikan) penempatan pada bank lain	8.841.526.430	(21.768.732.267)
Kenaikan (penurunan) biaya dibayar dimuka	11.175.016	(45.967.917)
Kenaikan (penurunan) utang bunga	(529.007.323)	281.255.161
Kenaikan utang pajak	444.699.324	355.213.449
Kenaikan simpanan	8.779.229.463	15.887.693.941
Kenaikan (penurunan) simpanan dari bank lain	2.000.000.000	(4.000.000.000)
Penurunan kewajiban imbalan kerja	-	(700.000.000)
Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain	(1.074.656.017)	1.571.267.549
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.583.720.850	(5.350.535.374)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2019

	2019	2018
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(939.451.850)	(675.030.692)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(939.451.850)	(675.030.692)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Setoran tambahan modal	6.000.000.000	8.700.000.000
Penurunan pinjaman yang diterima	(1.000.000.000)	(3.291.674.000)
Pembagian dividen	(4.220.612.637)	(4.064.816.704)
Pembayaran Jasa produksi	(844.122.527)	(812.963.341)
Pembayaran dana kesejahteraan	(844.122.527)	(812.963.341)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(908.857.691)	(282.417.386)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	5.735.411.309	(6.307.983.452)
Kas dan setara kas pada awal tahun	13.374.110.105	19.682.093.557
Kas dan setara kas pada akhir tahun	19.109.521.414	13.374.110.105
Kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas	1.503.877.100	937.307.900
Giro pada bank lain	17.605.644.314	12.436.802.205
Kas dan setara kas pada akhir tahun	19.109.521.414	13.374.110.105

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019**

1. U M U M

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (untuk selanjutnya disebut BPR), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 tahun 1985 tentang pembentukan Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Setelah dilakukan peninjauan serta perubahan modal BPR mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 1995 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat II Bogor untuk pertama kalinya mengalami perubahan atas Modal Dasar BPR serta beberapa ketentuan, yang kemudian pada tahun 2004 atas dasar Peraturan daerah Tingkat II Bogor Nomor 03 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, BPR kembali mengalami perubahan atas modal dasar serta beberapa ketentuannya. BPR telah mendapat izin usaha dari Direktorat Jendral Moneter departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam surat No. S.Ket-529/DJM/III.3/7/1975 tanggal 3 Juli 1975 berdasarkan pertimbangan Direksi Bank Indonesia No. 8/15 UPBP/PPTR, tanggal 23 juni 1975.

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penggunaan izin usaha atas nama PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor menjadi izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor. Kegiatan utama BPR adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan serta memberikan pinjaman jangka pendek kepada pedagang kecil dan pengusaha di pasar-pasar dan tempat lain. BPR berkedudukan di jalan RE Martadinata No. 45, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 62 dan 56 orang.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Bogor No. 539.45-116 tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang pengangkatan Sdr. Ibrahim, SE sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Kota Bogor dan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S.190/KR.0211/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pengangkatan pengurus Perumda BPR Bank Kota Bogor. Sehingga susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPR per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut .

Dewan Pengawas :

Ketua : Bhima Irsi Faliandri
Anggota : Euis Risnawati, SE

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ibrahim, SE
Direktur Operasional : Ir. Budi Sulistio
Direktur Kepatuhan : Anjas Asmara

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi BPR menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2019 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2018 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian Laporan Keuangan

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Edaran Bank Indonesia : No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

Laporan Keuangan entitas disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) tentang Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta prinsip dan praktek akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku umum di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ini mengatur tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan tahun berjalan telah di modifikasi sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari giro/tabungan pada bank lain.

b. Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan SAK ETAP, yang dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- i. Dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara umum, tetapi tidak memenuhi ketentuan (d) dan (f) dalam definisi "pihak yang mempunyai hubungan istimewa".
- ii. Dua ventura karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture.
- iii. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
 1. Penyandang dana
 2. Serikat dagang
 3. Departemen dan instansi pemerintahan.

**PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

b. Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Hubungan istimewa yang berkenaan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan yaitu kredit yang diberikan, tabungan, deposito berjangka, dan sewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

c. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

d. Giro Pada Bank Lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan penyisihan kredit dan provisi kredit.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

f. **Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)**

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

BPR wajib menetapkan Kualitas Aset Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset produktif terhadap beberapa rekening aktiva 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penyisihan aset produktif

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset dibentuk berdasarkan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penggolongan Aset Produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pembentukan penyisihan aset produktif, sekurang-kurangnya :

Klasifikasi	2019 Persentase	2018 Persentase
Lancar :	0,5 %	0,5 %
Dalam Perhatian khusus :	0,5%	-
Kurang lancar :	10 %	10 %
Diragukan :	50 %	50 %
Macet :	100 %	100 %

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

f. **Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)**

Penyisihan aset produktif (Lanjutan)

Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah nilai agunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aktiva produktif tersebut.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Realisasi pemberian kredit tahun 2019 tidak terdapat yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

g. **Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)**

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan aset BPR yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dinilai dengan harga taksiran pada saat pengambilalihan, nilai yang disajikan cukup wajar.

h. **Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat	
	tahun	% per tahun
Bangunan	20	5
Inventaris kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus (*straight line method*).

j. Beban Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

k. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

l. Imbalan Kerja

BPR diwajibkan untuk membentuk penyisihan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

m. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

n. Kewajiban Segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

4. K A S

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Rp	Rp
Uang tunai	<u>1.503.877.100</u>	<u>937.307.900</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebongkaran dengan nilai pertanggungan yang memadai, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	2019	2018
	Rp	Rp
Kredit	1.055.846.696	1.050.224.228
Deposito	111.321.892	76.150.480
Jumlah	<u>1.167.168.588</u>	<u>1.126.374.708</u>
6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2019	2018
	Rp	Rp
Giro		
Pihak ketiga :		
PT Bank Jabar Banten, Tbk	11.589.347.181	9.391.060.669
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.709.644.261	690.092.834
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	1.771.990.517	703.765.182
PT Bank Permata, Tbk	1.874.952.345	477.834.090
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	659.710.010	1.174.049.430
Jumlah giro pada bank lain	<u>17.605.644.314</u>	<u>12.436.802.205</u>
Tabungan dan deposito :		
Tabungan		
Pihak ketiga :		
PT Bank Jabar Banten, Tbk	3.359.511.953	11.792.865.965
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.833.238.285	6.066.315.210
PT BPR Karyajatnika Sadaya	194.954.272	120.049.765
Jumlah tabungan	<u>6.437.704.510</u>	<u>17.979.230.940</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Rp	Rp
Tabungan dan deposito :		
Tabungan (Lanjutan)	<u>24.039.539.861</u>	<u>30.416.033.145</u>
Deposito :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Jabar Banten, Tbk	3.568.750.000	3.568.750.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	2.430.000.000	2.430.000.000
PT BPR Hitamajaya Argamandiri	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Indra Candra	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Lestari Bali	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Dana Mandiri Bogor	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Rasyid	1.500.000.000	1.000.000.000
PT.BPR Karya Utama Jabar	1.000.000.000	-
PT BPR Haneda Mitra Usaha	1.000.000.000	500.000.000
PD BPR Bandung	500.000.000	500.000.000
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	500.000.000	500.000.000
PT BPR Nature Primadana	500.000.000	300.000.000
PT.BPR Muliatama Dananjaya	500.000.000	-
Jumlah deposito	<u>22.498.750.000</u>	<u>19.798.750.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	46.542.098.824	50.214.783.145
Dikurangi : Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(117.341.736)	(188.889.905)
Jumlah	<u>46.424.757.088</u>	<u>50.025.893.240</u>

Tingkat suku bunga tabungan selama tahun 2019 dan 2018 berkisar antara 1% – 5% (2019) dan 1% – 3,98% (2018).

Tingkat suku bunga deposito pada tahun 2019 dan 2018 berkisar antara 6,5% – 8,75% (2019 dan 2018).

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	188.889.905	80.046.243
Penyisihan kerugian tahun berjalan	58.474.535	114.150.022
Pemulihan kerugian tahun berjalan	(130.022.704)	(5.306.360)
Saldo akhir tahun	<u>(117.341.736)</u>	<u>188.889.905</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2019 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis kredit

	2019 Rp	2018 Rp
Konsumsi	114.009.573.349	98.933.293.283
Modal kerja	11.295.945.455	8.203.723.267
Investasi	<u>7.146.874.400</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah	132.452.393.204	111.137.016.550
Provisi kredit	<u>(3.275.510.453)</u>	<u>(2.756.565.802)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	129.176.882.751	108.380.450.748
Dikurangi : Penyisihan kerugian	<u>(3.570.038.661)</u>	<u>(2.767.949.144)</u>
Jumlah bersih	<u><u>125.606.844.090</u></u>	<u><u>105.612.501.604</u></u>

b. Berdasarkan kolektibilitas

	2019 Rp	2018 Rp
Lancar	125.890.781.349	107.595.802.450
Dalam Perhatian Khusus	2.503.146.255	-
Kurang lancar	557.373.600	891.275.900
Diragukan	1.046.211.100	812.351.800
Macet	<u>2.454.880.900</u>	<u>1.837.586.400</u>
Jumlah	132.452.393.204	111.137.016.550
Provisi kredit	<u>(3.275.510.453)</u>	<u>(2.756.565.802)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	129.176.882.751	108.380.450.748
Dikurangi : Penyisihan kerugian	<u>(3.570.038.661)</u>	<u>(2.767.949.144)</u>
Jumlah bersih	<u><u>125.606.844.090</u></u>	<u><u>105.612.501.604</u></u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan sektor ekonomi

	2 0 1 9 Rp	2 0 1 8 Rp
Perdagangan	10.275.120.055	6.631.509.067
Pendidikan	7.146.874.400	4.000.000.000
Jasa-jasa	-	1.759.597.400
Lain-lain	<u>115.030.398.749</u>	<u>98.745.910.083</u>
Jumlah	132.452.393.204	111.137.016.550
Provisi kredit dan biaya administrasi	<u>(3.275.510.453)</u>	<u>(2.756.565.802)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	129.176.882.751	108.380.450.748
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(3.570.038.661)	(2.767.949.144)
Jumlah bersih	<u>125.606.844.090</u>	<u>105.612.501.604</u>

d. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 1 9 Rp	2 0 1 8 Rp
Kurang dari 1 tahun	3.042.629.900	1.600.816.400
Sampai dengan 1 tahun	6.327.399.346	6.336.811.567
Lebih dari 1 tahun	<u>123.082.363.958</u>	<u>103.199.388.583</u>
Jumlah	132.452.393.204	111.137.016.550
Provisi kredit	<u>(3.570.038.661)</u>	<u>(2.756.565.802)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	128.882.354.543	108.380.450.748
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(3.275.510.453)	(2.767.949.144)
Jumlah bersih	<u>125.606.844.090</u>	<u>105.612.501.604</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

e. Kredit bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian kredit bermasalah dan penyisihannya menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

Sektor ekonomi :

	2 0 1 9			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Lain-lain	534.665.900	923.795.800	2.276.153.500	3.734.615.200
Perdagangan besar dan eceran	<u>22.707.700</u>	<u>122.415.300</u>	<u>178.727.400</u>	<u>323.850.400</u>
Jumlah				4.058.465.600
Penyisihan kerugian				(2.929.586.510)
Jumlah bersih				<u>1.128.879.090</u>

	2 0 1 8			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Lain-lain	781.714.700	651.642.400	1.718.068.800	3.151.425.900
Perdagangan besar dan eceran	<u>109.561.200</u>	<u>160.709.400</u>	<u>119.517.600</u>	<u>389.788.200</u>
Jumlah				3.541.214.100
Penyisihan kerugian				(2.229.969.890)
Jumlah bersih				<u>1.311.244.210</u>

Jenis kredit :

	2 0 1 9			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	22.707.700	122.415.300	178.727.400	323.850.400
Kredit konsumtif	<u>534.665.900</u>	<u>923.795.800</u>	<u>2.276.153.500</u>	<u>3.734.615.200</u>
Jumlah				4.058.465.600
Penyisihan kerugian				(2.929.586.510)
Jumlah bersih				<u>1.128.879.090</u>

	2 0 1 8			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	109.561.200	160.709.400	119.517.600	389.788.200
Kredit konsumtif	<u>781.714.700</u>	<u>651.642.400</u>	<u>1.718.068.800</u>	<u>3.151.425.900</u>
Jumlah				3.541.214.100
Penyisihan kerugian				(2.229.969.890)
Jumlah bersih				<u>1.311.244.210</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

e. Kredit bermasalah (Lanjutan)

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	2018
	%	%
NPL Gross	3,06	3,19
NPL Net	0,89	2,60

f. Penyisihan kerugian kredit yang diberikan

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2019	2018
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	2.767.949.144	2.364.327.419
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	989.768.061	1.440.856.391
Pemulihan selama tahun berjalan (lihat catatan 23)	(187.678.544)	(281.213.816)
Penghapusan kredit	-	(756.020.850)
Penerimaan kredit hapus buku	-	-
Saldo akhir tahun	2.570.038.661	2.767.949.144

Penyisihan kerugian kredit dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing akun kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit tersebut.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan rata-rata sebesar 20,28% (2019) dan 20,71% (2018).
- b. Pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 30.380.622.515 dan Rp 30.308.208.420 (lihat Catatan 21).
- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

	2019
	Rp
Pihak Terkait	7.940.970.014
Pihak Tidak Terkait	15.881.940.027
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	23.822.910.040

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. Manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 339.941.271 untuk tahun 2019 dan Rp 260.941.092 untuk tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

9. ASET TIDAK BERWUJUD

	2019 Rp	2018 Rp
Software	346.005.000	346.005.000
Akumulasi amortisasi	(311.336.436)	(235.835.187)
Jumlah	34.668.564	110.169.813

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2019 Rp	2018 Rp
Sewa	32.614.800	22.710.000
Asuransi	8.660.861	8.740.677
Lainnya	-	21.000.000
Jumlah	41.275.661	52.450.677

11. UTANG BUNGA

	2019 Rp	2018 Rp
Bunga deposito yang masih harus dibayar	154.111.192	670.917.156
Bunga pinjaman dari pihak ketiga bukan bank	-	12.201.359
Jumlah	154.111.192	683.118.515

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

12. **SIMPANAN**

	2 0 1 9 Rp	2 0 1 8 Rp
Tabungan		
Tabungan Umum	19.093.183.814	16.716.013.558
Tabungan Berseri	19.094.645.565	14.873.350.584
Tabungan Umum Organisasi	5.653.328.529	3.689.697.555
Tabungan Tasmal 2	1.259.687.563	2.269.121.519
Tabungan Siswa	369.915.190	307.813.844
Tabungan Tasmal 1	48.892.122	45.884.596
	<u>45.519.652.783</u>	<u>37.901.881.656</u>
Deposito berjangka		
Menurut jangka waktu :		
Sampai dengan 3 bulan	4.289.200.000	3.701.000.000
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	4.872.500.000	6.816.500.000
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	<u>26.988.600.000</u>	<u>24.482.800.000</u>
	36.150.300.000	35.000.300.000
Biaya transaksi	-	(11.458.336)
	<u>36.150.300.000</u>	<u>34.988.841.664</u>
	<u>81.669.952.783</u>	<u>72.890.723.320</u>

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2019 dan 2018 masing – masing sebesar 4,41% dan 6,24% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 1.644.323.531 dan Rp 1.246.588.452 (lihat Catatan 22).

Tingkat suku bunga deposito rata-rata untuk tahun 2019 dan 2018 masing – masing sebesar 7,50% (2019) dan 8,50% (2018). Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.693.275.662 dan Rp 2.740.672.326 (lihat Catatan 22).

- PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

12. SIMPANAN (Lanjutan)

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2019 Rp	2018 Rp
Tabungan :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.215.165.195	658.495.779
Pihak ketiga	44.304.487.588	37.243.385.877
Jumlah	<u>45.519.652.783</u>	<u>37.901.881.656</u>
Deposito berjangka :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	378.000.000	434.000.000
Pihak ketiga	35.772.300.000	34.566.300.000
Jumlah	<u>36.150.300.000</u>	<u>35.000.300.000</u>
Jumlah simpanan	<u>81.669.952.783</u>	<u>72.902.181.656</u>

13. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2019 Rp	2018 Rp
PT BPR Daya Lumbang Asia	2.500.000.000	-
PT BPR Berfasi Raharja	-	500.000.000
Jumlah	<u>2.500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan, dengan perpanjangan otomatis. Tingkat suku bunga deposito dari bank lain sebesar 9% (2019) dan 8,50% (2018) per tahun.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

14. **PERPAJAKAN**

a. **Taksiran perhitungan pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2019 Rp	2018 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>12.078.690.786</u>	<u>11.280.183.801</u>
Perbedaan waktu :		
Kewajiban imbalan kerja	<u> -</u>	<u>500.000.000</u>
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Representatif	46.141.885	56.000.000
Undian berhadiah	256.853.700	252.498.950
Tunjangan pajak	520.562.881	-
Lainnya	1.138.022.426	323.259.889
Jumlah perbedaan tetap	<u>1.961.580.892</u>	<u>631.758.839</u>
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final	<u> -</u>	<u> -</u>
Laba fiskal	<u>14.040.271.678</u>	<u>12.411.942.639</u>
Taksiran pajak penghasilan badan	<u>3.276.694.814</u>	<u>2.838.958.527</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 dan 2018, dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

14. **PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. **Utang pajak**

	2019 Rp	2018 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	3.276.694.814	2.838.958.527
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	<u>2.494.623.278</u>	<u>2.438.721.319</u>
Pajak Penghasilan pasal 29	782.071.536	400.237.208
Utang pajak lainnya :		
PPh pasal 21	51.834.297	44.395.785
PPh pasal 23	3.416.715	-
PPh pasal 23 bunga deposito	45.790.441	46.371.021
PPh pasal 23 bunga tabungan	19.620.860	17.030.511
PPh pasal 25	100.000.000	50.000.000
Jumlah	<u>1.002.733.849</u>	<u>558.034.525</u>

15. **KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13/2003 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk membentuk kewajiban imbalan kerja untuk karyawan tetap. Besarnya kewajiban imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan lama bekerja dan kompensasi karyawan pada tanggal pelaporan.

Berikut ini adalah mutasi kewajiban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo awal tahun lalu	577.840.655	1.277.840.655
Penambahan	-	500.000.000
Pengurangan	-	(1.200.000.000)
Saldo pada akhir tahun	<u>577.840.655</u>	<u>577.840.655</u>

Pada tanggal 31 Desember 2019, BPR telah menghitung kewajiban imbalan kerja, yang dihitung oleh aktuaris Independent PT KAIA Magna Consulting dengan nomor laporan: 230/ETAP-KMC/X-2019. Kewajiban imbalan kerja dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

15. **KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Jumlah karyawan tetap	: 42
Tingkat diskonto	: 7,90%
Umur pensiun normal	: 56 tahun
Kenaikan salary per tahun	: 10%

Berdasarkan perhitungan aktuaris Independent PT KAIA Magna Consulting tersebut, Nilai Kini Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.155.034.978, Nilai Wajar Aktiva Program atas keikutsertaan program pensiun pada DPLK Manulife Indonesia sebesar Rp 2.359.104.764, sehingga Kewajiban yang harus di akui di neraca sebesar Rp 795.930.214. Pada tanggal 31 Desember 2019 Perumda BPR Bank Kota Bogor telah mengakui Kewajiban Imbalan Kerja sebesar Rp 577.840.655, sehingga masih kurang sebesar Rp 218.089.559.

16. **PINJAMAN YANG DITERIMA**

	2019 Rp	2018 Rp
PT BPD Bank Jabar Banten, Tbk :		
Kredit modal kerja	6.750.000.000	9.750.000.000
Kredit <i>Back to back</i>	<u>2.000.000.000</u>	<u> -</u>
Jumlah	8.750.000.000	9.750.000.000
Dikurangi : Biaya transaksi	-	-
Jumlah	<u>8.750.000.000</u>	<u>9.750.000.000</u>

PT Bank Jabar Banten, Tbk :

- Berdasarkan persetujuan kredit No.028/BGR-LKM/2017 tanggal 30 Maret 2017, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank Jabar Banten Tbk, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 15.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun, jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) bulan.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit *Back to back loan* (SPPK) No. 074/BGR.LKM/2019 tanggal 29 Mei 2019, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman *Back to back loan* (Fjb FBL BPR) dari PT Bank Jabar Banten Tbk dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 2.000.000.000 dan tingkat suku bunga jaminan *cash collateral* ditambah *spread* bunga sebesar 1,00%

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 31 Desember 2019

19. **CADANGAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 900.45 – 92 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang penggunaan laba bersih Perumda, BPR telah menambah cadangan umum sebesar Rp 1.266.183.791 dan cadangan tujuan sebesar Rp 1.266.183.791 sehingga saldo cadangan pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 20.261.906.507.

20. **DIVIDEN**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 900.45 – 92 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang penggunaan laba bersih Perumda penetapan pembagian deviden tahun 2019, BPR telah membagikan laba untuk pemerintah daerah yang berasal dari laba tahun 2018 sebesar 50% dari Laba bersih setelah dikurangi pajak atau sebesar Rp 4.220.612.637.

21. **PENDAPATAN BUNGA**

	2019	2018
	Rp	Rp
Penempatan pada bank lain :		
Deposito berjangka	1.557.917.090	649.081.857
Tabungan	138.577.886	253.398.102
Giro	68.354.555	120.900.733
Jumlah	<u>1.764.849.531</u>	<u>1.023.380.692</u>
Kredit yang diberikan :		
Kredit Konsumsi	28.244.328.684	28.751.117.030
Kredit Modal Kerja	1.349.777.701	1.196.357.519
Kredit Investasi	786.516.130	360.733.871
Jumlah	<u>30.380.622.515</u>	<u>30.308.208.420</u>
Jumlah pendapatan bunga	<u>32.145.472.046</u>	<u>31.331.589.112</u>
Pendapatan provisi :		
Provisi kredit	<u>2.545.750.349</u>	<u>1.986.919.431</u>
Jumlah	<u>34.691.222.395</u>	<u>33.318.508.543</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

22. BEBAN BUNGA	2019 Rp	2018 Rp
Bunga bank lain :		
Bunga pinjaman dari bank lain	1.038.617.741	1.179.864.915
Bunga simpanan dari bank lain	68.009.362	666.680.766
Jumlah bunga bank lain	<u>1.106.627.103</u>	<u>1.846.545.681</u>
Bunga simpanan :		
Deposito berjangka	2.693.275.662	2.740.672.326
Tabungan	1.644.323.531	1.246.588.452
Jumlah simpanan	<u>4.337.599.193</u>	<u>3.987.260.778</u>
Bunga bukan bank		
Bunga pinjaman	-	4.083.435
Provisi	29.276.236	27.329.164
Jumlah bunga bukan bank	<u>29.276.236</u>	<u>31.412.599</u>
Jumlah	<u>5.473.502.532</u>	<u>5.865.219.058</u>
23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2019 Rp	2018 Rp
Administrasi tabungan	357.928.457	351.839.878
Pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif	317.701.248	281.213.816
Pendapatan jasa transaksi	26.034.666	50.115.273
Penerimaan kredit yang dihapusbuku	46.252.500	9.738.500
<i>Pinalty</i> deposito	44.445.158	29.235.331
Pendapatan operasional lainnya	613.842.871	30.644.947
Jumlah	<u>1.406.204.900</u>	<u>752.787.745</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

24. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN DAN PENYUSUTAN

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Rp	Rp
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	989.768.061	1.440.856.391
Penyusutan	339.941.272	260.941.092
Amortisasi	75.501.249	75.501.252
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	58.474.535	114.150.022
	<u>1.463.685.117</u>	<u>1.891.448.757</u>

25. BEBAN TENAGA KERJA

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Rp	Rp
Gaji	3.202.157.906	3.044.263.511
Tunjangan Jabatan	1.201.850.000	1.164.385.000
Tunjangan Perumahan	912.600.000	661.680.000
Tunjangan Hari Raya	799.500.000	684.300.000
Tunjangan Hari Tua	759.382.901	634.664.761
Tunjangan kemahalan	693.400.000	618.225.000
Uang pengganti transportasi	682.805.000	449.222.000
Pendidikan	607.349.861	498.585.945
Premi asuransi	600.000.000	-
Tunjangan PPh 21	520.562.881	450.081.828
Honorarium Dewan Pengawas	515.667.000	870.093.450
Tunjangan Pelaksana	295.600.000	202.000.000
Tunjangan pangan dan transport	287.200.000	263.285.000
Tenaga kerja lainnya	244.049.000	7.298.000
Tunjangan Kesehatan	214.275.706	147.162.365
Tunjangan Sandang	157.860.000	156.622.500
Imbalan kerja	-	500.000.000
Lembur	49.130.000	69.210.000
	<u>11.743.390.255</u>	<u>10.421.079.360</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2019	2018
	Rp	Rp
Pelayanan dan pemungutan setoran	1.361.732.157	1.333.472.323
Sewa	398.320.702	312.107.500
Promosi / iklan	329.883.400	506.264.350
Perjalanan dinas	311.831.733	78.140.000
Pemeliharaan dan perbaikan	262.032.675	307.533.685
Undian berhadiah tabungan berseri	256.853.700	-
Kegiatan Bank Kota Bogor	256.116.081	214.210.267
Tanda penghargaan	250.000.000	500.000.000
Koran, majalah, pos, listrik, air dan telepon	219.123.951	167.658.528
Barang cetakan	188.875.800	208.595.200
Asuransi	138.303.813	85.326.668
Pemasaran	125.500.000	137.550.000
Pengamanan	90.125.000	108.308.000
Alat tulis dan kantor	88.761.590	71.307.100
Dana representasi	46.141.885	56.000.000
Pajak	19.051.531	11.885.803
Administrasi bank	13.116.000	8.179.143
Honorarium dan penjaminan	-	251.771.779
Lainnya	1.138.022.426	1.858.644
Jumlah	<u>5.493.792.444</u>	<u>4.360.168.990</u>
27. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	2019	2018
	Rp	Rp
Lainnya	<u>207.239.457</u>	<u>145.872.214</u>
28. BEBAN NON OPERASIONAL	2019	2018
	Rp	Rp
Iuran OJK	19.861.458	75.808.647
Denda	13.859.160	-
Lainnya	17.885.000	323.259.889
Jumlah	<u>51.605.618</u>	<u>399.068.536</u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tersebut meliputi :

Pada tahun 2019 dan 2018 BPR membayar sewa pemakaian lahan pemerintah Kota Bogor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp 54.472.800 dan Rp 45.420.000 (Lihat Catatan 26).

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No.2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 20 Nopember 2019 – 24 Januari 2020 adalah sebesar 8,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 154.138.577 dan Rp 71.930.889.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

31. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 12%. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar 56,54% dan 57,40% %.

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

31. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

	2019 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)	
1. ASET NERACA	
1.1. Kas	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	9.308.419.765
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	13.066.600
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	679.865.100
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	-
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	5.013.526.500
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	1.935.254.300
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	-
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	-
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	114.883.689.204
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	2.445.452.000
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	4.960.215.227
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	-
	1.208.444.249
Jumlah ATMR	<u><u>140.447.932.945</u></u>

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

31 **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

	2019 Rp
I. MODAL	
1.1. Modal Inti Utama	
1.1.1. Modal disetor	54.000.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	
1.1.2.1. Agio	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	
1.1.2.3. Modal sumbangan	-
1.1.2.4. Cadangan umum	10.873.861.815
1.1.2.5. Cadangan tujuan	9.388.044.692
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (50%)	4.400.997.986
1.1.2.8. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	-
1.1.2.10. Disagio	-
1.1.2.11. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	-
Jumlah modal inti utama	78.662.904.493
1.2 Modal Inti Tambahan	-
1.3 Modal Inti Tambahan	-
2. Modal Pelengkap	
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1.25% dari ATMR)	746.795.643
Jumlah modal pelengkap	746.795.643
Jumlah modal	79.409.700.136
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	16.853.751.953
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	62.841.236.208
IV. Rasio Modal (CAR)	
(Jumlah modal / ATMR) x 100%	56,54%
Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti / ATMR) x 100%	56,01%
V. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah modal	7.940.970.014
Pihak ketiga : 20% x Jumlah modal	15.881.940.027
Kelompok pihak ketiga : 30% x Jumlah modal	23.822.910.040

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

32. INFORMASI LAINNYA	2 0 1 9	2 0 1 8
	%	%
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	56,54	57,40
II. Aktiva Produktif		
<i>Non Performing Loan</i>	3,06	3,01
Pemenuhan PPAP	100	100
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	6,72	7,58
<i>Return On Equity (ROE)</i>	10,60	13,98
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	17,80	19,01
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	70,52	66,15
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Ratio (LDR)</i>	80,53	77,80
<i>Cash Rasio</i>	30,82	42,45

33. MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas perkreditan, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2019

33. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aktiva dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan (Catatan 26) adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi untuk Risiko Kredit, maka selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud, BPR perlu menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi, sebagai berikut :
 - a) Dewan Pengawas memantau penyediaan dana termasuk mereview penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
 - b) Direksi bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Pengawas.
 - c) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, dengan antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPR terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah.
2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kredit, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, BPR perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.